

**ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI  
SEBAGAI IDEOLOGI SERTA PRAKTIK  
HIDDEN CURRICULUM  
DI SEKOLAH MENENGAH ATAS**



**I Wayan Winaja**



**ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI  
SEBAGAI IDEOLOGI SERTA PRAKTIK  
*HIDDEN CURRICULUM*  
DI SEKOLAH MENENGAH**

**I WAYAN WINAJA**

**Editor  
Ni Ketut Dewi Yulianti**

**Pustaka Larasan  
2016**

**Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Sebagai Ideologi Serta Praktik  
*Hidden Curriculum* di Sekolah Menengah**

**Penulis**

I Wayan Winaja

**Editor**

Ni Ketut Dewi Yulianti

**Pracetak**

Slamat Trisila

**Penerbit**

**Pustaka Larasan**

Jalan Tunggul Ametung IIIA/11B

Denpasar, Bali

Telepon: 0361-2163433

Ponsel: 0817 353433

pustaka\_larasan@yahoo.co.id

Bekerja sama dengan

**Pascasarjana Universitas Hindu Indoensia  
Denpasar**

Cetakan Pertama: 2016

**ISBN 978-602-1586-79-2**

## KATA PENGANTAR

### **Sekolah: Arena Sosial Bagi Penumbuhkembangan Ideologi Pasar**

**A**pa itu sekolah? Jawaban atas pertanyaan ini dapat dipastikan bahwa sekolah adalah lembaga pendidikan formal yang sangat penting guna menjadikan manusia agar menjadi manusia. Manusia yang bagaimana? Jawabannya adalah manusia yang tidak saja cerdas secara akaliah, tetapi juga berbudi pekerti yang luhur. Dalam agama Hindu disebutkan bahwa manusia berbudi pekerti luhur adalah manusia yang menjunjung tinggi karakter *sattwam*. Dengan demikian tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pendidikan pada dasarnya adalah proses *sattwam*-isasi atas manusia.

Pendidikan sebagai proses *sattwam*-isasi tidak terlepas dari ideologi global yang sedang berjaya, yakni ideologi pasar atau kapitalisme lanjut. Ideologi ini mengakibatkan manusia yang berkarakter *sattwam* tidak sekadar berwatak luhur, melainkan harus pula menguasai Iptek (ilmu dan teknologi). Penguasaan Iptek berlanjut pada kepemilikan modal finansial yang mumpuni sehingga kesejahteraan hidup manusia lewat permainan pada pasar secara optimal menjadi terjamin secara baik. Dalam konteks ini Iptek tidak sekadar kepanjangan tubuh manusia manusia, tetapi merupakan modal yang dapat dialihkan menjadi modal finansial.

Pemikiran ini sangat kuat pengaruhnya sebagaimana tercermin dari penilaian dan pemilihan jurusan maupun sekolah di kalangan anak-anak, terutama pada saat mereka memasuki Sekolah Lanjutan Atas (SLA). Jika anak SMP (Sekolah Menengah Pertama) ditanya – khususnya dari kalangan kelas menengah ke atas, “Jurusan apa yang akan dipilih jika masuk ke SMA? Jawabannya secara umum adalah jurusan IPA. Jika masuk ke perguruan tinggi maka pilihannya lebih terfokus pada jurusan

yang berlatar belakang IPA – paling bergengsi adalah Fakultas Kedokteran, teknik, dll.

Jawaban seperti ini tentu tidak salah, melainkan benar bahkan baik dan tepat adanya. Namun bagaimanapun juga, di balik itu ada aspek menarik untuk didekonstruksi, yakni ideologi yang bermain di baliknya. Ideologi apa? Dalam konteks inilah maka jawabannya dapat dikembalikan pada ideologi pasar. Artinya, seseorang memilih suatu jurusan di SMA sasaran utamanya, selain menjadikan anak berkarakter *sattwam*, adalah menjadikan anak memiliki kemampuan teknologi (menguasai Iptek) yang dapat dijual guna menghasilkan modal finansial bagi kelangsungan hidupnya. Kondisi ini berimplikasi terhadap jurusan-jurusan ilmu sosial dan humaniora di SMA – terutama SMA favorit, yakni kering peminatnya – suatu SMA favorit di Singaraja amat miskin akan Jurusan IPS dan Bahasa - hanya satu kelas dan kelas kurus.

Dengan demikian alasan utama seseorang memilih jurusan, bukan minat dan bakat, melainkan “Apakah ijazahnya laku dijual di pasar guna mendapatkan modal finansial?” Dalam kondisi seperti ini maka peran orang tua amat penting bahkan dengan kekuasaan yang dimilikinya, mereka secara mudah menghegemoni dan/atau mendominasi anaknya agar memilih jurusan di SMA (Perguruan Tinggi) yang masa depannya diramalkan cerah secara finansial. Anak pun menyerah, karena kalah adu modal kuasa dengan orang tuannya.

Kondisi ini dapat berlanjut pada praktik pendidikan di sekolah. Sekolah tidak saja membuat binerisasi atas jurusan favorit/nonfavorit atau pusat/pinggiran, tetapi juga menganaktirikan yang satu daripada yang lainnya. Pada umumnya yang favorit diutamakan daripada yang nonfavorit atau pusat diutamakan daripada pinggiran. Kondisi ini dapat berlangsung secara terang-terangan – kegiatan pembelajaran di kelas sebagaimana tercantum dalam kurikulum atau bisa pula secara tersembunyi dalam suatu kegiatan yang tercakup pada apa yang disebut praktik *hidden curriculum*. Kondisi ini dapat memengaruhi citra diri anak, yakni mereka pun menempatkan

dirinya pada posisi pinggiran. Orang tua pun tidak memprotes sehingga terjadi pembiaran atau bahkan kekerasan secara berlapis – sekolah dan keluarga. Kondisi ini tidak bisa dilepaskan dari adanya kenyataan bahwa apa yang terjadi di sekolah sesuai dengan ide habitus orang tua – jurusan yang baik adalah jurusan yang ijazahnya memiliki prospek laku dijual di pasar dan/atau menjanjikan pekerjaan dengan status sosial yang tinggi.

Dengan demikian praktik pendidikan seperti ini dengan berbagai ideologi yang bermain di baliknya, acap kali dianggap sebagai sesuatu yang biasa – tidak ada masalah yang dipertanyakan secara serius. Kondisi ini mengakibatkan jarang orang yang mengkritisnya yang sekaligus berarti tidak ada usaha yang serius untuk mencari solusi guna menarik yang di pinggiran agar berpindah ke pusat dan/atau menetralsir praktik-praktik yang menganaktirikan jurusan marginal. Ketidakadilan ini menjadikan yang marginal menjadi lebih marginal lagi bahkan melembaga atau membanting dalam masyarakat sehingga tidak mudah menghapuskannya.

Berkenaan dengan itu maka gagasan yang dikemukakan Wayan Winaja pada buku ini amat penting dan menarik untuk disimak secara cermat. Mengapa menarik? Jawabannya, karena dalam buku ini, Wayan Winaja berhasil memaparkan bahwa apa yang dianggap oleh kebanyakan orang-orang awam bahkan sering pula berlaku di kalangan kaum akademikus sebagai sesuatu yang biasa, namun setelah dikaji secara mendalam dengan menggunakan pendekatan teori kritis, ternyata banyak dijumpai hal yang luar biasa. Kondisi inilah yang menyebabkan buku ini tidak saja penting, tetapi amat menarik untuk dibaca oleh siapa pun, terutama di kalangan mereka yang berminat pada masalah pendidikan secara umum atau pendidikan kritis secara khusus.

Apalagi paparan tentang pendidikan selama ini lebih banyak bergelut dengan masalah makro dan jarang memakai pendekatan kritis sehingga paparan tentang pendidikan sepertinya mengalami involusi. Namun, apa yang dikemukakan dalam buku ini boleh dikatakan merupakan suatu lompatan yang sangat berarti dalam konteks kajian tentang pendidikan,

walaupun kajiannya bersifat mikro. Wacana yang dikemukakan pada buku ini tentu saja secara akademis baik isi maupun aspek metodologisnya dapat dipertanggungjawabkan sehingga layak diperhitungkan pada pembendaharaan pengetahuan dalam dunia akademik.

Singaraja, 26 September 2016

**Prof. Dr. Nengah Bawa Atmadja**

Guru Besar Antropologi, Jurusan Pendidikan Sejarah/  
Jurusan Pendidikan Sosiologi,  
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial,  
Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja

## PENGANTAR PENULIS

Puja *pengastuti* dan *angayubagia* penulis panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa) karena atas *asung kertha waranugraha-NYA*, buku yang berjudul “Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Sebagai Ideologi serta Praktik *Hidden Curriculum* di Sekolah Menengah Atas” ini dapat diselesaikan sesuai rencana. Buku ini merupakan hasil penelitian terhadap “nasib” pengembangan ilmu pengetahuan di Sekolah Menengah Atas, yaitu Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Bahasa.

Penelitian ini penulis anggap penting dibukukan agar IPA, IPS, dan Bahasa mendapat perhatian yang sama di masa-masa mendatang. Penulis menemukannya adanya praktik *Hidden Curricullum* oleh regulator pendidikan, sehingga peminatan terhadap IPS dan Bahasa menjadi kurang. IPS, dan Bahasa kurang mendapat minat di kalangan siswa, dan orang tua siswa. Jumlah siswa yang menekuni kedua jurusan IPS, dan Bahasa jauh lebih sedikit dibandingkan dengan siswa yang menekuni IPA. Rendahnya minat siswa menekuni IPS dan Bahasa, secara tidak langsung akan dapat “memminggirkan” atau memarginalisasi IPS dan Bahasa. Hal ini tentu berdampak tidak baik terhadap perkembangan ilmu itu sendiri, khususnya ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Dampak lainnya, akan muncul “klas-klas” atau “kasta-kasta” baru pada lembaga pendidikan yang pada akhirnya dapat memunculkan pendidikan yang elitis, tidak emansipatoris, birokratis, dan hegemonik.

Buku ini diharapkan mampu memberi informasi mengapa IPS dan Bahasa kurang ditekuni oleh siswa di Sekolah Menengah Atas, termasuk implikasinya terhadap diri siswa, manajemen kelas, dan manajemen sekolah, dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pendidikan. Bagi para pengambil kebijakan dan pelaku pendidikan seperti, institusi pendidikan, kepala sekolah, guru, dan orangtua siswa, buku ini dapat dijadikan rujukan dalam mengarahkan para siswa



agar menekuni ilmu pengetahuan benar-benar didasarkan atas bakat, minat, dan kemampuan, dan dapat dijadikan dasar untuk membuat berbagai kebijakan terkait dengan pengembangan keilmuan di Sekolah Menengah Atas. Mudah-mudahan buku ini, dapat memberi inspirasi dalam persejajaran pengembangan keilmuan. Dengan demikian, IPS dan Bahasa mendapat minat yang sama dengan IPA. Apalagi ilmu-ilmu sosial dan humaniora, memiliki peran penting dalam pembentukan karakter siswa.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Prof. Dr. Nengah Bawa Atmadja, M.A., pimpinan Pascasarjana UNHI Denpasar, editor, penerbit, keluarga tercinta (Dewa Hyang, Cucu, Anak-Anakku, Menantu) dan semua pihak yang telah memberikan bantuan berupa, bimbingan, buah pikiran, dan motivasi sehingga buku ini bisa diterbitkan. Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik sangat dihargai.

Denpasar, November 2016

I Wayan Winaja

# DAFTAR ISI

**Kata Pengantar ~ iii**

**Pengantar Penulis ~ vii**

**Penjurusan: Penelusuran Minat, Bakat, dan Kemampuan ~ 1**

**Budaya Citra ~ 9**

**Dikotomi Jurusan ~ 19**

Jurusan Bahasa ~ 22

**Kepentingan Pragmatis ~ 25**

Konstruktivisme ~ 27

**Pergumulan Ideologi ~ 33**

**Profil SMAN 1 Denpasar ~ 41**

**Profil SMA Dwijendra Denpasar ~ 63**

**Marjinalisasi Jurusan IPS dan Bahasa ~ 79**

Kebijakan Pemerintah Terhadap Sistem Penjurusan ~ 81

Persepsi Siswa Terhadap Jurusan IPA ~ 87

Persepsi Siswa Terhadap Jurusan IPS dan Bahasa ~ 97

Persepsi Orangtua Terhadap Jurusan IPA, IPS dan Bahasa ~  
101

**Jurusan dan “Kasta Baru” ~ 105**

Motivasi Siswa Memilih Jurusan IPA, IPS dan Bahasa ~ 112

Motivasi Orang Tua Mengarahkan Anaknya Memilih

Jurusan IPA ~ 118

Imperialisme Pengetahuan Sains Terhadap IPS dan  
Bahasa ~ 121

**Ideologi di Balik Sistem Penjurusan ~ 129**

**Proses Marjinalisasi Jurusan ~ 133**

Jurusan Favorit di SMA Negeri 1 Denpasar ~ 138

Jurusan Termarginal di SMA Negeri 1 Denpasar ~ 141

Sistem Penjurusan di SMA Dwijendra Denpasar ~ 145

Jurusan Favorit di SMA Dwijendra Denpasar ~ 148

Jurusan Termarginal di SMA Dwijendra Denpasar ~ 153

Peran Guru BK dalam Sistem Penjurusan ~ 155

Peran Guru IPA dalam Pemilihan Jurusan ~ 160

Peran Guru IPS dalam Pemilihan Jurusan ~ 164

Peran Guru Bahasa dalam Pemilihan Jurusan ~ 167

**Implikasi Marjinalisasi Jurusan IPS dan Bahasa ~ 173**

Implikasi Terhadap Siswa ~ 173

Implikasi Terhadap Manajemen Sekolah ~ 175

Implikasi Terhadap Manajemen Kelas ~ 178

**Temuan Baru ~ 183**

**Penutup ~ 189**

Simpulan ~ 189

Saran ~ 191

**Daftar Pustaka ~ 193**

**Indeks ~ 201**

**Tentang Penulis ~ 206**

## **PENJURUSAN: Penelusuran Minat, Bakat, dan Kemampuan**

**B**agi bangsa yang sedang membangun seperti Indonesia, pendidikan merupakan kebutuhan mutlak yang harus dikembangkan sejalan dengan tuntutan pembangunan. Pendidikan yang dikelola dengan tertib, efektif, dan efisien (berdaya guna dan berhasil guna) akan mampu mempercepat jalannya proses pembudayaan bangsa untuk menciptakan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, seperti tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Keinginan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dipertegas dalam batang tubuh UUD 1945, yakni pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan, dan ketakwaan, serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-undang No. 2 Tahun 1989 mengamanatkan bahwa satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang pendidikan.

Pendidikan bagi kehidupan umat manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan sangat mustahil manusia dapat hidup, berkembang, sejahtera, dan bahagia, karena manusia dilahirkan tidak berdaya, tidak memiliki naluri yang sempurna untuk menyesuaikan diri menghadapi lingkungan. Umat manusia perlu masa belajar yang panjang sebagai persiapan untuk dapat secara tepat berhubungan dengan lingkungan secara konstruktif, yang dimulai setelah anak manusia mencapai penyesuaian jasmani (dapat berjalan sendiri, makan sendiri, menggunakan tangan sendiri) atau mencapai

kebebasan fisik. Manusia harus dan wajib dididik, sebab kalau tidak ia akan kehilangan hakikat kemanusiaannya, dan akan tidak menjadi berbudaya (Mudyahardjo, 2001:33).

Pendidikan memberi tuntunan, bantuan, "pertolongan" kepada umat manusia. Pengertian memberi tuntunan pada sistem pendidikan persekolahan tersimpul suatu dasar pengakuan bahwa anak memiliki daya-daya/potensi (kecerdasan) untuk berkembang. Kecerdasan yang teridentifikasi, yaitu kecerdasan linguistik; kecerdasan matematika; kecerdasan visual/spasial; kecerdasan kinestetik/perasa; kecerdasan musikal; kecerdasan interpersonal; kecerdasan intrapersonal; kecerdasan intuisi. Kecerdasan ini secara berangsur-angsur tumbuh dan berkembang dalam diri anak. Untuk berkembangnya potensi-potensi (kecerdasan) agar menjadi lancar dan terarah, diperlukan "pertolongan", tuntunan dari luar yaitu pendidikan persekolahan. Jika pertolongan tidak ada, maka potensi/kecerdasan tersebut tinggal potensi belaka yang tak sempat diaktualisasikan. Dalam hal ini pendidikan harus memberikan keseimbangan aktivitas terhadap kanan dan otak kiri sehingga kecerdasan antara logika dan rasa menjadi padu dan seimbang (Hernacki, 2003:31- 38; Ihsan, 1996:2).

Pendidikan merupakan media mencerdaskan kehidupan bangsa dan membawa bangsa ke era *aufklärung* (pencerahan), pendidikan memberikan pembukaan dan perluasan pengetahuan sehingga dapat mewujudkan melek terhadap kehidupan. Pendidikan tidak hanya usaha pemberian informasi dan pembentukan keterampilan untuk persiapan kehidupan yang akan datang, tetapi juga untuk menuju kehidupan yang lebih dewasa, cerdas secara intelektual, serta mampu merasakan segala keluh kesah yang berada di sekitarnya. Untuk memajukan kehidupan itulah, maka pendidikan menjadi sarana utama yang perlu dikelola, secara sistematis dan konsisten. Dengan kata lain bahwa pendidikan dapat diartikan sebagai suatu hasil peradaban. Kedudukan pendidikan yang dilembagakan dalam berbagai bentuk atau model dalam masyarakat, dengan dinamika masyarakatnya selalu berinteraksi sepanjang waktu (Gunawan, 2000:17; Mangunwijaya, 2007:15; Yamin, 2009:15).

Ditegaskan oleh Supratiknya (2009:3), bahwa pendidikan persekolahan merupakan wahana untuk mengkritisi kebenaran yang telah ada dalam konteks dialogis antara pendidik dengan peserta didik. Ketika pendidikan berubah menjadi pusat pelatihan dengan menghilangkan nilai kritis dan tergesernya faktor dialogis, berarti pendidikan telah berbelok haluan sekadar menjadi fungsi *drill* dan berfokus pada hal-hal yang praktis. Seperti teori Positivisme yang dirintis oleh Auguste Comte (1798-1857) yang menyatakan bahwa Positivisme menganggap pengetahuan mengenai fakta objektif sebagai pengetahuan yang sah dengan menyingkirkan pengetahuan yang melampaui fakta-fakta indrawi (Hardiman, 2008:26).

Mudyahardjo (2001:37) menyatakan bahwa, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang dapat menghasilkan individu yang dapat mempertahankan dan meningkatkan mutu hidupnya. Hal ini terjadi apabila bentuk kegiatan pendidikan mempunyai tujuan yang tepat. Pendidikan yang rumusan tujuannya tidak tepat akan memunculkan tujuan pendidikan yang tidak benar pula. Tujuan pendidikan dikatakan tidak benar apabila berisi nilai-nilai hidup yang bersifat mengingkari dan merusak harkat dan martabat manusia sebagai makhluk sosial, individual, serta hamba Tuhan Yang Maha Esa. Kekeliruan pendidikan dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu kekeliruan idiil, dan kekeliruan teknis. Kekeliruan ideal berupa kegiatan pendidikan "patologis" atau "demagogis", yaitu kegiatan pendidikan yang mengandung unsur yang mengingkari kemanusiaan dan bahkan mempropagandakan dan mendorong pada perbuatan-perbuatan merusak dan menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan "patologis" atau "demagogis" akan melahirkan orang-orang yang cacat moral atau amoral, yang mempunyai watak ingin merusak kehidupan manusia atau berbuat kemungkaran. Kekeliruan teknis, yaitu kegiatan pendidikan yang salah dalam memilih dan menggunakan alat pendidikan. Kekeliruan ini mencakup kekeliruan cara mendidik, misalnya mendidik dengan memanjakan atau murah ganjaran, pendidikan yang mengembangkan keterampilan hanya dengan ceramah; kekeliruan ekologis, yaitu pendidikan yang kurang

mendukung pencapaian kedewasaan, seperti sistem atau regulasi penjurusan di SMA yang menciptakan “kelas-kelas” atau “kasta-kasta” baru. Akibat yang ditimbulkan adalah, pendidikan yang tidak efektif, tidak efisien, dan tidak relevan dalam membantu pengembangan kognitif, afektif, dan psikomotor anak menuju kedewasaan. Kekeliruan teknis ini dapat berakibat penguasaan pengetahuan/keterampilan yang keliru, dan gangguan-gangguan emosional, seperti rendah diri, sombong, keras kepala, dan individu menjadi lemah, karena terjadi perampasan harga dirinya yang merupakan milik yang paling berharga dalam kehidupan manusia (Mudyahardjo, 2001:30-27; Supratiknya, 2009:2).

Saat ini telah muncul gejala-gejala semakin langkanya para lulusan lembaga pendidikan sebagai sosok pribadi yang beradab, punya wawasan generalis, seimbang kepribadiannya. Mereka benar-benar profesional, tetapi tidak atau kurang peduli terhadap tanggung jawab etisnya. Apa yang dilakukannya sering tidak memperhatikan dampak yang sangat luas bagi orang lain dan lingkungan sekitarnya. Contoh sederhana pemanfaatan sinar laser untuk memecah bahkan mengusir awan, yang sering menyebabkan kemarau dan banjir. Contoh lain saat ini adalah munculnya kurikulum yang mengarah pada fanatisme sempit bahkan telah menjurus pada radikalisme. Begitu pula di Sekolah Menengah Umum Atas (SMA). Namanya sekolah menengah umum tapi terspesialisasi. Contohnya pada pemilihan jurusan, dan adanya indikasi pembiaran jurusan tertentu termajinal (Mudyahardjo, 2001:37-39; Supratiknya, 2009:4-5)

Penjurusan di SMA dilaksanakan dalam rangka penelurusan minat, bakat, dan kemampuan anak-anak di bidang akademik. Persyaratan dalam proses penjurusan di SMA hanya memperhatikan: nilai akademik siswa saat naik kelas ke kelas XI dan ketentuan mata pelajaran ciri khas jurusan. Untuk jurusan IPA, adalah siswa yang nilai mata pelajaran Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi, pada raport semester 2 (kelas X) mengalami ketuntasan. Demikian pula siswa yang bisa memilih jurusan IPS, nilai mata pelajaran Sejarah, Geografi, Ekonomi, dan Sosiologi pada raport semester 2 (kelas X) mengalami ketuntasan. Tidak terkecuali untuk memilih jurusan Bahasa. Bagi siswa yang ingin

memilih jurusan Bahasa, mereka harus memiliki nilai ketuntasan dalam mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Bali, dan Bahasa Asing lainnya pada raport semester 2 (Kurikulum 1998; Permendiknas. No. 22. Tahun 2006).

Menariknya dari proses penjurusan siswa SMA di kelas XI adalah, persyaratan yang ditentukan hanya memperhatikan kemampuan akademik, dan “relative” minat, sementara bakat terabaikan. Dampaknya jumlah siswa dimasing-masing jurusan menjadi tidak merata, terjadi penumpukan siswa yang memilih jurusan tertentu, sementara jurusan lainnya kurang diminati. Seperti yang terjadi pada Sekolah Menengah Umum Atas (SMA) Negeri 1 Denpasar dan Sekolah Menengah Umum Atas (SMA) Dwijendra Denpasar, seperti ditunjukkan pada tabel 1 dan tabel 2.

Tabel 1  
Data Jumlah Siswa Jurusan IPA, IPS, dan Bahasa, Tiga Tahun Terakhir di SMA Negeri 1 Denpasar

No.	Tahun Ajaran	Jur. IPA	Jur. IPS	Jur. Bahasa	Jumlah
1.	2009/2010	770 orang	29 orang	-	799 orang
2.	2010/2011	794 orang	26 orang	-	820 orang
3.	2011/2012	897 orang	37 orang	-	934 orang

Sumber data : TU SMA Negeri 1 Denpasar (2011)

Tabel 2  
Data Jumlah Siswa Jurusan IPA, IPS, dan Bahasa, Tiga Tahun Terakhir di SMA Dwijendra Denpasar

No.	Tahun Ajaran	Jur. IPA	Jur. IPS	Jur. Bahasa	Jumlah
1.	2009/2010	431 orang	235 orang	- orang	666 orang
2.	2010/2011	518 orang	221 orang	- orang	739 orang
3.	2011/2012	624 orang	236 orang	<b>-orang</b>	860 orang

Sumber data: TU SMA Dwijendra Denpasar (2011)



Perbandingan jumlah siswa yang memilih jurusan IPA, IPS, dan Bahasa, berdasarkan data tiga tahun terakhir di SMA Negeri 1 Denpasar, yakni dari Tahun Ajaran 2009/2010 s/d 2011/2012 dapat diuraikan sebagai berikut. Pada tahun ajaran 2009/2010 dari 799 orang jumlah siswa kelas XI, dan XII yang memilih jurusan IPS hanya 29 orang, Jurusan IPA 770 orang, sementara jurusan Bahasa tidak ada. Kemudian pada tahun ajaran 2010/2011 dari 820 orang jumlah siswa kelas XI, yang memilih jurusan IPS hanya 26 orang, jurusan IPA 794 orang, sedangkan jurusan Bahasa tidak ada. Demikian pula pada tahun ajaran 2011/2012 dari jumlah siswa kelas XI sebanyak 927 orang, yang memilih jurusan IPS hanya 37 orang, jurusan IPA 890 orang, sedangkan jurusan bahasa tidak ada. Gambaran data di atas dapat memberikan petunjuk bahwa betapa jurusan IPS, dan Bahasa pada sekolah tersebut sangat tidak diminati, dan rendahnya minat siswa memilih jurusan IPS, dan Bahasa yang secara tidak langsung jurusan IPS dan bahasa menjadi termajinal.

Hal yang sama juga terjadi di SMA Dwijendra Denpasar. Data di sekolah tersebut menunjukkan bahwa siswa Kelas XI angkatan Tahun Ajaran 2009/2010 jumlah siswanya 666 orang, terdiri dari 235 orang jurusan IPS, 431 orang jurusan IPA, dan 0 (nol) orang siswa jurusan Bahasa. Siswa Kelas XI angkatan Tahun Ajaran 2010/2011 dengan jumlah siswa 739 orang, mengambil jurusan IPS 221 oarang siswa, 518 oarang jurusan IPA, dan nol (0) orang jurusan bahasa. Siswa kelas XI angkatan tahun ajaran 2011/2012, dengan jumlah siswa 860, dengan 236 orang siswa jurusan IPS, dan 624 orang siswa jurusan IPA, dan 0 (nol) orang jurusan Bahasa. Data itu menunjukkan telah terjadi ketimpangan yang signifikan jumlah siswa pada masing-masing jurusan yang mengindikasikan terjadi peminggiran atau marjinalisasi terhadap Ilmu Pengetahuan Sosial dan Bahasa.

Hal ini tentu berdampak tidak baik terhadap perkembangan ilmu itu sendiri khususnya ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Dampak lainnya, muncul “klas-klas” atau “kasta-kasta” pada lembaga pendidikan, yang dapat memunculkan pendidikan

yang elitis, tidak emansipatoris, birokratis, dan hegemonik. Ditinjau dari pendidikan kritis maka hal ini akan berakibat pada terbangunnya model pendidikan yang pragmatis yang menghasilkan sikap praktis (*practicality*); kerja keras (*work-ability*); mempunyai nilai uang (*cash value*); personalisme dan dinamisme; menolak kepasrahan (*agresive*); pasti bisa kalau ada kemauan; menjelajah (*achievement status*); alam sebagai objek; demokrasi; dan sekularisme. Dengan demikian akan muncul pemahaman bahwa ekolah menjadi “tempat” untuk mencari pekerjaan, “mimpi-mimpi indah pun” terbangun di dalamnya. Seperti sekolah untuk menjadi dokter, insinyur, pengusaha, dan lain sebagainya yang berprinsip seperti uraian di atas. Padahal bersekolah adalah kegiatan diri untuk dapat dan sanggup menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab diri. Sekolah bukan semata-mata untuk mencari pekerjaan tetapi untuk mempersiapkan diri menjadi pelaku di dalam kegiatan hidup (Dewey, 2001:23-28; Suwati, 2008:2-6)

Penulis melakukan penelitian di SMA Negeri 1 Denpasar dan SMA Dwijendra Denpasar, mengingat kedua sekolah ini diminati oleh masyarakat Denpasar. Hal ini dapat dilihat dari jumlah bakal calon siswa yang mendaftar ke SMA Negeri 1 Denpasar dan SMA Dwijendra Denpasar.

Hal lainnya, SMA Negeri 1 Denpasar merupakan sekolah negeri paling tua sehingga secara logika SMA Negeri 1 Denpasar memiliki pengalaman yang panjang dalam mengelola pelaksanaan pendidikan. Begitu pula SMA Dwijendra Denpasar memiliki jumlah bakal calon siswa paling banyak dibandingkan jumlah bakal calon siswa SMA swasta lainnya di Kota Denpasar, seperti data pada tabel 3 dan 4 berikut ini. Selain itu SMA Dwijendra Denpasar adalah sekolah yang mengikrarkan diri sebagai sekolah yang bebasiskan budaya, dalam realitasnya jurusan IPS dan bahasa termajinal (Profil Sekolah SMA Dwijendra, 2000)

**Tabel 3**  
**Jumlah Calon Siswa Kelas X dan Jumlah Siswa Kelas X SMA**  
**Negeri di Kota Denpasar**

SMAN	Tahun					
	2009/2010		2010/2011		2011/2012	
	Calon Siswa Kelas X	Jml. Siswa Kelas X	Calon Siswa Kelas X	Jml. Siswa Kelas X	Calon Siswa Kelas X	Jml. Siswa Kelas X
SMAN 1	771	404	756	478	867	468
SMAN 2	635	390	621	400	647	427
SMAN 3	654	325	645	347	631	370
SMAN 4	546	350	731	360	459	368
SMAN 5	699	370	723	418	854	460
SMAN 6	567	411	543	421	435	438
SMAN 7	723	351	677	369	658	386
SMAN 8	589	333	611	340	567	355

Sumber : TU Disdikpora Kota Denpasar

**Tabel 4**  
**Jumlah Calon Siswa Kelas X dan Jumlah Siswa Kelas X SMA**  
**Swasta di Kota Denpasar**

SMA	Tahun					
	2009/2010		2010/2011		2011/2012	
	Calon Siswa Kls. X	Jml Siswa Kls. X	Calon Siswa Kls. X	Jml Siswa Kls. X	Calon Siswa Kls.X	Jml Siswa Kls. X
SMA Dwijendra	556	444	526	447	624	426
SMA Saraswati	310	290	357	300	365	327
SMA Perintis	267	225	298	247	301	270
SMA Dharma Praja	287	250	298	260	298	268
SMA Santo Yoseph	303	270	345	318	426	360
SMA Harapan	356	311	367	321	440	338
SMA Kerta Wisata	267	251	287	269	315	286
SMA PGRI 1	351	345	370	356	387	369
SMA PGRI 2	344	338	333	321	358	340
SMA PGRI 3	335	315	365	340	359	320
SMA PGRI 4	275	265	287	270	293	285
SMA PGRI 5	341	321	373	351	357	345
SMA PGRI 6	352	341	364	344	371	367

Sumber : TU Disdikpora Kota Denpasar. \*\*\*

## BUDAYA CITRA

Pembangunan seringkali dikaitkan dengan proses industrialisasi. Karena itu pengertiannya dianggap sama. Proses industrialisasi dan pembangunan, sebenarnya merupakan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam arti tingkat hidup yang lebih maju, maupun taraf hidup yang lebih bermutu. Selain itu industri dan pembangunan juga tidak lepas dari usaha untuk meningkatkan mutu sumberdaya manusia dan kemampuannya memanfaatkan secara optimal sumberdaya alam dan sumber daya lainnya. Sering terdengar bahwa industri dan pembangunan mempunyai peranan sebagai sektor pemimpin (*leading sector*). *Leading sector* ini maksudnya adalah dengan adanya pembangunan atau industri maka akan memacu dan meningkatkan sektor-sektor lainnya, seperti sektor pendidikan, pertanian, jasa, pariwisata, periklanan, dan lain sebagainya (Arsyad, 2007:329-330).

Namun tanpa disadari, zaman pencerahan dan teori kemajuan yang tercetuskan hanya berpusat pada kesucian dua kategori, yaitu ilmu pengetahuan modern, dan pembangunan ekonomi. Berkenaan dengan itu, mengejar kemajuan tanpa batas, yang dituntun oleh ilmu pengetahuan dan pembangunan ekonomi atau industri yang menjadi dambaan, sehingga menimbulkan dampak penghancuran terhadap kehidupantampa ada penilaian seberapa cepat dan seberapa banyak keanekaragaman kehidupan di planet ini mulai lenyap (Shiva, 1997). Seperti pemanfaatan sumber daya alam secara maksimal, sampai melebihi daya dukung sehingga menimbulkan degradasi kualitas sumber daya alam. Belum terhitung lagi adanya berbagai masalah sosial budaya sebagai akibat dari globalisasi, yang sering menimbulkan “biaya-biaya manusiawi” atau biaya sosial (*social cost*), yang bisa menimbulkan “menyusutnya kebudayaan” atau (*cultural loss*). Sehingga banyak orang kehilangan makna dan pegangan hidup. Banyak gejala sosial yang menimbulkan biaya

sosial, seperti munculnya budaya citra (lihat sistem penjurusan di SMA), budaya materialistik, konsumtif, yang pada gilirannya menyokong ketidaksamarataan sosial, dan kemiskinan. Yang paling terkena dari kondisi ini adalah angkatan muda yang dibesarkan di tengah suatu kevakuman kebudayaan dan nilai. Tradisi lama dibuang begitu saja, dianggap sebagai sesuatu yang usang demi mengejar “modernisasi”. Kebudayaan “Barat” pun hanya dijiplak dan ditiru secara lahiriah, seperti dalam pembangunan pendidikan saat ini “berbau Barat = maju”. Model pendidikan saat ini hampir semua berbau “Barat”. Nilai mata pelajaran IPA tinggi = pintar, nilai IPS tinggi, Bahasa tinggi, nilai IPA rendah = tidak pintar. Kondisi seperti ini merupakan kondisi yang di dalamnya hampir seluruh energi dipusatkan bagi pelayanan “hawa nafsu” yang pragmatis, sehingga pengejaran kebendaan, kekuasaan, ketenaran, popularitas, kecantikan, kebugaran, keindahan, dan kesenangan, menjadi sebuah pencarian yang tak pernah berkesudahan, bagaikan hidup di “alam Dewa” yang serba berlimpah (Berger,1982: Palguna, 2007; Piliang, 1998). Hal ini berarti pembangunan dan industri pada umumnya, termasuk pembangunan di sektor pendidikan, dapat memberikan berbagai dampak terhadap kehidupan, baik pada lingkungan sosial maupun lingkungan alam. Kalau dievaluasi, maka akan terdapat sejumlah dampak baik yang bersifat positif maupun negatif. Karena itulah tidak mengherankan jika kajian pendidikan telah banyak dilakukan dan selalu menarik untuk dikaji dengan berbagai pendekatan.

Tripalupi (2000) melakukan penelitian pendidikan tentang tindakan kelas. Dalam kajiannya Tripalupi mendeskripsikan tentang penerapan pola pembelajaran IPS terpadu dengan teknik pemberian tugas dan resitasi. Kajian yang dilakukan Tripalupi sangat ringkas, karena kajiannya hanya mencakup tindakan di kelas, dan dijelaskan bahwa pembelajaran IPS terpadu dengan teknik pemberian tugas dan resitasi dapat meningkatkan hasil belajar. Tripalupi hanya mengkaji masalah tindakan kelas tidak menyinggung sedikitpun kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, apalagi tentang marjinalisasi jurusan IPS dan Bahasa. Dengan demikian, kajian Tripalupi cukup relevan untuk

dijadikan salah satu sumber kajian pendukung penelitian ini dan dalam menentukan orisinalitas penelitian ini.

Penelitian tentang sistem persekolahan, Dawam (2003) telah mempublikasikan hasil penelitiannya yang ditulis dalam buku yang berjudul "Emoh Sekolah" Menolak "Komersialisasi Pendidikan" dan "Kanibalisme Intelektual" menuju Pendidikan Multikultural. Dalam tulisannya itu, ia menawarkan kerangka berpikir baru tentang sistem persekolahan. Institusi pendidikan formal dan sistem persekolahan memang penting sebagai arena untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat, tetapi menurutnya institusi pendidikan yang pada awalnya diniatkan untuk memberdayakan masyarakat, dalam sistem modernitas justru menjadi sebuah lembaga yang tidak memungkinkan bagi keturunan orang-orang miskin, dan *papa* untuk memperolehnya. Dengan demikian pendidikan nyaris hanya dinikmati oleh para elite yang termasuk kategori tingkat atas.

Membendung anak-anak orang miskin caranya dilakukan seleksi yang sangat kompleks dan ketat. Dengan cara seperti itu orang-orang miskin menjadi tidak mampu bersaing secara jantan. Jangankan bersaing, untuk mengikuti ujian masuk saja mereka sudah kalah duluan dengan tidak adanya biaya dari mereka untuk mengikuti berbagai program pelatihan dan bimbingan untuk memasuki perguruan tinggi. Persaingan, seleksi, berkualitas, biaya tinggi, dan efisien adalah kata-kata sakral dalam modernitas. Mempersilahkan orang lain yang mampu untuk maju, pemilihan sukarela, tanpa biaya (*gratis*) dan tidak efisien adalah kata-kata yang harus dibuang kemudian dihindari sejauh-jauhnya dalam dunia modern. Manusia atau anggota masyarakat yang tidak memiliki *skill* atau keterampilan atau keunggulan kompetitif harus tersingkir dan termarginalkan (di sini berlaku hukum rimba). Hasil kajian ini setidaknya bisa memberikan inspirasi bahwa penerapan hukum rimba dalam konteks pendidikan sangatlah tidak cocok. Artinya, persaingan bebas dengan menjunjung tinggi hukum rimba (baca: hukum liberalisasi dan neoliberal) dalam konteks pendidikan sama sekali tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Kajian Dawam cukup relevan dijadikan bahan kajian untuk mendukung

penelitian ini mengingat ada keterkaitan antara penelitian Dawam dengan penelitian ini, dan menunjukkan originalitas penelitian ini.

Selanjutnya, Aryaningsih (2005) meneliti pembelajaran manajemen berbasis inkuiri dalam upaya meningkatkan aktivitas dan hasil belajar peserta didik. Dari hasil kajiannya itu Aryaningsih menyimpulkan bahwa pembelajaran manajemen berbasis inkuiri dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar mahasiswa melalui pemahaman teori manajemen risiko dengan baik. Namun karena penelitian yang dilakukan Aryaningsih terfokus pada aktivitas di kelas, maka kajiannya juga tidak menyentuh sedikitpun kebijakan pemerintah dibidang pendidikan apalagi masalah marjinalisasi jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Bahasa dalam pemilihan jurusan di Sekolah Menengah Atas. Namun demikian hasil penelitian Aryaningsih sangat relevan dijadikan salah satu bahan kajian mendukung penelitian ini dan menentukan originalitas gagasan dalam penelitian ini.

Mahmud (2005) mempublikasikan hasil penelitiannya dalam Jurnal *Kependidikan* IKIP Mataram mengenai kontribusi gaya kepemimpinan kepala sekolah dan performansi kerja guru SMA di Kota Mataram, menyimpulkan bahwa ada hubungan kontribusi gaya kepemimpinan kepala sekolah dengan performansi kerja guru. Penelitian Mahmud hanya meneliti tentang gaya kepemimpinan dan kontribusinya terhadap performansi kerja guru. Mahmud tidak menyinggung implikasi marjinalisasi IPS dan Bahasa terhadap diri siswa, manajemen sekolah, dan manajemen kelas.

Hasil penelitian Susetyo (2005) yang dipublikasikan lewat bukunya *Politik Pendidikan Penguasa*, telah memelopori pembahasan mengenai hal ini. Dalam penelitiannya ia banyak menyoroti politik pendidikan yang kerdil dan sempit, yang merupakan hasil reduksionisme, telah mengubur nilai hakiki pendidikan sejatinya. Menurutnya, politik pendidikan yang terbuka dan mencerahkan akan dapat dijalankan dengan sedemikian rupa apabila pembentukan karakter bangsa mulai dari elite lapis teratas hingga terbawah betul-betul dikerjakan

dengan sedemikian tegas dan konkrit. Dengan analisisnya itu dapat memberikan kontribusi pemahaman dalam penelitian ini terhadap fenomena kebijakan pemerintah menyangkut otonomi dalam bidang pendidikan hingga ke tingkat sekolah. Berbagai kebijakan pendidikan sering pula dikaitkan dengan setiap perubahan kepemimpinan. Di setiap perubahan kepemimpinan, selalu timbul relasi bagaimana sebuah konsep baru ditawarkan ke masyarakat, termasuk pendidikan sehingga ketika konsep baru tersebut dijalankan, ini pun akan mengubah dan mengganti konsep lama, kendati pun konsep lama tersebut layak untuk dilanjutkan. Dengan demikian, konteks ini menunjukkan sedang terjadi pertarungan kekuasaan baru terhadap kekuasaan lama yang sudah tersingkir. Apabila dikaitkan dengan pendidikan di negeri ini, maka adanya perubahan kepemimpinan itu, dengan konsep yang baru sebenarnya bertujuan untuk pembangunan citra politik agar konsep yang baru itu diklaim lebih baik dari konsep kepemimpinan sebelumnya. Sayangnya, politik identitas kepentingan golongan selalu ditonjolkan dan merusak cita-cita pendidikan yang mulia, yakni mencerdaskan bangsa. Meskipun berbagai kritik silih berganti dari pelbagai komponen masyarakat agar arah kebijakan pendidikan nasional betul-betul diletakan secara proporsional dan tepat sasaran, tetapi secara realitas belum mampu dan belum bisa mengubah setiap kepemimpinan yang selalu berganti-ganti.

Narsa (2006) meneliti hubungan persepsi, sikap, dan pengetahuan guru, dengan pembelajaran pendidikan budipakerti pada Sekolah Menengah Atas swasta di Kota Denpasar. Dari hasil kajiannya Narsa menyimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan dan positif antara dua variabel yang diselidiki. Mengingat kajian yang dilakukan Narsa, menyangkut hubungan persepsi, sikap, dan pengetahuan guru terhadap pembelajaran pendidikan budipakerti, itu menunjukkan bahwa tidak ada sedikitpun menyinggung masalah marjinalisasi jurusan IPS dan Bahasa pada pemilihan jurusan di SMA.

Penelitian Paulo Prierre (2002) dalam bukunya "Politik Pendidikan, Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan", membahas masalah pendidikan dikaitkan dengan masalah



politik, kebudayaan, kekuasaan, dan pembebasan. Pendidikan bagi Prierre adalah salah satu upaya untuk mengembalikan fungsi manusia agar menjadi manusia yang terhindar dari berbagai bentuk penindasan, kebodohan, sampai pada ketertinggalan. Masih menurut Prierre, oleh karena manusia sebagai pusat pendidikan, maka manusia harus menjadikan pendidikan sebagai alat pembebasan untuk mengantarkan manusia menjadi makhluk yang bermartabat. Namun demikian kajian Prierre tidak sedikitpun menyinggung masalah ketidakadilan dalam pengembangan pendidikan anatar ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial dan bahasa.

Demikian pula Darmaningtyas (2005) dengan karya tulisnya "*Pendidikan Rusak-Rusakan*" dengan jernih telah menyoroti berbagai malpraktik yang terjadi dalam dunia pendidikan. Adapun malpraktik dalam pendidikan yang disorot Darmaningtyas adalah; pertama, kecenderungan pendidikan yang semakin elitis dan tidak terjangkau oleh rakyat miskin; kedua, manajemen pendidikan masih birokratis dan hegemonik sehingga kebijakan yang lahir tidak mendukung terwujudnya pendidikan yang emansipatoris, dan dialogis.

Sastrini (2010) meneliti tentang "Psrsepsi Siswa SMA Dwijendra Denpasar Terhadap Penerapan Konsep *Ajeg* Bali Berbasis Agama Hindu". Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pergulatan antara modernisasi dan tradisi yang dialami oleh siswa SMA Dwijendra Denpasar diatasi dengan peningkatan pola pikir anak didik yang bepedoman pada konsep nilai-nilai kearifan lokal yang selalu dikembangkan seperti, Konsep *Rwa Bhineda*, *Tri Hita Karana*, *Desa Kala Patra*, *Karma Phala*, *Tat Twam Asi*, dan lain sebagainya. Penelitian ini sama sekali tidak menyinggung marjinalisasi jurusan IPS dan Bahasa di SMA Dwijendra Denpasar sebagai akibat dari modernisasi. Namun demikian penelitian ini sangat tepat dijadikan bahan kajian dan pendukung penelitian ini.

Isjoni (2008) juga telah membahas masalah pendidikan dengan judul *Belajar Demi Hidup* menjadikan Pendidikan untuk Masa Depan yang lebih baik. Dari kajiannya itu Isjoni menyoroti kelemahan guru di Indonesia, yang secara umum cepat puas,

selalu mempertahankan status quo, dan tidak mau berubah. Mereka cenderung mengajar dengan materi yang sama dengan apa yang diterimanya di bangku kuliah tanpa menyesuainya dengan kondisi dan situasi anak didik. Mereka sulit menerima usulan anak didik yang berbeda dengan yang mereka ketahui dan mereka persiapkan. Guru seperti ini sering dirasakan oleh anak didik sebagai sesuatu yang membelenggu dirinya. Akibatnya, anak didik datang ke sekolah hanya sekadar beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan apa yang hendak dibuat gurunya. Jika proses ini terus terjadi, bukan tidak mungkin anak akan kehilangan sebagian besar potensi dirinya. Adaptasi mengenai lingkungan objektif tidak pernah bisa berubah, padahal mereka dituntut terus untuk menyesuaikan diri. Proses seperti ini berlawanan dengan tujuan pendidikan, yakni mendidik siswa agar menjadi manusia otonom.

Suda (2009) telah mengkaji masalah pendidikan dengan judul *Merkantilisme Pengetahuan dalam Bidang Pendidikan: Studi Kasus di SD Melati Sukma Denpasar*. Dari hasil kajiannya itu, Suda menyimpulkan bahwa di dalam memilih sekolah untuk putra-putrinya, banyak orang tua di Denpasar yang terjebak pada pemaknaan sekolah dari segi nilai simbol. Artinya, orang tua siswa di dalam memilih sekolah untuk putra-putrinya banyak yang tidak melihat sekolah dari segi nilai fungsi akan tetapi dari segi nilai simbol atau dengan kata lain banyak orang tua yang menjadikan sekolah sebagai ajang untuk menentukan status sosial (gengsi) semata. Padahal sekolah seharusnya dilihat sebagai arena untuk mencerdaskan anak dan bukan sebagai ajang untuk menentukan simbol status sosial. Apabila dikaitkan dengan pemilihan jurusan telah terindikasi terjadi pergeseran makna, jurusan dijadikan simbol status sosial, bukan dijadikan tempat mengasah kecerdasan sesuai bakat. Dengan demikian, kajian yang dihasilkan oleh Suda cukup relevan untuk menentukan originalitas penelitian ini

Kajian mengenai masalah pendidikan juga telah dilakukan oleh Yamin (2009) dengan judul *Menggugat Pendidikan Indonesia*, dan Surakhmad (2009) dalam bukunya *Pendidikan Nasional Strategi dan Tragedi*. Dari kajiannya itu, Yamin dan

Surakhmad mengatakan bahwa bangsa ini sedang menunggu peran implementasi pendidikan yang mencerdaskan, membawa kehidupan bangsa yang beradab, berdaya saing tinggi, berkualitas, dan mandiri. Namun, menurutnya sejarah pendidikan di negeri ini selalu diwarnai kepentingan politik praktis, dan kerdil, oleh segelintir orang sehingga pendidikan tidak mampu melakukan hal-hal yang konstruktif. Realitas membuktikan bahwa pendidikan selalu diarahkan untuk membenarkan kepentingan penguasa dan kroni-kroninya sehingga pendidikan berada dalam penjara kekuasaan dan ia pun tidak bisa meningkatkan kualitas bangsa ini.

Ironisnya lagi, pascareformasi yang diharapkan mampu membawa angin perubahan bagi dunia pendidikan, ternyata hanya menjadi wacana politik sehingga pendidikan di Indonesia tidak beranjak dari persoalan-persoalan yang semakin parah dan amburadul, Adanya kebijakan otonomi pendidikan yang kemudian memberikan hak sepenuhnya kepada setiap penyelenggara pendidikan dan satuan pendidikan, maka ini memberikan satu bukti konkret, pendidikan berada dalam kerentanan komersialisasi pendidikan, sehingga menjadi keniscayaan apabila pendidikan pun menjadi komoditas yang siap diperjualbelikan dengan harga yang sangat tinggi.

Nurmini (2010), meneliti tentang pengaruh pembelajaran kooperatif terhadap prestasi belajar ekonomi ditinjau dari sikap siswa pada pelajaran ekonomi, menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan prestasi belajar antara pembelajaran kooperatif Jigsaw dengan pembelajaran STAD. Nurmini hanya meneliti tentang metode pembelajaran, sama sekali tidak menyinggung masalah marjinalisasi IPS dan Bahasa pada pemilihan jurusan di SMA. Hal ini menunjukkan bahwa ada relevansi originalitas dari penelitian ini.

Adri (2010) dalam *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran* Program Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Ganesha, menulis hasil penelitiannya tentang implementasi pembelajaran tematik berbasis lingkungan dalam meningkatkan kreativitas dan hasil belajar, menyimpulkan bahwa terjadi peningkatan kreativitas dan peningkatan hasil belajar pada

pembelajaran tematik berbasis lingkungan. Penelitian Adri sama sekali tidak menyinggung masalah marjinalisasi jurusan IPS dan Bahasa pada pemilihan jurusan di SMA.

Meskipun beberapa penelitian telah membahas masalah pendidikan yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan, metode pembelajaran, tetapi tak satu pun di antara mereka yang membahas secara spesifik dan mendetail mengenai sistem pemilihan Jurusan dan marginalisasi Jurusan IPS dan Bahasa di SMA, apalagi untuk kasus di SMA Negeri 1 Denpasar dan SMA Dwijendra Denpasar. Dari fenomena-fenomena seperti di atas, dan dari sistem pemilihan Jurusan di di SMA Negeri 1 Denpasar, dan di SMA Dwijendra Denpasar, ada yang sangat menarik dan perlu dikaji lebih mendalam, yaitu Marjinalisasi Ilmu Pengetahuan Sosial dan Bahasa.

Hasil-hasil studi yang disebutkan di atas semuanya dapat dijadikan acuan dalam proses penelitian selanjutnya, paling tidak untuk meyakinkan peneliti bahwa dunia pendidikan di Indonesia memang banyak menyimpan permasalahan krusial yang perlu diteliti secara lebih mendalam dan spesifik. Berbagai kajian dan hasil penelitian itu akan banyak membantu, di samping sangat relevan dalam memberikan pemahaman dan perbandingan terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Namun, dari semua kajian dan hasil penelitian tersebut, belum atau tidak ada kajian/ hasil penelitian yang menggunakan pendekatan atau paradigma kajian budaya. Jadi, kajian ini merupakan sebuah studi baru dan original serta memiliki perbedaan prinsip dengan beberapa studi yang dilakukan sebelumnya. Perbedaan itu tidak hanya dari segi ontologi (pusat perhatian, subjek atau objek kajian), dari segi epistemologi (konsep, teori, pendekatan, model, dan metode) tetapi juga dari segi aksiologi. \*\*\*



## DIKOTOMI JURUSAN

**K**onsep pemilihan jurusan mengacu pada pandangan Isjoni (2008:125) yang mengatakan bahwa siswa secara umum ketika memilih jurusan lebih suka memilih jurusan IPA dibandingkan jurusan IPS dan atau Bahasa. Hal ini disebabkan tamatan atau lulusan jurusan IPA bebas bisa memilih jurusan di perguruan tinggi. Selain itu, tamatan jurusan IPA bisa memilih jurusan yang favorit seperti kedokteran, farmasi, teknik, dan lain-lain, yang sampai saat ini masih dipandang akan mampu memberikan harapan bagi kehidupan, dan sebagai profesi yang menjanjikan oleh masyarakat.

Jadi, berangkat dari pandangan Isjoni di atas dan jika dikaitkan dengan fenomena pemilihan jurusan di SMA Negeri 1 Denpasar dan SMA Dwijendra Denpasar, nampak ada kesamaan. Siswa-siswa SMA Negeri 1 Denpasar dan SMA Dwijendra dalam memilih jurusan cenderung berlomba-lomba mencari jurusan IPA, sementara jurusan IPS dan Bahasa cenderung dipinggirkan/dimarginalkan.

Konsep marjinalisasi sebenarnya mempunyai padanan dengan konsep oposisi biner dan cara-cara berpikir lainnya yang bersifat hierarkhis dikotomis. Kecenderungan utama oposisi biner adalah pada anggapan bahwa unsur yang pertama merupakan pusat, asal-usul, dan prinsip, dengan konsekuensi logis yang lain menjadi sekunder, marginal, dan padanan pelengkap lainnya (Ratna, 2004:222). Jadi, dalam hal pemilihan jurusan bagi siswa di Sekolah Menengah Atas (SMA) Jurusan IPA sering dipandang sebagai pusat, asal-usul, dan prinsip, sementara untuk jurusan IPS dan Bahasa dianggap sekunder, marjinal atau terpinggirkan. Selanjutnya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995:630), disebutkan bahwa marjinalisasi adalah usaha membatasi, pembatasan, dan agaknya telah terjadi peran terhadap kelompok tertentu. Jadi, konsep marjinalisasi dalam konteks ini mengandung arti bahwa telah terjadi pembatasan

dalam proses pemilihan jurusan terhadap jurusan IPS dan Bahasa khususnya pada sekolah-sekolah favorit di Denpasar, dan lebih khusus lagi di SMA Negeri 1 dan SMA Dwijendra Denpasar.

Hal ini dikarenakan masih adanya pandangan masyarakat yang mendikotomi antara jurusan IPA dengan jurusan IPS, dan Bahasa. Hal ini terlihat dari rasio anak-anak yang mengambil jurusan IPA, IPS, dan Bahasa dalam tiga tahun terakhir di SMA Negeri 1 dan SMA Dwijendra Denpasar, yang menunjukkan ketimpangan yang sangat tinggi. Di SMA Negeri 1 Denpasar, pada Tahun Ajaran 2009/2010—2011/2012. Tahun ajaran 2009/2010 dari jumlah siswa sebanyak 799 orang, yang memilih jurusan IPA sebanyak 770 orang, yang memilih jurusan IPS hanya 29 orang, bahasa tidak ada, Tahun Ajaran 2010/2011, Jurusan IPA 794 orang, jurusan IPS 36 orang, sementara jurusan Bahasa tidak ada. Kemudian pada tahun ajaran 2011/2012 dari jumlah siswa sebanyak 937 orang yang memilih jurusan IPA 897 orang, IPS 37 orang, sedangkan jurusan Bahasa tidak ada. Demikian pula di SMA Dwijendra pada tahun ajaran 2009/2010 dari jumlah siswa sebanyak 666 orang, yang memilih jurusan IPA 431 orang, jurusan IPS hanya 235 orang, jurusan bahasa tidak ada. Tahun ajaran 2010/2011, dari jumlah siswa 739 orang, yang memilih jurusan IPA 518 orang, jurusan IPS 221 orang, sedangkan jurusan bahasa tidak ada. Tahun ajaran 2011/2012 jumlah siswa 860, yang memilih jurusan IPA 624 orang, dan memilih jurusan IPS 238 orang, sedangkan jurusan bahasa tidak ada.

#### Jurusan IPS

Ilmu pengetahuan sosial (Inggris: *social studies*) adalah sekelompok disiplin akademis yang mempelajari aspek-aspek yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan sosialnya. Ilmu ini berbeda dengan seni dan humaniora karena menekankan penggunaan metode ilmiah dalam mempelajari manusia, termasuk metoda kuantitatif dan kualitatif. Istilah ini juga termasuk menggambarkan penelitian dengan cakupan yang luas dalam berbagai lapangan meliputi perilaku dan interaksi manusia di masa kini dan masa lalu. Berbeda dengan ilmu sosial secara umum, IPS tidak memusatkan diri pada satu topik secara mendalam melainkan memberikan tinjauan yang luas terhadap

masyarakat.

Ilmu pengetahuan sosial, dalam mempelajari aspek-aspek masyarakat secara subjektif, inter-subjektif, dan objektif atau struktural, sebelumnya dianggap kurang ilmiah bila dibanding dengan ilmu alam. Namun sekarang, beberapa bagian dari ilmu sosial telah banyak menggunakan metoda kuantitatif. Demikian pula, pendekatan interdisiplin dan lintas-disiplin dalam penelitian sosial terhadap perilaku manusia serta faktor sosial dan lingkungan yang mempengaruhinya telah membuat banyak peneliti ilmu alam tertarik pada beberapa aspek dalam metodologi ilmu sosial.<sup>[1]</sup> Penggunaan metoda kuantitatif dan kualitatif telah makin banyak diintegrasikan dalam studi tentang tindakan manusia serta implikasi dan konsekuensinya.

Karena sifatnya yang berupa penyederhanaan dari ilmu-ilmu sosial, di Indonesia IPS dijadikan sebagai mata pelajaran untuk siswa sekolah dasar (SD), dan sekolah menengah tingkat pertama (SMP/SLTP). Sedangkan untuk tingkat di atasnya, mulai dari sekolah menengah tingkat atas (SMA) dan perguruan tinggi, ilmu sosial dipelajari berdasarkan cabang-cabang dalam ilmu tersebut khususnya jurusan atau fakultas yang memfokuskan diri dalam mempelajari hal tersebut.

Cabang-cabang utama dari ilmu pengetahuan sosial, yaitu antropologi, yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu; ekonomi, yang mempelajari produksi dan pembagian kekayaan dalam masyarakat; geografi, yang mempelajari lokasi dan variasi keruangan atas fenomena fisik dan manusia di atas permukaan bumi; hukum, yang mempelajari sistem aturan yang telah dilembagakan; linguistik, yang mempelajari aspek kognitif dan sosial dari bahasa; pendidikan, yang mempelajari masalah yang berkaitan dengan belajar, pembelajaran, serta pembentukan karakter dan moral; politik, yang mempelajari pemerintahan sekelompok manusia (termasuk negara); psikologi, yang mempelajari tingkah laku dan proses mental; sejarah, yang mempelajari masa lalu yang berhubungan dengan umat manusia; sosiologi, yang mempelajari masyarakat dan hubungan antarmanusia di dalamnya.

Mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik memiliki



kemampuan mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya; memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial; memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan; memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global.

Ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi berbagai aspek: manusia, tempat, dan lingkungan; waktu keberlanjutan dan perubahan; sistem sosial dan budaya; perilaku ekonomi dan kesejahteraan.

Standar kompetensi mata pelajaran IPS: memahami identitas diri dan keluarga, serta mewujudkan sikap saling menghormati dalam kemajemukan keluarga; mendeskripsikan kedudukan dan peran anggota dalam keluarga dan lingkungan tetangga, serta kerja sama di antara keduanya; memahami sejarah, kenampakan alam, dan keragaman suku bangsa di lingkungan kabupaten/kota dan provinsi; mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten/kota dan provinsi; menghargai berbagai peninggalan dan tokoh sejarah nasional, keragaman suku bangsa serta kegiatan ekonomi di Indonesia; menghargai peranan tokoh pejuang dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia; memahami perkembangan wilayah Indonesia, keadaan sosial negara di Asia Tenggara serta benua-benua; mengenal gejala (peristiwa) alam yang terjadi di Indonesia dan negara tetangga, serta dapat melakukan tindakan dalam menghadapi bencana alam; memahami peranan Indonesia di era global.

### ***Jurusan Bahasa***

Menurut Keraf dalam Smarapradhipa (2005:1), memberikan dua pengertian bahasa. Pengertian pertama menyatakan bahasa sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Kedua, bahasa adalah sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vocal (bunyi ujaran) yang bersifat arbitrer. Lain halnya menurut

Owen dalam Stiawan (2006:1), menjelaskan definisi bahasa, yaitu *language can be defined as a socially shared combinations of those symbols and rule governed combinations of those symbols* (bahasa dapat didefinisikan sebagai kode yang diterima secara sosial atau sistem konvensional untuk menyampaikan konsep melalui kegunaan simbol-simbol yang dikehendaki dan kombinasi simbol-simbol yang diatur oleh ketentuan).

Pendapat di atas mirip dengan apa yang diungkapkan oleh Tarigan (1989:4), beliau memberikan dua definisi bahasa. Pertama, bahasa adalah suatu sistem yang sistematis, barang kali juga untuk sistem generatif. Kedua, bahasa adalah seperangkat lambang-lambang mana suka atau simbol-simbol arbitrer.

Menurut Santoso (1990:1), bahasa adalah rangkaian bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia secara sadar. Definisi lain, bahasa adalah suatu bentuk dan bukan suatu keadaan (*language may be form and not matter*) atau sesuatu sistem lambang bunyi yang arbitrer, atau juga suatu sistem dari sekian banyak sistem-sistem, suatu sistem dari suatu tatanan atau suatu tatanan dalam sistem-sistem (Mackey, 1986:12). Menurut Wibowo (2001:3), bahasa adalah sistem simbol bunyi yang bermakna dan berartikulasi (dihasilkan oleh alat ucap) yang bersifat arbitrer dan konvensional, yang dipakai sebagai alat berkomunikasi oleh sekelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan pikiran. Hampir senada dengan pendapat Wibowo, Walija (1996:4), mengungkapkan definisi bahasa ialah komunikasi yang paling lengkap dan efektif untuk menyampaikan ide, pesan, maksud, perasaan dan pendapat kepada orang lain. Pendapat lainnya tentang definisi bahasa diungkapkan oleh Syamsuddin (1986:2), beliau memberi dua pengertian bahasa. Pertama, bahasa adalah alat yang dipakai untuk membentuk pikiran dan perasaan, keinginan dan perbuatan-perbuatan, alat yang dipakai untuk mempengaruhi dan dipengaruhi. Kedua, bahasa adalah tanda yang jelas dari kepribadian yang baik maupun yang buruk, tanda yang jelas dari keluarga dan bangsa, tanda yang jelas dari budi kemanusiaan. Sementara Pengabean (1981:5), berpendapat bahwa bahasa adalah suatu sistem yang mengutarakan dan melaporkan apa yang terjadi pada sistem saraf. Pendapat terakhir

dari makalah singkat tentang bahasa ini diutarakan oleh Soejono (1983:1), bahasa adalah suatu sarana perhubungan rohani yang amat penting dalam hidup bersama.

Jadi, yang dimaksud bahasa dalam buku ini adalah jurusan yang mengkaji sarana atau alat penghubung rasa, keinginan, dan perbuatan-perbuatan untuk mempengaruhi dan dipengaruhi yang amat penting dalam hidup bersama. Mengingat begitu dalamnya pengertian bahasa, maka sangat disayangkan telah terjadi marjinalisasi jurusan bahasa di SMA. \*\*\*

## Keuntungan Pragmatis

Ilmu pengetahuan dikembangkan atas kepentingan rasional yang pragmatis, sehingga kecenderungan pendidikan persekolahan ansih mengembangkan ilmu-ilmu yang mengarah pada ciri-ciri masyarakat modern, seperti Ilmu Pengetahuan Alam yang logis, rasional, lekat dengan teknologi, dan lain sebagainya. Sebagai akibat dari itu munculah ketidakadilan dalam pengembangan ilmu, sehingga pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Bahasa menjadi termarginal. Seperti dalam pemilihan jurusan di Sekolah Menengah Atas, jurusan non-Ilmu Pengetahuan Alam sangat tidak diminati karena dianggap sangat tidak rasional (Fauzi, 2002:37).

Berbarengan dengan itu muncullah berbagai patologi sosial, anomali perikehidupan diberbagai sektor, inflasi menggila, pengangguran meningkat, distribusi pendapatan dan kekayaan tidak merata, serta terkurasnya sumber energi dan sumber alam. Adalah suatu tanda zaman yang mengejutkan bahwa orang-orang yang seharusnya ahli dalam berbagai bidang tidak lagi mampu menyelesaikan masalah-masalah mendesak. Revolusi ilmiah, Pencerahan, dan Revolusi Industri yang menganut kepercayaan bahwa metode ilmiah merupakan satu-satunya pendekatan yang sah terhadap pengetahuan, alam semesta menjadi objek, kehidupan dalam masyarakat merupakan perjuangan persaingan untuk bereksistensi, dan kepercayaan pada pertumbuhan tak terbatas, saat ini menjadi sangat terbatas dan memerlukan revisi yang mendasar (Capra, 1999:8-17).

Di Sekolah Menengah Atas telah terjadi struktur pembagian kelompok siswa yang memilih jurusan IPA, IPS, dan Bahasa. Apabila merujuk teori Strukturalis, secara kasat mata pebagian jurusan yang telah terstruktur sepertinya tidak ada idealisme lain di balik penjurusan itu. Padahal dengan sangat kentara pembagian jurusan telah membedakan "sifat struktur" yang mereka anggap

nyata. Jurusan IPA dianggap lebih unggul dibandingkan dengan Jurusan IPS dan Bahasa, sehingga peminat jurusan IPA jauh lebih banyak dari peminat jurusan IPS dan Bahasa. Godelier dalam Ritzer dan Goodman (2008) menyatakan bahwa:

“...sebuah struktur bukanlah sebuah realitas yang langsung tampak dan karenanya langsung dapat diobservasi, tetapi tingkat realitas berada di balik hubungan nyata antara manusia, dan fungsi hubungan nyata itu merupakan sistem logika yang terletak di bawah, jika ada tatanan yang terletak lebih rendah maka tatanan yang nyata dijelaskan...”

Pembagian jurusan di SMA sesuai Permendiknas No.22 Tahun 2006, tidak memunculkan kesan ada perbedaan antara jurusan IPA, IPS, dan Bahasa, tetapi dalam kenyataan ada perbedaan perlakuan dalam pengembangan ketiga jurusan tersebut. Ada kesan pembiaran dominasi jurusan IPA terhadap Jurusan IPS dan Bahasa. Apabila merujuk pada renungan teoretis Derrida (1967) bahwa “kita” mengalami suatu transisi dari cara berpikir modern ke bentuk pemikiran yang melewati modern (Ritzer, 2008:56-60). Karena itu Derrida menawarkan perspektif yang akhirnya bersifat subversif dan dekonstruktif yang makin lama makin penting dalam kemunculan post-strukturalisme. Sasaran “permusuhan” Derrida melalui post-strukturalismenya adalah *logosentrisme*. Logosentrisme menyebabkan ketertutupan filsafat, dan ketertutupan ilmu pengetahuan manusia. Derrida memusatkan perhatian untuk menghancurkan/membongkar sumber ketertutupan ini. Kalimat yang tepat untuk melukiskan sasaran perhatian Derrida adalah “dekonstruksi logosentrisme” (Ritzer; Goodman, 2008:603-609).

Apabila dianalogkan dalam pemilihan jurusan di Sekolah Menengah Atas sehingga sangatlah tepat dilakukan pembongkaran dengan post-strukturalisme Derrida, terhadap struktur pemilihan jurusan yang ada di Sekolah Menengah Atas. Penjurusan di Sekolah Menengah Atas dibagi menjadi tiga, yaitu IPA, IPS, dan Bahasa, dengan masing-masing jurusan memiliki syarat dan ketentuan-ketentuan yang mengatur untuk bisa menjadi siswa jurusan IPA, IPS, dan Bahasa.

### ***Konstruktivisme***

Konstruktivisme Interpretatif merupakan paham yang menolak positivisme dan postpositivisme yang berusaha memproduksi hukum sosial yang berlaku abadi. Gagasan-gagasan konstruktivisme dimulai oleh Giambattista Vico, seorang epistemolog dari Itali, ia adalah cikal bakal konstruktivisme dalam aliran filsafat. Gagasannya muncul sejak Socrates menemukan jiwa dalam tubuh manusia dan sejak Plato menemukan akal budi dan ide. Gagasan tersebut lebih konkret lagi setelah Aristoteles mengenal istilah informasi, relasi individu, substansi, materi esensi dan sebagainya. Ia mengatakan, manusia adalah makhluk sosial, setiap pernyataan harus dibuktikan kebenarannya, bahwa kunci pengetahuan adalah logika dan dasar pengetahuan adalah fakta (Hidayat, 1998).

Von Glaserfeld, bapak paradigma Konstruktivisme menyatakan bahwa salah satu filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan adalah bentukan (konstruksi) kita sendiri. Pengetahuan bukan tiruan dari realitas, bukan juga gambarandari dunia kenyataan yang ada. Pengetahuan merupakan hasil dari konstruksi kognitif melalui kegiatan seseorang dengan membuat struktur, kategori, konsep, dan skema yang diperlukan untuk membentuk pengetahuan tersebut. Ada tiga macam bentuk konstruktivisme, yaitu Konstruktivisme Radikal, hanya mengakui apa yang dibentuk oleh pikiran manusia. Kaum Konstruktivisme radikal mengesampingkan hubungan antara pengetahuan dan kenyataan sebagai kriteria kebenaran. Pengetahuan bagi mereka tidak merefleksikan suatu realitas ontologisme objektif, namun sebagai sebuah realitas yang dibentuk pengalaman seseorang. Pengetahuan selalu merupakan konstruksi dari individu yang mengetahui dan tidak dapat ditransfer kepada individu lain yang pasif. Karena itu konstruksi harus dilakukan sendiri olehnya terhadap pengetahuan itu. Sedangkan lingkungan adalah sarana terjadi konstruksi; Konstruktivisme Biasa, mengambil semua konsekuensi konstruktivisme dan memahami pengetahuan sebagai gambaran dari realitas. Kemudian pengetahuan individu dipandang sebagai suatu gambaran yang dibentuk dari realitas objek dalam dirinya sendiri: Konstruktivisme Sosial;

konstruktivisme dilihat sebagai sebuah kerja kognitif individu untuk menafsirkan dunia realitas yang ada, karena terjadi relasi sosial antara individu dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Kemudian individu membangun sendiri pengetahuan atas realitas yang dilihatnya itu, berdasarkan pada struktur pengetahuan yang telah ada sebelumnya (Eriyanto, 2007).

Dengan merujuk teori di atas maka pengetahuan seseorang dapat terproduksi sebagai akibat dari adanya beberapa faktor yang ada di sekitar individu, seperti negara, kegiatan industri dan bisnis, sekolah, media informasi, masyarakat, dan keluarga. Untuk ilmu pengetahuan yang diproduksi di dalam sistem persekolahan dipengaruhi oleh, Ideologi, Guru, Materi Pelajaran, Metode dan Media Pembelajaran, serta Tujuan yang ingin dicapai. Apabila dikaitkan dengan sistem penjurusan dan marjinalisasi Ilmu Pengetahuan Sosial dan Bahasa dalam sistem persekolahan, maka dapat diasumsikan telah terjadi proses campur tangan beberapa pihak untuk mempengaruhi siswa dalam menentukan pilihan jurusan, telah terjadi konstruksi “kesepakatan dan dominasi” yang disebut dengan istilah hegemoni.

Hegemoni dikembangkan oleh Gramsci (1891—1937) seorang Marxis Italia yang sangat terkenal dengan pemikirannya tentang kekuasaan yang ditulisnya sewaktu dalam penjara. Inti pemikiran Gramsci, adalah menyoroti mengapa dan bagaimana negara modern bisa mendapatkan konsensus atas kekuasaannya terhadap masyarakat. Pemikiran Gramsci ini dipengaruhi oleh teori-teori sosial Barel dan Benedetto Coroce. Menurut Coroce sistem kekuasaan yang didasarkan pada konsensus yang dilaksanakan oleh negara disebut hegemoni. Pandangan ini sangat berbeda dengan pandangan Maxis ortodok yang memandang sebuah revolusi klas. Akan tetapi hegemoni menggabungkan dua hal, yakni kesepakatan dan kekuatan tergantung kepada situasi suatu masyarakat (Tilaar, 2003:76).

Berangkat dari uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa hegemoni bukanlah selamanya merupakan hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, melainkan dapat pula berupa hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis (Gramsci:1976:144). Teori hegemoni

digunakan untuk mengkaji permasalahan penelitian ini karena teori ini mempunyai relevansi. Dalam proses pembelajaran di sekolah, bisa saja guru, kepala sekolah, komite sekolah, dan unsur-unsur lainnya, menggunakan kepemimpinan moral dan intelektual untuk mempengaruhi dan mengkonstruksi peserta didik guna mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan modal budaya, ekonomi, dan modal kekuasaan pihak manajemen sekolah dengan mudah bisa mempengaruhi pikiran siswa termasuk orang tuanya agar mengikuti kehendak sekolah.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Bourdieu (1974:39) bahwa budaya elite begitu dekat dengan budaya sekolah sehingga anak-anak dari kelas menengah bawah (dan terlebih lagi kelas pekerja tani dan pekerja industri) hanya dapat "sesuatu" gaya, selera, dan kecerdasan dengan usaha yang sangat keras. Dengan cara ini habitus dominan ditransformasi menjadi bentuk modal budaya yang diterima begitu saja oleh sekolah-sekolah di samping bertindak sebagai saringan yang paling efektif dalam proses-proses reproduktif sebuah masyarakat hierarkhis.

Selain itu, dengan modal pengetahuan dan kuasa yang dimiliki, pihak sekolah juga dengan mudah dapat melakukan hegemoni terhadap para peserta didik dan orang tuanya, termasuk dalam hal pemilihan jurusan. Misalnya, dengan menjargonkan bahwa "jika memilih jurusan IPA kamu bisa melanjutkan ke berbagai jurusan di perguruan tinggi" dapat membuat anak yang sebenarnya mempunyai talenta di bidang Ilmu Pengetahuan Sosial atau Bahasa, akhirnya ikut juga memilih jurusan IPA. Hal ini sejalan dengan gagasan Foucault (2002) bahwa tidak ada pengetahuan tanpa kuasa dan tidak ada kuasa tanpa pengetahuan. Melalui pengetahuan dan kuasa yang dimiliki inilah mereka (baca: guru, kepala sekolah, dan komite sekolah) dapat membuat berbagai bentuk peraturan untuk mendominasi dan menghegemoni siswa dan orang tuanya dalam berbagai hal.

Berbicara masalah kekuasaan cukup menarik, terutama dalam kehidupan masyarakat modern. Jika meminjam gagasan Tilaar (2003:72) maka dapat dikatakan bahwa seluruh aspek kehidupan manusia diliputi oleh pengaruh kekuasaan. Dalam



kehidupan sehari-hari kita diatur oleh berbagai jenis kekuasaan, seperti kekuasaan militer, kekuasaan ekonomi, kekuasaan politik, dan berbagai macam kekuasaan lainnya. Namun, secara garis besar teori mengenai sifat kekuasaan dapat digolongkan ke dalam dua kategori besar, yaitu organik dan mekanistik. Termasuk ke dalam teori organik, adalah beberapa pandangan seperti tampak dalam pemikiran Plato dan Arestoteles, sedangkan pemikiran yang dapat dikategorikan ke dalam teori yang mekanistik adalah teori kontrak sosial yang dikemukakan oleh John Lock. Dalam teori organik, kekuasaan merupakan lembaga etis dengan tujuan moral. Teori organik beranggapan bahwa kesatuan politik seperti negara merupakan tuntutan dari dalam manusia untuk bersosialisasi dengan orang lain. Sebagai makhluk rasional manusia menyadari bahwa kekuasaan yang membuat hidup menjadi mungkin dan bermanfaat bagi mereka. Kesatuan moral atau sosial berhasil dari kehendak kolektif untuk berhubungan bersama-sama dan memfungsikan diri sebagai anggota masyarakat.

Sementara pandangan mekanistik cenderung mengabaikan sifat sosial manusia dan memandang kekuasaan sebagai suatu lembaga artifisial yang didasarkan atas tuntutan-tuntutan individu. Teori ini menganggap kekuasaan sebagai sarana atau mesin kesepakatan antara individu untuk memuaskan keinginan-keinginannya. Dalam konteks pemilihan jurusan di SMA misalnya, teori mekanistik ini tampaknya dapat menggambarkan kondisi yang ada. Sebab kuasa yang dimiliki oleh pihak manajemen sekolah secara mekanik dapat dimanfaatkan untuk mempengaruhi pikiran para siswanya agar dapat memenuhi tuntutan-tuntutan individu yang merupakan bagian dari keinginan individu itu sendiri. Misalnya, bagaimana para guru dapat memengaruhi pikiran para siswa agar cenderung memilih jurusan yang “modern”, karena di situ ada peluang untuk saling memperebutkan dan mempertukarkan modal, yakni antara modal budaya (intelektual) dan modal ekonomi. Misalnya, guru memberi les dan dari pemberian les itu, guru akan mendapat imbal jasa berupa modal ekonomi. Dari gambaran tersebut dapat dipahami bahwa di balik sistem pemilihan jurusan dan

marginalisasi jurusan IPS dan Bahasa di SMA, ternyata ada ideologi, yakni ideologi pasar. Dalam konteks penjurusan biasanya, anak-anak (baca: para siswa) cenderung menganggap jurusan IPA lebih baik dan lebih unggul dari pada jurusan IPS dan Jurusan Bahasa. Ketika siswa menganggap bahwa Jurusan IPA lebih unggul dari dua jurusan lainnya, maka di situ ada peluang bagi para guru untuk menggiring anak-anak mengikuti les pelajaran dalam mata pelajaran IPA. Akibatnya, orang tua siswa harus rela membayar lebih untuk keperluan les mata pelajaran IPA, meskipun sebenarnya anak-anak dari segi kemampuan akademik untuk mengikuti pelajaran secara reguler tidak ada masalah (telah terjadi komodifikasi pendidikan). \*\*\*



## PERGUMULAN IDEOLOGI

**P**ara praktisi pendidikan seperti guru, dosen, pelatih (*trainer*), dan para pemandu pelatihan (*fasilitator*) di berbagai arena pendidikan formal maupun nonformal, banyak yang tidak sadar bahwa ia tengah terlibat dalam suatu pergumulan politik dan ideologi melalui arena pendidikan. Umumnya orang memahami pendidikan sebagai suatu kegiatan mulia yang selalu mengandung kebajikan dan senantiasa berwatak netral. Namun menurut Paulo Friere dan Ivan Illich (1970) dalam Fakhri (2009:x), bahwa pendidikan yang selama ini disakralkan, dimuliakan, penuh kebajikan ternyata mengandung juga penindasan. Seperti tertuang dalam bukunya Freire, *Pedagogy of the Oppressed*, tentang realitas kehidupan termajinal yang dialami sebagian masyarakat dalam hal mendapatkan pendidikan yang memadai dan perlu “dilawan” (dicarikan jalan keluar) melalui pendidikan itu sendiri. Dalam konteks pikiran seperti di atas, yang dimaksud dengan penindasan adalah situasi/kondisi terjadinya proses dehumanisasi sebagai lawan dari humanisasi yang merupakan hakikat serta harkat keberadaan manusia (Mansur Fakhri dalam Oneil, 2008:x; Widja, 2009:44).

Kritik terhadap dunia pendidikan datang dari pengaruh pikiran kritis terhadap Kapitalisme di Amerika Serikat pada masa setelah tahun tujuh puluhan. Samuel Bowles, melakukan analisis politik ekonomi terhadap pendidikan. Pendidikan merupakan reproduksi terhadap sistem kapitalisme. Pandangan yang sangat pesimistis ini melahirkan aliran reproduksi dalam pendidikan. Pandangan yang sangat bertentangan dengan pandangan Freire, yang menyatakan bahwa pendidikan adalah penyadaran kritis yang akan memproduksi resistensi dan kritik terhadap proses dehumanisasi akibat kapitalisme. Kedua pemikiran itu menyadarkan banyak orang tentang tidak mungkinnya pendidikan netral, melainkan memerlukan syarat akan agenda ideologi. Penganut paham kritis ini menyatakan hakikat

pendidikan pada dasarnya adalah memanusiakan manusia. Pendidikan harus memainkan peran kritis untuk menyadarkan manusia pada proses dehumanisasi tersebut, menuju pada dunia yang lebih adil, sebagai prasyarat lingkungan sosial yang memanusiawikan. Dalam perspektif kritis, urusan pendidikan adalah melakukan refleksi kritis terhadap *'the dominant ideology'* kearah transformasi sosial, merupakan wahana untuk mengkritisi kebenaran yang telah ada dalam kontek dialogis. Tugas utama pendidikan adalah menciptakan ruang agar sikap kritis terhadap sistem dan struktur ketidakadilan, serta melakukan dekonstruksi dan advokasi menuju sistem sosial yang lebih adil (Mansour Fakih dalam O'neil, 2009:xii).

Dekonstruksi dalam konteks teori dapat dikatakan merupakan sebuah tindakan dari subjek untuk membongkar sebuah objek yang tersusun dari berbagai unsur. Sebagai sebuah tindakan yang dilakukan si subjek tentu tidak kosong, dia mesti melibatkan pelbagai cara atau metode, yaitu metode subjek membongkar suatu objek yang memang patut dibongkar. Tokoh terpenting dari teori ini adalah Jacques Derrida, yakni tokoh filsafat Prancis kelahiran Aljazair pada tahun 1930. Dia dibesarkan dalam tradisi pemikiran era 1950-an sampai 1970-an. Era ini dimeriahkan oleh pergeseran besar-besaran dari pemikiran modernitas ke pemikiran post-modernitas dan dari strukturalisme ke post-strukturalisme. Dalam teori kontemporer dekonstruksi sering diartikan sebagai pembongkaran, pelucutan, penghancuran, penolakan, dan berbagai istilah lain dalam kaitannya dengan penyempurnaan arti semula. Namun, dalam konteks ini istilah pembongkaran, penghancuran, dan penolakan sering diberikan arti secara leksikal sehingga karya sastra sebagai objek benar-benar dianggap sebagai benda mati yang siap untuk dibongkar/dibedah dan dipisah-pisahkan sehingga lepas dari totalitasnya semula. Padahal sebagai sebuah teori dekonstruksi sesungguhnya mengandung arti sebuah pengurangan atau penurunan intensitas konstruksi itu sendiri. Misalnya, dalam mendekonstruksi strukturalisme, kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus adalah mengurangi intensitas oposisi biner, sehingga unsur-unsur yang dominan tidak selalu mendominasi

unsur-unsur yang lain. Sebaliknya, unsur-unsur yang semula selalu terlupakan, terdegradasikan, dan termarginalisasikan, seperti kelompok minoritas, kelompok yang lemah, kaum perempuan, tokoh-tokoh komplementer, kawasan kumuh, dan bahkan jurusan IPS dan Bahasa dalam proses pembelajaran di sekolah, dapat diberikan perhatian yang memadai, bahkan secara seimbang dan proporsional (Ratna, 2005:252—253; Noris, 2003:5—6).

Kenyataan menunjukkan bahwa dalam manajemen persekolahan dan manajemen kelas tidak terjadi penundaan oposisi biner yang hanya mengakui perbedaan, tetapi tetap memunculkan dikotomi. Hal ini berakibat pada status atau kesan “Sekolah yang unggul adalah sekolah yang mampu melahirkan siswa yang banyak jurusan IPA-nya”. Sedangkan dalam manajemen kelas juga muncul kesan “Semakin bagus mata pelajaran Non IPS dan Bahasanya (baca MIPA)” semakin pintar anak tersebut, begitu pula sebaliknya. Sehingga manajemen sekolah dan kelas menciptakan jam tambahan belajar pada mata pelajaran MIPA saja, mata pelajaran IPS dan Bahasa termajinalkan. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari berbagai faktor yang memengaruhi manajemen sekolah dan kelas, seperti Ideologi Dominan (Negara, Pancasila, Masyarakat, Gender, dan Oposisi Biner), Dunia Industri, dan Masyarakat Politik. Dengan meminjam istilah Bourdeu dalam Ritzer, (2008) bahwa ada dinamika aktor dalam arena yang mampu berimprovisasi secara teratur, walaupun produk yang dihasilkan tanpa sengaja. Keunggulan seharusnya diwujudkan melalui pembinaan utuh pribadi manusia, yaitu: pengembangan bakat-bakat fisik, psikis, emosional, intelektual, moral, spiritual, dan budaya secara harmonis tidak parsial. Dengan merujuk konsep *Tri Hita Karana*, tiga penyebab kesejahteraan (*Parhyangan, Pawongan, dan Palemahan*), serta konsep *Desa Kala Patra*, tempat, waktu, dan, keadaan, yaitu konsep dalam keseragaman pasti ada keragaman, dan dalam persatuan pasti ada perbedaan, maka pendidikan seharusnya dapat juga mencerdaskan peserta didik pada “wilayah” *parhyangan, pawongan, dan palemahan*, serta dapat memahami tentang tempat (posisi), waktu, dan keadaan. *Parhyangan* adalah hubungan antara manusia dengan Sang

Pencipta Tuhan Yang Maha Esa, itu artinya bahwa pendidikan harus dapat meningkatkan *srada* dan *bhakti* kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak menjadikan peserta didik sebagai “penguasa atas alam semesta”, mengejar “pertumbuhan”, dan tidak hanya mengejar angka nilai yang tinggi. *Pawongan* yaitu konsep tentang harmonisasi antara manusia dengan manusia, *Vasu Deva Kutumbhakam* yakni semua manusia di dunia bersaudara. Dengan demikian tidak ada oposisi biner yang diproduksi dari proses pendidikan, manusia semua sama. Sedangkan *Palemahan* adalah konsep tentang hubungan antara manusia dengan alam. Dari kemajuan pendidikan yang menghasilkan pengetahuan, bagaimana pendidikan dapat meningkatkan kualitas sumber daya alam, bukan sebaliknya. Dari padanya diharapkan peserta didik dimampukan untuk mengemban tanggung jawab yang benar, menggunakan kebebasan yang tepat, dan terlibat aktif dalam kehidupan masyarakat. Peserta didik diharapkan dapat memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan *manah* (rasa) yang diakronimkan menjadi, *school*, *skill*, dan *skel* (bahasa Bali, manah) (Mantra, 1993:14-15).

Menurut Suparno (2009:3), pendidikan di Indonesia, terlalu menekankan segi kognitif, sedangkan segi spiritual, emosional, sosial, fisik, dan seni kurang mendapat tekanan. Akibatnya anak didik berkembang kurang menyeluruh. Dalam pembelajaran hanya ditekankan hanya *to know* (untuk tahu), sedangkan prinsip *to do* (melakukan), *to live together* (hidup bersama), *to be* (menjadi) kurang menonjol. Yang terpenting dapat “angka nilai” yang besar, dan jurusan yang “menjajikan” sesuai dengan “janji” pencerahan dan modern. Akibatnya muncul krisis sosial di dunia pendidikan. Pendidikan menjadi komoditi. Sekolah menjadi lembaga “menara gading”, dan sebagai simbol status sosial. Muncullah bimbingan-bimbingan belajar dengan membudayakan budaya bujuk rayu dan ekonomi libido untuk mempengaruhi anak didik diajak terbang ke dunia hiperrealitas. Ikut bimbingan, pasti dapat nilai bagus, ikut bimbingan pasti diterima di lembaga pendidikan berkualitas, dan bergengsi, tamat studi, kerja dapat duit banyak. Maka secara tidak langsung terbangunlah simulacra dalam proses pendidikan. Hal ini tentu

sangat bertentangan dengan prinsip Pendidikan Humaniora, yang memanusiakan manusia muda seutuhnya. Menurut Supratiknya (2009:3) pendidikan telah berubah haluan dari wahana untuk mengkritisi kebenaran yang telah ada dalam konteks dialogis, menjadi berfokus pada hal-hal yang praktis, tidak berpegang kredo *formation intellectualis* (tujuan keutamaan-keutamaan, dan pembudayaan. Hal yang sama juga diungkap Marianti (2009:3) yang menyatakan bahwa pendidikan bukan semata-mata masalah otak, tetapi merupakan upaya pembinaan dan pengembangan seluruh aspek pribadi anak didik yang meliputi aspek: *visual/spatial, verbal/linguistic, mathematical/logical, bodily/kinesthetic, musical/rhythmic, intrapersonal, interpersonal, naturalist, dan existential*. Menurutnya lebih bangga mencetak anak-anak yang tidak terlalu hebat tetapi peduli orang lain, daripada anak yang hebat otaknya tapi hanya peduli pada nasibnya sendiri.

Dalam proses penelitian ini peneliti ingin memahami dan mengeksplorasi mengapa dalam sistem pemilihan jurusan bagi siswa SMA, khususnya SMA favorit di Denpasar ada kecenderungan para siswa lebih tertarik untuk memilih jurusan IPA, dari pada jurusan IPS dan Bahasa. Bahkan dalam kenyataannya Jurusan IPS dan Bahasa sering dimarjinalkan. Padahal seharusnya para pakar pendidikan dan pendidik profesional, diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya para siswa bahwa antara jurusan IPA, IPS, dan Bahasa sebenarnya mempunyai kedudukan yang sama. Jika mengacu pada pendekatan pedagogis, khususnya pandangan nativisme oleh Schopenhauer serta pengikutnya yang beranggapan bahwa anak-anak sejak dilahirkan telah memiliki kemampuan-kemampuan khusus dan kemampuan ini tinggal dikembangkan saja (Tilaar, 1999:19), maka seharusnya tidak terjadi marjinalisasi jurusan IPS dan Bahasa, bagi para siswa SMA.

Jika berpijak pada pandangan Schopenhauer, maka para siswa SMA di dalam memilih jurusan, seharusnya lebih didasarkan atas pertimbangan bakat/kemampuan yang telah dimiliki oleh siswa itu sendiri dari pada pertimbangan status sosial (gengsi). Meskipun pandangan pedagogisme ini juga mempunyai ke-



lemahan, karena anak-anak seakan-akan diisolasi dari kehidupan bersama, namun dalam aplikasinya teori ini bisa didukung pula oleh teori konvergensinya William Stern, yang mengatakan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor internal (bawaan) dan faktor eksternal, yaitu faktor lingkungan. Seperti keluarga, sekolah, teman sepermainan, media informasi, dunia industri, dan kebijakan pemerintah (Negara). Namun, yang terjadi di SMA Negeri 1 Denpasar dan SMA Dwijendra Denpasar para siswa di dalam pemilihan jurusan justru mengingkari teori nativismenya Schopenhauer dan teori Konvergensinya William Stern. Dalam hal memilih jurusan para siswa cenderung terjebak pada politik ideologi modernisme, dibandingkan dengan hakikat perkembangan diri mereka sendiri. Akibatnya, para siswa SMA Negeri 1 Denpasar dan SMA Dwijendra Denpasar, lebih cenderung memilih Jurusan IPA dari pada IPS dan Bahasa sehingga dua jurusan yang disebut belakangan menjadi termarginalkan. Padahal pemerintah sebagai regulator dalam menjalankan politik pendidikan seharusnya mampu memposisikan semua jurusan yang dikembangkan di tingkat sekolah menengah ini mempunyai posisi yang sama.

Akan tetapi yang terjadi dalam berbagai kegiatan pendidikan justru hal yang sebaliknya, yakni di dalam berbagai kegiatan pendidikan tidak jarang ada kekuasaan negara (politik pendidikan) yang menyusupi kegiatan pendidikan dalam berbagai bentuknya, termasuk dalam hal pemilihan jurusan (Tilaar 2003:85). Semua ini terkonstruksi (terbangun) melalui dominasi dan hegemoni dalam proses pengambilan keputusan. Mekanisme ini menjadi semakin mapan ketika, masyarakat sebagai *social control*, diam-diam ikut terjebak pada politik tontonan, yang menganggap bahwa Jurusan IPA lebih unggul dari Jurusan IPS dan Bahasa. Selain itu, komite sekolah sebagai badan yang seharusnya mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat, dalam melahirkan berbagai kebijakan yang transparan, *accountable*, dan demokratis dalam bidang pendidikan, ternyata belum bisa berfungsi secara optimal, bahkan cenderung masih sebatas slogan saja (Hasbullah, 2006:90). Semua ini dapat berakibat terjadinya hegemoni dan dominasi

pihak pengelola sekolah terhadap para siswa dan orang tuanya dalam berbagai kegiatan pendidikan dan tidak terkecuali dalam hal pemilihan jurusan. Dalam kenyataannya hal ini tampak tidak ada permasalahan, tetapi jika mengacu pada pandangan Gramsci, yang mengatakan bahwa proses hegemoni itu terjadi apabila ideologi dari golongan yang mendominasi telah diambil alih secara sukarela oleh yang didominasi.

Demikian halnya dengan sistem pemilihan jurusan di SMA Negeri 1 Denpasar dan SMA Dwijendra Denpasar, dengan pandangan yang mainstream bahwa jurusan IPA lebih unggul dari jurusan IPS dan Bahasa, membuat pihak sekolah secara leluasa dapat melakukan "permainan ideologi" dalam arti membuat jargon-jargon yang heroik tentang keunggulan dari jurusan IPA, tanpa banyak disadari oleh para siswa dan orang tuanya. Padahal di balik, jargon tersebut ada suatu ideologi yang tersembunyi, yakni ideologi pasar atau keinginan untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi (melakukan kegiatan bisnis). Pasalnya, hanya pada mata pelajaran kelompok IPA yang memberi kemungkinan bagi para siswa mau mengikuti les pelajaran, sementara pada kelompok mata pelajaran IPS dan Bahasa kemungkinannya sangat kecil.

Mengingat terselubungnya ideologi tersebut dan bersifat sangat sistemik yang menurut Tilaar (2003:85) disebut *hidden curriculum*, maka masyarakat, orang tua siswa, dan bahkan LSM pun sangat sulit untuk mengkritisi kebijakan sekolah yang dalam implementasinya bukan tidak mungkin dapat mengarah pada komersialisasi pendidikan. Dalam konteks penelitian ini, penulis sebenarnya ingin mendekonstruksi ideologi yang tersembunyi di balik berbagai kebijakan sekolah baik yang berwujud objektif (terang-terangan) maupun yang subjektif atau secara tidak disadari telah mengarahkan kegiatan-kegiatan pendidikan dalam bentuk *hidden curriculum*.

Jadi, penelitian ini ingin memahami, mengeksplorasi, dan mendekonstruksi berbagai kebijakan sekolah termasuk kebijakan dalam sistem pemilihan jurusan dan terjadinya marginalisasi jurusan IPS dan Bahasa di SMA Negeri 1 Denpasar, dan SMA Dwijendra Denpasar. Dengan mendasarkan diri pada

berbagai konsep dan kerangka teori sebagaimana dijabarkan sebelumnya, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap kebijakan sekolah, dan mampu menjustifikasi serta melakukan advokasiterhadap objek-objek yang dimarjinalkan. Hal ini sejalan dengan sifat penelitian kajian budaya, yakni merupakan bentuk perlawanan terhadap dominasi kekuasaan sebuah tradisi ilmu pengetahuanitu sendiri. Oleh karena itu, kajian budaya muncul dari pemikiran sekelompok orang yang meyakini bahwa bangun teori adalah sebuah praktik politik manusia sehari-hari (Barker, 2004:367). Dengan demikian, maka ilmu pengetahuan bagi kajian budaya adalah sesuatu yang tidak netral, dan tidak objektif tetapi berhubungan dengan posisi tempat seseorang berbicara, kepada siapa sasaran pembicaraannya, dan situasi tertentu yang melingkari.\*\*\*

## PROFIL SMAN 1 DENPASAR

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena bisa memajukan kebudayaan dan mengangkat derajat bangsa di mata dunia internasional. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dinyatakan Daoed Yoesoef (dalam Susilo, 2006:13) bahwa “pendidikan merupakan alat yang sangat menentukan dalam rangka mencapai kemajuan di segala bidang kehidupan, termasuk memilih dan membina hidup yang baik sesuai dengan martabat manusia”.

Upaya untuk memajukan pendidikan di negeri ini, termasuk Bali sebenarnya telah tampak sejak pemerintah kolonial. Hal ini terlihat jelas dari pembukaan sekolah-sekolah di Bali. Walaupun pada mulanya hanya ditujukan untuk menyiapkan tenaga-tenaga administratif kolonial, tetapi dalam perkembangan selanjutnya juga melahirkan kelas baru dalam masyarakat, yaitu munculnya golongan elite modern (Agung, 2006:4). Usaha-usaha kolonial untuk memperlancar jalannya roda pemerintahan pada waktu itu, disamping meningkatkan mutu pelayanan melalui pendidikan, seperti membuka sekolah-sekolah, kursus-kursus, dan sistem *magang*, pemerintah juga mendirikan gedung-gedung perkantoran, seperti kantor kontrolir, *landschap* untuk pemerintah pribumi, rumah sakit, kantor pegadaian, penjara, rumah dinas dokter, kantor pos, gardu listrik, saluran air minum, dan sebagainya.

Menurut Kartodihardjo dkk (t.t), proses modernisasi yang bersamaan dengan masuknya kebudayaan Barat, telah menimbulkan perubahan orientasi, sikap, dan perilaku. Semua itu tampak pada gaya hidup seseorang, yaitu suatu totalitas dari berbagai tatacara adat kebiasaan, mentalitas dari suatu golongan sosial yang secara menyeluruh mempengaruhi kehidupannya sehari-hari.

Upaya-upaya untuk mengembangkan dan memajukan

tingkat pendidikan masyarakat tampaknya terus dilakukan, baik oleh pemerintah, yayasan (swasta) maupun pihak perorangan hingga di alam kemerdekaan dewasa ini. Seperti yang dilakukan pemerintah pada tanggal 1 Agustus 1960 membuka SMA Negeri Denpasar, dan peresmiannya dilakukan pada tanggal 8 Agustus 1960. Pada saat mulai beroperasi SMA Negeri Denpasar membuka tiga jurusan yaitu Jurusan A, Jurusan B, dan Jurusan C. Selanjutnya tahun ajaran 1964/1965 SMA Negeri Denpasar dijadikan dua, yaitu SMA Negeri 1 Denpasar, dan SMA Negeri 2 Denpasar. Setelah G 30 S/PKI, SMA Negeri 2 Denpasar dipindah ke Wangaya, sedangkan SMA Negeri 1 tidak dipindah tetap menempati tempat semula sampai sekarang.

Mulai tahun ajaran 1996/1997 SMA Negeri 1 mulai membuka kelas unggul sebanyak satu kelas. Tahun ajaran 1997/1998 membuka kelas unggul tiga kelas, dan sejak tahun ajaran 1998/1999 SMA Negeri 1 Denpasar ditetapkan sebagai sekolah unggulan, dan melaksanakan kurikulum KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) secara terbatas mulai tahun 2002/2003 dan Kurikulum Tingkat Satuan Pelajaran (KTSP) mulai tahun 2007/2008 sampai sekarang.

Kemudian dalam perkembangannya sampai saat ini terutama dalam mengantisipasi tantangan global pada millennium III SMA Negeri 1 Denpasar menjadi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) sejak tahun 2005/2006 dengan membuka satu kelas dan pada tahun 2007/2008 semua kelas X sebagai kelas RSBI. Di samping itu SMA Negeri 1 Denpasar memandang perlu memberikan perhatian khusus dan layanan kepada siswa yang memiliki kemampuan, kecerdasan, ataupun bakat yang luar biasa dalam bentuk perlakuan pendidikan pengajaran di atas rata-rata dengan membuka program kelas percepatan sejak tahun 2001/2002, sesuai dengan pasal 8 ayat 2 dan pasal 24 ayat 1 UU no.2 tahun 1989. Dalam rangka itu SMA Negeri 1 Denpasar memiliki konsep SMA Negeri 1 "BERSATU" (Bersih, Rapi, Aman, Tertib, dan Bermutu) dengan pemikiran pengelolaan sekolah adalah bekerja, memberi yang terbaik adalah yang terpenting, SMA Negeri 1 Denpasar adalah klinik pendidikan, seluruh masyarakat menaruh perhatian terhadap

nama baik SMA Negeri 1 Denpasar.

Untuk mewujudkan hal itu SMA Negeri 1 Denpasar memiliki filosofi dan sekaligus dijadikan sebagai motto yaitu “KARMANY EVA DHIKARASTE MAPHALESU KADACANA” yang artinya bekerja terlebih dahulu sesuai dengan kewajiban tanpa mempertimbangkan hasilnya.

Saat ini SMA Negeri 1 Denpasar menyelenggarakan pendidikan berdasarkan visi dan misi. Visi SMA Negeri 1 Denpasar adalah “Mewujudkan SMA Negeri 1 Denpasar sebagai Sekolah Unggul dalam Mutu, Berbudaya, dan Berwawasan Global” dengan ciri-ciri : unggul dalam perolehan Nilai Ujian Akhir Nasional, unggul dalam kelulusan SPMB, unggul dalam lomba sains, unggul dalam kreativitas, unggul dalam lomba karya ilmiah, unggul dalam disiplin, unggul dalam budaya, unggul dalam aktivitas agama. Sedangkan Misinya adalah melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga setiap siswa berkembang secara optimal sesuai potensi yang dimiliki, menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh warga sekolah, mendorong dan membantu setiap siswa untuk mengenali dirinya sehingga dapat dikembangkan secara optimal, menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut dan juga budaya bangsa sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak, menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga sekolah, *stake holder* sekolah dan memiliki kompetensi dasar mata pelajaran, kompetensi umum rumpun mata pelajaran, dan kompetensi tamatan (Selayang Pandang SMA Negeri 1 Denpasar, 2009:1-3).

Memperhatikan Visi dan Misi dari SMA Negeri 1 Denpasar, seiring dengan berubahnya waktu, ketika perekonomian Indonesia diwarnai oleh sistem ekonomi pasar pada akhir tahun 1960-an atau awal tahun 1970-an tampaknya sulit juga dihindari oleh lembaga-lembaga pendidikan termasuk SMA Negeri 1 Denpasar yang akhirnya juga terperangkap ke dalam sistem kapitalisme. Lebih-lebih pada era sekarang kehidupan masyarakat ditandai oleh semakin kukuh dan tegaknya filsafat hidup positivisme-materialisme dan gaya hidup konsumerisme-kapitalisme. Sistem kapitalisme sebagai sebuah pranata ekonomi-politik baru

yang muncul di Bali, yakni ditandai dengan runtuhnya pranata feodalisme agraris yang menandakan terjadinya transformasi struktur kelas. Sistem ini sebenarnya direproduksi oleh orang asing, dalam hal ini menurut orang Bali disebut “wong seberang” (Dwipayana, 2001:37).

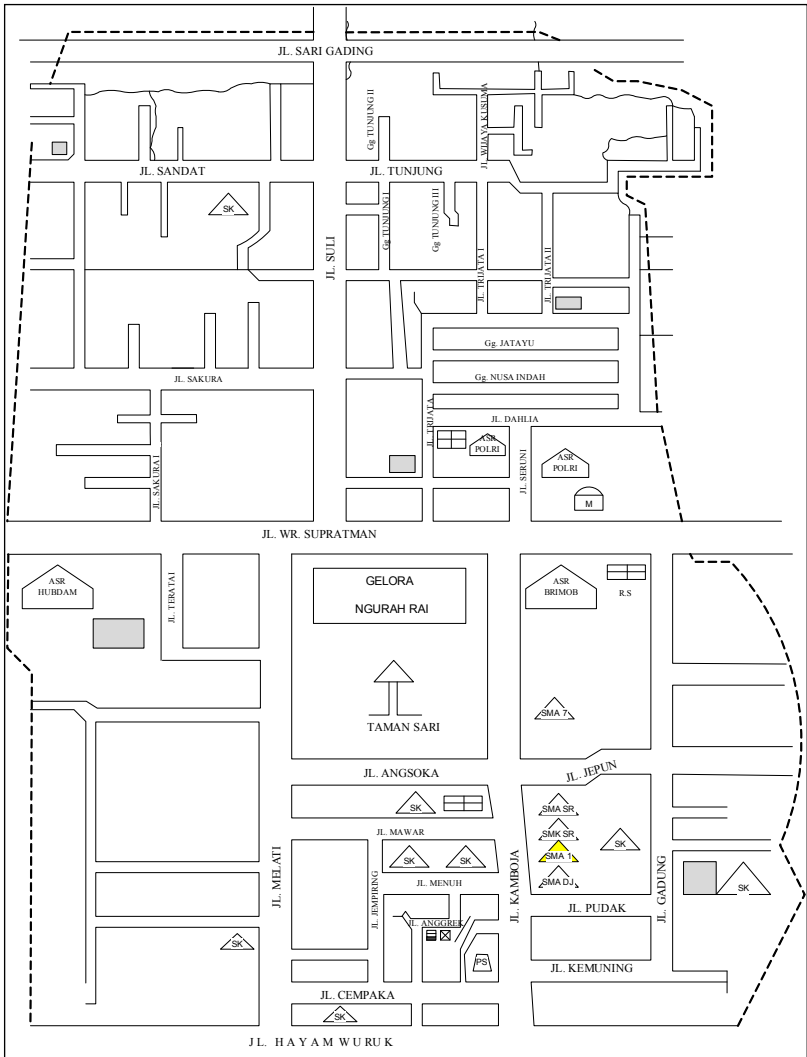
Dunia citra yang terbangun sebagai akibat dari sikap konsumerisme-kapitalisme memungkinkan terbangunnya ruang-ruang fatamorgana politik yang ditawarkan oleh era informasi. Seperti Visi-Misi SMA Negeri 1 Denpasar yang ditawarkan ke publik. Sudah sangat jelas ada menyebutkan unggul dalam lomba sains, unggul dalam budaya, namun dalam kenyataannya tidak terjadi pembinaan jurusan yang seimbang antara jurusan yang membidangi Sains (IPA) dengan yang non Sains (IPS) maupun humaniora (Bahasa). Piliang (2005:61) menyebutkan ketika aktor politik memasuki dunia citra yang ditawarkan oleh era informasi (Visi-Misi) dan tak mampu melakukan refleksi dan reinterpretasi terhadap hakikat politik di dalamnya untuk menemukan maknanya yang hakiki, maka aktor politik dapat jatuh ke dalam dunia tanpa makna, dan akhirnya aktor politik kehilangan dirinya sebagai subjek. Hal ini dapat dilihat dari visi-misi SMA Negeri 1 Denpasar dan kenyataan yang ada yaitu termajinalnya jurusan IPS dan Bahasa. Telah terjadi perbedaan yang nyata antara ungkapan retorika Visi-Misi dengan kenyataan yang ada. Unggul dalam budaya, tetapi jurusan pendukung kebudayaan (IPS) dan Bahasa justru terpinggirkan. Bagaimana warung dagangan, mana yang laku itu yang lebih banyak dijual, yang mana tidak laku itu dikurangi.

Terkait dengan hal itu Piliang (2004:364) menyatakan bahwa pendidikan telah terjebak pada mekanisme pasar bebas, menjadikan prinsip-prinsip pasar sebagai prinsip dasar. Pendidikan dikemas menjadi komoditi untuk dikonsumsi. Pendidikan berkembang menjadi sebuah institusi yang memiliki nilai tukar (*exchange value*) lewat penciptaan berbagai citra/*image* (lihat Visi-Misi)

SMA Negeri 1 Denpasar terletak di wilayah Desa Daging Puri Kanging, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Kurang lebih 2 km sebelah timur pusat Kota Denpasar, dan sekitar 4










km sebelah utara pusat pemerintahan Provinsi Bali. Dilihat dari letak geografisnya, SMA Negeri 1 Denpasar sangat strategis karena terletak di pinggir jalan di pusat kota, tidak jauh dari puast pemerintahan Kecamatan Denpasar Utara, juga tidak jauh dari pusat pemerintahan Kota Denpasar, maupun pemerintahan Provinsi Bali, seperti peta berikut ini.

Peta Lokasi SMA Negeri 1 Denpasar





## Keterangan

	: Sungai		: SMANegeri 1 Dps
	: Batas Desa		: Masjid
	: Kantor Kepala Desa		: Pasar
	: Kantor Kepala Dusun		: Rumah Sakit
	: Pura		

Letak sekolah yang strategis, membuat SMA Negeri 1 Denpasar mudah diakses oleh masyarakat. Letak yang strategis seharusnya membuat pemberdayaan sekolah ini dapat dioptimalkan. Oleh karena pemberdayaan sekolah pada umumnya, menurut Danim (2003:184), terkait langsung dengan sumber daya sekolah itu sendiri, baik internal, maupun eksternal. Secara Internal sumber daya sekolah dapat merubah sumber daya manusia (SDM), sumber daya material, sumber daya fasilitatif.

Sumber daya material dapat berupa finansial (uang) dan dapat pula berupa berbagai bentuk barang (alat) penunjang kelancaran proses pendidikan di sekolah bersangkutan. Sumber daya fasilitatif berupa struktur organisasi sekolah yang telah ditata sedemikian rupa, masing-masing diharapkan dapat memfasilitasi tugas pokok dan fungsi unit struktur tersebut. Selanjutnya secara eksternal berupa sumber daya yang dapat diakses di masyarakat, baik yang ada di sektor pemerintah, sektor swasta, maupun sumber daya alam pada umumnya.

Terkait dengan hal tersebut dan mengingat SMA Negeri 1 Denpasar lokasinya tidak jauh dari pusat pemerintahan, maka aneka sumber daya dapat dioptimalkan pemberdayaanya oleh komunitas sekolah menuju sosok sekolah yang ideal. Inisiatif untuk mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya sekolah, baik yang bersifat internal maupun eksternal menjadi tanggung jawab seluruh komunitas sekolah secara sinergi kolegal, dan bukan secara tunggal menjadi tanggung jawab dan beban kepala sekolah.

Selain memiliki potensi yang cukup baik untuk memberdayakan berbagai sumber daya yang ada di sekolah, keberadaan SMA Negeri 1 Denpasar di wilayah kota Denpasar

yang relatif lebih “maju” dibandingkan kota-kota lainnya di Bali, baik dari segi infrastruktur yang dimiliki, membuat sekolah ini menjadi semakin strategis. Sebab pemberdayaan sekolah merupakan prasyarat bagi perubahan budaya kerja, termasuk perubahan kinerja dan perilaku praktisi pendidikan di sekolah dan ruang-ruang pembelajaran. Perubahan budaya dimaksud meliputi budaya manajemen, budaya peran, budaya tugas, dan budaya individu.

Budaya manajemen merujuk pada kapasitas manajerial seorang eksekutif untuk bekerja dengan orang lain secara efektif dan efisien. Budaya peran bermakna apakah seseorang atau suatu unit kerja telah mampu bergerak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Budaya tugas mengandung makna apakah komunikasi vertikal dan horizontal, termasuk koordinasi telah berjalan secara sinergi atau tidak. Dalam hal ini termasuk apakah individu pengembalian tugas telah mampu melakukan inisiatif pembaharuan, melakukan pekerjaan berbasis teknologi, mereduksi budaya konsultasi, dan dapat bekerja secara tim. Budaya individu merujuk pada apakah seseorang telah mampu memainkan perannya tanpa harus selalu dipandu oleh prakarsa struktur, dari orientasi menyalahkan ke orientasi mengoreksi diri, dan dari orientasi percaturan politik sekolah ke orientasi pekerjaan pokoknya.

Namun menurut Rosyada (2004:1) memasuki abad ke-21 isu tentang perbaikan sektor pendidikan di Indonesia mencuat ke permukaan, tidak hanya dalam jalur pendidikan umum, tetapi pada semua jalur dan jenjang pendidikan. Bahkan upaya advokasi untuk jalur pendidikan yang dikelola oleh beberapa Kantor Kementerian teknis, dengan tuntutan *social equity* sangat kuat. Dalam hal ini tidak hanya disuarakan oleh Kantor Kementerian terkait sebagai otoritas pengelola jalur pendidikan tersebut, tetapi juga oleh para praktisi dan pengambil kebijakan. Dalam pembangunan sektor pembinaan sumber daya manusia. Oleh karena semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan merupakan unsur-unsur yang memberikan kontribusi terhadap rata-rata hasil pendidikan secara nasional. Dengan demikian kelemahan proses dan hasil pendidikan dari sebuah jalur pendidikan

akan mempengaruhi indeks keberhasilan pendidikan secara keseluruhan.

Apa yang dinyatakan oleh Rosyada bukan tanpa alasan. Hal ini terbukti, yakni pada awal abad ke-21 ini, prestasi pendidikan di Indonesia tertinggal jauh di bawah negara-negara Asia lainnya, seperti Singapura, Jepang, dan Malaysia. Dalam hal ini jika Indonesia tidak bisa menjadi pemenang, maka tidak bisa dipungkiri pasti akan menjadi pecundang dan akan tertinggal dari masyarakat lainnya, khususnya dalam meraih pasar dan peluang kesempatan kerja karena tidak dibatasi lagi oleh garis wilayah kenegaraan. Di samping itu, hal tersebut bergerak kian meluas dan kian dimulai dari wilayah Asia Tenggara yang akan terus bergerak menjadi wilayah dunia. Oleh karena itu penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas, kompetitif, serta memiliki berbagai keunggulan kompetitif menjadi sebuah keharusan yang mesti menjadi perhatian dalam sektor pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa betapa sektor pendidikan di Indonesia, termasuk Bali perlu dikaji, dibenahi, bahkan, direformasi.

### **Prasarana dan Sarana**

Demi kelancaran proses belajar mengajar, SMA Negeri 1 Denpasar telah dilengkapi dengan berbagai prasarana dan sarana pendidikan. Lembaga ini telah memiliki 29 ruang kelas (27 ruang kelas reguler dan dua ruang kelas percepatan), satu buah ruang kepala sekolah, satu buah ruang tata usaha, lima buah ruang laboratorium (laboratorium kimia, fisika, biologi, komputer, dan bahasa), satu buah ruang guru, satu buah ruang tamu, satu buah ruang perpustakaan, tempat suci (pura), lapangan olahraga, tempat parkir, dan satu buah ruang usaha kesehatan sekolah (UKS), yaitu ruang untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta didik.



*Identitas Sekolah SMA Negeri 1 Denpasar*



*Gedung SMA Negeri 1 Denpasar dengan indentitas modern 'WELCOME'*



*Ruang Tata Usaha SMA Negeri 1 Denpasar*

Selain itu, SMA Negeri 1 Denpasar juga dilengkapi dengan satu buah ruang Bimbingan dan Konseling (BK) tempat untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada siswa yang bermasalah. Prasarana lainnya yaitu satu ruang aula kesenian/olahraga, serta masing-masing satu ruang pertemuan multimedia, koperasi, kantin, dan rumah Satpam, ruang kendaraan, dan gudang. Terdapat juga dua buah ruang laboratorium komputer, dan tiga buah laboratorium IPA, serta laboratorium bahasa, seperti gambar di bawah ini (Selayang Pandang SMA Negeri 1 Denpasar, 2011).



*Ruangan Bimbingan dan Konseling*



*Ruangan dan Fasilitas Laboratorium Kimia*



*Ruangan dan Fasilitas Laboratorium Biologi*



*Ruangan dan Fasilitas Laboratorium Fisika*



*Gedung dan Fasilitas Laboratorium Bahasa*



*Laboratorium Komputer*

Untuk membina dan meningkatkan kecerdasan peserta didik dalam bidang spiritual (SQ), sekolah ini juga dilengkapi dengan satu unit tempat suci Pura. Hal ini sesuai dengan konsep tata ruang masyarakat Hindu di Bali, yang mengikuti konsep *Rwabhineda* (konsep dua realitas yang berbeda), misalnya; siang-malam, laki-perempuan, utara-selatan, timur-barat, dan lain sebagainya. Menurut pandangan masyarakat Hindu di Bali, segala sesuatu yang dianggap *suci* biasanya diposisikan ke arah *kaja* atau *kangin* (utara atau timur), ke arah hulu. Sedangkan setiap yang benuansa tidak suci biasanya diletakkan di arah selatan atau barat (*kelod* atau *kauh*), ke arah *teben* (hilir).

Di tempat pemujaan ini, dilakukan acara persembahyangan bersama setiap *pujana* (tiga puluh hari) sekali, setiap hari raya Saraswati (210 hari) sekali, dan setiap *piodalan* (hari ulang tahun pura) pada *Purnama Kedasa* (menurut kalender Hindu Bali). Di samping itu, setiap pagi guru-guru, pimpinan, siswa, dan pegawai, sebelum melakukan *swadharna* masing-masing, bagi yang beragama Hindu juga melakukan persembahyangan sendiri-sendiri. Tujuannya untuk memohon *waranugraha* kerahayuan ke hadapan *Ida Hyang Widdhi Wasa*, agar dalam menjalankan *swadharna* dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.



*Pura Tempat Pemujaan*



Biasanya pada acara-acara persembahyangan bersama, kegiatan diawali dengan acara *Dharma Wacana* yang disampaikan oleh guru yang mengajar agama atau mendatangkan nara sumber yang berkompeten. Materi dharma wacana yang diberikan umumnya mengenai ajaran filsafat agama, yakni dengan harapan anak-anak peserta didik tidak hanya dibebani pencerahan di bidang keilmuan (*intelektual*), tetapi juga diharapkan memperoleh pencerahan dalam bidang spiritual (keagamaan). Hal ini penting sebab melalui acara semacam ini dapat dibangun dan dikembangkan rasa solidaritas social di kalangan warga sekolah yang nantinya akan menjadi pilar bagi pengembangan kesadaran social dalam konteks pemahaman nilai-nilai keagamaan, khususnya bagi anak-anak dalam kehidupan bermasyarakat setelah mereka dewasa.

Untuk kelengkapan sarana penunjang kelancaran proses belajar mengajar dapat dideskripsikan sebagai berikut. Sampai penelitian ini dilakukan, SMA Negeri 1 Denpasar telah memiliki tiga puluh LCD untuk mentransformasikan berbagai bahan ajar kepada siswa. Sarana lainnya berupa 100 unit komputer yang dibagi dalam dua ruang laboratorium komputer, empatpuluh sarana/fasilitas laboratorium bahasa, dan tiga ruang fasilitas laboratorium MIPA. Untuk meningkatkan minat baca di kalangan peserta didik, lembaga telah melengkapi bahan bacaan di perpustakaan dengan jumlah 30.646 eksemplar, yang terbagi menjadi buku pelajaran 1.241 eksemplar, buku sekolah elektronik 9.177 judul, buku panduan pendidik 9.703 eksemplar, buku pengayaan 8.969 eksemplar, dan buku referensi (kamus, ensiklopedi) 734 eksemplar, dan buku-buku lainnya (majalah, tabloid) 822 eksemplar. Yang menarik dari jumlah itu bahwasanya buku-buku IPA dan sains berjumlah 3.398 buah buku, buku IPS 1.240 buah buku, buku-buku bahasa 383 buku (Profil Sekolah SMA Negeri 1 Denpasar, 2011).

Dari uraian di atas sangat jelas bahwa dari segi fasilitas saja telah terjadi ketimpangan antara jumlah buku-buku IPA, dengan buku-buku IPS dan Bahasa. Ditinjau dari pengembangan ilmu sangat memungkinkan jurusan IPS dan termajinal. Apabila pemerintah menghendaki terbangunnya suatu kesetaraan antara

jurusan IPA, IPS dan Bahasa seharusnya fasilitas yang diadakan harus seimbang.



*Gedung Perpustakaan dengan Identitas Modern*



*Suasana di Perpustakaan*

Setiap peserta didik boleh meminjam buku di perpustakaan sekolah, dengan catatan peserta didik harus memiliki kartu perpustakaan yang dikeluarkan oleh sekolah. Persyaratan lainnya, anak-anak hanya boleh meminjam buku maksimal selama dua hari, dengan pertimbangan agar anak-anak terlatih memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien, selain untuk keperluan pemerataan.



*Suasana Kelas Percepatan*

Keadaan prasarana yang ada menunjukkan adanya diskriminasi penyediaan fasilitas antara jurusan IPA, IPS, dan Bahasa. Jurusan IPA disediakan ruang kelas percepatan dengan fasilitas full AC, sementara jurusan IPS dan Jurusan Bahasa tidak disediakan ruang kelas percepatan. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip Kesementaraan dari Sikap Ilmiah sebagai bagian dari komponen bangun dasar ilmu pengetahuan. Sikap kesementaraan akan selalu meragukan validitas suatu hipotesa termasuk pengerjaannya, bahkan meragukan segala usaha ilmiah termasuk bidang keahlian seseorang. Selama para ilmuwan terus bekerja lebih lama, lebih baik, dan lebih penuh bukti, kepastian tetap selalu kurang dari seratus persen. Studi dalam sejarah ilmu membuktikan bahwa sistem ilmiah yang mapan dan hampir diterima secara universal dalam satu zaman, tetap selalu

tidak memadai, dan pada akhirnya memberikan jalan menuju munculnya berbagai konsepsi revolusioner yang mengantar kepada penegakan sistem baru yang didasarkan atas berbagai praduga yang berbeda dan radikal (Muslih, tt:49).

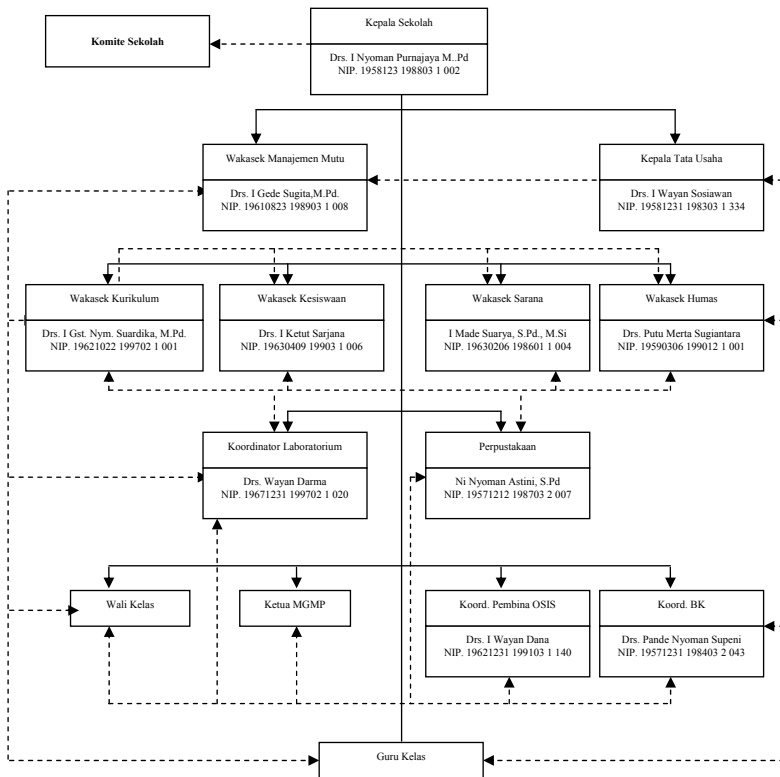
Dengan merujuk pernyataan di atas semestinya ada penundaan terhadap kelas percepatan, ada kesementaraan yang dibangun, mengingat kelas percepatan jurusan IPA tidak ada jaminan dapat menunjukkan kualitas lebih baik dibandingkan dengan kelas regular. Dari kenyataan ini menunjukkan bahwa ada indikasi jurusan IPS, dan jurusan Bahasa dimarjinalkan.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan, sudah tentu pada lembaga tersebut di dalamnya terdapat beberapa unsur personal, seperti: kepala sekolah, guru-guru, pegawai tata usaha, pesuruh, dan siswa. Dalam usaha pengembangan akademik yang lebih baik melalui institusi sekolah, maka perlu adanya organisasi yang baik pula sehingga dalam proses mencapai tujuan institusi tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar. Menurut sistem persekolahan di Indonesia, kepala sekolah merupakan jabatan tertinggi di sebuah sekolah. Dengan demikian, kepala sekolah memegang peranan dan pimpinan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan keputusan, kebijakan, dan kewajiban-kewajiban sekolah, baik yang bersifat intern (kedalam) maupun yang bersifat ekstern (keluar) sekolah tersebut. Oleh karena itu, dalam struktur organisasi sekolah, kepala sekolah selalu didudukkan pada posisi penanggung jawab yang di dalam nomenklatur berada pada posisi paling atas. Sementara itu, guru, pegawai tata usaha, pesuruh sekolah, dan siswa masing-masing mempunyai tanggung jawab masing-masing sesuai dengan tugas, kewajiban, hak, dan tanggung jawab yang diberikan lembaga dalam menjalankan regulasi sekolah secara keseluruhan.

Agar tidak terjadi *overlapping* (tumpang tindih) dan kejelasan dalam melaksanakan tugas masing-masing, maka diperlukan organisasi sekolah yang baik, tegas, dan teratur. Meskipun kedudukan kepala sekolah dalam nomenklatur struktur organisasi sekolah pada posisi paling tinggi, tetapi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tidak boleh sewenang-wenang. Oleh karena dalam organisasi sekolah yang

baik, pembagian tugas-tugas, kewajiban, dan tanggung jawab seharusnya merata sesuai dengan prinsip *the right man on right please*, posisi kewenangan, tugas, tanggung jawab sesuai dengan kecakapannya. Sehingga fungsi masing-masing komponen dalam organisasi berjalan dengan baik sehingga terciptalah suasana yang demokratis dalam melaksanakan tugas-tugas, kewajiban, dan fungsi-fungsi sekolah. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai posisi kepala sekolah dan komponen-komponen yang ada dan terlibat dalam struktur organisasi sekolah, di bawah ini digambarkan bagan struktur organisasi SMA Negeri 1 Denpasar seperti bagan di bawah.

### Struktur Organisasi SMA Negeri 1 Denpasar Tahun Ajaran 2011/2012



Keterangan :

—————  
—————

Garis Komando  
Garis Koordinasi

Dalam struktur organisasi sekolah, sebagaimana tampak dalam di atas, siswa memang berada pada struktur yang paling bawah. Namun, pelaksanaan proses pendidikan mereka harus dipandang sebagai objek dan sekaligus subjek pendidikan. Oleh karena itu menurut Susetyo (2005:145-146), pendidikan merupakan proses awal dalam usaha menumbuhkan kesadaran sosial pada setiap manusia sebagai pelaku sejarah. Artinya, kesadaran sosial hanya akan bisa tercapai apabila seseorang telah berhasil membaca realitas sosial yang berkembang di sekitar mereka.

Sebagai usaha untuk menumbuhkan kesadaran sosial, maka perlu adanya perangkat analisis yang bersumber dari kebebasan berpikir masing-masing individu, yang pada akhirnya memberikan daya nalar yang kritis terhadap perkembangan sosial yang ada di sekitar mereka. Dengan demikian, siswa dalam proses pendidikan, selain harus dipandang sebagai objek yang harus diberi berbagai pengetahuan, sikap, dan ketrampilan, mereka juga harus dilihat sebagai subjek, dalam arti guru dalam proses pembelajaran harus berupaya menempatkan dirinya sebagai pengayom, narasumber, pembimbing atau pendamping, dan teman belajar anak yang dilandasi pendekatan emosional yang humanistik sesuai dengan dengan filosofi *Tut Wuri Handayani* (Sarna, 1997:4)

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa siswa dalam struktur organisasi sekolah mempunyai arti yang sangat penting. Oleh karena sasaran akhir setiap proses pendidikan di sekolah adalah membantu pertumbuhan siswa menuju ke tingkat kedewasaannya. Terkait dengan keberadaan siswa semacam itu, SMA Negeri 1 Denpasar sampai Agustus 2011 memiliki jumlah siswa sebanyak 1.395 orang yang terdiri dari 798 perempuan, dan 597 orang siswa laki-laki. Jumlah ini kemudian, terdistribusi kedalam tiga kelas, yang masing –masing kelas dengan dua rombongan belajar (rombel), yaitu rombel IPA dan rombel IPS. Kelas satu (kelas X) jumlah siswanya 468 orang. Kelas dua (XI) 486 orang siswa, rombel IPA 462 orang siswa, dan rombel IPS 24 orang siswa. Kelas tiga (kelas XII) jumlah siswanya 441 orang, dengan rombel IPA 428 orang dan rombel IPS 13 orang. Jumlah

guru yang mengasuh siswa SMA Negeri 1 Denpasar, sebanyak 82 orang, dengan rincian 69 guru tetap Pegawai Negeri Sipil (PNS), 13 guru tidak tetap, dengan jenis kelamin 48 guru laki-laki, dan 34 guru wanita.

Dilihat dari tingkat pendidikan, guru-guru yang mengajar di SMA Negeri 1 Denpasar hanya 1, 22% atau satu orang guru yang belum memenuhi syarat minimal pendidikan Strata Satu (S1), sisanya 18,29 % atau 15 orang telah berpendidikan Strata Dua (S2/Magister), dan 77,65 % atau 66 orang berpendidikan Strata Satu (S1) sedangkan 98,78 % atau 81 orang telah memenuhi syarat minimal berpendidikan Strata satu (S1).

Dalam keseluruhan kegiatan pendidikan di tingkat operasional, guru merupakan penentu keberhasilan pendidikan melalui kinerjanya, baik di tingkat institusional maupun pada tingkat instruksional. Hal ini mengandung makna bahwa guru mempunyai posisi yang strategis dalam upaya pembangunan bangsa. Sejalan dengan tugas utamanya sebagai pendidik di sekolah, menurut Surya (2003:46), guru melakukan tugas-tugas kinerja pendidikan dalam bimbingan, pengajaran, dan pelatihan. Semua kegiatan itu sangat terkait dengan upaya pengembangan para peserta didik melalui keteladanan, penciptaan lingkungan pendidikan yang kondusif, membimbing, mengajar, dan melatih peserta didik untuk bertanggung jawab atas pembangunan diri, masyarakat, dan bangsanya.

Dilihat dari persyaratan kualifikasi pendidikan formal tenaga pengajar (guru-guru) SMA Negeri 1 Denpasar sudah sangat mumpuni. Namun dari jumlah guru per mata pelajaran, terjadi ketimpangan antara guru-guru IPA dengan guru-guru IPS. Untuk kelancaran jalannya operasional pendidikan di SMA Negeri 1 Denpasar, selain siswa dan guru, juga didukung oleh beberapa tenaga pelaksana seperti tenaga tata usaha yang menangani berbagai urusan administrasi sebanyak 17 orang, pustawan tiga orang, petugas laboratorium tiga orang, penjaga sekolah satu orang, tenaga kebersihan Sembilan orang, dan tenaga satpam sebanyak dua orang.

Sekolah sebagai sebuah organisasi pembelajaran (*learning organization*), seluruh komunitasnya (kepala sekolah, guru,

dan staf) dituntut melakukan aktivitas-aktivitas pembelajaran organisasional (*organization learning*) secara terus menerus (Danim, 2005:200). Dalam hal ini agar aktivitas yang dilakukan dapat terarah dan lebih terstruktur, maka setiap sekolah dituntut untuk membuat program kerja sehingga dalam menjalankan berbagai aktivitas terkait dengan pelaksanaan operasional sekolah dapat berjalan sebagaimana diharapkan. Terkait dengan hal tersebut sekolah sebagai lembaga pendidikan mempunyai tugas dan tanggung jawab yang secara organisasional berhubungan langsung dengan dinas pendidikan kabupaten/kota dan lembaga kemasyarakatan. Hal ini sejalan dengan yang ditegaskan oleh UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara orang tua, pemerintah, dan masyarakat. Terkait dengan tugas sekolah sebagai organisasi pembelajaran, Sujanto (2007:55) mengatakan bahwa ada beberapa tugas sekolah, khususnya dalam pengelolaan kurikulum berbasis sekolah, pertama sekolah yang sudah mampu menyusun silabus sendiri agar melaporkan rencana kegiatan penyusunan silabus dan hasilnya kepada dinas pendidikan kabupaten atau kota. Kedua, sekolah yang belum mampu menyusun silabus sendiri dapat menyusun silabus bersama dengan tim pengembangan silabus dinas pendidikan kabupaten/atau kota. Ketiga, mengusulkan peningkatan kapasitas (*capacity building*) tenaga kependidikan melalui berbagai wadah yang tersedia, seperti KKG, MGMP, serta pelatihan dan penataran yang diselenggarakan secara sistematis dan berkala. Pelatihan dan penataran ini sangat penting untuk memotivasi guru agar terus belajar dan berusaha meningkatkan kinerja dan kualitasnya, sesuai dengan tuntutan perubahan yang terjadi. Keempat, melibatkan komite sekolah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta mutu pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar sebagai penjabaran KBK/KTSP. Hal ini juga perlu dilakukan agar para orang tua merasa terlibat dan mengetahui perkembangan yang terjadi di sekolah. Kelima, mengkomunikasikan implikasi KBK/KTSP kepada orang tua siswa dan anggota masyarakat lainnya. Hal ini terkait dengan makin banyaknya variasi kegiatan yang harus dilakukan siswa



dan guru sehingga dukungan terhadap kegiatan ini harus diberikan secara penuh oleh orang tua, jika ingin pendidikan anak-anaknya berhasil dengan baik. Keenam, sekolah dapat mengusahakan swadana melalui komite sekolah, untuk menopang penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Hal ini perlu dilakukan mengingat terbatasnya dana yang dapat disediakan oleh pemerintah. Melalui kegiatan (program kerja) seperti ini partisipasi masyarakat akan tampak dengan jelas sebagai wujud pendidikan yang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, sekolah, dan orang tua atau masyarakat. Untuk mengaktualisasikan berbagai program kerja yang berkaitan dengan tugas pokok sekolah sebagai organisasi pembelajaran ini maka pihak manajemen SMA Negeri 1 Denpasar membuat beberapa program kerja tahunan yang memuat hal-hal sebagai berikut. Kepala Sekolah dan Para Guru serta dengan persetujuan Komite Sekolah menetapkan sasaran program, baik untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Sasaran program dimaksudkan untuk mewujudkan visi dan misi sekolah.

## PROFIL SMA DWIJENDRA DENPASAR

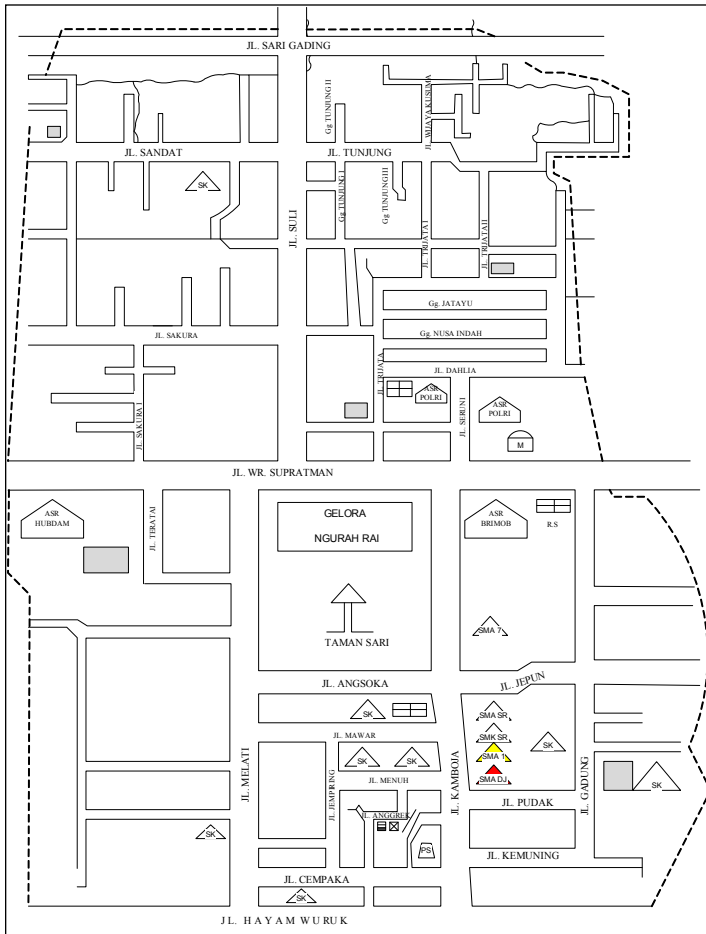
**S**MA Dwijendra Denpasar juga memiliki andil yang besar dalam pembangunan pendidikan untuk mencerdaskan bangsa. SMA Dwijendra Denpasar telah berusia 29 tahun. Surat keputusan pendirian sekolah tertulis nomor: 496.Um 1.4/77 tertanggal 6 Desember 1977 NSS:304220900005. SMA Dwijendra Denpasar merupakan lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dibawah naungan Yayasan Dwijendra Denpasar.

Visi SMA Dwijendra Denpasar adalah berperan aktif dalam mengajegkan adat dan budaya Bali yang Adiluhung berdasarkan sastra Agama Hindu dan kemajuan Ilmu Pengetahuan dibidang Teknologi dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia berkualitas memiliki kecakapan hidup dan siap bersaing pada masa globalisasi.

Pertanyaan yang perlu dicarikan jawaban atas visi dari SMA Dwijendra Denpasar adalah, bagaimana usaha yang dilakukan untuk mengajegkan adat dan budaya Bali yang adiluhung berdasarkan sastra agama Hindu, mengingat jurusan yang mendukung usaha pengajegan adat dan budaya Bali (jurusan IPS dan Bahasa) termajinkan? Seiring dengan berubahnya waktu, ketika perekonomian Indonesia diwarnai oleh sistem ekonomi pasar pada awal tahun 1970-an atau akhir tahun 1960-an tampaknya sulit juga dihindari oleh lembaga-lembaga pendidikan termasuk SMA Dwijendra Denpasar, yang akhirnya terperangkap juga ke dalam sistem kapitalis sehingga terkesan jurusan yang cenderung mendorong munculnya paham kapitalisme (IPA) begitu “merajai”, dan jurusan IPS dan Bahasa termajinkan.








SMA Dwijendra Denpasar terletak di Jalan Kamboja Desa Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali. SMA Dwijendra berada persis disebelah selatan SMA Negeri 1 Denpasar. Berjarak kurang lebih 2 km sebelah timur pusat kota Denpasar, dan sekitar 4 km sebelah utara pusat

pemerintahan Provinsi Bali. Dilihat dari letak geografisnya, SMA Dwijendra Denpasar sangat strategis karena terletak di pinggir jalan di pusat kota, tidak jauh dari pusat pemerintahan Kecamatan Denpasar Utara, juga tidak jauh dari pusat pemerintahan Kota Denpasar, maupun pemerintahan Provinsi Bali, seperti terlihat pada peta berikut.



Peta SMA Dwijendra Denpasar

Keterangan

-  : Sungai
-  : Batas Desa
-  : Kantor Kepala Desa
-  : SMA Dwijendra Dps
-  : Masjid
-  : Pasar
-  : Rumah Sakit

Letak sekolah yang strategis, membuat SMA Dwijendra Denpasar mudah diakses oleh masyarakat. Letak yang strategis seharusnya membuat pemberdayaan sekolah ini dapat dioptimalkan. Oleh karena pemberdayaan sekolah pada umumnya menurut Danim (2003:184), terkait langsung dengan sumber daya sekolah itu sendiri, baik internal, maupun eksternal. Secara internal sumber daya sekolah dapat berupa sumber daya manusia (SDM), sumber daya material, sumber daya fasilitatif.

Sumber daya material dapat berupa finansial (uang) dan dapat pula berupa berbagai bentuk barang (alat) penunjang kelancaran proses pendidikan di sekolah bersangkutan. Sumber daya fasilitatif berupa struktur organisasi sekolah yang telah ditata sedemikian rupa, masing-masing diharapkan dapat memfasilitasi tugas pokok dan fungsi unit struktur tersebut. Selanjutnya secara eksternal berupa sumber daya yang dapat diakses di masyarakat, baik yang ada di sektor pemerintah, swasta, maupun sumber daya alam pada umumnya.

Terkait dengan hal tersebut dan mengingat SMA Dwijendra Denpasar lokasinya tidak jauh dari pusat pemerintahan, maka aneka sumber daya dapat dioptimalkan pemberdayaannya oleh komunitas sekolah menuju sosok sekolah yang ideal. Inisiatif untuk mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya sekolah, baik yang bersifat internal maupun eksternal menjadi tanggung jawab seluruh komunitas sekolah secara sinergi kolegal, dan bukan secara tunggal menjadi tanggung jawab dan beban kepala sekolah.

Selain memiliki potensi yang cukup baik untuk memberdayakan berbagai sumber daya yang ada di sekolah, keberadaan SMA Dwijendra Denpasar di wilayah Kota Denpasar yang relatif lebih “maju” dibandingkan dengan sekolah yang dikelola masyarakat di kota-kota lainnya di Bali, baik dari segi infrastruktur yang dimiliki, membuat sekolah ini menjadi semakin strategis. Sebab pemberdayaan sekolah merupakan prasyarat bagi perubahan budaya kerja, termasuk perubahan kinerja dan perilaku praktisi pendidikan di sekolah dan ruang-ruang pembelajaran. Perubahan budaya dimaksud meliputi budaya manajemen, budaya peran, budaya tugas, dan budaya

individu.

Budaya manajemen merujuk pada kapasitas manajerial seorang eksekutif untuk bekerja dengan orang lain secara efektif dan efisien. Budaya peran bermakna apakah seseorang atau suatu unit kerja telah mampu bergerak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Budaya tugas mengandung makna apakah komunikasi vertikal dan horizontal, termasuk koordinasi telah berjalan secara sinergi atau tidak. Dalam hal ini termasuk apakah individu pengembalian tugas telah mampu melakukan inisiatif pembaharuan, melakukan pekerjaan berbasis teknologi, mereduksi budaya konsultasi, dan dapat bekerja secara tim. Budaya individu merujuk pada apakah seseorang telah mampu memainkan perannya tanpa harus selalu dipandu oleh prakarsa struktur, dari orientasi menyalahkan ke orientasi mengoreksi diri, dan dari orientasi percaturan politik sekolah ke orientasi pekerjaan pokoknya.

Namun menurut Rosyada (2004:1) memasuki abad ke-21 isu tentang perbaikan sektor pendidikan di Indonesia mencuat ke permukaan, tidak hanya dalam jalur pendidikan umum, tetapi pada semua jalur dan jenjang pendidikan. Bahkan upaya advokasi untuk jalur pendidikan yang dikelola oleh beberapa Kantor Kementerian teknis, dengan tuntutan *social equity* sangat kuat. Dalam hal ini tidak hanya disuarakan oleh Kantor Kementerian terkait sebagai otoritas pengelola jalur pendidikan tersebut, tetapi juga oleh para praktisi dan pengambil kebijakan. Dalam pembangunan sektor pembinaan sumber daya manusia. Oleh karena semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan merupakan unsur-unsur yang memberikan kontribusi terhadap rata-rata hasil pendidikan secara nasional. Dengan demikian kelemahan proses dan hasil pendidikan dari sebuah jalur pendidikan akan mempengaruhi indeks keberhasilan pendidikan secara keseluruhan.

Apa yang dinyatakan oleh Rosyada buka tanpa alasan. Hal ini terbukti, yakni pada awal abad ke-21 ini, prestasi pendidikan di Indonesia tertinggal jauh di bawah negara-negara Asia lainnya seperti, Singapura, Jepang, dan Malaysia. Dalam hal ini jika Indonesia tidak bisa menjadi pemenang, maka tidak bisa

dipungkiri pasti akan menjadi pecundang dan akan tertinggal dari masyarakat lainnya, khususnya dalam meraih pasar dan peluang kesempatan kerja karena tidak dibatasi lagi oleh garis wilayah kenegaraan. Di samping itu, hal tersebut bergerak kian meluas dan kini dimulai dari wilayah Asia Tenggara yang akan terus bergerak menjadi wilayah dunia. Oleh karena itu penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas, kompetitif, serta memiliki berbagai keunggulan kompetitif menjadi sebuah keharusan yang mesti menjadi perhatian dalam sektor pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa betapa sektor pendidikan di Indonesia, termasuk Bali perlu dikaji, dibenahi, bahkan, direformasi.

### **Prasarana dan Sarana**

Secara etimologis (arti kata) prasarana berarti alat tak langsung untuk mencapai tujuan. Dalam konteks pendidikan, prasarana berarti berbagai perlengkapan atau peralatan yang secara tidak langsung dapat menunjang pencapaian tujuan pendidikan, misalnya: lokasi atau tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, keuangan, dan lain sebagainya. Selanjutnya sarana pendidikan adalah alat yang secara langsung dapat digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Misalnya, buku-buku pelajaran, alat-alat laboratorium, alat peraga, dan lain-lainya. Jenis peralatan dan perlengkapan yang disediakan di sekolah dan cara-cara pengadministrasiannya mempunyai pengaruh besar terhadap program belajar-mengajar yang dilakukan. Keterbatasan dan kekurangan prasarana dan sarana pendidikan dapat menghambat kelancaran proses belajar-mengajar yang dilakukan di dalam suatu lembaga pendidikan. Dengan demikian, betapa kondisi prasarana dan sarana pendidikan mempunyai arti yang sangat penting bagi pencapaian hasil belajar dalam suatu proses pembelajaran.

Dalam hubungan pendidikan, untuk kelancaran proses belajar mengajar, SMA Dwijendra Denpasar telah dilengkapi dengan berbagai prasarana dan sarana pendidikan. Lembaga ini dalam membangun prasarana ditata berdasarkan konsep Tri Hita Karana, dan konsep Tri Mandala. Pertama, tempat pemujaan Pura Maha Dwijasrama. Sebagaimana diketahui bahwa

pura adalah tempat suci untuk membina dan meningkatkan kecerdasan peserta didik dalam bidang spiritual question (SQ), Hal ini sesuai dengan konsep tata ruang masyarakat Hindu di Bali, yang mengikuti konsep *Rwabhineda* (konsep dua realitas yang berbeda), misalnya; siang-malam, laki-perempuan, utara-selatan, timur-barat, *ulu-teben* dan lain sebagainya. Menurut pandangan masyarakat Hindu di Bali, segala sesuatu yang dianggap *suci* biasanya diposisikan ke arah *kaja* atau *kangin* (utara atau timur), ke arah hulu. Sedangkan setiap yang bernuansa tidak suci biasanya diletakkan di arah selatan atau barat (*kelod* atau *kauh*), kearah *teben* (hilir).



*Pura Maha Dwijasrama SMA Dwijendra Denpasar*

Biasanya pada acara-acara persembahyangan bersama, kegiatan diawali dengan acara *Dharma Wacana* yang disampaikan oleh guru yang mengajar agama atau mendatangkan nara sumber yang berkompeten. Materi dharma wacana yang diberikan umumnya mengenai ajaran filsafat agama, yakni dengan harapan anak-anak peserta didik tidak hanya dibebani pencerahan di bidang keilmuan (*intelektual*), tetapi juga diharapkan memperoleh pencerahan dalam bidang spiritual (keagamaan). Hal ini penting sebab melalui acara semacam ini dapat dibangun dan dikembangkan rasa solidaritas sosial di kalangan warga sekolah yang nantinya akan menjadi pilar bagi

pengembangan kesadaran sosial dalam konteks pemahaman nilai-nilai keagamaan, khususnya bagi anak-anak dalam kehidupan bermasyarakat setelah mereka dewasa.

Kedua, lembaga ini memiliki dua puluh enam ruang kelas belajar, terdiri atas empat ruang kelas ber AC, dan dua puluh dua kelas regular. Ketiga, ruang guru, yang diatur dan ditata dalam satu ruangan yang disekat menjadi satu buah ruang kepala sekolah, ruang wakil kepala sekolah, satu buah ruang guru, dan satu ruang tata usaha, serta teras ruang tamu, yang dilengkapi dengan kamar mandi dan wc.



*Ruang Kepala Sekolah dan Kepala Sekolah SMA Dwijendra*

Keempat, ruang Osis, adalah ruangan untuk organisasi siswa intra sekolah. Di tempat ini para siswa melaksanakan manajemen organisasi kesiswaan, yang salah satunya menurut wakasek kesiswaan, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengasah kecerdasan emosionalnya. Kelima, ruang perpustakaan, untuk meningkatkan minat baca di kalangan peserta didik, lembaga telah melengkapi bahan bacaan di perpustakaan dengan jumlah 3,500 eksemplar, yang terbagi menjadi buku pelajaran IPA 2.000 eksemplar, dengan 250 judul. Sedangkan buku IPS 700 eksemplar dengan 75 judul, dan beberapa lontar (Profil Sekolah SMA Dwijendra Denpasar, 2011). Setiap peserta



didik boleh meminjam buku di perpustakaan sekolah, dengan catatan peserta didik harus memiliki kartu perpustakaan yang dikeluarkan oleh sekolah. Persyaratan lainnya, anak-anak hanya boleh meminjam buku maksimal selama dua hari, dengan pertimbangan agar anak-anak terlatih memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien, selain untuk keperluan pemerataan. Keenam, sekolah ini juga memiliki laboratorium komputer, laboratorium multimedia, laboratorium bahasa, laboratorium IPA (kimia, Fisika, dan Biologi).



*Gedung dan Fasilitas Laboratorium Komputer*



*Gedung dan Fasilitas Laboratorium Kimia*



*Gedung dan Fasilitas Laboratorium Fisika*



*Gedung dan Fasilitas Laboratorium Biologi*



*Gedung dan Fasilitas Laboratorium Bahasa.*

Ketujuh, ruang koperasi sekolah, pojok kantin, tempat parkir, gudang lapangan volley dan basket. Kedelapan, SMA Dwijendra Denpasar juga melengkapi prasarana dengan prasarana uretra berupa sembilan buah toilet, dua buah sumur bor, air dari PDAM, sarana listrik PLN, sarana listrik diesel, sarana telpon, faksimile, dan internet.



*Gedung SMA Dwijendra Denpasar*

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa ada pola hidup modern yang ditampilkan dengan harapan tentu muncul kesan Go Internasional, dengan slogan “*Better Education Better Life*”. Muncul pertanyaan kenapa tidak ditulis dengan tiga bahasa “*Amretham tu Widya*” Ilmu Pengetahuan untuk Hidup Lebih Baik. Hal ini dimaksudkan jangan sampai terjadi Modern tetapi tidak “mengakar”.



*Ruang Tata Usaha SMA Dwijendra Denpasar*



*Ruang Perpustakaan SMA Negeri Dwijendra Denpasar*

Kesembilan, SMA Dwijendra Denpasar juga dilengkapi dengan satu buah ruang Bimbingan dan Konseling (BK) tempat untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada siswa yang bermasalah, ruang UKS, untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada sivitas SMA Dwijendra Denpasar. Kesepuluh, prasarana lainnya yaitu satu ruang aula kesenian/olahraga, rumah satpam, dan ruang kendaraan.



*Ruang Bimbingan Konseling*

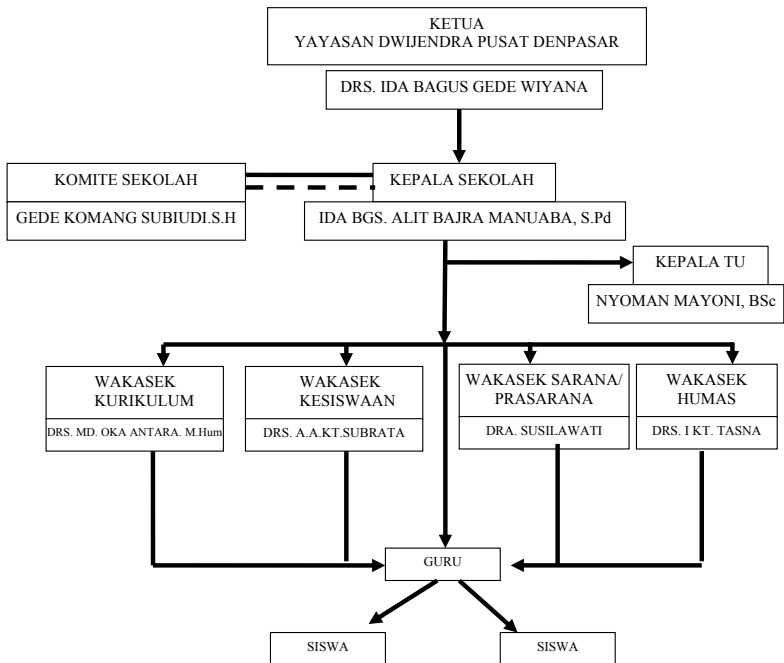
Kelengkapan sarana penunjang kelancaran proses belajar mengajar dapat dideskripsikan sebagai berikut. Sampai penelitian ini dilakukan, SMA Dwijendra Denpasar telah memiliki 25 LCD untuk mentransformasikan berbagai bahan ajar kepada siswa. Sarana lainnya berupa 40 unit komputer yang ditempatkan dalam ruang laboratorium komputer, satu sarana/fasilitas laboratorium bahasa, dan fasilitas laboratorium MIPA.

Kondisi prasarana yang ada menunjukkan adanya diskriminasi penyediaan fasilitas antara jurusan IPA, IPS, dan Bahasa. Jurusan IPA disediakan laboratorium MIPA, sementara laboratorium IPS tidak ada. Laboratorium bahasa dan komputer adalah laboratorium yang digunakan oleh semua siswa baik dari jurusan IPA dan IPS. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip keadilan, IPA penuh dengan prioritas fasilitas, sementara IPS dan bahasa kurang mendapatkan fasilitas. Dari kenyataan ini menunjukkan bahwa ada indikasi jurusan IPS, dan jurusan Bahasa dimarjinalkan.

Agar tidak terjadi *overlapping* (tumpang tindih) dan kejelasan dalam melaksanakan tugas masing-masing, maka diperlukan organisasi sekolah yang baik, tegas, dan teratur. Meskipun kedudukan kepala sekolah dalam nomenklatur

struktur organisasi sekolah pada posisi paling tinggi, tetapi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tidak boleh sewenang-wenang. Oleh karena dalam organisasi sekolah yang baik, pembagian tugas-tugas, kewajiban, dan tanggung jawab seharusnya merata sesuai dengan prinsip *the right man on right please*, posisi kewenangan, tugas, tanggung jawab sesuai dengan kecakapannya. Sehingga fungsi masing-masing komponen dalam organisasi berjalan dengan baik sehingga terciptalah suasana yang demokratis dalam melaksanakan tugas-tugas, kewajiban, dan fungsi-fungsi sekolah. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai posisi kepala sekolah dan komponen-komponen yang ada dan terlibat dalam struktur organisasi sekolah, di bawah ini digambarkan bagan struktur organisasi SMA Dwijendra Denpasar seperti bagan berikut.

### Struktur Organisasi SMA Dwijendra Denpasar Tahun Ajaran 2011/2012



Dalam struktur organisasi sekolah, sebagaimana tampak dalam Bagan di atas, siswa memang berada pada struktur yang paling bawah. Namun, pelaksanaan proses pendidikan mereka harus dipandang sebagai objek dan sekaligus subjek pendidikan. Oleh karena itu menurut Susetyo (2005:145-146), pendidikan merupakan proses awal dalam usaha menumbuhkan kesadaran social paada setiap manusia sebagai pelaku sejarah. Artinya, kesadaran sosial hanya akan bisa tercapai apabila seseorang telah berhasil membaca realitas sosial yang berkembang di sekitar mereka.

Sebagai usaha untuk menumbuhkan kesadaran sosial, maka perlu adanya perangkat analisis yang bersumber dari kebebasan berpikir masing-masing individu, yang pada akhirnya memberikan daya nalar yang kritis terhadap perkembangan sosial yang ada di sekitar mereka. Dengan demikian, siswa dalam proses pendidikan, selain harus dipandang sebagai objek yang harus diberi berbagai pengetahuan, sikap, dan ketrampilan, mereka juga harus dilihat sebagai subjek, dalam arti guru dalam prosesw pembelajaran harus berupaya menempatkan dirinya sebagai pengayom, narasumber, pembimbing atau pendamping, dan teman belajar anak yang dilandasi pendekatan emosional yang humanistic sesuai dengan dengan filosofi *Tut Wuri Handayani* (Sarna, 1997:4)

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa siswa dalam struktur organisasi sekolah mempunyai arti yang sangat penting. Oleh karena sasaran akhir setiap proses pendidikan di sekolah adalah membantu pertumbuhan siswa menuju ke tingkat kedewasaannya. Terkait dengan keberadaan siswa semacam itu, SMA Dwijendra Denpasar sampai Agustus 2011 memiliki jumlah siswa sebanyak 1,179 orang yang terdiri dari 695 perempuan, dan 484 orang siswa laki-laki. Jumlah ini kemudian, terdistribusi kedalam tiga kelas, yang masing -masing kelas dengan dua rombongan belajar (rombel), yaitu rombel IPA dan rombel IPS. Kelas satu (kelas IX) jumlah siswanya 426 orang. Kelas dua (X) 422 siswa rombel IPA 313 orang, dan rombel IPS 116orang. Kelas tiga (kelas XI) jumlah siswanya 431 orang dengan rombel IPA 311 dan rombel IPS 120 oarng siswa. Jumlah guru yang

mengasuh siswa SMA Dwijendra Denpasar, sebanyak 70 orang, dengan rincian 28 guru tetap Pegawai Negeri Sipil (PNS), 16 guru kontrak, dan 26 orang guru tidak tetap.

Dilihat dari tingkat pendidikan, guru-guru yang mengajar di SMA Dwijendra 1 Denpasar hanya 13 orang guru yang belum memenuhi syarat minimal pendidikan Strata Satu (S1), sisanya 11 orang telah berpendidikan Strata Dua (S2/Magister), dan 46 orang berpendidikan Strata Satu (S1). Dalam keseluruhan kegiatan pendidikan di tingkat operasional, guru merupakan penentu keberhasilan pendidikan melalui kinerjanya, baik di tingkat institusional maupun pada tingkat instruksional. Hal ini mengandung makna bahwa guru mempunyai posisi yang strategis dalam upaya pembangunan bangsa. Sejalan dengan tugas utamanya sebagai pendidik di sekolah, menurut Surya (2003:46), guru melakukan tugas-tugas kinerja pendidikan dalam bimbingan, pengajaran, dan pelatihan. Semua kegiatan itu sangat terkait dengan upaya pengembangan para peserta didik melalui keteladanan, penciptaan lingkungan pendidikan yang kondusif, membimbing, mengajar, dan melatih peserta didik untuk bertanggung jawab atas pembangunan diri, masyarakat, dan bangsanya.

Dilihat dari persyaratan kualifikasi pendidikan formal tenaga pengajar (guru-guru) SMA Dwijendra Denpasar sudah sangat mumpuni. Namun dari jumlah guru per mata pelajaran, terjadi ketimpangan antara guru-guru IPA dengan guru-guru IPS. Untuk kelancaran jalannya operasional pendidikan di SMA Dwijendra Denpasar, selain siswa dan guru, juga didukung oleh beberapa tenaga pelaksana seperti tenaga tata usaha yang menangani berbagai urusan administrasi sebanyak 14 orang, pustakawan dua orang, petugas laboratorium 2 orang, tenaga kebersihan 8 orang, dan tenaga satpam sebanyak 6 orang.

Program kerja SMA Dwijendra Denpasar dibagi menjadi dua program pengembangan, yaitu pengembangan akademik dan non akademik. Pengembangan akademik, meliputi pengembangan kelas unggulan; RSKM; BILINGUAL; CLUB OLYMPIADE; Olympiade Matematika; Olympiade Fisika; Olympiade Kimia; Olympiade Biologi; Olympiade Akuntansi; Olympiade Bahasa Inggris;



Olympiade Komputer; Pembelajaran Berbasis IT; Peningkatan SDM Guru/Pendidik dari D1/D2 ke jenjang S1; Dari S1 ke jenjang S2; Peningkatan Profesional Tenaga Administrasi (TAS).

Sedangkan pengembangan nonakademik/ program ekstrakurikuler meliputi kegiatan, yoga asanas; menjanur (*meje-jahitan*); KRIA; Dharma Githa; tata boga; melukis; menari/ menabuh; musik/vokal; KIR (Kelompok Ilmiah Remaja); bahasa Jepang; pencak silat; atletik; bulu tangkis; sepak bola; bola volley; basket; tenis meja; pramuka/PMR; menulis (nyurat Bali); MC (Apresiasi Sastra); KSPAN (Kelompok Siswa Peduli Aid dan Narkoba).

Program pengembangan sarana dan prasarana, meliputi pengadaan dan perbaikan gedung / ruang belajar; laboratorium bahasa; laboratorium komputer; laboratorium multi media; laboratorium fisika; laboratorium kimia; laboratorium Biologi.

Dari rencana pengembangan seperti uraian di atas pengembangan untuk peningkatan hasil pembelajaran IPA begitu dominan. Untuk pengembangan peningkatan hasil pembelajaran IPS kurang diperhatikan, seperti laboratorium yang terkait dengan mata pelajaran IPS. Walaupun toh ada laboratorium bahasa, itu juga termasuk pengembangan yang digunakan untuk semua SMA.

## MARJINALISASI JURUSAN IPS DAN BAHASA

Setelah Perang Dunia II perhatian negara-negara di dunia terhadap “pembangunan” fisik dan nonfisik tumbuh dengan pesat. Hal ini disebabkan oleh berkembangnya cita-cita negara yang baru merdeka untuk mengejar ketertinggalan. Negara-negara yang baru merdeka seperti Indonesia, India, Pakistan, dan Korea, adalah negara yang relatif miskin dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, dan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Pembangunan di negara-negara tersebut merupakan sesuatu yang sangat mendesak untuk dilakukan. Hal ini terjadi karena adanya “perhatian” negara-negara maju Kolonialis Eropa Barat dan Amerika Serikat (yang sering disebut negara-negara Barat), untuk membantu negara-negara yang baru merdeka dalam mempercepat laju pembangunan dan mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju, disamping adanya “utang di balik batu” seperti untuk mendapatkan dukungan dalam perang ideologi antara Blok Barat dan Blok Timur, juga dimaksudkan untuk mencari lahan sebagai tempat pemasaran berbagai jenis barang hasil industri (Arsyad, 2007:4).

Dengan adanya bantuan yang melimpah dari pemerintah negara-negara Barat, dan organisasi swasta/*Non Governmnet Organisation* (NGO), satu generasi baru ilmuwan politik, ekonomi, sosiologi, psikologi, antropologi, pendidikan, serta ahli kependudukan negara-negara Barat menghasilkan karya-karya disertasi dan monograf tentang negara-negara yang baru merdeka yang disebut Negara Dunia Ketiga. Satu aliran pemikiran antardisiplin yang tergabung dalam ajaran modernisasi yang terbentuk pada tahun 1950-an. Meraka adalah Evsey Domar, Roy Harrod, Max Weber, David Mc Ceeland, W.W. Rostow, Bert F. Hoselitz, Alex Inkeles, Everett E. Hagen, J.H. Boeke, Clifford Geertz (Budiman, 1996:17-34; Sinopsis:xvii-xix). Pengalamannya di Negara-negara, seperti Birma (sekarang Myanmar), dan di

Kolombia, menyatakan bahwa faktor kekuatan yang paling penting untuk menggerakkan masyarakat Negara Dunia Ketiga dari stagnasi pembangunan adalah perubahan pada tata sosial budayanya. Dengan demikian dapat dipastikan akan terjadi dominasi Barat terhadap negara-negara Dunia Ketiga untuk mewujudkan pembangunan dan modernisasi. Mau tidak mau, suka tidak suka, model pembangunan Negara Dunia Ketiga sudah dapat dipastikan memakai model modernisasi Barat, termasuk pembangunan dan pengembangan pendidikan.

Pendidikan suatu negara dikatakan maju dan modern apabila teknologi dan informasi di negara tersebut juga maju, dan mengutamakan rasionalitas. Pemikiran ini diradikalkan oleh berbagai pemikiran manusia modern, terutama mereka yang bergerak di dalam bidang filsafat sekuler dan sains, yang berkarakter materialistis dan mekanistik. Manusia modern tidak pernah berpikir bahwa ia sesungguhnya adalah bagian dari alam. Ia menganggap dirinya sebagai entitas yang terpisah dari alam, dan alam dijadikan objek. Rasio atau akal adalah segala-galanya bagi manusia modern, meski rasio ini sendiri sangat terbatas. Manusia memiliki akal, yaitu sebuah kemampuan yang luar biasa, yang tidak dimiliki makhluk lain. Dengan akal ini manusia memberi bukti bahwa manusia bisa membuat banyak hal yang hebat di dalam hidupnya. Hukum-hukum alam mulai bisa dimanipulasi. Contoh sederhana, mengusir mendung dengan teknologi laser, tanpa memperhatikan dampak ikutannya. Yang terpenting bahwa "tujuannya" tercapai. Sejalan dengan itu teknologi dan informasi semakin maju. Sejak itulah kecendrungan manusia untuk menekuni Sains dan teknologi, dan dengan tegas menyerang aliran-aliran filsafat tradisional serta mengembangkan semangat baru untuk melakukan percobaan ilmiah (Wora, 2006:2-6; Capra,1999:39-43).

Hagen (Sinopsis:xvii) mengatakan bahwa, faktor yang paling penting untuk menggerakkan masyarakat Negara Dunia Ketiga dari stagnasi ekonomi ke arah proses pembangunan dan modernisasi ialah perubahan pada tata sosial budayanya. Kemajuan ekonomi dan pembangunan ekonomi dijadikan fungsi dari perubahan pada kombinasi bidang kehidupan masyarakat

yaitu bidang pendidikan, sosiologi, antropologi, dan psikologi. Perubahan sosial budaya termasuk pendidikan dianggap sebagai faktor dinamika yang otonom-dominan yang mempengaruhi perkembangan masyarakat secara menyeluruh.

Dari uraian di atas dapat dideskripsikan bahwa modernisasi ala Barat yang bercirikan mengejar pertumbuhan yang diilhami oleh pandangan dunia ala Descartes yang mekanistik, rasional, telah berpengaruh kuat pada semua “ilmu” dan pada “cara berpikir”. Pandangan-pandangan yang tidak sesuai dengan kerangka berpikir dengan metode ilmiah tidak akan dibicarakan secara serius dan biasanya dikesampingkan, jika tidak dijadikan cemoohan. Cara berpikir tidak ilmiah dianggap *out of date*, tidak modern dan dianggap, dan tidak maju. Selalu mengagungkan cara berpikir dengan metode ilmiah, logis, rasional.

### **Kebijakan Pemerintah Terhadap Sistem Penjurusan**

Secara filosofis sebenarnya sistem penjurusan di SMA dilaksanakan dalam rangka: pertama, penelusuran minat, bakat, dan kemampuan anak-anak di bidang akademik. Namun, secara normatif persyaratan yang ditentukan memperhatikan nilai akademik siswa saat mereka naik ke kelas XI. Kedua, ketentuan mata pelajaran ciri khas jurusan, maksudnya siswa yang bisa masuk ke jurusan IPA adalah siswa yang nilai mata pelajaran Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi pada raport semester 2 (kelas X) mengalami ketuntasan. Demikian pula siswa yang bisa memilih jurusan IPS nilai mata pelajaran Sejarah, Geografi, Ekonomi, dan Sosiologi pada raport semester 2 (kelas X harus mengalami ketuntasan, tidak terkecuali siswa yang ingin memilih jurusan Bahasa. Bagi siswa yang ingin memilih jurusan Bahasa, mereka harus mengalami ketuntasan belajar dalam mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Bali, dan Bahasa Asing lainnya pada raport semester 2 (Kelas X) (Permendiknas No. 22 tahun 2006).

Jika diperhatikan Permendiknas No.22 tahun 2006 di atas, secara filosofis tidak mengacu pada prinsip-prinsip pedagogis sebagaimana diharapkan oleh para ahli pendidikan. Dikatakan demikian karena sistem penjurusan yang digariskan dalam

Permendiknas tersebut hanya mempersyaratkan nilai ketuntasan siswa pada mata pelajaran yang menjadi penciri dari jurusan yang mereka pilih. Hal demikian berakibat kemampuan-kemampuan khusus yang dibawa anak dari sejak lahir sebagaimana diyakini oleh Scovenhouwer dan para pengikutnya dalam aliran nativisme (Tilaar, 1999:19) sangat diabaikan. Padahal menurut penganut aliran nativisme anak begitu dilahirkan sebenarnya sudah membawa bakat-bakat khusus yang disebut hereditet. Jika dalam hal pemilihan jurusan bakat-bakat yang dibawa anak sejak dari lahir diperhatikan tentu akan mempermudah membantu anak dalam mengikuti irama perkembangannya.

Selain kurang memperhatikan minat dan bakat siswa dalam proses pemilihan jurusan, proses pelaksanaannya sampai saat penelitian ini dilakukan juga masih terkesan dikotomis. Artinya, kebijaksanaan pemerintah dalam hal ini masih memberi ruang yang lebih luas bagi jurusan IPA mendominasi jurusan IPS dan bahasa. Salah satu contoh adalah anak-anak (siswa) dari jurusan IPA memiliki peluang yang sangat besar untuk memilih jurusan di Perguruan Tinggi dibandingkan anak-anak dari jurusan IPS atau Bahasa. Hal ini diakui oleh Ida Bagus Alit Bajra Manuaba, S.Pd. (Kepala SMA Dwijendra Denpasar) dengan mengatakan sebagai berikut.

... dari segi aturan, sistem penjurusan di SMA menurut hemat saya masih bersifat dikotomis. Memang jika dilihat normatifnya Permendiknas No. 22/2006, seakan memberi ruang yang sama pada anak-anak baik yang mengambil jurusan IPA maupun anak yang mengambil jurusan IPS untuk memasuki lembaga pendidikan tinggi. Dalam arti baik anak yang jurusan IPS maupun anak yang jurusan IPA, setelah tamat SMA diberi kesempatan yang sama untuk memilih jurusan setelah mereka masuk ke perguruan tinggi. Tetapi secara sistemik anak-anak yang mengambil jurusan IPA justru lebih leluasa memilih jurusan di perguruan tinggi dibandingkan dengan anak-anak yang jurusan IPS. Saya tidak mengerti kenapa hal ini bisa terjadi? Tanyanya menegaskan (Wawancara 3 Februari 2012).

Hal senada dikatakan juga oleh salah satu guru SMA Negeri 1 Denpasar, yakni Drs. I Wayan Sadia, M.Pd. (guru matematika) dengan mengatakan sebagai berikut.



*Kepala SMA Dwijendra Denpasar saat diwawancarai di ruang kerjanya*

... saya kurang mengerti dari segi aturannya, tetapi kenyataannya saya lihat di lapangan memang anak-anak yang tamatan jurusan IPA, lebih leluasa bisa memilih jurusan setelah mereka memasuki lembaga pendidikan tinggi dibandingkan dengan anak-anak yang jurusan IPS. Hal ini membuat para siswa di sini lebih suka memilih jurusan IPA dibandingkan jurusan IPS. Padahal setelah tamat di jurusan IPA mereka belum tentu memilih jurusan IPA. Banyak anak-anak kami di sini waktu dia masih sekolah di sini ramai-ramai memilih jurusan IPA, tetapi setelah tamat mereka malah lari ke jurusan IPS, atau ke jurusan Bahasa. Ada kasus menarik dari sistem penjurusan ini, salah satu siswa kami waktu di SMA dia berjuang sekuat daya upaya untuk bisa tembus di jurusan IPA, tetapi setelah tamat, malah dia sama sekali tidak memilih jurusan IPA, jurusan yang dipilih adalah Jurusan Sastra Daerah Fakultas Sastra, di salah satu perguruan tinggi di Denpasar. Ini kan lucu, jika dari awal memang mau memilih jurusan IPS atau jurusan Bahasa kenapa tidak dari SMA saja memilih jurusan IPS atau Bahasa kan lebih mantap setelah terjun ke perguruan tinggi (Wawancara 4 Februari 2012).

Mencermati kedua pendapat guru di atas, memang kelihatan seperti halnya Permendiknas No. 22/2006 bersifat dikotomis. Seperti fakta di lapangan, walaupun para guru telah memberikan informasi yang berimbang dalam pemilihan jurusan, IPA tetap menjadi jurusan yang favorit. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang guru senior di SMA Negeri 1 Denpasar yang namanya minta dirahasiakan dengan pernyataan sebagai berikut.



*Salah seorang guru Matematika SMA Negeri 1 Denpasar yang ditunjuk sebagai informan*

...teman-teman dari guru-guru IPS dan Bahasa kurang mampu mempersuasi siswa untuk memilih jurusan IPS atau Bahasa. Padahal saat sosialisasi tentang sistem penjurusan kepada anak-anak kita bisa menjelaskan secara gamblang mengenai hakikat keilmuan, sasaran yang ingin dituju, serta kelebihan dan kekuarangan masing-masing jurusan yang ada, sehingga anak-anak memahami betul hakikat dan kompetensi dari masing-masing jurusan sebelum mereka menjatuhkan pilihannya. Kenyataanya IPA tetap mendominasi.”

Kemudian salah seorang guru Bimbingan dan Konseling di SMA Negeri 1 Denpasar, membenarkan jika sebelum dilakukan sistem penjurusan didahului dengan sosialisasi ke kelas-kelas, baik oleh guru BK maupun oleh guru bidang studi, seperti disampaikan guru BK SMA Negeri 1 Denpasar, Ibu Dra. Ida Ayu Tirta (55 Tahun) sebagai berikut:

... sebelum sistem penjurusan dimulai anak-anak telah diberikan sosialisasi, baik oleh guru BK maupun oleh wali kelasnya masing-masing, mengenai sistem penjurusan itu sendiri. Anak-anak telah diberikan penjelasan secara panjang lebar mengenai kelebihan dan kekurangan dari tiap-tiap jurusan yang ada. Tetapi dalam kenyataannya tetap saja anak-anak lebih banyak memilih jurusan IPA dibandingkan dengan jurusan IPS atau Bahasa. Hal ini mungkin disebabkan anak-anak akan merasa lebih bergengsi jika memilih jurusan IPA dibandingkan dengan jurusan IPS atau Bahasa. Saya tidak mengerti dengan kondisi ini apa yang membuat mereka bisa demikian,” katanya penuh tanya (Wawancara (25 Februari 2012).



*Dra. Ida Ayu Tirta Guru BK SMA Negeri 1 Denpasar  
saat diwawancarai di ruang kerjanya*

Pernyataan di atas mengasumsikan bahwa dalam sistem penjurusan di SMA, masih cenderung menghasilkan pemahaman yang dikotomis pada masyarakat dan siswa, *elite* tidak *elite*, pintar tidak pintar, punya peluang banyak tidak punya peluang banyak, menjanjikan tidak menjanjikan, dan predikat lain yang "*elite*". Makna *elite* di sini semula bersifat personal, kemudian berkembang ke model-model yang lebih mempunyai penerimaan secara kolektif, sehingga tampak seperti berbasis massa padahal sesungguhnya berbasis *elite*. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Bourdieu (1990:110) tentang habitus fraksi budaya dominan, yang mengatakan bahwa: institusi-institusi ekonomi dominan telah terstruktur untuk menguntungkan mereka yang telah memiliki modal ekonomi. Demikian pula institusi-institusi pendidikan telah terstruktur untuk menguntungkan mereka yang telah memiliki modal budaya dalam bentuk habitus fraksi budaya dominan.

Hal demikian mengandung maksud bahwa sistem penjurusan di SMA dapat dianggap sebagai arena bermain, yang di dalamnya selalu ada peluang untuk saling memperebutkan dan mempertukarkan modal, baik modal sosial, modal budaya, modal ekonomi, maupun modal simbolik. Jika ini yang terjadi, maka dapat dikatakan bahwa proses pemilihan jurusan di SMA juga



dapat dipandang sebagai arena sosial yang di baliknya selalu ada relasi kekuasaan.

Hal ini dapat dilihat dari perbandingan jumlah jam pelajaran IPA, IPS, dan Bahasa di Kelas X. Jam pelajaran IPA dan Matematika, rata-rata tiga jam dalam seminggu ditambah “jam ekstra” sehingga menjadi empat jam dalam seminggu. Sedangkan pelajaran IPS hanya dua jam dalam seminggu. Bahasa Indonesia lima jam dalam seminggu, kalau dicermati bukan semata-mata untuk peningkatan kompetensi tetapi lebih banyak disebabkan karena Bahasa Indonesia di “UN” kan.

Selain sebagai arena sosial, sistem penjurusan di SMA oleh para siswa dan orang tuanya juga sering dijadikan sebagai panggung sosial yang di dalamnya makna-makna sosial saling diperbutkan. Maksudnya, jurusan yang dianggap favorit di SMA oleh para siswa dan orang tuanya tidak jarang dijadikan sebagai simbol status yang dikondisikan melalui komunikasi pemasaran sebagai salah satu bentuk budaya konsumerisme. Atau dengan kata lain, pemilihan jurusan yang seharusnya dilandasi oleh minat, bakat, dan kemampuan siswa sesuai dengan jurusan yang dipilih, tetapi penjurusan dipandang sebagai arena sosial, minat, bakat. Kemampuan bukan lagi sebagai acuan normatif untuk memilih jurusan, tetapi acuannya adalah hasrat atau keinginan untuk memperoleh jurusan yang dapat memberikan simbol status yang tinggi.

Akibatnya, anak yang sesungguhnya tidak mempunyai minat, bakat, dan kemampuan untuk memilih jurusan yang dianggap favorit lalu dipaksakan untuk memilih jurusan tersebut. Untuk menghindari hal inilah sebenarnya perlu melakukan penelusuran terhadap minat, bakat, dan kemampuan siswa sehingga setelah mereka duduk di jurusan yang mereka pilih benar-benar sesuai dengan potensi yang mereka miliki.

Di Indonesia pendidikan masih berorientasi pragmatis, yaitu diarahkan pada kepentingan penyediaan sumber daya manusia (SDM) berkualitas cerdas intelektual (IQ), dan untuk kepentingan pembangunan yang dapat dilaksanakan secara ekseleratif. Konsepsi pendidikan belum mampu menyentuh dimensi kemanusiaan yang paling *human*. Sisi *humanity* manusia

tereduksi oleh sisi pragmatisme belaka yang bertolak dari materialistik. *Out put* institusi pendidikan diciptakan untuk bisa terserap di pasar kerja, dan menguasai keterampilan (*skill*) yang tinggi. Konsepsi pendidikan seperti inilah yang menyebabkan aspek humanistik menjadi terabaikan bahkan ditinggalkan (Wahab, 2011:11-12).

Cara berpikir seperti di atas telah menyumsum dan mendarah daging sampai saat ini pada kehidupan bermasyarakat, dan berbangsa di bidang pendidikan. Regulator pendidikan tanpa sadar telah menerapkan konsep pendidikan pragmatisme, yang telah merambah pada regulasi pendidikan dan pemahaman masyarakat, dan dunia informasi. Marjinalisasi jurusan IPS dan Bahasa menjadi sebuah kasus. Menomorsatukan jurusan IPA dan memomorduakan jurusan IPS dan Bahasa.

Contoh lainnya adalah materi pelajaran IPA di SMA, sangat tendensius dalam menginformasi “manfaat” IPA bagi perluasan kemudahan umat manusia. Sangat berbeda dengan materi IPS di SMA, yang menginformasikan materi akademik yang normatif dengan tidak memberikan informasi manfaat pengetahuan IPS terhadap kehidupan umat manusia (Khosim, 2007; Kurniatin, 2007; Saripudin, 2006; Suhardi, 2009; Sunardi, 2008:204-262; Sutarno, 2009; Riandari, 2009:15-163;). Dari sana dapat diramalkan apa yang terjadi, seperti ungkapan yang disampaikan dari beberapa nara sumber penelitian ini.

### **Persepsi Siswa Terhadap Jurusan IPA**

Persepsi siswa terhadap jurusan IPA, dapat dikelompokkan menjadi tiga. Kelompok pertama menyatakan bahwa jurusan IPA, adalah jurusan yang menjanjikan karena dapat melanjutkan studi kejenjang pendidikan tinggi pada program studi “unggulan”, favorit, dan bergengsi. Setelah menyelesaikan studi di program studi unggulan dinyatakan pula bahwa masa depan lebih pasti. Kelompok kedua menyatakan bahwa jurusan IPA memiliki peluang lebih banyak untuk memilih program studi ketika melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Seperti disampaikan Made Ayu Dwi Octavanny siswi kelas XI IPA 3 SMA Negeri 1 Denpasar,



*Wawancara dengan Made Ayu Dwi Octavanny siswi  
Kelas XI IPA 3 SMA Negeri 1 Denpasar*

..... IPA memiliki peluang lebih banyak untuk dapat memilih jurusan ke perguruan tinggi. Program studi yang dapat dipilih yang menurut saya, relatif program studi unggulan. Saya tidak mengatakan IPS dan Bahasa kurang bagus, kebetulan hobi saya di IPA.”

Pernyataan yang sama juga disampaikan Arianai Kls XII IPA 1 SMA Dwijendra Denpasar.

.....alumni IPA bebas melanjutkan studi ke perguruan tinggi, dan juga lebih bergengsi, karena IPS imagenya kurang bagus di masyarakat, walaupun saya akan melanjutkan studi ke perguruan tinggi program studi ekonomi. Anak-anak IPA lebih pintar dibandingkan anak-anak IPS dan Bahasa .”

Kelompok ketiga menyatakan bahwa jurusan IPA lebih bergengsi dari jurusan IPS, karena dianggap lebih pintar dibanding dengan siswa jurusan IPS dan atau Bahasa.

Menyimak persepsi siswa kelompok pertama yang menyatakan bahwa jurusan IPA adalah jurusan yang menjanjikan karena dapat melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi pada program studi “unggulan”, favorit, dan bergengsi, dengan masa depan yang lebih pasti, maka dapat dianalisis sebagai berikut. Bahwa pendidikan kita lebih menekankan pada prinsip-prinsip



*Wawancara dengan Arianai Kls XII IPA 1 SMA Dwijendra Denpasar*

pragmatis, seperti pernyataan Dewey (2001:23-28) yang menyatakan bahwa pragmatisme adalah filsafat yang mementingkan hal-hal yang praktis (*practicality*) dan kerja keras yang kriteria utamanya adalah sukses finansial. Pragmatisme juga dinamakan filsafat bisnis karena mengutamakan hasil secara ekonomi dibandingkan hasil yang berupa nonekonomi. Kaum pragmatis, filsafatnya yaitu harus mempunyai nilai uang (*cash value*). Pada umumnya, pragmatisme dianggap sebagai pandangan yang khas Amerika, yaitu suatu gerakan filsafat yang lahir dari pola-pola kebudayaan Amerika. Dalam masyarakat Amerika Serikat, tidak ada demarkasi yang jelas antarkelas. Posisi sosial individu tidak ditentukan oleh leluhur, atau nenek moyangnya tetapi ditentukan oleh prestasi. Setiap individu dididik untuk kerja otak dan kerja tangan secara serentak sehingga kehidupan intelektual dan kehidupan praktis saling mengisi. Contoh sederhana dalam menggunakan tangan kanan dan tangan kiri. Tidak ada pertimbangan etis, seperti masyarakat “timur”. Begitu pula tentang *ulu* dengan *teben*, tidak penting, yang terpenting adalah praktis, efisien, dan logis, sehingga produksi menjadi maksimal.

Ini tentu bertentangan dengan konsep *the need for Achievement (n-Ach)* dari Mc Clelland, yang menyatakan bahwa keinginan, kebutuhan, atau dorongan untuk berprestasi ini

tidak sekadar untuk meraih imbalan material yang besar. Orang dengan *n-Ach* tinggi, memiliki kebutuhan untuk berprestasi, mengalami kepuasan bukan karena mendapatkan imbalan dari hasil kerjanya, tetapi karena hasil kerja tersebut dianggapnya sangat baik. Ada kepuasan bathin tersendiri kalau berhasil menyelesaikan pekerjaan dengan sempurna. Imbalan material menjadi faktor sekunder (Budiman, 1996:22)

Ditinjau dari pendidikan kritis model pendidikan yang pragmatis akan menghasilkan sikap praktis (*practicality*); kerja keras (*workability*); mempunyai nilai uang (*cash value*); personalisme dan dinamisme; menolak kepasrahan (*agresive*); pasti bisa kalau ada kemauan; menjelajah (*achievement status*); alam sebagai objek; demokrasi; dan sekularisme. Dengan demikian akan muncul pemahaman bahwa sekolah menjadi “tempat” untuk mencari pekerjaan, “mimpi-mimpi indah pun” terbangun di dalamnya. Mencari jurusan IPA supaya dapat melanjutkan studi ke pendidikan tinggi pada program studi unggulan, favorit, dan bergengsi. Setelah tamat studi masa depan lebih terjamin, pernyataan ini mengindikasikan bahwa uang sebagai indera keenam, karena tanpa uang tidak akan dapat memanfaatkan sepenuhnya lima idera lainnya. Padahal bersekolah adalah kegiatan diri untuk dapat dan sanggup menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab diri. Sekolah bukan semata-mata untuk mencari pekerjaan (berparadigma instrumental) tetapi untuk mempersiapkan diri menjadi pelaku di dalam kegiatan hidup, dan menjadi insan yang memiliki budaya ilmiah (berparadigma pencerahan). Mereka yang berbudaya ilmiah akan dapat dengan mudah mengikuti perubahan menuju ketertiban dan keadilan. Pengguna *science* tanpa dibarengi budaya ilmiah akan mudah melenceng dan bias. Di dalam masyarakat ilmiah yang tanpa budaya ilmiah maka perjalanan ilmu akan mengalami hambatan, atau melenceng ke arah nonilmiah (Dewey, 2001:23-28; Marzoeki, 2000:xii-3; Prasetyo, 2008:1; Suwati, 2008:2-6).

Kelompok pertama lebih mengabdikan dirinya melalui dominasi sains dan teknologi. Menempatkan ilmu-ilmu kealaman sebagai standar kebenaran tertinggi, akibatnya nilai moral religius kehilangan peran dan wibawanya. Baik buruk

hanya ditentukan oleh kepentingan sang penguasa. Menurut Nietzsche, dominasi sains dan teknologi akan memberi peluang kepada berkurangnya pertimbangan etis dan moral. Nietzsche menegaskan bahwa “Barat” sebagai penghianat nilai moral dan humanisme, sebagai contoh adalah Kolonialisme Barat terhadap Timur. Dampak dari “didewakannya” ilmu-ilmu kealaman adalah tidak diakuinya Filsafat, Sejarah, dan Budaya sebagai kegiatan ilmiah. Apabila dihubungkan dengan marginalisasi jurusan IPS dan Bahasa di Sekolah Menengah, hal ini sangat memiliki hubungan yang signifikan (Munir, 2008:2-3).

Persepsi siswa kelompok pertama, apabila dihubungkan dengan pernyataan Murchland (2002:27-34) disebut sebagai peradaban dingin tanpa simpati, sebagai hasil dari kepentingan komersial dan isolasi. Mereka juga menyatakan bahwa persepsi siswa kelompok pertama menunjukkan bahwa terjadi pemahaman ideal-ideal yang palsu. Mereka dianggap kikir, materialistis, asyik dengan segala yang besar, asyik dengan mesin-mesin, uang, serta lupa terhadap kekuatan alam yang lebih besar, kepercayaan diri, dan jiwa atma. Ditegaskan oleh Schrijvers (2000:55) produksi pengetahuan dijadikan tidak netral, tetapi dijadikan norma-norma ideologis yang melayani kepentingan ras dominan, kelas yang berkuasa, dan gender yang berkuasa. Dalam kasus ini dianalogkan dengan kepentingan sains dan teknologi yang mengkonstruksi kekerasan, dan memarginalkan non sains dan humanisme.

Persepsi dari siswa kelompok kedua menyatakan bahwa jurusan IPA memiliki peluang lebih banyak untuk memilih program studi ketika melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Hal ini dapat dianalisis bahwa regulasi pendidikan di Indonesia masih kurang mencerminkan keadilan dalam pengembangan ilmu. Membiarkan anak-anak dari jurusan IPS, dan Bahasa tidak bisa bersaing dalam ujian masuk perguruan tinggi dengan teman-temannya dari jurusan IPA. Menurut para ilmuwan pendidikan, potensi setiap manusia sesungguhnya tak terbatas, akan tetapi hingga tingkat peradaban sekarang ini, baru digunakan hanya satu persen. Menurut pendidikan Neo-Humanis pendidikan seharusnya memberikan pendidikan kepada keseluruhan bagian yang membentuk anak, bukan hanya menghafalkan informasi

dan menjejalkannya kepada intelek, atau melatih anak untuk menjadi “robot” agar guru menjadi senang karena memberikan jawaban-jawaban yang dikehendaki yang dikatakan benar. Tetapi harus mengembangkan semua potensi anak sehingga anak-anak (siswa) memiliki kecerdasan yang lengkap (Acarya, 2001:2-3).

Ditinjau dari sitem penjurusan di sekolah menengah atas, khususnya di SMA Negeri 1 dan SMA Dwijendra Denpasar terkesan ada pembiaran jurusan IPS, dan Bahasa “ditinggal” oleh anak-anak sekolah. Dalam pembinaan mata pelajaranpun terkesan lebih memprioritaskan pelajaran dari kelompok/jurusan IPA, sementara IPS, dan bahasa dinomorduakan. Anak-anak dari jurusan IPS dan Bahasa dapat dipastikan kalah bersaing dengan anak-anak dari jurusan IPA. Pendidikan seharusnya menjadi wahana manusia untuk belajar hidup menyelesaikan problem kehidupan yang sedang dan akan dihadapi. Sayangnya pendidikan tidak lebih dari paket peniruan gaya hidup penguasa, birokrat pendidikan, dan para orang dewasa. Pendidikan sering terperangkap sebagai salah satu sektor sasaran liberalisme perdagangan. Pendidikan juga dengan mudah terperangkap sebagai praktik sebuah penindasan dan ketidakadilan karena pengaruh kapitalisme pendidikan (Prasetyo, 2008:34). Sebagai contoh pendidikan seharusnya diorientasikan tidak hanya dapat meningkatkan kecerdasan atas prestasi otak, tetapi juga sebagai peningkatan kecerdasan kualitas spiritual dan religius, serta pemihakan kepada kemanusiaan tradisional (Isjoni, 2008:22). Pernyataan Isjoni (2008) sangat tepat apabila dihubungkan dengan terjadinya marjinalisasi jurusan IPS dan bahasa di Sekolah Menengah Atas. Pendidikan seharusnya memberikan perhatian yang sama terhadap IPA, IPS, dan Bahasa, sehingga ada keadilan dalam pengembangan ilmu yang sudah tentu akan berdampak pada kecerdasan peserta didik. Dengan demikian kenangan ilmuan sosial di aula Fakultas Sastra Universitas Indonesia pada tahun 1970 dapat menjadi pedoman dalam pembangunan dan pengembangan pendidikan, bukan hanya sebagai sebuah prasati tanpa makna.

“...ingin membangun untuk dapat hidup bahagia dalam suatu masyarakat yang lebih adil, yang lebih makmur, yang memberi kebebasan berpikir

dan berbicara, tetapi tanpa membahayakan keindahan alam kita dan tanpa membahayakan nilai-nilai yang kita junjung tinggi sampai sekarang” (Mas’oed, 1999:2)

Pernyataan ilmuwan sosial di atas mengandung makna bahwa, pemilihan jurusan memberi peluang yang sama kepada para pemilih dengan prinsip jangan sampai mengganggu niatan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, dan keadilan sehingga alam dan nilai-nilai kebenaran yang dijunjung tinggi menjadi ajeg. Hal ini sesuai dengan pendapat Isjoni (2008:23) yang menyatakan bahwa, pendidikan seharusnya tidak diletakkan dan dikelola sebagai paket pengembangan jiwa atau kepribadian hingga keterampilan, tetapi pemberian fasilitas bagi setiap manusia untuk bisa mengalami dan menyelesaikan sebanyak mungkin masalah. Dengan demikian, pendidikan merupakan rekonstruksi pengalaman sejarah secara akumulatif sehingga manusia bisa belajar dari sejarah masa lalu. Kecerdasan tidak hanya diorientasikan pada prestasi otak, tetapi juga sebagai kualitas spiritual dan religiusitas serta pemihakan pada kemanusiaan tradisional.

Pernyataan dari siswa kelompok ketiga yang menyatakan bahwa jurusan IPA lebih bergengsi dari jurusan IPS dan Bahasa, apabila dianalisa pada kasus ini bahwa siswa lebih mementingkan “stempel’ dibandingkan dengan “nilai” yang terkandung dari jurusan IPA, IPS, dan Bahasa. Dari informasi yang mereka dapatkan bahwa alumni IPA jauh lebih sejahtera dibandingkan dengan Alumni IPS, dan Bahasa. Informasi itulah yang mengkonstruksi pikiran siswa sehingga mereka lebih cenderung mengunggulkan jurusan IPA dibandingkan dengan IPS, dan Bahasa. Karena unggul maka lebih bergengsi. Informasi dari siswa kelompok ketiga ini sangat menarik bila dianalisis dengan teori Modernisme.

Inti dasar teori ini adalah pandangan tentang konsumsi sebagai suatu kegiatan eksternalisasi. Tokoh penting teori ini adalah Judith Williamsons dengan pandangannya yang mengatakan bahwa di dalam masyarakat konsumen sekarang, konsumsi memberikan kesempatan tertentu bagi daya kreativitas, seperti sebuah mainan di mana seluruh bagian-bagiannya



telah ditentukan akan tetapi kemungkinan, kombinasinya berlipat ganda. Membeli dan memiliki di dalam masyarakat kita memberikan rasa mengontrol. Bila anda membeli sesuatu, anda cenderung merasa mengontrolnya (Piliang, 2003:148).

Apa yang tampak dari pemikiran Williamsons adalah, bahwa ada satu perasaan kebebasan atau bahkan kekuasaan tertentu yang beroperasi dan dimiliki oleh subjek di balik tindakan konsumsinya. Williamsons, berpandangan sangat positif terhadap konsumerisme yang melihatnya sebagai media representasi kekuasaan, khususnya dalam mengontrol objek-objek. Objek-objek dimuati dengan makna-makna yang digunakan untuk mengkomunikasikan atau menandai kekuasaan tersebut. Jadi, konsumsi di sini menjadi sebuah fenomena bahasa dan pertandaan, dan dengan demikian masuk ke dalam kawasan semiotika. Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa konsumsi sebagai suatu sistem diprensiasi, yakni sistem pembentukan perbedaan-perbedaan status, simbol, dan prestise sosial adalah sistem yang menandai kedatangan masyarakat konsumen. Di dalam era konsumerisme, masyarakat hidup di dalam suatu bentuk relasi subjek dan objek yang baru, yaitu relasi konsumerisme.

Dalam masyarakat komsumerisme dewasa ini media komunikasi kebudayaan, seperti TV, surat kabar, radio, dan lain-lain mempunyai arti penting untuk mengkomunikasikan berbagai komoditas atau menampilkan gaya hidup para selebriti. Orang yang menikmati tampilan (iklan) tersebut secara terus-menerus, disadari atau tidak mereka akan mengidentifikasi dirinya dengan gaya hidup para selebriti tersebut. Akhirnya, mereka pun terperangkap pada gaya hidup para selebriti (baca:gaya hidup konsumerisme) (Atmadja:2005:52).

Terkait dengan persoalan iklan, apapun bentuk pesan yang disampaikan oleh media komunikasi kebudayaan pada dasarnya merupakan konstruksi yang mengandung ideologi, kepentingan, niat untuk mendapatkan keuntungan ataupun kekuasaan (Nurohrman, 2003). Gejala ini tidak tampak secara nyata, melainkan bersembunyi di balik pesan yang diucapkan, perilaku sosial, dan gambar yang ditampilkannya. Dalam konteks

penampilan gaya hidup para selebriti di berbagai media iklan, yang menarik untuk dikaji adalah bagaimana para remaja, termasuk para siswa SMA memaknai gaya hidup para selebriti tersebut. Menurut Piliang, (1998;2004; Bungin, 2001) tayangan iklan di media massa, terutama di televisi memiliki daya tarik yang luar biasa, tidak saja karena iklan dapat menjelaskan nilai guna suatu barang yang diiklankan, tetapi terkait pula dengan pencitraan yang disertai kemampuan membujuk lewat gaya, ucapan, atau aksi yang dilakukan bintang iklan sebagaimana ditampilkan oleh media massa itu sendiri.

Penerimaan masyarakat terhadap gaya hidup para selebriti, khususnya anak-anak remaja, (baca: para siswa SMA) tidak terbatas pada pengonsumsi barang-barang komoditi, tetapi merembes pula pada nilai dan simbol-simbol kehidupan lainnya. Misalnya, dalam hal berbelanja, ada kecenderungan para remaja lebih memilih berbelanja di pasar-pasar modern seperti *mall*/swalayan dibandingkan dengan di pasar-pasar tradisional. Demikian pula persoalan makan misalnya, anak-anak muda (baca:para remaja) lebih memilih makan di restoran yang *fast food* dibandingkan di warung makan atau di rumah, dan banyak lagi contoh-contoh lain yang mencerminkan gaya hidup para remaja dewasa ini. Bukan hanya itu, dalam menentukan pilihan atas jurusan dalam konteks pembelajaran di sekolahpun bukan tidak mungkin para remaja kini dipengaruhi oleh gaya hidup (*life style*). Artinya, para siswa di dalam memilih jurusan untuk menentukan keahlian yang dimiliki, cenderung didasarkan atas pertimbangan nilai simbol dibandingkan nilai guna. Dalam arti, mereka memilih jurusan IPA, IPS, atau Bahasa, tidak mempertimbangkan bakat-bakat khusus (potensi) yang mereka miliki, melainkan lebih didasari atas pertimbangan gengsi atau pandangan mainstream masyarakat yang menganggap suatu jurusan tertentu lebih hebat dari jurusan yang lain.

Padahal, jika mengacu pada teori pedagogis, yakni teori Nativismenya Schopenhauer dan teori Konvergensi oleh Williams Stern, bahwa anak telah mempunyai kemampuan yang dibawa sejak lahir dan tinggal dikembangkan melalui sentuhan lingkungan, maka para siswa di dalam memilih jurusan di

sekolah seharusnya menyesuaikan dengan bakat-bakat (potensi) yang mereka miliki, sehingga di dalam proses pendewasaan dirinya dapat berlangsung secara alamiah dan optimal (Tilaar, 1999:19).

Namun, yang terjadi pada tataran realitas para siswa di dalam memilih jurusan lebih didasarkan pada pertimbangan nilai simbol (gengsi) dibandingkan nilai fungsi. Anak-anak (baca: para siswa SMA) dalam hal pemilihan jurusan, cenderung memilih Jurusan IPA dari pada Jurusan IPS dan Bahasa, karena menurut penilaian mereka Jurusan IPA lebih unggul dibandingkan dua jurusan lainnya. Padahal setelah mereka menyelesaikan pendidikan di SMA, dan begitu memasuki jenjang pendidikan tinggi belum tentu tertarik untuk memilih program studidari bidang ilmu IPA. Kondisi ini menunjukkan bahwa betapa kuatnya pengaruh gaya hidup (*life style*) menerpa kehidupan masyarakat khususnya para remaja (baca: para siswa) dewasa ini. Sampai-sampai dalam hal pemilihan jurusan di sekolah pun ikut dipengaruhi oleh gaya hidup (*lookisme*) itu sendiri.

Kondisi ini menjadi semakin kuat dalam kehidupan masyarakat karena manusia terjerat pula pada politik konsumsi, politik tontonan (*lookisme*) dan politik citra (Lull, 1993 dan Atmadja, 2005). Politik konsumsi artinya, masyarakat memaknai konsumsi sebagai ideologi, yakni dalam arti bagaimana nilai dan makna kehidupan, aktualisasi, dan eksistensi diri diperoleh lewat tindakan konsumsi. Politik tontonan (*lookisme*) artinya, kenikmatan hidup manusia tidak saja diprolehnya melalui kebiasaan menonton, sepertimenonton TV, film, dan tari-tarian, tetapi yang lebih penting mereka ingin pula ditonton oleh orang lain. Jadi, kebermaknaan hidup manusia terletak pada kepuasaannya menonton dan sekaligus ditonton oleh orang lain. Sedangkan politik citra adalah apapun yang mereka konsumsi penekannya pada pencitraan, penampilanisme atau wajahisme, yakni agar tampak modern, kaya, atau seperti selebriti. Oleh karena itu orang tidak ingin menjadi dirinya sendiri, melainkan ingin menjadi orang lain (misalnya, menjadi bintang iklan atau bintang sinetron). Akibatnya, manusia tidak lagi sebagai *user*, yakni mengkonsumsi sesuatu berdasarkan nilai guna, tetapi telah

berubah menjadi konsumer, yakni mengkonsumsi sesuatu karena muatan nilai simbolik, pencitraan diri atau agar penampilannya enak ditonton oleh orang lain (Piliang, 1998, 2004; Aldin, 2004).

Dalam perkembangannya gaya hidup model ini ternyata tidak hanya bersentuhan dengan kehidupan dunia material, seperti cara berpakaian (*fashionable*), persoalan makanan, dan yang lain-lain, tetapi telah merembes pula pada persoalan-persoalan psikologis seperti dalam hal manusia menikmati rasa keindahan, rasa aman, dan tidak terkecuali dalam hal manusia menikmati pendidikannya. Hal ini tampak dari bagaimana masyarakat dewasa ini memaknai sebuah institusi pendidikan, dalam arti banyak orang tua siswa yang memaknai pendidikan tidak hanya dari segi nilai fungsi, tetapi juga dari segi nilai simbol. Artinya, dalam hal memilih sekolah sebagai tempat untuk mendewasakan putra-putrinya dewasa ini, banyak orang tua siswa menentukan pilihannya pada sekolah-sekolah favorit dengan biaya yang jauh lebih mahal daripada sekolah biasa, meski pun dari segi kualitas belum tentu menjamin lebih baik (lihat Disertasi Suda, 2009a). Bukan hanya itu, sampai-sampai dalam memilih jurusan pun kini para remaja sering terjebak pada nilai simbol, yakni memilih jurusan lebih didasari oleh pertimbangan gengsi daripada pertimbangan akan potensi atau bakat-bakat yang mereka miliki. Akibatnya, anak yang memang tidak mempunyai talenta dalam bidang tertentu, tetapi karena pertimbangan gengsi (status sosial) mereka memilih jurusan tersebut, akhirnya dalam proses pendewasaan dirinya tidak dapat berlangsung secara optimal.

### **Persepsi Siswa Terhadap Jurusan IPS dan Bahasa**

Hasil penelitian tentang pandangan siswa terhadap jurusan IPS dan Bahasa, menunjukkan suatu ketercengan khususnya dari siswa-siswa IPS. Mengingat jumlah siswa IPS sangat sedikit, maka hasil penelitian relatif menunjukkan kesamaan. Siswa-siswa IPS menyatakan bahwa jurusan IPS adalah jurusan yang memang mereka sukai sesuai dengan bakat, kemampuan, dan minatnya. Mereka menentukan pilihannya sesuai dengan kemampuan, dan keinginannya tanpa ada campur tangan dari pihak manapun.

Sebagian besar mereka menyatakan akan melanjutkan studi ke pendidikan tinggi sesuai dengan jurusannya. Mereka menyangkan sikap teman mereka yang memilih jurusan IPA, karena ikut-ikutan, dan “dipaksa” pihak lain. Menurutnya banyak teman mereka yang jurusan IPA belum dapat menentukan pilihan program studi apa yang akan dipilih ketika melanjutkan studi ke pendidikan tinggi. Hal ini tentu sangat berbeda dengan pernyataan siswa-siswa jurusan IPS, mereka dengan penuh keyakinan akan melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi dengan program studi yang sesuai dengan jurusannya sekarang. Mereka tidak pernah merasa sebagai siswa “golongan kedua”, karena mereka mengetahui banyak temannya yang memilih jurusan IPA memiliki kemampuan akademik yang lebih rendah dibandingkan dirinya. Seperti yang disampaikan oleh siswi Ni Made Ayu Chyntia Trisna Eva Dewi siswi kelas XI IPS, SMA Negeri 1 Denpasar,

“...IPS dan Bahasa adalah jurusan yang keberadaannya sama dengan jurusan IPA. Tidak ada perbedaan. Yang menyatakan berbeda adalah siswa yang tidak percaya diri, artinya mereka mencari IPA agar bisa memilih dua program untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, mereka tidak percaya diri dan belum memiliki kepastian akan melanjutkan ke mana. Banyak dari mereka yang kemampuan IPAnya kurang. Mohon maaf, saya juara umum II di kelas satu, tetapi karena saya memang menyukai dan berminat di IPS saya tidak mau ikut-ikutan mencari IPA, karena saya akan pasti melanjutkan ke prodi rumpun IPS di perguruan tinggi. Bisa dibuktikan banyak dari jurusan IPA yang melanjutkan studi ke perguruan tinggi mencari prodi rumpun IPS.”



*Gambar salah seorang siswi saat diwawancarai seputar sistem pemilihan jurusan di SMA Negeri 1 Denpasar*

Hal sama juga disampaikan oleh Agung Ridwan siswa kls XI IPS, SMA Negeri 1 Denpasar,

".....IPS dan IPA sama saja, saya ingin merubah image IPS yang disebut-sebut sebagai jurusan yang tidak menjanjikan, kumpulan anak-anak pemalas, saya akan buktikan bahwa anak-anak jurusan IPS, bisa lebih unggul dari anak-anak dari jurusan IPA. Saya bercita-cita menjadi pengusaha makanya dari sekarang saya harus mempersiapkan diri melalui jurusan IPS."



*Gambar salah seorang siswi saat diwawancarai seputar sistem pemilihan jurusan di SMA Negeri 1 Denpasar*

Begitu juga yang disampaikan Nani Tresna Dewi siswi kelas XII IPS, SMA Dwijendra Denpasar,

"...IPS IPA sama saja. Justru IPS lebih banyak peluang kerjanya. Anak anak IPA saja yang suka nyrobot anak-anak IPS, contoh alumni dari perguruan tinggi rumpun IPA banyak yang kerja di Bank, Asuransi, dan sektor-sektor untuk alumni IPS. Menurut saya itu tidak pas."

Ketika penelitian ini dilakukan jurusan Bahasa sudah tidak ada sehingga penulis tidak mendapatkan informasi dari jurusan Bahasa. Informasi hanya diperoleh dari siswa jurusan IPA dan IPS. Sudah dapat dipastikan mereka memiliki persepsi yang sangat berbeda terhadap Jurusan Bahasa. Siswa dari jurusan IPA menyatakan bahwa Jurusan IPS dan Bahasa adalah jurusan yang kurang menjanjikan dan kurang bergengsi, sedangkan jurusan IPA, seperti uraian di atas diyakini sebagai jurusan yang menjanjikan dan bergengsi.

Terhadap pendapat siswa IPA tentang jurusan IPS dan Bahasa, hal ini menunjukkan bahwa pendidikan menjadi sebuah sistem yang berkonsentrasi untuk memproduksi pola perilaku dan kepribadian yang dirancang penguasa dan birokrat pendidikan tanpa memberi peluang manusia tumbuh sesuai keunikan dirinya sendiri. Dalam model pendidikan seperti ini, kebudayaan kemudian dikembangkan menjadi Uniformitas. Pendidikan seharusnya menjadi wahana manusia untuk belajar hidup menyelesaikan problem kehidupan yang sedang dan akan dihadapi. Pendidikan menjadikan manusia (siswa) mampu menggunakan intelegensianya, dan mampu membuat pilihan bebas, dan mampu menyadari dirinya sebagai agen perubahan dalam sejarah peradaban. Sebagai subjek yang berkesadaran diri, manusia dapat berdistansi dengan objek yang ada di luar dirinya. melalui akal budi dan daya nalarnya, manusia dapat memahami realitas di luar dirinya dan bukan hanya memahami realitas, tetapi juga dapat mengubahnya demi kepentingan manusia itu sendiri. Sayangnya pendidikan lebih sebagai sebuah paket peniruan gaya hidup versi penguasa, birokrat pendidikan, dan para orang dewasa. Karena itulah pendidikan sering terperangkap sebagai praktik sebuah penindasan dan ketidakadilan (Isjoni, 2008:24; Sugiharto (ed), 2008: 341-342).

Kesalahan paling fatal yang sudah menjadi pola pemikiran masyarakat adalah menganggap, bersekolah pada akhirnya untuk mencari pekerjaan. Padahal bersekolah harus identik dengan belajar, sehingga dengan demikian peserta didik yang bersekolah harus belajar untuk mengubah kemampuan diri agar sesuai dengan kebutuhan hidup. Orang bersekolah adalah untuk melakukan perubahan terhadap kondisi dirinya sehingga dapat mengatasi permasalahan yang timbul di dalam kehidupannya. Hal inilah yang belum tertanam pada masyarakat sehingga, di dalam pemilihan jurusan, tidak hanya kemampuan akademik dan minat yang menentukan, tetapi juga dipengaruhi oleh keinginan pihak lain (orang tua), informasi “ekonomi libido”, dan lain sebagainya, sehingga pilihan lebih banyak pada jurusan yang “menjanjikan”. Dari uraian di atas jelas diketahui bahwa bersekolah tidak sedang mempersiapkan diri untuk mencari pekerjaan, tetapi

hanya mempersiapkan diri untuk mengembangkan kemampuan yang ada di dalam diri sehingga menjadi lengkap dan sesuai dengan kebutuhan di dalam masyarakat. Sama sekali harus dihilangkan prinsip belajar untuk mempersiapkan diri untuk dapat mencari pekerjaan. Begitulah esensi sebenarnya dari proses pembelajaran, khususnya pembelajaran formal yang diselenggarakan di sekolah-sekolah (Suwati, 2008:8-9).

Selama ini pengetahuan tentang jurusan IPA yang menjadi “idaman” sebagai suatu proses pembentukan (konstruksi) yang terus-menerus keliru dari masyarakat sehingga terjadi ketimpangan yang tajam jumlah siswa yang memilih jurusan IPA, IPS, dan Bahasa. Pembentukan (konstruksi) pengetahuan merupakan paham suatu filsafat *Konstruktivisme* yang menekankan bahwa pengetahuan adalah bentukan kita sendiri. Apabila merujuk pada kondisi penjurusan yang favorit dan non favorit, telah terjadi konstruksi pengetahuan yang pragmatis, “Sekolah untuk mencari pekerjaan” (Suparno, 2009:18)

### **Persepsi Orangtua Terhadap Jurusan IPA, IPS dan Bahasa**

Persepsi orang tua siswa terhadap jurusan IPA, IPS, dan Bahasa, ada kemiripan dengan persepsi para siswa. Para orang tua siswa lebih menekankan kepada suasana belajar yang dibangun oleh siswa pada masing-masing jurusan. Jurusan IPA menurut orang tua siswa adalah jurusan yang menjanjikan dan memiliki peluang yang lebih banyak dibandingkan jurusan IPS dan Bahasa pada pemilihan program studi ketika akan melanjutkan studi kependidikan tinggi, seperti disampaikan Bapak Drs. Made Tumbuh, mantan kepala SMA Negeri 1 Denpasar:

... orang tua siswa lebih menginginkan anaknya untuk masuk di jurusan IPA, terlepas dari peluang IPA lebih banyak dari IPS untuk ke perguruan tinggi. Anak-anak IPA menurut orang tua siswa lebih tekun belajar dibandingkan dengan anak-anak IPS. Sehingga saya sering mendatangi orang tua siswa agar anaknya dapat dipindahkan ke jurusan IPA, dengan “jaminan” orang tuanya. Persepsi lainnya bahwa anak-anak dari jurusan IPA lebih rajin belajar, lebih cerdas secara akademik, dan lebih beretika. Sedangkan jurusan IPS, dan Bahasa dipandang sebagai jurusan yang siswanya memiliki keinginan belajar yang kurang, sehingga mereka lebih mengarahkan putra-putrinya untuk memilih IPA.”



Hal ini tentu berbeda dengan persepsi dari orang tua siswa yang putra-putrinya memilih jurusan IPS, dan Bahasa, seperti dijelaskan oleh Ni Ketut Mangkin orang tua dari Ariani siswi kelas XII IPS, SMA Dwijendra Denpasar:

“.....dalam pemilihan jurusan hendaknya orang tua hanya mengarahkan sesuai dengan minat dan kemampuannya, bukan memaksakan apalagi menjajikan “surga”, tetu ini akan berdampak tidak baik terhadap perkembangan pengetahuan para siswa. Semua jurusan memiliki peluang yang sama dalam meniti masa depan, semua itu tergantung orangnya. Dengan demikian mereka membiarkan putra-putrinya memilih jurusan sesuai dengan minat dan kemampuannya.”

Pernyataan pertama yang menyatakan jurusan IPA lebih menjajikan, dan lebih bergensi. Apabila merujuk penyataan Baudrillard, yaitu memberikan ilustrasi tentang gejala-gejala dehumanisasi yang dilakukan oleh rezim global. Semua pembicaraan tentang kebutuhan didasarkan pada antropologi naif, yaitu antropologi tentang kecenderungan alamiah terhadap keberuntungan/ kebahagiaan. Keberuntungan/kebahagiaan merupakan acuan mutlak masyarakat konsumerisme dan merasa lebih modern (Baudrillard, 2004:43; Wora, 2006:36).

Secara etimologis “modern” berasal dari akar kata “modernus” yang artinya sekarang. Secara historis menurut beberapa sumber, istilah modern pertama kali muncul dalam konteks Kristiani Barat, sekitar akhir abad ke19. Suatu pemikiran untuk manamai gerakan teolog Katolik yang menggulirkan pemikiran kritis dan skeptis terhadap dogma tradisional Kristen, yang disebut dengan masa Renaisans dan *Aufklarung/* pencerahan. Salah satu pilar utama gerakan modernism adalah kerangka konseptual yang olah Bede Griffiths disebut filsafat materialis (Wora, 2006:39).

Benih filsafat materialis pada dasarnya ada dalam pemikiran Aristoteles. Aristoteles mengemukakan konsep *hylemorfisme*, yang pada dasarnya menerima dunia materi sebagai satu-satunya realitas sejati. Dikatakan pula bahwa pengetahuan harus didasarkan pada bukti pengalaman indrawi. Karena indra hanya berhubungan dengan dunia materi, maka bagi Aristoteles, pengetahuan yang sejati adalah pengetahuan tentang dunia

materi. Penganut aliran ini Rene Descartes, Fracois Bacon, Galileo Galilei, dan Isaac Newton. Mereka sepakat menyatakan bahwa pengetahuan Sains dan Matematika harus dipakai untuk menguasai alam, dalam arti mengubah dan merekonstruksi alam materi. Selain itu dinyatakan bahwa materi itu harus dipelajari dalam aspek kuantitatif, dan pengetahuan yang sejati haruslah pengetahuan yang bisa diukur dan dipahami secara matematis (Wora, 40-43).

Analisis terhadap pernyataan kedua yang menyatakan bahwa sebagai orang tua yang mengharapkan anaknya bisa menjadi dewasa sesuai dengan bakat dan kemampuannya, dapat dianalisa sesuai dengan pendapat Suwati (2008:8) sekolah bukan untuk mencari pekerjaan. Kesalahan paling fatal yang menjadi pola pemikiran masyarakat adalah menganggap bahwa bersekolah pada akhirnya untuk mencari pekerjaan. Padahal bersekolah seharusnya diidentikan dengan belajar, sehingga dengan demikian sebenarnya yang terjadi pada saat bersekolah adalah mengubah kemampuan diri agar sesuai dengan kebutuhan hidup. Orang bersekolah adalah untuk melakukan perubahan terhadap kondisi dirinya sehingga dapat mengatasi permasalahan yang timbul di dalam kehidupannya.

Seperti dijelaskan Suriasumantri (1978:2-3) yang menyatakan bahwa pengetahuan yang diperoleh dari bersekolah merupakan produk kegiatan berpikir dan merupakan obor serta sebagai perekat peradaban manusia untuk menemukan dirinya dalam menghayati hidup lebih sempurna. Mereka yang mendewadewakan ilmu sebagai satu-satunya sumber kebenaran biasanya tidak mengetahui hakikat ilmu yang sebenarnya. Dengan demikian jelas bahwa bersekolah bukan untuk mencari pekerjaan dan jangan menganggap ilmu yang diperoleh di sekolah sebagai satu-satunya sumber kebenaran.



## JURUSAN DAN “KASTA BARU”

**D**engan mengacu pada Piliang (2004:109) budaya citra dapat dipadankan dengan kebudayaan bujuk rayu, yakni sebuah kebudayaan di mana dalam kehidupan masyarakat hampir seluruh energi dipusatkan bagi pelayanan hawa nafsu, sementara hanya menyisakan sedikit ruang bagi penajaman hati, penumbuhan kebijaksanaan, peningkatan kesalehan, dan pencerahan spritual. Lebih lanjut menurut Piliang, di dalam kebudayaan yang lebih dikuasai oleh hawa nafsu dibandingkan dengan kedalaman spiritual, maka revolusi kebudayaan tidak lebih dari sebuah revolusi penghambaan diri bagi pelepasan hawa nafsu. Dalam kondisi masyarakat demikian menurut Felix Guattari (1981:86) tidak ada lagi perjuangan revolusioner yang dapat hidup tanpa menghambakan dirinya pada pembebasan hawa nafsu.

Pandangan Piliang dan Felix Guattari di atas, menyiratkan bahwa pada masyarakat kontemporer dewasa ini, hampir semua aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lebih didasari oleh pemenuhan keinginan (hawa nafsu) dibandingkan dengan pemenuhan kebutuhan. Jika pada zaman dahulu orang makan suatu makanan tertentu dan memakai pakaian tertentu dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan rasa lapar, dan melindungi tubuh dari panasnya terik matahari, tetapi kini orang mengkonsumsi suatu makanan dan memakai suatu pakaian tidak lagi semata-mata dilandasi oleh hasrat untuk memenuhi kebutuhan, akan tetapi telah menjadi suatu keinginan. Artinya, ketika seseorang mengkonsumsi sesuatu makanan tertentu tidak semata dimaksudkan untuk memenuhi rasa lapar, tetapi juga untuk menentukan simbol status (gengsi) orang bersangkutan, maka orang tersebut telah terjebak pada budaya citra. Demikian pula dalam hal berpakaian, ketika seseorang memakai suatu pakaian tertentu, tidak semata dimaksudkan untuk melindungi tubuh dari teriknya matahari, dan dinginnya udara pada malam

hari, tetapi juga dimaksudkan untuk pencitraan, maka soal pakaian dan makanan telah bergeser dari kebutuhan menjadi keinginan.

Terkait dengan pergeseran kebutuhan menjadi keinginan, pada masyarakat konsumen sekarang ini pergeseran kebutuhan tidak hanya menyangkut kebutuhan biologis, tetapi juga telah merambah pada kebutuhan psikologis. Misalnya, kebutuhan akan nilai seni (estetika), kebutuhan akan rasa aman, dan termasuk kebutuhan manusia akan pendidikan. Pendidikan sebagaimana ditengarai Freire (2002:12--13) merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan fungsi manusia menjadi manusia agar terhindar dari berbagai bentuk penindasan, kebodohan, sampai kepada ketertinggalan.

Namun, jika mengikuti Piliang dan Felix Guattari di atas, dan mengaitkannya dengan kondisi masyarakat konsumen dewasa ini termasuk masyarakat Bali, maka kebutuhan manusia akan pendidikan telah berubah menjadi keinginan. Maksudnya, masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan pendidikan putra-puterinya tidak lagi semata-mata didasari atas kebutuhan akan kecerdasan anak mereka, tetapi dilandasi pula oleh keinginan untuk menentukan simbol status orang bersangkutan. Terbukti, masyarakat Denpasar dan sekitarnya, kini tidak lagi hanya menjadikan sekolah sebagai arena untuk memperoleh pencerahan atau kecerdasan bagi putera-puteri mereka, tetapi juga sekolah sudah dijadikan sebagai ajang untuk menentukan simbol status (gengsi). Bahkan pemilihan jurusan untuk di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sering dijadikan sebagai "kasta" baru dunia pendidikan yang juga bermuara pada upaya pembentukan simbol status. Seperti yang dikatakan I Made Gde Dwipayana Putra (15 Tahun) Siswa Kelas X.8 SMA Negeri 1 Denpasar sebagai berikut.

"...saat pemilihan jurusan nanti, saya akan memilih jurusan IPA, sebab Jurusan IPA selain sekupnya lebih luas, di mata masyarakat jurusan ini juga lebih bergengsi. Saya katakan jurusan IPA mempunyai sekup yang lebih luas, sebab tamatannya nanti bisa lebih leluasa memilih jurusan di perguruan tinggi. Dalam arti mau tetap di jurusan IPA boleh mau beralih ke Jurusan IPS/Bahasa boleh. Sedangkan kalau di SMA memilih Jurusan IPS atau Bahasa, jika tamat nanti hanya boleh memilih jurusan

IPS atau Bahasa saja di Perguruan Tinggi. Jadinya kan lebih sempit ruang lingkungannya. Saya katakan jurusan IPA lebih bergengsi sebab jika berhasil duduk di jurusan IPA, masyarakat akan menganggap kita lebih pintar, lebih cerdas, dan lebih superior dibandingkan kita duduk di jurusan IPS/ Jurusan Bahasa.”(Wawancara, tanggal 9 Januari 2012).



*Wawancara dengan I Made Gde Dwipayana Putra  
Siswa Kelas X.8 SMA Negeri 1 Denpasar*

Apa yang dikatakan oleh I Made Gede Dwipayana Putra (siswa kelas X.8 SMA Negeri 1 Denpasar) setelah dikomparasi dengan D.A.A Ratih Jayadiningrat yang juga siswa kelas X.1 SMAN 1 Denpasar, maka pernyataannya tidak jauh berbeda. Ketika ditanya apa yang memotivasi dirinya untuk memilih Jurusan IPA, ia mengatakan sebagai berikut.

“...Saya memilih jurusan IPA, karena ingin menjadi dokter dan untuk bisa menjadi dokter harus menempuh jurusan IPA ketika duduk di bangku SMA. Selain itu, menjadi dokter merupakan cita-cita saya dari kecil, sebab menurut saya profesi dokter merupakan profesi yang mulia di samping juga bergengsi.” (Wawancara, tanggal 10 Januari 2011).

Kedua pernyataan siswa di atas, ini menunjukkan bahwa alasan mereka memilih jurusan IPA hampir sama, yakni keduanya menekankan pada masalah pencitraan. Hal demikian menunjukkan betapa kuatnya pengaruh budaya citra telah melanda masyarakat dewasa ini termasuk masyarakat Denpasar. Hal ini sesuai pula dengan ciri dari era modernisme, sebagaimana

digambarkan Katu (2002:85) bahwa masyarakat dewasa ini lebih suka pada hal-hal yang bersifat praksis, rasional, dan pragmatis. Ketika sikap rasionalitas dan pragmatisme terlalu jauh masuk pada tataran kehidupan masyarakat, termasuk dunia sekolah, maka hal ini dapat pula berpengaruh terhadap sikap siswa dalam memilih jurusan di SMA. Hal demikian sangat tampak dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa orang siswa SMA Dwijendra Denpasar, diantaranya Citra Dewi (siswi kelas XII IPA1) yang mengatakan sebagai berikut.

“...saya memilih jurusan IPA, karena beberapa pertimbangan yakni, jurusan IPA lebih prospektif dibandingkan dengan jurusan IPS. Jurusan IPA memberi peluang yang lebih luas untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi. Memilih jurusan IPA lebih bergengsi di mata masyarakat, karena dianggap lebih pintar dan lebih cerdas” (Wawancara, 15 Januari 2012).



*Wawancara dengan beberapa siswa dalam memilih jurusan di SMA Dwijendra*

Sejalan dengan Citra Dewi adalah Fati Oktavianti yang juga siswi kelas XII IPA 1 SMA Dwijendra Denpasar ketika ditanya mengapa ia memilih jurusan IPA dengan lugas ia mengatakan:

“...saya memilih jurusan IPA selain karena memang suka mata pelajaran IPA, juga karena saya melihat prospek ke depan jurusan IPA lebih baik dari jurusan IPS. Maksudnya jika memilih jurusan IPA ada kemungkinan saya bisa kuliah di fakultas kedokteran yang menurut saya mempunyai prospek yang lebih baik dari jurusan lainnya. Selain itu jurusan IPA juga lebih bergengsi daripada jurusan IPS” (Wawancara, 15 Januari 2012).



*Wawancara dengan Fati Oktavianti siswa Kelas XII IPA 1 SMA Dwijendra  
Denpasar*

Dari beberapa pernyataan yang disampaikan oleh para siswa di atas, nampak jelas betapa budaya citra telah merasuk pada kehidupan masyarakat Denpasar termasuk pada kehidupan dunia sekolah. Terkait masalah pencitraan kasus menarik yang juga berhubungan dengan masalah pemilihan jurusan ditemukan, baik di SMA Negeri 1 Denpasar maupun di SMA Dwijendra. Seperti yang dikatakan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Negeri 1 dan Kepala Sekolah SMA Dwijendra Denpasar sebagai berikut:

“...ada beberapa siswa yang secara normatif sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk memilih Jurusan IPA, tetapi karena “ambisi” orang tua agar anaknya masuk di jurusan IPA, akhirnya orang tua siswa langsung mendatangi pihak manajemen sekolah untuk memohon kebijaksanaan agar anak bersangkutan diterima di jurusan IPA. Dengan berbagai argumentasi yang disampaikan pihak orang tua siswa, maka manajemen sekolah akhirnya mengizinkan anak tersebut masuk di Jurusan IPA dengan beberapa persyaratan. Adapun syarat yang ditetapkan manajemen sekolah adalah: siswa bersangkutan harus mencapai nilai ketuntasan terlebih dahulu pada kelompok mata pelajaran MIPA; orang tua siswa bersangkutan harus memberi jaminan bahwa dirinya siap mengawasi dan membimbing anaknya dalam hal belajar sehingga anak tersebut mampu mengikuti pelajaran di jurusan IPA dengan menandatangani surat perjanjian. ”





*Wawancara dengan Wakasek Kurikulum SMA Negeri 1 Denpasar*

Hal demikian menunjukkan betapa sebenarnya orang tua ataupun siswa bersangkutan telah terjebak pada berbagai bentuk pemaksaan gagasan, pengetahuan atau ideologi lewat sebuah mekanisme yang disebut kekerasan simbol (*symbolic violence*). Dikatakan demikian sebab hanya karena gagasan dan sistem ideologi tertentu yang bersifat dominan, seperti ideologi tentang jurusan IPA lebih unggul dari jurusan IPS, atau jurusan IPA lebih menjanjikan dibandingkan jurusan IPS yang pada kenyataannya belum tentu demikian, orang tua siswa telah bertindak memaksakan kehendak untuk menggiring anaknya memilih jurusan IPA, padahal dari segi persyaratan nilai tidak memenuhi.

Terkait dengan kekerasan simbol, Pierre Bourdieu dalam *Language and Symbolic Power* (1992) mengatakan bahwa kekerasan simbol merupakan sebuah kekerasan yang halus atau tidak tampak, yang di baliknya menyembunyikan pemaksaan dominasi. Artinya, dominasi (ide, gagasan, dan kekuasaan) dilakukan dengan cara yang sangat halus, sehingga tidak tampak sebagai sebuah pemaksaan dominasi. Demikian pula pemaksaan orang tua terhadap kemampuan anaknya untuk memilih jurusan IPA. Dengan mengungkapkan berbagai jargon, seperti jurusan IPA lebih unggul dari jurusan IPS, jurusan IPA lebih bergengsi dibandingkan dengan jurusan IPS, yang dilakukan orang tua untuk mempengaruhi anaknya agar memilih jurusan IPA, sebenarnya secara sistemik telah mengandung kekerasan simbol.

Sebab secara faktual anaknya yang tidak mempunyai potensi/kemampuan untuk memilih jurusan IPA, karena keinginan orang tua akhirnya anak dipaksa untuk memilih jurusan IPA. Padahal jika mengacu pada aliran nativisme sebagaimana dikatakan oleh Schopenhauer dan para pengikutnya (dalam Tilaar, 1999:19), bahwa anak telah mempunyai kemampuan yang dibawa sejak lahir, sehingga guru dan orang tua seharusnya hanya memberi sentuhan-sentuhan pendidikan sesuai bakat dan bawaan anak itu sendiri. Demikian pula pandangan Montesori yang sangat mengagungkan dan menghormati hakikat anak, seharusnya menjadi pertimbangan bagi orang tua untuk mengarahkan anaknya dalam hal memilih jurusan di SMA. Jika orang tua dan guru memahami berbagai prinsip perkembangan anak sebagaimana digambarkan para ahli pendidikan di atas, maka pemaksaan orang tua terhadap anaknya dalam hal pemilihan jurusan pada jenjang pendidikan sekolah menengah atas, tidak perlu terjadi. Sebab selain dapat membawa kerugian bagi orang tua siswa itu sendiri, juga dapat membawa dampak negatif bagi perkembangan jiwa anak itu sendiri. Seperti yang dialami oleh I Wayan Suartama siswa kelas XI IPA.6 SMA Dwijendra Denpasar, dia memilih jurusan IPA karena memenuhi ambisi orang tuanya. Seperti dijelaskan guru BP SMA Dwijendra Denpasar.

“.....padahal baik minat maupun kemampuan Suartama tidak ada untuk duduk di jurusan IPA, tetapi karena dipaksa oleh orang tuanya akhirnya Suartama duduk juga di jurusan IPA. Akibatnya, Suartama sering tidak masuk sekolah (bolos) dan secara psikologis dia merasa tertekan sebab dia dipaksa untuk mempelajari berbagai mata pelajaran yang sebenarnya tidak ia sukai.”



*Wawancara dengan I Wayan Suartama siswa kelas XI IPA.6 SMA Dwijendra Denpasar*

Jika demikian adanya, maka kerugian bisa terjadi, baik pada orang tua siswa yang telah banyak mengeluarkan uang untuk membiayai berbagai keperluan sekolah maupun pada diri anak sendiri karena waktu yang seharusnya dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi dirinya secara optimal lewat begitu saja tanpa makna apa-apa. Jadi, secara prinsip memaksakan kehendak kepada anak untuk memilih jurusan tertentu di SMA dapat membawa dampak negatif baik bagi orang tua maupun bagi diri anak itu sendiri.

### **Motivasi Siswa Memilih Jurusan IPA, IPS dan Bahasa**

Motivasi menurut Kartono (1985:157) adalah sebab, alasan dasar, pikiran dasar atau dorongan bagi seseorang untuk berbuat; atau ide pokok yang selalu berpengaruh besar terhadap tingkah laku manusia. Berangkat dari batasan tersebut dapat dikatakan bahwa motivasi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan atau suatu pekerjaan tidak selamanya karena dorongan ekonomis (dalam bentuk uang). Akan tetapi banyak alasan lain yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan atau pekerjaan tertentu, misalnya keinginan untuk merasa berguna, merasa dibutuhkan oleh lingkungannya, karena gengsi, atau demi pencapaian status sosial tertentu.

Terkait dengan proses pemilihan jurusan di SMA, tesis Kartono dapat dijadikan landasan untuk menelaah masalah ini, khususnya mengenai alasan siswa-siswa SMA cenderung lebih memilih jurusan IPA dibandingkan dengan jurusan IPS atau Bahasa. Berangkat dari kerangka pikirnya Kartono dan setelah peneliti melakukan wawancara mendalam dengan beberapa orang siswa, baik siswa SMA N 1 maupun siswa SMA Dwijendra Denpasar, maka dapat dideskripsikan datanya sebagai berikut.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Herdi (siswa kelas XI IPA 7 SMA N 1 Denpasar) terungkap bawa:

".....saya memilih jurusan IPA karena termotivasi untuk memperdalam pengetahuan dalam bidang sains. Alasannya, selain karena ia memang menyukai bidang ilmu sains, juga karena beberapa pertimbangan, seperti jurusan IPA lebih leluasa memilih jurusan setelah memasuki perguruan tinggi, jurusan IPA lebih bergengsi dibandingkan dengan jurusan IPS dan jurusan Bahasa."

Berbeda dengan Herdi adalah Heare juga siswa kelas XI IPA7 SMA N 1 Denpasar, seperti wawancara berikut:

“.....sebenarnya Heare suka dengan pelajaran Akuntansi, tetapi karena dorongan orang tua agar Heare memilih jurusan IPA, maka Heare terpaksa mengikuti keinginan orang tuanya. Motivasi Heare karena disuruh orang tua.”



*Wawancara Herdi siswa kelas XI IPA7 SMA N 1 Denpasar*

Dalam konteks ini anak tidak bisa berbuat banyak karena mereka berada di bawah kuasa orang tua sehingga harus patuh pada apa yang menjadi kehendak orang tuanya. Jadi, apa yang dialami oleh Heare, yakni siswa kelas XI IPA7 SMA Negeri 1 Denpasar ternyata sejalan dengan asumsi dasar teori hegemoni, yakni telah terjadi dominasi dan penguasaan pikiran anak melalui jargon bahwa “jurusan IPA lebih unggul, lebih baik, dan lebih prospektif” dibandingkan dengan jurusan IPS atau Bahasa.

Cara-cara seperti inilah yang banyak digunakan oleh orang tua untuk menghegemoni pikiran anaknya, sehingga apa yang menjadi keinginan orang tuanya diikuti oleh anaknya, meskipun di dalamnya ada permainan kekuasaan yang dilakukan oleh orang tua secara halus. Jika, hal ini dilihat dari sudut ontologi atau metafisik sebagaimana dikatakan Tilaar (1999:18) maka seharusnya keberadaan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari keberadaan (hakikat) manusia itu sendiri. Dalam arti, keberadaan peserta didik dan pendidik tidak terlepas dari makna keberadaan manusia secara hakiki. Atau jika meminjam gagasan Fiere

(2002:12—13) bahwa pendidikan pada hakikatnya merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan fungsi manusia menjadi manusia agar terhindar dari berbagai bentuk penindasan, kebodohan, sampai pada ketertinggalan.

Jika mengacu pada pandangan Tilaar (1999) dan Freire (2002) di atas, maka dalam hal pemilihan jurusan bagi para siswa-siswi di SMA, baik orang tua maupun guru di sekolah seharusnya tidak melakukan hegemoni dan dominasi, akan tetapi guru atau orang tua seharusnya bertindak sesuai prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, yakni *ing arso asungtulodo, ing madyo mangun karso, dan tut wuri handayani*. Terjemahan bebasnya kurang lebih sebagai berikut: dalam proses pendidikan anak, guru atau orang tua di depan harus mampu menjadi suritauladan yang dapat ditiru dan dicontoh oleh anak-anak, di samping anak orang tua atau guru harus mampu membangun semangat atau motivasi anak untuk belajar berbagai hal dalam menjalani kehidupan di dunia ini, dan dari belakang guru atau orang tua harus mampu mengawasi dan mengarahkan anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa dalam memilih jurusan, baik di SMAN 1 maupun di SMA Dwijendra Denpasar, dimotivasi oleh keinginan dan informasi dari orang tua. Artinya, dalam hal pemilihan jurusan pada jenjang pendidikan menengah atas orang tua masih melakukan dominasi dan hegemoni terhadap putra-putrinya.

Meskipun dominasi orang tua sangat kuat dalam hal pemilihan jurusan bagi para siswa di SMA namun bukan berarti semua anak dalam memilih jurusan berada di bawah nilai kuasa orang tuanya. Terbukti dari hasil penelitian di lapangan, peneliti menemukan beberapa kasus anak yang cukup independen dalam hal pemilihan jurusan. Seperti yang dilakukan Ni Made Chyntia Trisna Eva Dewi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Denpasar. Meskipun dia berhasil meraih predikat juara umum II di sekolah itu, namun dia tetap menjatuhkan pilihan pada Jurusan IPS. Ketika ditanya apa motivasinya dia memilih jurusan IPS, dengan penuh rasa percaya diri Eva menjawab sebagai berikut:

“...saya sengaja memilih jurusan IPS, padahal nilai saya sangat memenuhi syarat untuk memilih jurusan IPA. Akan tetapi saya tetap memilih jurusan IPS, sebab saya ingin mengilangkan *image* bahwa anak-anak IPS itu identik dengan anak nakal, bodoh, malas, dan kurang kreatif. Saya ingin membuktikan bahwa label yang diberikan kepada anak-anak di jurusan IPS atau Bahasa itu tidak selamanya benar. Menurut saya sebenarnya sangat konyol jika kita berminat dengan jurusan IPS, setelah tamat SMA juga akan melanjutkan ke jurusan IPS, tetapi hanya karena gengsi lalu saat duduk di SMA gagah-gagahan memilih jurusan IPA, bagi saya itu tindakan yang sangat konyol. Jika kita memang berminat dengan pelajaran IPS, pada akhirnya setelah masuk ke perguruan tinggi juga akan memilih jurusan IPS, kenapa tidak sejak SMA kita benar-benar fokus pada jurusan IPS, kan lebih mantap” (Wawancara, 17 Januari 2012).



*Wawancara dengan Ni Made Chyntia Trisna Eva Dewi Siswi kelas XI IPS SMA Negeri 1 Denpasar*

Apa yang dikatakan Ni Made Chyntia Trisna Eva Dewi di atas, ternyata kasusnya muncul di SMA Dwijendra Denpasar, seperti berikut ini. Dari hasil wawancara dengan beberapa orang siswa jurusan IPA di SMA Dwijendra Denpasar, terungkap bahwa:

“... sebenarnya saya setelah tamat SMA, ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi dengan mengambil jurusan IPS atau jurusan Bahasa. Tetapi di SMA saya mengambil jurusan IPA, ini saya lakukan karena rasa percaya diri saya kurang. Saya khawatir kalau saya memilih jurusan IPS, setelah tamat saya hanya memilih IPS, dan Bahasa. Tetapi kalau saya memilih IPA, saya dapat testing ke perguruan tinggi pada Jurusan/ Program studi IPA, IPS, dan Bahasa.”



*Wawancara Dengan Beberapa Orang Siswa Jurusan IPA  
di SMA Dwijendra Denpasar*

Kenyataan ini menandakan bahwa anak demikian sesungguhnya tidak mempunyai rasa percaya diri atas kemampuan yang dimilikinya. Atau dengan kata lain mereka tidak mempunyai motivasi yang jelas untuk memilih salah satu jurusan sesuai potensi yang mereka miliki. Bahkan boleh dikatakan cara berpikir seperti itu, sangat dipengaruhi oleh sifat-sifat modernisme yang cenderung mengutamakan rasionalitas dan pragmatisme. Apa yang dialami oleh para siswa, baik di SMAN 1 maupun di SMA Dwijendra Denpasar menunjukkan bukti bahwa filsafat pencerahan dan diskursus teoritis tentang modernitas telah mengunggulkan “rasio” sebagai sumber kemajuan dalam pengetahuan dan masyarakat. Berangkat dari kenyataan di atas, maka gagasan (Barker, 2008: 147-148; Piliang, 2003:74) yang mengatakan bahwa pencerahan ditandai oleh keyakinannya bahwa rasio mampu mendemistifikasi dan menerangi dunia melebihi “kemampuan” agama, mitos, dan takhayul, menunjukkan bukti nyatanya. Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa pencerahan memuji kreativitas manusia, rasionalitas dan eksplorasi ilmiah sebagai penopang epistemologis keterputusan dengan tradisi yang dicanangkan modernisme itu sendiri.

Motivasi lain yang mendorong siswa lebih memilih jurusan

IPA dibandingkan dengan jurusan IPS atau jurusan Bahasa juga dikemukakan oleh salah seorang Guru BK di SMA N 1 Denpasar, yakni Ida Ayu Tirta (54 tahun). Menurut Ida Ayu Tirta sebelum tahun 2001 ada beberapa orang siswa yang datang ke ruangnya dengan maksud untuk konsultasi tentang pemilihan jurusan. Dari hasil wawancara peneliti dengan Ida Ayu Tirta (tanggal 17 Januari 2012) terungkap bahwa:

“... ada beberapa siswa yang mengalami kebingungan dalam hal memilih jurusan. Pasalnya, siswa bersangkutan sebenarnya kurang berminat pada jurusan IPA, tetapi karena orang tuanya dari sejak ia duduk di bangku sekolah dasar sudah diarahkan agar kelak setelah memasuki lembaga pendidikan tinggi agar memilih Fakultas Kedokteran. Jadi, mau tidak mau saat pemilihan jurusan di SMA dirinya dihadapkan pada pilihan yang dilematis. Sebab di satu sisi mereka kurang berminat terhadap jurusan IPA, sementara di sisi lain mereka dituntut oleh orang tuanya agar nantinya bisa kuliah pada Fakultas Kedokteran. Akhirnya anak inipun menjatuhkan pilihan pada jurusan IPA, yang notabene tidak sesuai dengan apa yang menjadi minat mereka.”



*Wawancara dengan Ida Ayu Tirta Guru di SMA Negeri 1 Denpasar*

Mencermati kasus yang dialami oleh beberapa orang siswa SMA Negeri 1 Denpasar ini, maka dapat dideskripsikan bahwa motivasi ekstrinsik (motivasi dari luar diri anak), terutama kuasa orang tua justru lebih besar pengaruhnya dalam menentukan pemilihan jurusan dibandingkan dengan motivasi yang datang dari dalam diri anak itu sendiri.

Hal demikian, sekali lagi menunjukkan bukti betapa kuatnya



pengaruh modernisme memengaruhi pola pikir masyarakat dewasa ini, sehingga hampir semua aspek kehidupan manusia telah dirasukinya. Jika ini dibiarkan terus berlanjut, maka dikawatirkan semua aspek kehidupan ditaksir atas dasar sikap rasional, kritis, ekonomis, dan pragmatis. Akibatnya, hal-hal yang berdimensi sosiologis, spiritualis, dan humanis akan semakin tergeser, padahal kehidupan manusia di dunia ini adalah bersifat multidimensional.

### **Motivasi Orang Tua Mengarahkan Anaknya Memilih Jurusan IPA**

Sebelum masuk pada pembahasan mengenai motivasi orang tua mengarahkan anaknya memilih jurusan IPA saat mereka duduk di bangku SMA, harus dipahami terlebih dahulu beberapa kewajiban orang tua terhadap anaknya sebagai penanggung jawab dalam kehidupan keluarga. Menurut Arsana, dkk. (1994:59) setidaknya ada tiga kewajiban pokok yang harus dilakukan oleh orang tua dalam usaha mengembangkan potensi anaknya di lingkungan keluarga, yakni orang tua berkewajiban untuk memberikan perawatan fisik kepada anak-anak yang mereka lahirkan dalam keluarga. Artinya, orang tua harus bertanggung jawab atau berkewajiban memenuhi semua kebutuhan biologis anak-anak mereka, seperti sandang, pangan, dan papan. Orang tua berkewajiban untuk mendidik dan melatih anak-anaknya agar dapat menyesuaikan diri terhadap kebudayaan dan masyarakatnya. Dalam konteks ini orang tua harus dapat melakukan fungsi sosialisasi kepada anak-anaknya secara baik. Dalam arti, orang tua dalam memberikan pendidikan kepada anak-anaknya harus memahami prinsip-prinsip dasar pendidikan sehingga dalam proses sosialisasi berbagai nilai budaya dan nilai kehidupan kepada anaknya tidak dilakukan dengan cara-cara yang dapat mengingkari prinsip dasar pendidikan itu sendiri. Orang tua juga berkewajiban untuk menjamin kesejahteraan psikologis dan emosional anak mereka (menyangkut pemberian perlindungan afeksi/rasa aman) kepada anak-anak yang ada di lingkungan keluarga mereka.

Berangkat dari tiga kewajiban orang tua terhadap anaknya

tersebut, seharusnya orang tua dalam hal memberikan arahan kepada anak-anak mereka, tidak melakukannya dengan cara dominasi atau pun hegemoni. Sebab hal demikian dapat berakibat negatif bagi perkembangan kepribadian anak. Namun, dari hasil penelitian yang dilakukan, ternyata ditemukan sebuah kasus yang dialami oleh Oka Arsa siswa kelas XII IPA.5 SMA Dwijendra Denpasar. Seperti diuraikan dari hasil wawancara seperti berikut:

".....sebenarnya berdasarkan minat sama sekali saya tidak tertarik dengan pelajaran IPA, tetapi karena orang tua saya ingin agar saya memilih jurusan IPA, dengan harapan setelah tamat SMA bisa lebih leluasa memilih jurusan di perguruan tinggi, akhirnya dengan keadaan terpaksa saya pun duduk di jurusan IPA, dan sekarang sudah kelas XII IPA 5. Karena saya dipaksa untuk memilih IPA, saya menjadi sering bolos saat pelajaran berlangsung, sering tidak masuk kelas, karena merasa jenuh dengan bayang-bayang yang tidak jelas, dan sering malas-malasan."

Apa yang dialami oleh Oka Arsa, dan mungkin juga oleh banyak siswa lainnya di tingkat SMA setelah dilakukan penelitian dengan mengambil kasus di dua Sekolah Menengah Atas di Denpasar ini, ternyata motivasi orang tua siswa mengarahkan anaknya memilih jurusan IPA, disebabkan oleh adanya imperialisme pengetahuan yang tersiar melalui media massa, baik media elektronik maupun media cetak. Terkait dengan berita di media massa, khususnya berita di televisi, Schlesinger sebagaimana dikutip oleh Chris Barker (2005:342) mengatakan bahwa berita televisi bukanlah cerminan dunia ataupun "hasil rangkaian realitas". Atau dengan kata lain berita bukanlah "jendela dunia" yang langsung, melainkan representasi yang terseleksi dan terkonstruksi yang menjadi bagian dan turut membentuk realitas. Hal ini mengandung arti bahwa pemilihan materi berita dan cara yang digunakan untuk menyeleksi dan mengkonstruksi cerita yang diberitakan melalui televisi tidak pernah bersifat netral. Demikian pula mengenai informasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang disebarluaskan melalui media massa, juga tidak pernah bersifat netral, akan tetapi selalu mengandung ideologis. Ideologi yang dimaksudkan di sini adalah struktur-struktur pemaknaan atau "pandangan dunia" yang

membentuk hubungan sosial di dalam dan melalui bekerjanya kekuasaan.

Terkait dengan nilai suatu berita di media massa, Galtung dan Ruge (1973) menemukan ada empat nilai berita utama di dunia Barat, yakni: acuan pada bangsa-bangsa *elite*; acuan pada orang-orang *elite*; personalisasi, dan negativitas. Berangkat dari pandangan Galtung dan Ruge, di atas dan jika dikaitkan dengan kenyataan di lapangan memang hal yang tak terduga mempunyai nilai berita tinggi, apalagi hal itu mempunyai konsekuensi negatif yang melibatkan orang *elite* di bangsa yang *elite*. Misalnya, sebuah skandal kehidupan pribadi Presiden AS lebih “bernilai berita” dibandingkan berita tentang angka-angka mengenai hasil tani masyarakat Malawi.

Berangkat dari adanya imperialisme pengetahuan melalui pemberitaan media massa, seperti penyebaran informasi mengenai dampak positif dari perkembangan IPA dan teknologi dapat mendatangkan kemakmuran materi bagi kehidupan umat manusia di bumi ini, tentu berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat, termasuk masyarakat Denpasar. Pengaruh ini akan menjadi semakin kompleks ketika informasi yang diserap oleh masyarakat melalui berbagai berita di media massa telah direduksi menjadi ideologi kolektifitas. Artinya, dengan seringnya alam bawah sadar manusia disasar oleh informasi yang menganggap bahwa perkembangan IPA dan teknologi dapat mendatangkan kemakmuran bagi kehidupan manusia, maka lama kelamaan pada pikiran masyarakat secara kolektif akan melekat sebuah ideologi bahwa dengan mengikuti perkembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi akan dapat membawa kehidupan manusia ke arah kemakmuran, kemajuan, dan kesejahteraan.

Pemahaman model ini lama kelamaan akan menjadi milik masyarakat secara kolektif dan seakan telah diterima oleh masyarakat sebagai suatu kebenaran tanpa perlu adanya pembuktian. Hal demikian saat ini tampak telah menyasar hampir sebagian besar pola pikir masyarakat, sehingga dalam memberikan arahan pada anak-anak, termasuk arahan dalam hal pemilihan jurusan pola pikir demikian ikut berpengaruh.

Jadi, motivasi orang tua mengarahkan anaknya untuk memilih jurusan IPA, tidak semata-mata disebabkan oleh keinginan agar anaknya memahami bidang Ilmu Pengetahuan Alam itu sendiri, tetapi lebih dimaksudkan agar anaknya kelak bisa memperoleh kemakmuran materi sebagaimana dianut oleh ideologi masyarakat modern.

### **Imperialisme Pengetahuan Sains Terhadap IPS dan Bahasa**

Para penganut aliran positivisme beranggapan bahwa puncak pengetahuan manusia adalah ilmu-ilmu positif atau sains (ilmu-ilmu yang berangkat dari fakta-fakta yang terverifikasi dan terukur secara ketat). Kemunculan positivisme tidak bisa dilepaskan dari iklim kultural yang memungkinkan berkembangnya gerakan untuk menerapkan cara kerja sains dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Iklim kultural tersebut ditimbulkan oleh Revolusi Industri di Inggris pada abad ke-18 yang mengakibatkan timbulnya gelombang optimisme akan kemajuan umat manusia berdasarkan keberhasilan teknologi industri itu sendiri. Akibat lebih lanjut positivisme mengistirahatkan filsafat dari kerja spekulatifnya, yakni mencari-cari hakikat ontologis ataupun metafisis yang telah dijalaninya selama ribuan tahun.

Jadi, menurut pandangan positivisme filsafat tidak punya kerja lain selain cara kerja sains, yakni menemukan prinsip-prinsip umum yang sama untuk semua ilmu dan menggunakan prinsip tersebut sebagai pemandu untuk perilaku manusia serta dasar untuk pengaturan perilaku sosial masyarakat. Dalam konteks ini aliran positivisme yakin bahwa masyarakat akan mengalami kemajuan apabila menghargai sains dan teknologi. Dengan kata lain aliran ini amat menjunjung tinggi kedudukan sains serta optimis terhadap peran sosialnya yang dapat dimainkan bagi kesejahteraan umat manusia (Adian, 2006:24). Tokoh utama dari aliran positivisme ini adalah Saint Simon (1760—1825) dan muridnya August Comte (1798—1857).

Dalam perjalanannya Comte kemudian mengembangkan positivisme untuk melawan apa yang ia yakini sebagai filsafat

negatif dan destruktif dari para pemikir pencerahan yang dikatakannya belum bisa melepaskan diri dari khayalan-khayalan metafisika. Comte bersama beberapa pemikir Prancis lainnya, kemudian membuat barisan kontrarevolusioner yang bersikap kritis pada proyek pencerahan. Hal ini dilandasi oleh keyakinan Comte bahwa pengetahuan positif-ilmiah adalah pengetahuan yang pasti, nyata, dan berguna. Ia membunuh metafisika dengan keyakinannya bahwa segala sesuatu yang dapat diketahui oleh manusia adalah apa yang tertangkap pancaindra. Keyakinan Comte dan para pengikutnya terhadap filsafat positivisme ini sebenarnya didasarkan pada teori Comte tentang tiga tahap perkembangan sejarah pemikiran manusia, yakni pertama, tahap teologis yang beranggapan bahwa manusia memahami gejala-gejala alam sebagai hasil tindakan langsung dari kekuatan ilahi. Tahap ini masih dapat dirinci menjadi tiga tahap lagi yakni, animisme, politeisme, dan monoteisme. Pada tahap animisme benda-benda dianggap memiliki jiwa dan secara khusus ada benda-benda yang dianggap suci atau keramat. Pada tahap politeisme, manusia percaya adanya banyak dewa, seperti ada Dewa Angin, Dewa Laut, Dewa Api, dan lain-lain. Sedangkan pada tahap monoteisme manusia percaya adanya kekuatan tunggal di balik semua gejala tersebut. Kedua, tahap metafisis. Pada tahap ini pelaku ilahi yang personal digantikan oleh prinsip-prinsip metafisika berupa kekuatan abstrak, seperti 'nature'. Tahap ketiga menurut Comte adalah tahap positif-ilmiah, pada tahap ini manusia berhenti mencari penyebab absolut, baik Tuhan maupun 'nature' serta mulai berkonsentrasi pada observasi dunia sosial dan fisik dalam mencari hukum-hukum yang mengatur mereka. Pendeknya pada tahap ini kehidupan manusia diwarnai oleh keyakinan yang cukup besar pada sains dan teknologi.

Apa yang disampaikan oleh Comte di atas, ternyata kini telah menemukan kebenarannya. Hal ini sangat kentara dari berbagai gejala alam yang dulu tidak dapat dipecahkan dengan akal pikiran manusia, kini dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seakan semua telah dilampauinya. Apalagi hal-hal yang bersifat fisik manusiawi tentu sangat diyakini oleh manusia

bahwa semua itu akan dapat dipecahkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Kuatnya keyakinan manusia terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, terlihat pada proses pemilihan jurusan yang dilakukan oleh anak-anak SMA yang cenderung didominasi oleh pemilihan jurusan IPA, sementara Jurusan IPS dan Bahasa krisis peminat. Contoh untuk di SMA Negeri 1 Denpasar, hanya ada satu kelas jurusan IPS di kelas XI dan satu jurusan IPS di kelas XII, sementara jurusan Bahasanya tidak ada. Demikian juga di SMA Dwijendra Denpasar hanya ada tiga kelas untuk jurusan IPS di kelas XI dan tiga kelas untuk dikelas XII, sementara jurusan Bahasanya tidak ada. Padahal SMA Dwijendra dalam menjalankan visi misinya senantiasa mengusung label sekolah berbasis Agama dan Kebudayaan Hindu, tetapi dalam kenyataannya hanya sedikit anak yang tertarik untuk memilih jurusan IPS apalagi jurusan Bahasa.

Hal ini terjadi menurut beberapa orang guru, baik di SMA Negeri 1 maupun di SMA Dwijendra disebabkan karena pola pikir anak-anak termasuk orang tuanya telah banyak dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat pragmatis dan rasional kritis. Seperti yang dikatakan oleh Ni Luh Putu Trisna Rini, S.E., A.K., M.Pd. (35 tahun) guru Ekonomi SMA Negeri 1 Denpasar sebagai berikut:

“...anak-anak lebih banyak memilih jurusan IPA, karena pertimbangan pragmatis. Artinya, setelah mereka tamat agar bisa memperoleh kesempatan yang lebih banyak untuk memilih jurusan di perguruan tinggi. Hal ini tentu sangat terkait dengan regulasi peraturan pemerintah tentang sistem penjurusan yang ada baik untuk di jenjang pendidikan menengah maupun di jenjang pendidikan tinggi. Seharusnya dibuat aturan yang agak berimbang, dalam arti mereka yang saat SMA memilih jurusan IPA setelah masuk ke jenjang pendidikan tinggi seharusnya juga hanya boleh memilih jurusan IPA, dan begitu sebaliknya. Jika ini yang dilakukan pemerintah saya pikir dalam hal penjurusan akan dapat berjalan secara berimbang antara anak yang memilih jurusan IPA dengan anak yang memilih jurusan IPS. Sekarang mengapa lebih banyak anak menjatuhkan pilihan pada jurusan IPA, karena sistem penjurusan yang ada memungkinkan anak-anak jurusan IPA memperoleh peluang yang lebih luas dalam hal memilih jurusan di perguruan tinggi.” (Wawancara, 6 Februari 2012).



*Wawancara dengan Ni Luh Putu Trisna Rini, SE;Ak; MPd Guru di SMA N 1 Denpasar*

Senada dengan Ni Luh Putu Trisna Rini adalah Drs. I Made Oka Antara, M.Hum. Guru Bahasa Indonesia di SMA Dwijendra Denpasar. Ketika ditanya faktor apa yang menyebabkan lebih banyak anak-anak yang memilih jurusan IPA dibandingkan dengan anak yang memilih jurusan IPS dan Bahasa, dengan gaya seorang akademisi tulen dia menjawab sebagai berikut.

“... karena Ilmu Pengetahuan Alam adalah ilmu yang pasti, objektif, dan sifat rasionalitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan IPS dan Bahasa. Selain itu, anak-anak banyak yang tertarik untuk memilih jurusan IPA karena jurusan IPA lebih menjanjikan dan lebih prospektif bagi masa depan anak, di samping mereka mempunyai banyak peluang untuk memilih jurusan setelah mereka memasuki jenjang pendidikan tinggi” (Wawancara, 8 Februari 2012).



*Wawancara dengan Drs. I Made Oka Antara, M.Hum. Guru Bahasa Indonesia SMA Dwijendra Denpasar*

Apa yang dikatakan oleh dua orang guru di atas, ketika dikroscek dengan beberapa orang siswa, baik pada siswa SMA Negeri 1 maupun siswa SMA Dwijendra Denpasar, ternyata jawabannya tidak jauh berbeda. Seperti yang diungkapkan oleh Inten Kusumayanti siswa kelas X U1 SMA Dwijendra Denpasar dengan berkata sebagai berikut,

... jika saatnya pemilihan jurusan nanti saya pasti memilih jurusan IPA, sebab menurut saya jurusan IPA itu lebih leluasa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Maksudnya, bila di SMA memilih jurusan IPA setelah tamat jika mau melanjutkan ke perguruan tinggi bebas memilih jurusan, mau tetap memilih jurusan IPA boleh mau beralih ke jurusan IPS atau Bahasa juga bisa (Wawancara, 8 Februari 2012).



*Wawancara Dengan Beberapa Orang Siswa Kelas X U1  
di SMA Dwijendra Denpasar*

Demikian juga yang dikatakan oleh Indra Widiasta Putra Siswa kelas XI IPA 7 SMA Negeri 1 Denpasar. Saat ditemui sedang praktik di Lab Kimia SMA Negeri 1 Denpasar ia mengatakan sebagai berikut.

... saya memilih jurusan IPA, karena pertimbangan praktis, yakni setelah tamat saya bisa lebih leluasa untuk memilih jurusan di perguruan tinggi. Selain itu, jurusan IPA lebih ke sains atau ke ilmu pasti sehingga sifatnya lebih objektif, lebih pasti, dan lebih bersifat empirik (Wawancara, 9 Februari 2012).





*Beberapa siswa saat diwawancarai di Lab Fisika SMA Negeri 1 Denpasar*

Beberapa hasil wawancara, baik dengan guru maupun dengan siswa, ternyata memperkuat apa yang dikatakan Comte bahwa sains atau yang lazim juga disebut aliran positivisme merupakan suatu paham dalam filsafat sains yang berkembang sangat pervasif dan menurut Ian Hacking dalam Adian (2006:27) tidak hanya telah menjadi filsafat sains melainkan agama humanis modern. Positivisme dikatakan menjadi agama dogmatis karena ia telah melembagakan pandangan dunianya menjadi doktrin bagi ilmu pengetahuan. Pandangan dunia yang dianut oleh positivisme adalah pandangan dunia objektivistik, yakni pandangan dunia yang menyatakan bahwa objek-objek fisik hadir independen dari mental dan menghadirkan properti-properti mereka secara langsung melalui data indrawi. Artinya, realitas dengan data indrawi adalah satu, sementara apa yang dilihat adalah realitas sebagaimana adanya (*seeing is believing*).

Bukan hanya itu, teori tiga tahap kebudayaan yang dikemukakan oleh Comte juga diperkuat oleh hasil penelitian ini. Di mana tiga tahap kebudayaan yang oleh Comte dikaitkan dengan tiga bentuk pengaturan masyarakat yang berbeda juga menemukan kebenaran. Seperti tahap teologis oleh Comte dikaitkan dengan bentuk pengaturan masyarakat yang masih percaya akan adanya otoritas mutlak, adanya hak istimewa ilahi

(*divine right*) pada raja karena ia dianggap keturunan dewa. Tatanan kehidupan masyarakat yang ada pada tahap ini bersifat feodal-militeristik. Legitimasi penguasa dipaksakan dengan kekuatan militer yang tangguh. Pada tahap metafisis, konsep kekuasaan seperti itu dikritik secara radikal. Kekuasaan rajawi dan imami digantikan dengan kekuasaan demokratis berdasarkan hukum, dengan asumsi bahwa setiap orang harus diperlakukan sejajar karena dianggap memiliki *natural rights*. Sementara dalam tahap pemikiran positif-ilmiah, pengaturan masyarakat dikaitkan dengan pembangunan masyarakat industrial. Dalam tahap kehidupan positif-ilmiah ini pula kehidupan ekonomi menjadi pusat perhatian, dan masyarakat dipimpin dan diatur oleh sekelompok elite ilmuan yang bertugas menata masyarakat secara rasional. Jadi, dalam konteks penelitian ini mengapa ada kecenderungan anak-anak di SMA lebih suka memilih jurusan IPA dibandingkan dengan jurusan IPS dan Bahasa, sebab jika mengacu pada teori Comte tentang tiga tahap perkembangan pemikiran manusia, tampaknya dewasa ini tahap pemikiran masyarakat sudah memasuki tahap yang ketiga, yakni tahap positif-ilmiah. Hal demikian berakibat segala sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat dewasa ini lebih banyak dipengaruhi oleh pola-pola berpikir yang rasional, objektif, dan bahkan selalu ditopang oleh data-data yang bersifat indrawi. \*\*\*



## IDEOLOGI DI BALIK SISTEM PENJURUSAN

Sebagaimana dipahami bersama bahwa istilah ideologi sebenarnya memiliki sejarah yang sangat panjang dan kompleks, yang tampak dalam karya beberapa penulis dan merambah ke beberapa disiplin modern dalam ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Dari sejarah perkembangan ideologi tersebut, dan jika dicermati penggunaannya menunjukkan bahwa istilah ideologi digunakan dalam dua cara yang sangat berbeda. Di beberapa bagian 'ideologi' digunakan sebagai istilah yang murni deskriptif, yang mengandung arti 'sistem berpikir', 'sistem kepercayaan', 'praktik-praktik simbolik' yang berhubungan dengan tindakan sosial dan politik. Dalam konteks ini penggunaan istilah ideologi berhubungan dengan apa yang disebut konsepsi netral (*neutral conception*) tentang ideologi. Artinya, bahwa tidak ada upaya pada basis konsepsi ini, untuk memisahkan antara jenis-jenis tindakan dengan animasi ideologi. Sementara di bagian lain ideologi secara mendasar digunakan dalam hubungannya dengan proses pembenaran relasi kekuasaan yang tidak simetris, yakni berhubungan dengan proses pembenaran dominasi (Thompson, 2003:17).

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kajian budaya, maka istilah ideologi yang dimaksud dalam kajian ini lebih pada pemahaman yang kedua, yakni ideologi dalam hubungannya dengan pembenaran relasi kekuasaan yang tidak simetris atau pembenaran dominasi. Pihak dominan dalam hal pemilihan jurusan di SMA, adalah berupa dominasi kelompok ilmu pengetahuan sains (IPA) yang telah menguasai hampir sebagian besar struktur kognitif masyarakat dewasa ini termasuk masyarakat Denpasar. Kelompok Ilmu Pengetahuan Alam (ilmu sains) yang sering juga disebut positivisme telah melembagakan pandangan dunia objektivistiknya dalam suatu doktrin kesatuan ilmu (*unified science*). Doktrin ini mengatakan bahwa seluruh ilmu, baik ilmu alam maupun manusia, harus berada di bawah payung paradigma positivistik.

Jadi, dalam konteks penelitian ini hubungan pembenaran relasi kekuasaan yang tidak simetris atau hubungan pembenaran dominasi dimaksudkan adalah berupa dominasi pengetahuan sains terhadap Ilmu Pengetahuan Sosial dan Bahasa, yang secara empirik terlihat begitu jelas. Dari hasil wawancara dengan beberapa siswa dan orang tuanya terlihat bahwa sebagian besar di antara mereka mengatakan lebih suka memilih jurusan IPA dengan alasan jurusan IPA lebih menjanjikan masa depan yang lebih baik, IPA lebih bergengsi, dan bahkan ada yang mengatakan bahwa jurusan IPA lebih prospektif dibandingkan dengan jurusan IPS dan jurusan Bahasa. Hal ini menunjukkan betapa imperialisme pengetahuan sains terhadap pengetahuan sosial dan bahasa telah menguasai struktur kognisi masyarakat secara luas, termasuk masyarakat Denpasar.

Sementara di sisi lain, pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan, para ahli pendidikan, tokoh masyarakat seakan membenarkan kondisi ini terjadi tanpa ada upaya yang berarti untuk melakukan pembenahan terhadap sistem yang ada, terutama sistem penjurusan di SMA. Dari hasil wawancara dengan Kepala SMA Negeri 1 Denpasar saat itu (Drs. I Wayan Tumbuh, M.Pd.) terungkap bahwa dirinya tidak berdaya untuk membenahi sistem yang ada. Hal ini terlihat dari apa yang dikatakan oleh Tumbuh seperti di bawah ini.

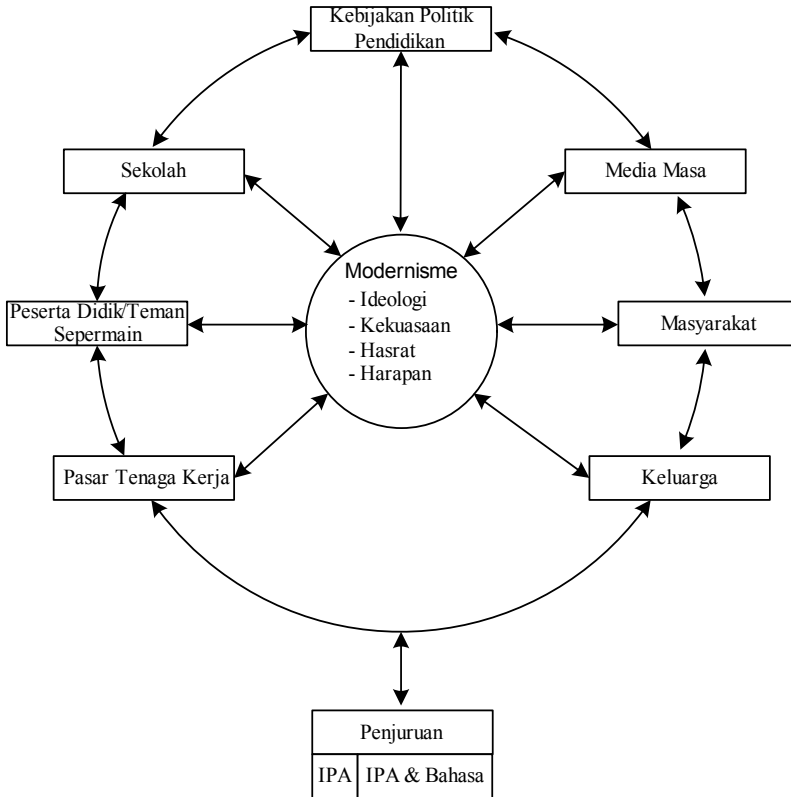
“...saya tidak berdaya untuk mengarahkan anak-anak agar memilih jurusan IPS atau Bahasa, sehingga tidak terjadi penumpukan anak-anak di jurusan IPA, sementara jurusan IPS dan Bahasa sepi peminat. Seharusnya ada regulasi peraturan perundang-undangan yang mengatur kondisi ini sehingga terjadi keseimbangan jumlah anak yang memilih jurusan IPA dan jurusan IPS atau Bahasa. Hal ini penting sebab pada hakikatnya antara ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial/humaniora atau bahasa harus dapat berkembang seiring dan sejalan” (Wawancara, 14 Februari 2012).

Hal senada dikatakan pula oleh Kepala SMA Dwijendra Denpasar (Ida Bagus Alit Bajra Manuaba, S.Pd.) berikut penuturannya:

... sebenarnya sebagai praktisi pendidikan saya menyadari bahwa kondisi ini dapat berakibat tidak baik bagi pengembangan kedua bidang ilmu tersebut, baik bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) maupun bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial ataupun Bahasa. Sebab anak-anak yang pintar pasti semua akan terkonsentrasi pada jurusan IPA, sementara anak-anak yang memiliki kemampuan agak kurang terpaksa memilih jurusan IPS atau pun jurusan Bahasa. Hal demikian *pertama*, akan berdampak pada *image* bahwa jurusan IPS adalah identik dengan anak-anak bodoh, nakal, dan pemalas. *Kedua*, karena anak-anak yang cerdas cenderung memilih jurusan IPA, sementara anak-anak yang memiliki kemampuan kurang cenderung memilih jurusan IPS atau Bahasa maka hal ini dapat berakibat perkembangan Ilmu Pengetahuan Sosial/Bahasa akan tertinggal dibandingkan dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam. *Ketiga*, jika hal ini dibiarkan terus berlanjut maka, bukan tidak mungkin akan terjadi disequilibrium antara pemikiran masyarakat yang terikat dengan para meter ilmiah dan matematis dengan pemikiran yang bersifat santai, imajinatif, kreatif, dan mencipta. Selain itu, jika kondisi ini tetap dibiarkan berlanjut lama kelamaan tidak akan ada anak yang mau memilih jurusan IPS atau pun Bahasa. “

Apa yang dikatakan oleh kedua Kepala Sekolah di atas sejalan dengan pandangan Chris Barker (2005:89) yang mengatakan bahwa pentingnya bahasa dalam memahami kebudayaan dan konstruksi pengetahuan telah menjadi agenda utama dalam ilmu-ilmu sosial humaniora, termasuk ilmu pengetahuan sains (IPA). Ada dua alasan utama menurut Barker terkait dengan hal ini yakni, bahasa adalah medium utama yang digunakan dalam pembentukan dan penyampaian makna-makna kultural; dan bahasa merupakan alat dan medium yang kita pakai untuk membentuk pengetahuan tentang diri kita dan dunia sosial. Berangkat dari pandangan Barker di atas, maka dapat dideskripsikan betapa pentingnya bahasa sebagai alat dan medium untuk membentuk pengetahuan, baik mengenai diri kita, dunia sosial, maupun tentang keberadaan alam semesta ini.

Semua uraian di atas dapat diringkas dalam sebuah bagan seperti ini.



Bagan di atas dengan tegas memperlihatkan bahwa Modernisme yang di dalamnya ada ideologi, kekuasaan, hasrat/keinginan, dan harapan telah terkonstruksi dari politik pendidikan, pola pikir masyarakat, kebijakan sekolah, pola pikir peserta didik/ teman sejawat, informasi media massa, dunia industri/pasar kerja, dan keluarga, dalam memahami ilmu pengetahuan. Ini tentu sangat berpengaruh terhadap pemilihan jurusan. Begitu pula sebaliknya politik pendidikan, pola pikir masyarakat, kebijakan sekolah, pola pikir peserta didik/ teman sejawat, informasi media massa, dunia industri/pasar kerja, dan keluarga mempengaruhi dan membentuk ideologi, kekuasaan, hasrat/keinginan, dan harapan di era Modernisme dalam memahami ilmu pengetahuan, yang berimplikasi pada pemilihan jurusan.

## PROSES MARJINALISASI JURUSAN

Sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa sistem penjurusan di SMA mengacu pada Permendiknas No. 22 Tahun 2006. Sistem penjurusan di Sekolah Menengah Atas dimaksudkan untuk melakukan penelusuran terhadap minat, bakat, dan kemampuan siswa di bidang akademik. Namun, secara normatif persyaratan yang ditentukan dalam rangka pemilihan jurusan untuk para siswa SMA hanya memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, nilai akademik siswa saat mereka naik ke kelas XI. Kedua, ketentuan mata pelajaran ciri khas jurusan, maksudnya siswa yang bisa masuk ke jurusan IPA adalah siswa yang nilai mata pelajaran Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi pada raport semester 2 (kelas X) mengalami ketuntasan. Demikian pula siswa yang bisa memilih jurusan IPS nilai mata pelajaran Sejarah, Geografi, Ekonomi, dan Sosiologi pada raport semester 2 (kelas X) harus mengalami ketuntasan, tidak terkecuali siswa yang ingin memilih jurusan Bahasa. Bagi siswa yang ingin memilih jurusan Bahasa, mereka harus mengalami ketuntasan belajar dalam mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Bali, dan Bahasa Asing lainnya pada raport semester 2 (Kelas X) (Permendiknas No. 22 tahun 2006). Sementara kecakapan lain di luar bidang akademik, seperti kemampuan siswa dalam hal seni, susatra, dan dalam hal membuat suatu karya tulis tidak pernah diperhitungkan dalam konteks pemilihan jurusan.

Dengan mengacu pada aturan tersebut dan berdasarkan hasil pengamatan serta pencatatan di lapangan, faktanya menunjukkan bahwa di SMA Negeri 1 Denpasar sampai penelitian ini dilakukan, jurusan yang ada hanya dua, yakni jurusan IPA dan jurusan IPS. Jurusan Bahasa tidak mendapat peminat, padahal dari hasil wawancara banyak siswa yang setelah tamat akan melanjutkan ke program studi bahasa, walaupun mereka bukan jurusan bahasa. Terkait dengan itu Mangunwijaya (1994:113)



mengatakan semua negara yang beradab dan demokratis mengakui hak primer pendidikan. Dengan demikian, maka pendidikan sebagai hak primer harus menjadi proses dialektis antarmanusia, karena sejak lahir manusia itu sudah membawa bakat-bakat khusus, di samping juga diberikan pendidikan oleh orang tua di rumah, dan pada akhirnya manusia menemukan pendidikan dari proses interaksi sosial dengan lingkungan masyarakatnya.

Jadi, apa yang dikembangkan oleh Mangunwijaya baru akan menemukan nilai kebenarannya apabila dalam proses pemilihan jurusan di SMA anak-anak diberikan kebebasan untuk menentukan secara independen apa sebenarnya yang menjadi pilihan mereka sesuai minat, bakat, dan kemampuan yang mereka miliki. Tetapi yang terjadi ketika proses pemilihan jurusan itu dilakukan, banyak anak yang mengalami kebingungan disebabkan oleh adanya semacam reduksionisme pemahaman atas posisi antar tiga jurusan yang ada. Konstruksi pengetahuan atas posisi ketiga jurusan yang ada di SMA ini seakan terbangun melalui proses alamiah, padahal sebenarnya terjadi melalui proses yang sangat hegemonik. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Gramsci (dalam Fakih, 2003:30) bahwa kekerasan sebagian besar terselenggara melalui proses hegemoni, yakni cara pandang, cara berpikir, ideologi, kebudayaan, bahkan 'selera golongan' yang mendominasi telah dipengaruhi dan diterima oleh golongan yang didominasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendidikan dan ilmu pengetahuan sebagaimana halnya kesenian dan estetika, bukanlah arena yang bersifat netral. Dalam arti kesenian dan kebudayaan, termasuk pendidikan tidaklah berada dalam ruang dan masa yang steril, tetapi dalam sistem dan struktur yang bersifat hegemonik.

Terkait dengan sistem penjurusan dan untuk memastikan berapa jumlah jurusan IPA dan berapa jurusan IPS yang ada di SMA Negeri 1 Denpasar, sampai 27 Februari 2012 maka datanya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

### Jumlah Kelas dan Jurusan di SMA Negeri 1 Denpasar

No.	Kelas	Jurusan	Jumlah
1.	Kelas XI	IPS	1 Kelas
2.	Kelas XII	IPS	1 Kelas
3.	Kelas XI	IPA	11 Kelas
4.	Kelas XII	IPA	10 Kelas

Sumber Data (TU SMA Negeri 1 Denpasar per 27-02-2012)

Dari data pada tabel di atas dapat dideskripsikan bahwa ada ketimpangan yang sangat tajam antara jumlah anak yang memilih jurusan IPA dengan anak yang memilih jurusan IPS atau jurusan Bahasa. Jika dikomparasikan anak yang memilih jurusan IPS dengan anak yang memilih jurusan IPA menunjukkan nisbah 1:11 untuk siswa di kelas XI dan 1:10 untuk siswa di kelas XII. Sementara perbandingan anak yang memilih jurusan IPA dengan anak yang memilih jurusan Bahasa menunjukkan perbandingan 11:0 untuk siswa di kelas XI dan 10:0 untuk siswa di kelas XII. Data ini menunjukkan betapa telah terjadi marginalisasi dalam sistem pemilihan jurusan, terutama untuk jurusan IPS atau Bahasa di SMA Negeri 1 Denpasar.

Dengan mempergunakan pendekatan analisis isi secara kualitatif, maka dapat dipahami bahwa proses marginalisasi sistem penjurusan di SMA Negeri 1 Denpasar menekankan kepada peran pemerintah sebagai regulator utama dalam pembangunan pendidikan. Artinya, terjadinya marginalisasi jurusan IPS dan Bahasa di SMA Negeri 1 Denpasar tidak dapat dilepaskan dari kebijakan sekolah terkait dengan otonomi sekolah itu sendiri. Seperti, yang dikatakan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Negeri 1 Denpasar (Drs. I Gusti Nyoman Suardika, M.Pd.) sebagai berikut.

... sebenarnya sistem penjurusan di sekolah ini sepenuhnya merupakan otonomi sekolah. Dalam arti pihak sekolah diberikan kewenangan penuh untuk membentuk jurusan yang diminati oleh para siswa. Tentu hal ini disesuaikan pula dengan kondisi dan potensi yang ada di sekolah ini. Jadi, secara normatif pihak sekolah sebenarnya menginginkan agar ketiga jurusan yang ada yakni jurusan IPA, IPS, dan jurusan Bahasa ada peminatnya. Tetapi kenyataannya pada saat penjurusan terjadi sebagian besar anak-anak memilih jurusan IPA, hanya sebagian kecil

memilih jurusan IPS, sementara tidak ada anak-anak yang berminat untuk memilih jurusan Bahasa. Kondisi ini hampir sudah menjadi tradisi dari tahun ke tahun di sekolah ini, dan kita dari pihak sekolah kan tidak boleh memaksa anak-anak untuk memilih jurusan ini atau jurusan itu. Prinsipnya kita serahkan semuanya pada keinginan anak-anak” (Wawancara, 27 Februari 2012).

Jika dicermati apa yang dikatakan oleh Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum di SMA Negeri 1 Denpasar di atas, tampak “*secara life service*” bahwa sistem penjurusan di sekolah tersebut berlangsung cukup demokratis. Sebab siswa diberikan kebebasan sepenuhnya untuk memilih jurusan apa saja yang mereka minati. Tetapi kenyataan di lapangan terjadi proses “Bebas Tetapi Diarahkan” karena jumlah jam pelajaran IPA di kelas X, lebih banyak dibandingkan jumlah jam pelajaran IPS di kelas X. Ditambah lagi adanya relasi kesepakatan antara Sekolah dengan Komite sekolah, semua jam pelajaran IPA ditambah satu jam dalam seminggu sehingga jumlah jam IPA menjadi dua kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan jam mata pelajaran IPS. Telah terbangun *Hidden Currikulum* dalam penyelenggaraan pendidikan.

Sementara pada penelitian ini penulis memahami pendidikan sebagai usaha yang disengaja untuk membangun manusia menjadi manusia yang mandiri untuk kemudian manunggal dengan manusia lain atau masyarakat di mana ia berada. Akan tetapi yang terjadi di SMA Negeri 1 Denpasar dalam konteks pemilihan jurusan seakan terjadi pembiaran proses penjurusan yang dikotomis. Dari hasil pengamatan di lapangan peneliti mendapatkan fakta bahwa banyak anak-anak yang terpaksa memilih jurusan IPA hanya untuk menghindari *image* agar dirinya tidak dicap sebagai kelompok anak-anak yang nakal, brandal, kurang disiplin, bodoh, dan sebutan miring lainnya. Hal ini dikarenakan sebagian masyarakat masih saja memiliki anggapan bahwa jurusan IPS dan Bahasa identik dengan kelompok anak-anak nakal, brandal, tidak bisa diurus, bodoh, dan sebutan lain yang senada. Padahal kenyataannya belum tentu seperti itu. Seperti yang dikatakan salah seorang siswa Ni Made Chyntia Trisna Eva Dewi, siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1

Denpasar sebagai berikut.

...Saya sengaja memilih jurusan IPS, walaupun saya berhasil meraih predikat juara umum II. Hal ini saya lakukan untuk menghilangkan *image* bahwa anak-anak IPS identik dengan anak-anak bodoh, nakal, kurang disiplin, dan sebutan lain yang sejenis. Menurut saya apapun jurusan yang kita pilih prinsipnya sama, yakni untuk mendalami bidang ilmu yang kita pilih secara lebih baik. Artinya, ketika kita memilih jurusan IPS kita harus mempersiapkan diri untuk memahami secara mendalam bidang ilmu IPS, demikian pula jika kita memilih jurusan IPA, kita harus memahami dengan baik bidang ilmu IPA, tidak terkecuali jurusan Bahasa, jangan hanya sekadarnya. Yang terpenting menurut saya janganlah jurusan itu dijadikan sebagai "kasta baru" dunia pendidikan. Maksud saya jangan jurusan itu dipandang didikotomi jurusan pintar IPA gak pintar IPS dan Bahasa, tetapi jurusan harus dilihat sebagai suatu spesialisasi, yang menuntut keahlian lebih, dalam bidang tertentu. Sehingga menurut saya tidak ada jurusan yang lebih pintar dan tidak ada yang lebih bodoh semuanya sepadan, yang beda hanya penekannya saja. Jika hal ini dipahami oleh seluruh masyarakat, termasuk para siswa saya yakin tidak akan terjadi penumpukan siswa pada jurusan tertentu, sementara jurusan lain kekurangan peminat. Yang perlu mendapat perhatian dari penjurusan bahwa setelah tamat anak-anak IPA tidak semuanya akan melanjutkan ke Perguruan Tinggi pada program studi IPA."

Dengan mengacu pada pernyataan Eva di atas, dan jika dipahami berdasarkan teori sibernetika sebagaimana dikembangkan oleh Norbert Wiener (1986) maka kondisi ini dapat dipahami sebagai praktik bahwa *information is power*. Artinya mereka yang menguasai informasi dengan benar mereka akan memegang kekuasaan. Jadi, proses terjadinya marjinalisasi jurusan IPS dan Bahasa, khususnya di SMA Negeri 1 Denpasar, bermula dari kurang dipahaminya informasi yang benar mengenai hakikat dari sistem penjurusan itu sendiri, baik oleh para siswa maupun oleh orang tuanya. Dalam memilih jurusan banyak siswa atau orang tuanya yang hanya memahami sistem penjurusan itu sebatas dipermukaan saja. Sementara apa dan bagaimana hakikat dari sistem penjurusan tersebut tidak mereka ketahui. Jadi, dalam hal pemilihan jurusan banyak siswa atau orang tua yang mengarahkan anaknya hanya berdasar pada asumsi bahwa jurusan yang lebih banyak peminatnya tentu mempunyai "nilai" yang lebih baik. Padahal jika mengacu pada Susetyo (2005:120) bahwa pendidikan seharusnya memerdekakan, yakni pendidikan yang berpola seperti "ayam yang mengajari anaknya mengenal

realitas kehidupan.” Pola pendidikan seperti ini, induk semang ayam mendidik anak-anaknya dari dan untuk kehidupan itu sendiri. Dalam arti anak ayam dibiarkan mencari makanan secara mandiri, sementara induknya mengawasi.

Jika pola ini dianalogkan dengan sistem pemilihan jurusan di Sekolah Menengah Atas seharusnya anak-anak dibiarkan memilih jurusan sendiri sesuai minat dan bakatnya sementara orang tua dan guru mengawasi, membimbing, dan bahkan mengamankan apa yang menjadi pilihan anak itu sendiri. Namun, yang terjadi di SMA Negeri 1 Denpasar dalam hal pemilihan jurusan orang tua justru berperan lebih dominan dibandingkan anak-anak mereka. Bahkan, boleh dibilang orang tua dalam mengarahkan anaknya untuk memilih jurusan hampir tidak mempedulikan potensi yang dimiliki anaknya. Seperti yang dialami oleh Ratih Dwipayani Siswa Kelas XI IPA7 SMA Negeri 1 Denpasar, mereka menuturkan sebagai berikut,

... sebenarnya saya berminat untuk melanjutkan studi ke Fakultas Ekonomi, sehingga dari awal sebenarnya saya bermaksud untuk memilih jurusan IPS. Tetapi atas kehendak orang tua saya diharuskan memilih jurusan IPA dengan alasan klasik, yakni agar bisa lebih leluasa memilih jurusan setelah memasuki lembaga pendidikan tinggi nantinya. Saya sempat stres diawal penjurusan tetapi karena ia masih ketergantungan secara finansial pada kedua orang tua, maka saya pun tidak punya kuasa untuk menolak keinginan orang tua, dan dengan keadaan terpaksa saya pun memilih jurusan IPA sesuai kehendak orang tua saya.”

### **Jurusan Favorit di SMA Negeri 1 Denpasar**

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar adalah lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab secara sektoral atas pembangunan pendidikan di Kota Denpasar. Dinas ini memiliki visi organisasi yang merupakan penjabaran dari visi Kota Denpasar yang kemudian dijadikan landasan operasional dalam pembangunan pendidikan. Adapun visi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Denpasar adalah “Terwujudnya Peningkatan Mutu Pendidikan yang Berakar pada Budaya Bangsa” (Disdikpora Kota Denpasar, 2011).

Untuk mencapai visi tersebut, maka ditetapkan lima fokus program pembangunan pendidikan, yakni menciptakan pemerataan peningkatan akses pendidikan; menciptakan peningkatan

mutu pendidikan; menciptakan efisiensi dan efektivitas pendidikan; menciptakan pendidikan yang berkesesuaian; dan menciptakan kapasitas manajemen pendidikan. Jika visi ini benar-benar dioprasionalkan dan diimplementasikan dalam pembangunan pendidikan, maka untuk kepentingan pemerataan dan untuk memenuhi kesesuaian *learning outcome* sekolah dengan kebutuhan masyarakat, sudah sepatutnya sistem pemilihan jurusan ini diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dapat lebih menjamin keseimbangan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antarjurusan IPS, Bahasa, dan jurusan IPA. Sehingga dengan aturan demikian tidak ada lagi proses marginalisasi salah satu jurusan pada lembaga pendidikan menengah atas.

Dari mekanisme penjurusan yang ada di SMA Negeri 1 Denpasar, ditemukan data bahwa ada pandangan, baik di kalangan siswa, guru, maupun orang tua siswa yang menganggap bahwa jurusan IPA adalah jurusan yang tergolong favorit. Asumsinya, karena *pertama*, jurusan IPA banyak diminati oleh para siswa; *kedua*, yang memilih jurusan IPA kebanyakan dari para siswa yang pintar, disiplin, dan cerdas akademik; *ketiga*, yang memilih jurusan IPA juga kebanyakan dari para siswa yang berasal dari kalangan keluarga menengah atas. Adanya pandangan demikian juga dapat berakibat terjadinya marginalisasi jurusan IPS dan jurusan Bahasa di SMA Negeri 1 Denpasar.

Adanya temuan tentang jurusan favorit dan jurusan tidak favorit di SMA Negeri 1 Denpasar, dapat memperuncing dikotomi antara jurusan IPA dengan jurusan IPS atau pun jurusan Bahasa yang seharusnya tidak perlu terjadi. Sebab terjadinya dikotomi antar jurusan di SMA dapat memperkuat pernyataan Ni Made Chyntia Trisna Eva Dewi, siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Denpasar sebagaimana dijelaskan di atas, dengan mengatakan bahwa kini telah terjadi "kasta baru" dunia pendidikan. Dengan realitas ini maka boleh jadi orientasi siswa memilih jurusan favorit (baca: IPA) di SMA tidak semata dilandasi oleh alasan pedagogis, yakni atas dasar minat, bakat, dan kemampuan mereka, akan tetapi lebih dilandasi oleh keinginan untuk memperoleh simbol status yang melekat pada jurusan tersebut. Seperti yang dikatakan

oleh Heare siswa kelas XI IPA 7 SMA Negeri 1 Denpasar, berikut pernyataannya.

.... sebenarnya saya suka mata pelajaran akuntansi, sementara bapak saya adalah seorang arsitek. Saya punya cita-cita untuk melanjutkan usaha bapak saya yang sehari-harinya bekerja sebagai kontraktor kan cocok jika saya memilih jurusan akuntansi. Sebab jika tamat nanti saya bisa menjadi akuntan publik dari usaha bapak saya. Tetapi setelah pikir-pikir malu juga pada teman-teman jika saya memilih jurusan IPS, sebab sebagian besar teman saya memilih jurusan IPA. Selain itu jurusan yang favorit di SMA Negeri 1 ini adalah jurusan IPA. Akhirnya saya ikut-ikutan teman memilih jurusan IPA' (Wawancara, 29 Februari 2012).

Dari ungkapan Heare di atas tampak sangat jelas, jika sistem pemilihan jurusan di SMA tidak saja berdimensi akademis pedagogis, tetapi juga berdimensi sosiologis psikologis. Maksudnya, sistem pemilihan jurusan pada jenjang pendidikan SMA tidak saja berlatar pada kemampuan siswa secara akademik dan pedagogis tetapi dilatari pula oleh sikap-sikap sosial tertentu, seperti rasa ingin dihargai, memperoleh status sosial tertentu, dan merasa malu dengan teman jika tidak berhasil meraih jurusan yang dianggap favorit. Atas fenomena ini, pihak manajemen sekolah seharusnya mencari berbagai solusi agar kondisi demikian tidak terus berlanjut dan tidak ikut dalam proses dominasi IPA terhadap IPS, dan Bahasa. Sebab jika tidak, marginalisasi jurusan IPS dan Bahasa pada jenjang pendidikan menengah atas, tidak akan dapat dibendung. Keseimbangan, baik mengenai jumlah maupun kualitas siswa yang memilih jurusan IPS, IPA, dan Bahasa akan menjadi sangat penting jika dilihat dari perspektif pembelajaran *quantum teaching*.

Dengan model pembelajaran *quantum teaching* dapat difungsikan kedua belahan otak manusia, yakni otak kiri dan kanan pada fungsinya masing-masing. Sebuah hasil penelitian di Universitas California sebagaimana dikutip Miftahul A'la (2010:25) mengungkapkan bahwa otak kiri dan kanan manusia mengendalikan aktivitas intelektual yang berbeda-beda sesuai tugas masing-masing. Otak kiri misalnya, menangani masalah angka, susunan, logika, organisasi, dan hal lain yang memerlukan pemikiran lebih rasional, beralasan dengan pertimbangan yang deduktif dan analitis, sehingga memungkinkan untuk berpikir

lebih mendalam lagi. Atau dengan kata lain bagian otak ini yang biasa digunakan untuk berpikir mengenai hal-hal yang bersifat matematis dan ilmiah.

Sementara otak kanan mengurus masalah-masalah pemikiran abstrak dengan penuh imajinasi. Misalnya, masalah warna, ritme, musik, dan proses pemikiran lain yang memerlukan kreativitas, orisinalitas, daya cipta, dan bakat artistik. Jadi, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa otak kanan memiliki karakteristik lebih imajiner, kurang terikat oleh parameter ilmiah dan matematis.

### **Jurusan Termarginal di SMA Negeri 1 Denpasar**

Konsep marginalisasi sebenarnya mempunyai padanan dengan konsep oposisi biner (*binary oposition*) dan cara-cara berpikir lainnya yang bersifat hierarkhis dikotomis. Kecenderungan utama oposisi biner adalah pada anggapan bahwa unsur yang pertama merupakan pusat, asal-usul, dan prinsip, dengan konsekuensi logis yang lain menjadi sekunder, marginal, dan padanan pelengkap lainnya (Kuta Ratna, 2004:222). Jadi, dalam hal pemilihan jurusan bagi siswa di Sekolah Menengah Atas (SMA) Jurusan IPA sering dipandang sebagai pusat, asal-usul, dan prinsip, sementara untuk jurusan IPS dan Bahasa dianggap sekunder, marginal atau terpinggirkan. Jadi, konsep marginalisasi dalam kajian ini mengadung arti bahwa telah terjadi peminggiran jurusan IPS dan Bahasa khususnya pada sekolah-sekolah favorit di Denpasar, dan lebih khusus lagi di SMA Negeri 1 dan SMA Dwijendra Denpasar.

Terpinggirkannya jurusan IPS dan Bahasa di SMA Negeri 1 Denpasar ini, bermula dari kurangnya peminat terhadap kedua jurusan tersebut. Kurangnya peminat terhadap jurusan IPS dan Bahasa, bahkan untuk jurusan Bahasa beberapa tahun berturut-turut tidak pernah ada peminatnya, akhirnya kepala sekolah mengundang komite sekolah untuk mencari jalan ke luar atas fenomena ini. Sesuai kesepakatan sekolah dengan komite sekolah SMA Negeri 1 Denpasar, serta dengan memperhatikan keadaan sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran yang tersedia, maka pihak sekolah menetapkan hanya ada dua



jurusan yang diprogramkan, yakni jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Alasan utama yang dijadikan dasar oleh sekolah untuk menetapkan dua jurusan itu adalah karena beberapa tahun berturut-turut sejak tahun 2000 jurusan Bahasa tidak pernah ada peminatnya, sementara jurusan IPA kebanyakan peminat dan jurusan IPS tetap diminati meskipun relatif sedikit. Terkait dengan hal itu Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum (Drs. I Gusti Nyoman Suardika, M.Pd.) mengatakan.

“...sejak tahun 2000 untuk jurusan Bahasa di SMA Negeri 1 Denpasar tidak pernah mendapat peminat (tidak ada siswa yang mau memilih jurusan ini). Dengan demikian pihak sekolah kemudian mengundang Komite Sekolah guna mencari solusi terkait kurangnya peminat bagi jurusan IPS dan Bahasa. Dari pertemuan yang dilakukan pihak sekolah dengan Komite Sekolah akhirnya disepakati bahwa jurusan yang dikembangkan hanya dua, yakni jurusan IPA dan jurusan IPS dan sampai saat inipun hanya dua jurusan itu yang mendapat peminat” (Wawancara, 29 Februari 2012).

Komite sekolah diundang dalam konteks ini dimaksudkan untuk menerapkan tata kelola sekolah yang baik (*good governance*) dengan meningkatkan akuntabilitas manajemen sekolah melalui pengembangan manajemen terbuka (*open management*) sehingga semua keputusan yang diambil memiliki akuntabilitas yang tinggi, tidak terkecuali untuk menetapkan jurusan yang hendak dikembangkan di sekolah ini. Selain keputusan mengenai jurusan yang akan dikembangkan, dalam kesepakatan itu juga ditetapkan mengenai waktu penjurusan dan kriteria penjurusan. Adapun waktu penentuan penjurusan studi Ilmu Pengetahuan Alam, dan Ilmu Pengetahuan Sosial, dilakukan pada akhir semester II Kelas X. Sedangkan pelaksanaan penjurusan dimulai pada semester I Kelas XI.

Selanjutnya, ada tiga kriteria pokok yang harus diperhatikan dalam konteks penjurusan untuk siswa SMA Negeri 1 Denpasar; antara lain peserta didik bersangkutan harus naik ke kelas XI; peserta didik dinyatakan masuk pada jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial apabila yang bersangkutan berminat memilih jurusan tersebut dan nilai mata pelajaran yang menjadi ciri khas Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (geografi, sosiologi,

ekonomi, dan sejarah) mencapai kategori tuntas; peserta didik dinyatakan masuk pada jurusan Ilmu Pengetahuan Alam apabila yang bersangkutan berminat untuk masuk ke jurusan Ilmu Pengetahuan Alam dan nilai mata pelajaran yang menjadi penciri jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (metematika, fisika, kimia, dan biologi) mencapai kategori tuntas (Dokumen 1 Kurikulum SMA Negeri 1 Denpasar, 2011/2012:108).

Dengan mengacu pada hasil kesepakatan pihak sekolah dengan komite sekolah SMA Negeri 1 Denpasar di atas, peneliti mengembangkan pemikiran bahwa di lingkungan sekolah telah terjadi kondisi "paternalisme". Namun tidak dalam konteks tradisi, sebagaimana yang dikenal dalam konsep paternalisme sebelumnya. Artinya, ketergantungan para siswa dalam hal memilih jurusan pada kesepakatan yang dibuat pihak sekolah dengan pihak komite sekolah, bersifat intelektual. Maka paternalisme yang berkembang di lingkungan sekolah pun adalah "paternalisme intelektual". Pemikiran "paternalisme intelektual" ini dikembangkan dari pemikiran Thomas A. Stewart yang mengatakan bahwa kekuatan yang paling dasyat saat ini adalah kekuatan intelektual, sehingga mereka yang memiliki "modal intelektual" yang terbanyak akan mempunyai posisi yang paling unggul (Stewart, 1997). Dalam konteks masyarakat sekolah, tentu guru dan kepala sekolah yang memiliki modal intelektual yang unggul dibandingkan para siswa. Dengan demikian guru/ kepala sekolah dengan modal intelektual yang dimiliki secara leluasa akan dapat melakukan permainan kekuasaan dengan menjadikan sekolah sebagai arena "bermainnya".

Jika kondisi paternalistik yang terjadi di sekolah ini dianalisis berdasarkan pendekatan strukturalis tampaknya tidak memadai untuk memahami peran dominan pihak guru atau kepala sekolah dalam kebijakan pemilihan jurusan di SMA Negeri 1 Denpasar. Oleh karena itu, maka peneliti menggunakan pendekatan kajian budaya untuk menganalisis permasalahan ini. Sebab secara teoritik, kajian budaya adalah praksis intelektual untuk membongkar jejaring relasi kekuasaan, dan secara politis kajian budaya adalah ilmu pengetahuan yang sangat subjektif, yakni untuk melakukan "pemihakan" terhadap yang bukan *elite*

atau kelompok masyarakat yang berada di tepi pusaran kekuasaan (Suryawan dalam *Jelajah Kajian Budaya*, 2011:35—52).

Jika mengacu pada Suryawan di atas, dan dengan mempergunakan pemikiran Bennett (dalam Nugroho, 1988) tentang sistem paternalistik yang mengatakan bahwa:

pada hakikatnya dalam sistem paternalisme ada tiga hal mendasar, yakni: (1) si “anak” selalu merasa tidak berdaya dan kekuarangan hak, serta ia selalu membutuhkan dukungan dan perlindungan; (2) si “anak” tidak sepenuhnya sadar akan peranannya dan oleh karena itu ia tidak bisa bertanggung jawab secara penuh; ia selalu membutuhkan bimbingan. (3) si “anak” adalah bodoh; ia dapat diperlakukan untuk melayani kepentingan si “dewasa” tanpa menyadari hal itu.

Maka dapat dipahami bahwa dalam penerapan sistem penjurusan di SMA Negeri 1 Denpasar guru/kepala sekolah menggunakan kepemimpinan paternalistik sebagaimana dikatakan oleh Bennett di atas, sehingga dalam implementasinya tidak nampak atau dengan kata lain terlaksana secara halus. Pemikiran ini didukung oleh Magnes Suseno yang mengatakan bahwa paternalisme merupakan salah satu jenis sistem manajemen politik totalitarian dengan varian yang lunak sebab sebagaimana lazimnya yang dikehendaki oleh sistem yang totalitarianistik, kekuasaan politik (*power*) terpusat di tangan pimpinan (lihat Magnes Suseno, 1987:312).

Demikian halnya yang terjadi di SMA Negeri 1 Denpasar dalam hal menentukan sistem penjurusan dan menetapkan jurusan-jurusan yang dikembangkan, hanya didasarkan atas kesepakatan kepala sekolah, guru, dan komite sekolah, sementara perwakilan dari siswa dan orang tuanya tidak ada. Meskipun dalam praktiknya pihak sekolah telah melibatkan pihak komite sekolah yang dianggap sebagai representasi dari orang tua siswa, namun di situ masih tampak ada relasi kekuasaan. Dikatakan demikian sebab mereka yang ditunjuk sebagai komite sekolah adalah mereka-mereka yang telah menduduki struktur dan memiliki berbagai modal, seperti modal sosial, modal budaya, dan modal ekonomi. Sementara menurut Bourdieu (1990:10) institusi-institusi ekonomi dominan telah terstruktur untuk menguntungkan mereka-mereka yang sudah memiliki modal

ekonomi. Demikian pula institusi-institusi pendidikan terstruktur untuk menguntungkan mereka yang telah memiliki modal budaya dalam bentuk habitus frasi budaya dominan.

Lebih lanjut dalam struktur ini mereka (baca: guru, kepala sekolah, dan komite sekolah) akan bisa bermain melalui proses pengambilan keputusan sehingga terjadilah dominasi dan hegemoni, bahkan bisa berlanjut pada eksploitasi terhadap siswa dan orang tuanya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa di sekolah telah terbentuk struktur, sementara itu struktur itu sendiri selalu berimplikasi pada proses pengambilan keputusan dan cenderung tidak berbasis massa tetapi berbasis *elite*. Dalam konteks ini Bourdieu (1974:39) mengatakan bahwa budaya elite begitu dekat dengan budaya sekolah sehingga anak-anak dari kelas menengah bawah (dan terlebih lagi kelas pekerja tani, dan pekerja industri) hanya dapat memperoleh sesuatu yang diberikan kepada anak-anak dari kelas-kelas yang terdidik—gaya, selera, dan kecerdasan—dengan usaha yang sangat keras. Dengan cara ini habitus dominan ditransformasi menjadi bentuk modal budaya yang diterima begitu saja oleh sekolah-sekolah, di samping bertindak sebagai saringan yang paling efektif dalam proses-proses reproduktif sebuah masyarakat hierarkhis.

### **Sistem Penjurusan di SMA Dwijendra Denpasar**

Sama seperti di SMA Negeri 1 Denpasar, sistem penjurusan di SMA Dwijendra Denpasar juga mengacu pada Permendiknas No. 22 tahun 2006, yang mengkategorisasi jurusan di SMA menjadi tiga, yaitu jurusan IPA, jurusan IPS, dan jurusan Bahasa. Meskipun yayasan Dwijendra sebagai institusi pendidikan yang menjadikan agama dan kebudayaan Hindu sebagai label, tetapi jurusan Bahasa yang secara normatif merepresentasikan nilai-nilai budaya di SMA ini juga tidak mendapat peminat, sementara untuk jurusan IPS hanya sedikit peminat. Terhadap kondisi ini pihak sekolah (yayasan, Kepala Sekolah, dan Guru) tidak mengambil langkah apapun sehingga kondisi ini terus saja berlanjut hingga sekarang. Ketika hal ini dikonfirmasi dengan kepala sekolah SMA Dwijendra Denpasar (Bapak Ida Bagus Alit Bajra Manuaba, S.Pd.) disampaikan sebagai berikut.

"...habis mau diapakan lagi, kita tidak bisa memaksa keinginan siswa untuk memilih jurusan ini atau jurusan itu. Sebab ini menyangkut masa depan anak-anak dan saya selaku kepala sekolah harus bersifat demokratis kepada siswa. Jadi, terkait dengan proses pemilihan jurusan di sekolah ini, kami selaku pelaku manajemen sekolah memberikan kebebasan penuh kepada siswa untuk memilih jurusan apa yang mereka inginkan sesuai kemampuan yang dimiliki." (Wawancara, 11 Februari 2012).

Apa yang disampaikan kepala sekolah tersebut menunjukkan bahwa SMA Dwijendra tidak memilih untuk mengembangkan atau menciptakan sebuah sistem yang dapat mengaplikasikan jurusan yang diatur dalam Permendiknas No. 22 tahun 2006, melainkan justru melakukan efisiensi jurusan dengan meniadakan salah satu jurusan, yakni jurusan Bahasa. Dikatakan menerapkan prinsip efisiensi, sebab jika tidak ada jurusan Bahasa, maka pihak manajemen sekolah tidak perlu membuat Lab Bahasa yang tentunya membutuhkan biaya tidak sedikit, tidak perlu menyiapkan sarana dan prasarana lainnya untuk keperluan proses pembelajaran di jurusan Bahasa. Penerapan prinsip efisiensi ini menunjukkan adanya pengingkaran terhadap prinsip keadilan yang dinyatakan oleh pasal 48 (1) UU No.20/2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dinyatakan bahwa "Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik". Dengan demikian ada keadilan kebijakan, antara kebijakan pendidikan di tingkat nasional dengan kebijakan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Dengan meniadakan jurusan Bahasa di lembaga pendidikan SMA dapat berakibat memudarnya minat dan perhatian para generasi muda terhadap nilai-nilai budaya bangsa, khususnya nilai-nilai kesusastraan yang sesungguhnya mempunyai arti yang sangat strategis bagi pembentukan karakter siswa. Di sinilah letak ketidakadilan pengelola pendidikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Ada yang mendapatkan fasilitas ada yang tidak.

Nilai-nilai kebudayaan sebagai nilai yang strategis dalam pembangunan karakter siswa (*character building*) secara keilmuan didukung oleh pemikiran Bertrand Russell (1993:xv) yang

mengatakan bahwa “pendidikan dimaksudkan supaya manusia mencerminkan lingkungannya dengan tepat lewat pengetahuan yang diperoleh dengan kecerdasan supaya ia melibatkan diri secara emosional dengan cinta, keramahan, dan keadilan pada sesama.” Hal senada diungkapkan pula oleh Schumacehr dalam dua karya besarnya, yakni *Small is Beautiful* (1973) dan *Good Work* (1979). Menurutnya, pendidikan adalah usaha penyebaran nilai-nilai kehidupan sehingga pendidikan harus dapat memberikan kemampuan hidup dan menginterpretasikan dunia.

Jika mengacu pada Bertrand Rusell dan Schumacher di atas, maka secara implisit sangat jelas tampak betapa nilai-nilai pendidikan, pendidikan sosial, termasuk pengetahuan bahasa dan humaniora dapat membekali para siswa seperangkat pengetahuan, sikap, cara pandang, dan nilai-nilai yang sangat berguna bagi pengembangan kepribadian (karakter) anak dalam menjalani hidupnya. Namun, hasil penelitian di lapangan menunjukkan fakta yang berbeda. Dari hasil pengamatan dan wawancara mendalam di dua lokasi penelitian ini, yakni di SMA Negeri 1 dan SMA Dwijendra Denpasar dalam proses pemilihan jurusan sebagian besar anak-anak memilih jurusan IPA, sementara jurusan IPS kurang peminat, bahkan untuk jurusan Bahasa sama sekali tidak ada peminat. Seperti yang dikatakan Yati Oktavianti seorang siswi kelas XII IPA-1 berikut pernyataannya.

...saya memilih jurusan IPA, karena melihat prospek ke depannya. Dalam arti jika saya tamat SMA nanti, bisa lebih leluasa memilih kesempatan, baik dalam hal pekerjaan maupun memilih jurusan di perguruan tinggi. Selain itu, sampai saat ini jurusan IPA tetap dianggap lebih unggul dibandingkan dengan jurusan IPS dan Bahasa. Itulah sebabnya mengapa saya kurang berminat terhadap jurusan IPS atau Bahasa (wawancara, 12 Maret 2012).

Ungkapan senada dikatakan pula oleh Indra Widiasta Putra siswa kelas X.1 diantara pernyataannya dia mengatakan bahwa jurusan IPA lebih bergengsi dibandingkan dua jurusan lainnya yaitu jurusan IPS dan Bahasa. Pernyataan lengkapnya adalah sebagai berikut,

... menurut saya jurusan IPA jauh lebih bergengsi daripada jurusan IPS dan Bahasa. Oleh karena itu, dari sejak awal saya masuk di sini sudah

bercita-cita untuk memilih jurusan IPA. Andaikan nanti sudah mulai penjurusan saya pasti memilih jurusan IPA, makanya dari sekarang saya sudah betul-betul mempersiapkan diri dan lebih memperdalam bidang ilmu yang mendukung keberhasilan saya meraih jurusan IPA. Selain itu, ada faktor lain yang memperkuat minat saya untuk memilih jurusan IPA, yakni dorongan orang tua saya sendiri. Orang tua saya sangat mendorong agar saya nantinya memilih jurusan IPA, sebab harapan orang tua saya agar nantinya saya bisa kuliah di Fakultas Kedokteran (wawancara, 12 Maret 2012).

Jika kondisi ini dibiarkan terus berlanjut, maka dikhawatirkan dunia ini akan sepi dari nilai-nilai sosial, humaniora, dan nilai-nilai budaya, karena para generasi muda (baca:para siswa) kebanyakan menaruh minat pada pengetahuan *science* murni sementara sedikit sekali yang berminat dengan ilmu sosial dan humaniora. Dengan sistem pendidikan demikian juga dapat berakibat masyarakat ke depan akan semakin bersifat rasionalisme pragmatisme, sehingga nilai-nilai budaya yang bersifat humanisme, estetis, etis, dan lain-lain yang sesungguhnya sangat sesuai dengan nilai-nilai budaya Bangsa Indonesia yang sudah diwarisi secara turun temurun akan semakin terkikis. Di sisi lain penganut aliran esensialisme berpendapat bahwa secara tradisional pendidikan harus bersendikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat sekaligus teruji oleh waktu. Jadi, jika mengacu pada beberapa pendapat ahli di atas, maka dapat diketahui bahwa semua bidang ilmu yang ada sebenarnya mempunyai fungsi masing-masing dan satu sama lain akan saling melengkapi.

### **Jurusan Favorit di SMA Dwijendra Denpasar**

Sebagaimana dikemukakan pada temuan penelitian ini dengan visi pembangunan pendidikan sebagai prioritas, SMA Dwijendra tidak mengembangkan jurusan sesuai dengan yang diamanatkan Permendiknas No. 22 tahun 2006, melainkan justru meniadakan jurusan Bahasa karena memang tidak ada peminat. Akibat dari kebijakan ini, maka salah satu jurusan yang sangat diminati para siswa, bahkan kelebihan peminat adalah jurusan IPA, sementara jurusan IPS dapat peminat, tetapi jumlahnya relatif sangat kecil. Jadi, dari hasil studi di lapangan menunjukkan

bahwa sampai saat penelitian ini dilakukan jurusan yang favorit di SMA Dwijendra Denpasar adalah Jurusan IPA.

Dari hasil wawancara mendalam dengan beberapa orang siswa dan orang tuanya maka dapat diketahui ada dua faktor dominan yang membuat kondisi ini terjadi, antara lain faktor internal siswa dan faktor eksternal (lingkungan) siswa. Faktor internal maksudnya ada semacam dorongan kuat yang berasal dari dalam diri siswa atau orang tuanya untuk memilih jurusan IPA. Dorongan model ini disebut juga motivasi instrinsik, yakni dorongan bagi seseorang untuk melakukan tindakan (tingkah laku) tertentu karena motif-motif tertentu yang ada pada diri siswa atau orang tuanya. Terkait dengan kecenderungan para siswa dan orang tuanya mengarahkan anaknya untuk memilih jurusan IPA, lebih didasari oleh dorongan untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi dibandingkan kebutuhan yang lain. Seperti dikatakan Bapak I Wayan Sueca (67 tahun) salah satu orang tua siswa SMA Dwijendra Denpasar sebagai berikut,

... saya memang dari awal meyarankan agar anak saya belajar dengan baik sehingga saat penjurusan bisa masuk di jurusan IPA. Sebab dalam pandangan saya dan mungkin juga masyarakat luas, sekarang jurusan IPA jauh lebih unggul, lebih baik, dan lebih bergengsi dibandingkan jurusan IPS dan jurusan Bahasa. Saya akan merasa sangat malu jika anak saya sampai masuk di jurusan IPS atau Bahasa. Oleh karena itu saya berusaha sekuat daya upaya agar anak saya bisa masuk di jurusan IPA. (wawancara, 14 Maret 2012).

Pernyataan orang tua siswa ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Intan Kusumayanti (siswa kelas X-U1 SMA Dwijendra Denpasar) dengan mengatakan sebagai berikut.

... saya jika penjurusan nanti pastinya akan memilih jurusan IPA. Alasannya, selain karena lebih bergengsi juga mempunyai prospek masa depan yang lebih baik. Alasan lainnya karena jurusan IPA lebih luas skopnya, baik dalam hal mencari kerja maupun untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Buktinya, kakak kelas saya di sini sebagian besar memilih jurusan IPA, demikian pula saya lihat di sekolah-sekolah lainnya di Denpasar atau di daerah-daerah lain. Jurusan yang paling favorit untuk jenis sekolah SMA adalah jurusan IPA. Sementara jurusan IPS kurang peminat, bahkan di jurusan Bahasa sama sekali tidak ada peminatnya dan kalau toh ada pasti hanya satu atau dua orang saja, sehingga bagi pihak institusi tidaklah mungkin membuka jurusan yang hanya diminati oleh satu atau dua orang saja" (wawancara, 15 Maret 2012).



Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa secara faktual jurusan yang menjadi idola para siswa di SMA Dwijendra Denpasar sampai saat penelitian ini dilakukan adalah jurusan IPA. Data lain menunjukkan bahwa dipilihnya jurusan IPA oleh para siswa sama sekali tidak dilandasi oleh alasan didaktis pedagogis, seperti tidak didasarkan atas minat, bakat, dan kemampuan siswa sesuai bidangnya, tetapi lebih dilandasi oleh alasan sosiologis psikologis. Artinya, siswa memilih jurusan IPA bukan atas pertimbangan, minat, bakat, dan kemampuan siswa terhadap kelompok bidang ilmu IPA, akan tetapi lebih didasari oleh pertimbangan-pertimbangan masa depan yang lebih menjanjikan, rasa gengsi, malu dengan teman, dan lain sebagainya. Singkatnya dapat dikatakan bahwa siswa SMA dalam sistem memilih jurusan, lebih didasari oleh pertimbangan pencitraan diri dibandingkan pertimbangan-pertimbangan ideologis pedagogis. Kondisi ini terjadi bukan tidak mungkin juga disebabkan karena mulai bertautnya citra pendidikan dengan citra kapitalisme.

Hal demikian sebenarnya telah menjadi kekawatiran sejumlah tokoh pendidikan dunia, salah satu di antaranya adalah Halsel Henderson (1991) dengan mengatakan sebagai berikut,

... bila kecenderungan bertautnya citra dunia pendidikan dengan citra kapitalisme terus berlanjut; bila dunia pendidikan terus disokong oleh budaya tanda, citra, dan gaya hidup; bila ia terus memproduksi mentalitas pekerja; bila ia terus menghasilkan ilmuan kapitalis, atau singkatnya bila pandangan dunia (*world view*) yang diciptakan kapitalisme tidak diubah, maka sesungguhnya distorsi di dalam dunia pendidikan akan terus berkembang semakin besar, yakni menciptakan dunia pendidikan yang semakin terperangkap di dalam dimensi komersial, dan semakin menjauhkan dari dimensi-dimensi sosial, moral, serta spiritual yang lebih luas dan kaya.

Apa yang dikawatirkan oleh Henderson di atas, di Indonesia umumnya dan Bali khususnya, lebih khusus lagi untuk kasus di SMA Negeri 1 dan SMA Dwijendra Denpasar faktanya membenarkan apa yang dikatakan oleh Henderson tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan sedikitnya minat anak yang tertarik untuk memilih jurusan IPS dan Bahasa yang sesungguhnya banyak mengandung dimensi sosial, spiritual, moral, dan estetika.

Di SMA Dwijendra Denpasar misalnya, dari 10 kelas siswa kelas XI dan 10 kelas siswa kelas XII yang memilih jurusan IPS, masing-masing hanya 3 kelas. Rinciannya adalah sebagai berikut: dari sepuluh kelas siswa kelas XI per tahun ajaran 2011/2012 yang memilih jurusan IPA adalah sebanyak 7 kelas, sementara yang memilih kelas IPS hanya tiga kelas. Demikian pula di kelas XII, dari sepuluh kelas siswa kelas XII yang memilih jurusan IPS hanya tiga kelas, sementara yang memilih jurusan IPA sebanyak 7 kelas. Melihat kenyataan yang ada terutama dalam konteks pemilihan jurusan, baik yang terjadi di SMA Negeri 1 maupun yang ada di SMA Dwijendra Denpasar, menunjukkan betapa pandangan Henderson memiliki ketepatan terhadap realitas yang terjadi.

Untuk menghindari terjadinya distorsi yang semakin luas dalam dunia pendidikan sebagaimana dikawatirkan Henderson, maka para pemegang kebijakan baik di tingkat nasional, daerah, maupun pada tingkat satuan pendidikan hendaknya segera melakukan hegemoni tandingan (*counter hegemony*) untuk melawan ide, gagasan, dan ideologi besar kapitalisme yang menguasai dunia pendidikan. Bukan hanya itu, terjadinya distorsi dunia pendidikan khususnya dalam hal pemilihan jurusan dapat pula berpengaruh terhadap sikap, cara pandang, dan cara manusia memikirkan sesuatu di dunia ini. Salah satu ciri khas Ilmu Pengetahuan Alam (*science*) adalah pada pandangannya yang bersifat rasionalis pragmatis. Cara pandang demikian tentu tidak dapat dipisahkan dari cara pandang penganut aliran modernisme yang menekankan pada sikap rasionalisme empirisme. Sikap dan cara pandang model ini tampaknya telah menimpa kehidupan para siswa di sekolah, termasuk siswa SMA Negeri 1 dan siswa SMA Dwijendra Denpasar.

Selain pada pilihannya terhadap jurusan IPA, dari cara berpakaian, ber-*handphone*, dan bahkan bermobil para siswa di dua sekolah yang dijadikan lokus penelitian ini tampaknya sudah banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai modernisme. Hal ini dapat dilihat dari penampilan beberapa siswa yang cenderung bersifat *fashionable* dan cenderung konsumerisme seperti tampak pada gambar di bawah ini.



*Beberapa orang siswa sedang istirahat makan siang di Kantin, dan beberapa di antaranya asyik bermain HP, membuat tampilannya tampak modern*

Pada gambar di atas tampak sebagian siswa asyik menikmati makanan di kantin sekolah, sementara yang lain asyik bermain HP, dan ada pula yang terlena mendengarkan musik lewat headset di telinganya. Melihat kondisi demikian membuat pikiran ini segera tertuju pada apa yang dikatakan George Ritzer (2002:2) tentang sebuah “paradigma” berlingkup luas yang disebutnya McDonaldisasi dengan mengatakan sebagai berikut,

... sebuah proses di mana berbagai prinsip restoran *fast-food* hadir untuk mendominasi lebih banyak sektor kehidupan Amerika serta di berbagai belahan dunia lainnya.

Jika mengacu pada Ritzer di atas, maka dapat diamati bahwa di mana-mana kehidupan McDonaldisasi tidak hanya mempengaruhi bisnis restoran, melainkan juga bidang pekerjaan, perawatan kesehatan, perjalanan, politik, keluarga, dan tidak terkecuali pendidikan. Ketika pendidikan terkontaminasi oleh paradigma McDonaldisasi, maka dalam proses transformasi berbagai pengetahuan bagi siswa SMA bisa terpengaruh oleh prinsip McDonald, yakni ingin serba instan, cepat mencapai hasil tanpa mepedulikan aspek kualitas dari hasil yang dicapai. Paradigma demikian dapat pula mempengaruhi cara berpikir para siswa dalam hal pemilihan jurusan. Maksudnya jurusan yang dianggap secara cepat dapat mengantarkan siswa ke dunia kerja,

dan jurusan yang dianggap merepresentasikan simbol-simbol modernisme akan sangat diminati oleh para siswa sementara jurusan yang jauh dari representasi tersebut cenderung akan ditinggalkan oleh para siswa. Hal demikianlah yang menyebabkan jurusan IPA akan kelebihan peminat sementara jurusan IPS dan Bahasa senantiasa kekurangan peminat, bahkan untuk jurusan Bahasa tidak ada peminat sama sekali.

### **Jurusan Termarjinal di SMA Dwijendra Denpasar**

Salah satu alasan mendasar ditiadakannya jurusan Bahasa, baik di SMA Negeri 1 maupun di SMA Dwijendra Denpasar adalah kurang diminatinya jurusan tersebut oleh para siswa di kedua sekolah tersebut. Adanya kebijakan meniadakan jurusan Bahasa di jenjang pendidikan SMA, sebagaimana dilakukan di SMA Negeri 1 dan SMA Dwijendra Denpasar dapat ditanggapi sebagai sebuah dialetika kebijakan. Pasalnya, kebijakan yang seharusnya diambil terkait dengan sistem penjurusan berdasarkan Permendiknas No. 22/2006 adalah mengembangkan tiga jurusan, yakni jurusan IPS, Bahasa, dan jurusan IPA. Namun, pada kenyataannya jurusan Bahasa, baik di SMA Negeri 1 maupun di SMA Dwijendra Denpasar, malah ditiadakan.

Alasan pengambilan kebijakan ini, di kedua sekolah tersebut sesuai temuan di lapangan dan sebagaimana telah disinggung dalam uraian di atas adalah karena kurangnya peminat terhadap jurusan Bahasa itu sendiri. Terhadap kondisi ini pihak manajemen sekolah seharusnya menempuh langkah-langkah nyata untuk mengatasi kurangnya minat siswa terhadap jurusan Bahasa. Tetapi kenyatannya tidak demikian, hal ini menunjukkan bahwa pihak manajemen sekolah seakan melakukan pembiaran terhadap kondisi yang terjadi. Padahal jika ditelusuri secara lebih mendalam sebenarnya ada saja siswa yang berminat untuk mengambil jurusan Bahasa. Seperti yang ditemukan di SMA Dwijendra Denpasar, dari hasil wawancara dengan beberapa orang siswa diperoleh data bahwa ada dua orang siswa yang sebenarnya berminat terhadap jurusan Bahasa, yakni Fatia dan Sintia.

Ketika ditanya lebih lanjut apa alasan anak ini ingin memilih

jurusan Bahasa dengan tegas ia menjawab:

... karena saya ingin melanjutkan ke Fakultas Sastra jurusan Sastra Inggris. Hal ini dilandasi oleh cita-cita saya kelak ingin jadi dosen. Untuk menjadi dosen di era sekarang ini Bahasa Inggris pasti menjadi sesuatu yang penting. Sebab untuk bisa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini kita harus menguasai Bahasa Inggris, karena kemajuan ilmu pengetahuan dunia Barat pastilah berbahasa Inggris. Oleh karena itu, jika ingin eksis dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kita harus memperkuat diri dalam bidang Bahasa Inggris (Wawancara, 15 Maret 2012).

Dari ungkapan siswa seperti di atas, dapat dideskripsikan bahwa sebenarnya masih ada siswa yang berminat terhadap jurusan Bahasa, tetapi karena pihak manajemen sekolah tidak melakukan upaya-upaya yang dapat mengarah pada upaya pengembangan ketiga jurusan sesuai yang diamanatkan oleh Permendiknas No.22/2006, membuat dua jurusan yakni jurusan IPS dan jurusan Bahasa menjadi termarjinalkan. Berbeda dengan jurusan Bahasa, jurusan IPS di SMA Dwijendra tetap ada peminat, tetapi jumlahnya relatif kecil, yakni hanya tiga kelas untuk di kelas XI dari 10 kelas yang ada, dan tiga kelas di kelas XII dari sepuluh kelas yang ada. Adanya kondisi ini menunjukkan betapa sebenarnya fungsi-fungsi manajemen pendidikan belum berjalan maksimal.

Padahal jika mengacu pada Tilaar (2009:48) yang mengatakan bahwa pendidikan bukanlah sekadar konsumsi, tetapi juga merupakan investasi produktif dalam masyarakat. Pedagogik kontemporer melihat pendidikan bukan sekadar transmisi kebudayaan atau sekadar mempersiapkan warga negara untuk masa depan, tetapi terutama sebagai proses penyadaran individu sebagai pendukung dan pembaru kebudayaan. Jika Tilaar memahami pendidikan sebagai investasi produktif dalam masyarakat, berbeda halnya dengan Michael Rutz (dalam Nugroho, 2008:20) yang mengemukakan bahwa pendidikan berawal dari fakta bahwa manusia mempunyai kekurangan. Pendidikan merupakan jawaban untuk membuat manusia menjadi lengkap. Diantara pernyataannya, Rutz berucap:

“(Karena) setiap pribadi selalu mempunyai defisit (maka) pendidikan adalah suatu proses kompensatoris yang dapat membantu anak didik

untuk sedapat-dapatnya menutupi devisa tersebut”.

Sebangun dengan pernyataan Rutz adalah P.J. Hills, yang memahami pendidikan sebagai proses belajar yang ditujukan untuk membangun manusia dengan pengetahuan dan ke-trampilan. Dalam pandangannya itu Hills mengatakan,

*“... education is a process of learning aimed at equipping people with knowledge and skills. There are to be enough to equip people sufficiently well so as to enable them to live satisfactorily, continue to learn and pursue career...”*

Ketiga pemahaman di atas sesungguhnya memberikan arah pemahaman bahwa pendidikan merupakan sebuah kegiatan yang melekat kepada setiap kehidupan bersama, atau dalam bahasa politiknya disebut sebagai “negara-bangsa” dalam rangka menjadikan kehidupan bersama tersebut mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dan mengantisipasi perkembangan kehidupannya. Jika dicermati secara lebih seksama ketiga pemahaman mengenai pendidikan di atas, maka tampak secara jelas betapa sesungguhnya ketiga bidang ilmu (jurusan) yang seharusnya dikembangkan di SMA itu, mempunyai arti yang sangat strategis. Mengingat peran strategisnya ketiga bidang ilmu yang secara konstitusi diwujudkan dalam bentuk jurusan, maka dalam implementasinya di lapangan seharusnya tidak ada jurusan yang sampai termarginalkan seperti yang terjadi di SMA Dwijendra Denpasar.

### **Peran Guru BK dalam Sistem Penjurusan**

Guru bimbingan dan konseling (BK) dimaksudkan dalam kajian ini adalah guru yang secara khusus memiliki kompetensi dasar untuk memberikan arahan atau bantuan (bimbingan) kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar. Menurut Poerwanto, (1979:126) bantuan yang diberikan hendaknya merupakan bantuan yang dapat menyadarkan orang itu akan pribadinya sendiri, seperti bakat, minat, kecakapan, dan kemampuan yang dimiliki anak itu sendiri. Dari pandangan Poerwanto di atas dapat dikatakan guru bimbingan dan konseling seharusnya mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengarahkan

anak-anak dalam hal belajar, termasuk dalam hal memilih jurusan yang sesuai dengan, minat, bakat, dan kemampuan yang dimiliki oleh siswa itu sendiri. Namun, dalam hal memberikan arahan atau bimbingan, guru bimbingan dan konseling tidak boleh memberikan arahan sesuai dengan keinginan guru itu sendiri. Atau dengan kata lain pemberian arahan itu tidak boleh mengandung unsur paksaan, dalam memberi arahan guru hanya sebatas memberikan pandangan atau pertimbangan sedangkan keputusan tetap berada pada diri siswa itu sendiri.

Proses pemberian bimbingan itu dapat dilakukan secara perorangan (secara individu) dan dapat pula diberikan secara berkelompok (sistem klasikal). Seperti yang dilakukan guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 1 Denpasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh guru BK di SMA Negeri 1 Denpasar menggunakan dua model, yakni model perorangan (individu) dan model kelompok. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara dengan salah seorang guru BK, yakni Dra. Ida Ayu Tirta (55 tahun) yang mengatakan sebagai berikut,

... ada dua model selama ini yang saya gunakan untuk memberikan bimbingan (arahan) kepada anak-anak dalam hal mengatasi kesulitan belajar, termasuk kebingungan anak-anak dalam memilih jurusan. *Pertama*, saya lakukan dengan sistem kelompok (kelas). Dengan sistem ini saya masuk ke kelas-kelas, terutama di kelas yang bermasalah kemudian saya berikan bimbingan atau arahan kepada mereka secara kolektif dan pemberian bimbingan disesuaikan dengan masalah yang dihadapi anak-anak. *Kedua*, kadang-kadang banyak juga anak yang datang ke ruangan saya untuk minta bimbingan terkait dengan masalah yang mereka hadapi, baik mengenai kesulitan belajar, masalah pribadinya, masalah keluarganya, dan tidak terkecuali mengenai hal pemilihan jurusan. Dalam kaitannya dengan pemilihan jurusan selain ke kelas-kelas, banyak juga anak-anak yang datang ke ruangan saya untuk memohon pertimbangan mengenai jurusan apa yang sebaiknya mereka pilih, sehingga mereka tidak sampai salah pilih. Terhadap kesulitan siswa dalam hal memilih jurusan, maka saya ajak dulu mereka ngobrol tentang hobinya, mata pelajaran yang disukainya, buku yang banyak dibacanya, dan nilai bidang studi yang diperolehnya. Jadi dengan ngobrol seperti itu saya akan tahu apa sebenarnya potensi yang dimiliki oleh anak tersebut, baru saya berikan mereka arahan sesuai dengan minat, bakat, dan potensi yang mereka miliki, dan itu pun hanya sebatas saran yang bisa saya berikan sedangkan keputusan tetap berada pada diri anak itu sendiri (wawancara, tanggal 17 Maret 2012).

Demikian pula yang terjadi di SMA Dwijendra Denpasar, dari hasil wawancara dengan guru BK di SMA Dwijendra Denpasar, terungkap bahwa proses bimbingan yang dilakukan di SMA Dwijendra juga tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan di SMA Negeri 1 Denpasar. Proses bimbingan di SMA ini juga dilakukan dengan dua pola, yakni dengan pola perorangan (individu) dan dengan pola kelompok (kelas). Seperti yang dikatakan oleh Drs. I Gusti Ngurah Suburyana, (Guru BK, di kelas XI, SMA Dwijendra) sebagai berikut,

... dalam hal memberikan bimbingan (arahan) kepada anak-anak yang mengalami kesulitan belajar biasanya saya melihat permasalahannya dulu. Artinya, jika kesulitan yang dihadapi anak-anak itu bersifat agak umum atau dialami oleh banyak anak, maka bimbingan saya berikan secara kelompok atau secara klasikal. Sedangkan jika kesulitan yang dihadapi oleh anak itu, bersifat personal (pribadi) maka saya panggil mereka ke ruangan untuk diberikan bimbingan/arahan sesuai dengan permasalahan yang mereka hadapi. Jadi, di sini saya menggunakan dua model bimbingan yakni model perorangan dan model kelompok. (wawancara tanggal 17 Maret 2012).

Mencermati apa yang dilakukan oleh kedua guru Bimbingan dan Konseling di atas, dari segi perlakukannya terhadap peserta didik tampak ada kesesuaian dengan pemahaman yang dibangun oleh penganut aliran Psikologi Daya yang mengatakan bahwa jiwa manusia terdiri atas berbagai daya, seperti daya mengingat, daya berpikir, merasakan, kemauan, dan sebagainya. Tiap orang mempunyai atau memiliki semua daya-daya itu, hanya berbeda dalam hal kekuatannya saja. Agar daya-daya itu berkembang (terbentuk), dengan baik maka daya-daya itu perlu dilatih, sehingga dapat berfungsi secara maksimal. Dalam hal mengembangkan daya-daya tersebut, maka para siswa perlu mendapat arahan yang baik dari gurunya, sehingga mereka tidak salah langkah. Di sinilah diperlukan peran guru Bimbingan dan Konseling untuk memberi arahan yang sesuai dengan kekuatan masing-masing potensi yang dimiliki para siswa.

Namun, dalam kenyataannya baik di SMA Negeri 1 maupun di SMA Dwijendra Denpasar, meski sudah di arahkan oleh guru BK-nya dalam hal pemilihan jurusan, tetapi tetap saja anak-anak yang memilih jurusan IPS jumlahnya sangat kecil. Bahkan untuk



jurusan Bahasa tidak ada sama sekali. Hal demikian membuktikan bahwa guru bimbingan dan konseling, baik di SMA Negeri 1 maupun di SMA Dwijendra Denpasar belum menunjukkan peranan yang maksimal. Sebab dari hasil wawancara dengan beberapa orang siswa di SMA Dwijendra Denpasar, ternyata ada dua orang siswa yang sebenarnya ingin mengambil jurusan Bahasa, tetapi karena jurusan Bahasa tidak dikembangkan di SMA Dwijendra, akhirnya anak inipun terpaksa memilih jurusan IPA, karena melihat *trend*.

*Trend* yang dimaksudkan di sini adalah melihat jumlah anak yang memilih jurusan IPA jauh lebih banyak dari mereka yang memilih jurusan IPS, akhirnya mereka yang berminat memilih jurusan Bahasa tadi tidak jadi memilih jurusan Bahasa, akan tetapi memilih jurusan IPA. Dari kenyataan ini, menunjukkan bahwa dalam konteks pemilihan jurusan ternyata guru bimbingan dan konseling, baik di SMA Negeri 1 maupun di SMA Dwijendra Denpasar belum mampu meyakinkan para siswanya atas hakikat dari penjurusan tersebut, termasuk dalam manajemen penjurusan di sekolah. Selain itu, dari kenyataan yang dihadapi siswa dan kebijakan yang diambil pihak sekolah nampak adanya rekayasa sosial (*social engenering*) terhadap sistem penjurusan di sekolah. Hal ini terbukti dari kenyataan yang menunjukkan meskipun ada beberapa siswa yang sebenarnya berminat untuk memilih jurusan Bahasa, akhirnya tidak jadi hanya karena di sekolah tersebut tidak dibuka jurusan Bahasa, dan pihak manajemen sekolah seakan tidak memberikan respon apa-apa terhadap keinginan siswa tersebut.

Kenyataan ini selain menunjukkan betapa guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 1 dan SMA Dwijendra Denpasar kurang berperanan dalam mengarahkan anak-anak untuk memilih jurusan yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan yang dimiliki para siswa tersebut, juga menunjukkan betapa kuatnya pengaruh modernisme melanda mental masyarakat dewasa ini termasuk manajemen sekolah. Terkait dengan hal itu, disadari ataupun tidak, suka ataupun tidak, masyarakat dewasa ini sebenarnya telah memasuki suatu era yang oleh para teoritisi sosial disebut zaman postmodern dengan salah satu cirinya ada-

lah *skizofrenia*. *Skizofrenia* oleh Piliang (2004) digambarkan sebagai sebuah dunia yang di dalamnya “hasrat” dan manifestasinya pada produk, tanda, gaya, mengalir dengan kecepatan tinggi dan dengan intensitas semakin tinggi, berpluktuasi, berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lainnya dalam tempo yang semakin tinggi pula, sehingga menggiring manusia ke dalam kondisi ke ketiadaan “ego” ke ketiadaan identitas, ke ketiadaan teritorial, dan ke ketiadaan makna. Artinya, di zaman yang oleh para teoritis sosial disebut zaman postmodern ini, “hasrat”, kegairahan, dan kesenangan-kesenangan mengalir tanpa henti menuju arah yang ia sukai, tanpa dapat lagi dikendalikan oleh ego, sehingga dunia realitas itu kini dibentuk oleh dorongan-dorongan insting manusia yang tidak terkendalikan lagi oleh ego.

Lebih lanjut menurut Piliang (2004) citra dan tanda-tanda mengalir dengan kecepatan tinggi di dalam media (televisi, produk, dan tontonan) dan di dalam kegilaannya, ia sampai pada satu titik di mana ia tidak meninggalkan jejak makna apapun bagi peningkatan kehidupan manusia yang bermakna. Dalam arti, manusia hanyut dalam kegilaan tanda, di dalam kegilaan trend, dan di dalam kegilaan gaya hidup (*life style*). Sampai-sampai sistem penjurusan di sekolah pun kini tidak urung dijadikan sebagai kegilaan tanda, atau dipandang sebagai gaya hidup oleh para siswa. Dalam arti, siswa yang mampu memilih jurusan yang dianggap merefresentasikan gaya hidup modern seperti jurusan IPA, maka mereka akan dianggap sebagai siswa yang berpikiran modern, modis, mengikuti trend dan sebutan lain yang sejenis. Sementara siswa yang tidak mampu memilih jurusan yang tidak merefresentasikan ciri-ciri zaman modern sebagaimana digambarkan di atas, maka mereka akan dipandang sebagai siswa yang , terkebelakang, dan tidak modis. Padahal seharusnya pemilihan jurusan dilakukan sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan yang dimiliki para siswa bersangkutan. Hal demikianlah yang menyebabkan para siswa kebanyakan memilih jurusan IPA, meskipun belum tentu sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan yang mereka miliki, yang penting dia bisa dicap sebagai siswa yang modern, mengikuti trend, atau sebagai siswa yang modis. Sementara para guru tidak kuasa

untuk membendung keinginan siswa semacam itu, karena hal demikian merupakan fenomena zaman yang memang sangat sulit untuk dibendung oleh sispapun.

### **Peran Guru IPA dalam Pemilihan Jurusan**

Menurut Sanjaya (2006:21) bagaimanapun hebatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti dewasa ini, peranan guru tetap menduduki posisi penting dalam proses pembelajaran di ruang kelas. Teknologi yang konon bisa memudahkan manusia dalam segala hal, termasuk dalam hal mencari dan mendapatkan berbagai informasi dan pengetahuan, namun dalam aplikasinya tidak akan dapat menggantikan peran guru secara keseluruhan. Berangkat dari asumsi tersebut, Sanjaya kemudian berhasil mengklasifikasi beberapa peran guru dalam kaitannya dengan proses pembelajaran di ruang kelas seperti berikut ini.

*Pertama*, peran guru sebagai sumber belajar mengandung maksud bahwa sebagai sumber belajar guru harus mampu menguasai materi ajar dengan baik. Sebab jika tidak anak didik (siswa) tidak akan percaya terhadap apa yang dibicarakan oleh guru di depan kelas. Sebaliknya, jika guru mampu menguasai materi ajar dengan baik, maka ia akan bisa melakukan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan (PAIKEM).

*Kedua*, peran guru sebagai fasilitator, sebagai fasilitator guru hendaknya mampu memberikan pelayanan agar siswa dapat lebih mudah menguasai materi pelajaran dalam setiap proses pembelajaran yang dilakukan antara guru dan siswa di ruang kelas. Selain guru sebagai fasilitator guru juga harus mampu mengarahkan siswa agar lebih mudah mempelajari materi ajar yang dimuat dalam berbagai sumber belajar, seperti berbagai macam buku (literatur), majalah, jurnal, dan sumber belajar lainnya.

*Ketiga*, peran guru sebagai pengelola (*learning manager*) sebagai pengelola pembelajaran (*learning manager*) guru berperan dalam menciptakan iklim belajar yang memungkinkan siswa dapat belajar secara nyaman. Melalui pengelolaan kelas yang baik guru dapat menjaga kelas agar tetap kondusif untuk

terjadinya proses pembelajaran yang baik seluruh kelas. Terkait dengan peranan guru sebagai pengelola kelas, Alvin C. Eurich sebagaimana dikutip Sanjaya (2006:24), membangun sebuah pemahaman tentang prinsip-prinsip belajar yang harus diperhatikan guru yaitu, segala sesuatu yang dipelajari oleh siswa, harus dipelajarinya sendiri; setiap siswa yang belajar memiliki kecepatan masing-masing; seorang siswa akan belajar lebih banyak apabila setiap selesai melaksanakan tahapan kegiatan diberi *reinforcement*; keempat penguasaan secara penuh dari setiap langkah yang dilakukan siswa dalam hal belajar memungkinkan belajar secara keseluruhan lebih berarti; dan apabila siswa diberi tanggung jawab, maka ia akan lebih termotivasi untuk belajar.

*Keempat*, guru sebagai demonstrator, guru sebagai demonstrator dimaksudkan di sini adalah peran guru untuk mempertunjukkan kepada siswa segala sesuatu yang dapat membuat siswa lebih mengerti dan memahami setiap pesan yang disampaikan. Dalam konteks ini guru harus mampu bertindak sebagai model atau teladan bagi setiap siswa, baik dalam hal belajar maupun dalam hal bertingkah laku.

*Kelima*, guru sebagai motivator, dalam proses pembelajaran motivasi merupakan salah satu aspek dinamis yang sangat penting. Sering terjadi siswa kurang berprestasi bukan disebabkan oleh kemampuannya yang kurang, tetapi bisa jadi disebabkan oleh tidak adanya motivasi untuk belajar, sehingga ia tidak berusaha untuk mengerahkan segala kemampuan yang dimilikinya. Terkait dengan hal itu, bisa dikatakan siswa berprestasi rendah belum tentu disebabkan oleh kemampuannya yang rendah pula, tetapi bisa jadi juga disebabkan oleh motivasinya yang rendah atau tidak ada motivasi belajar sama sekali.

*Keenam*, guru sebagai pembimbing, sebagai pembimbing guru harus memiliki pemahaman tentang anak yang dibimbingnya, seperti memahami mengenai gaya dan kebiasaan belajar, potensi dan bakat yang dimiliki siswa. Pemahaman ini mempunyai arti yang sangat penting sebab semuanya akan menentukan teknik dan jenis bimbingan yang harus diberikan. Demikian halnya dengan mengarahkan (membimbing) siswa

dalam hal pemilihan jurusan. Bagaimana guru bisa mengarahkan siswa dengan baik dan benar jika guru bersangkutan tidak memiliki pemahaman tentang diri siswa yang dibimbingnya, baik mengenai minat, bakat, maupun kemampuan yang dimiliki oleh siswa bersangkutan.

Dalam kaitannya dengan pemberian arahan (bimbingan) untuk pemilihan jurusan bagi siswa bagi di SMA Negeri 1 dan di SMA Dwijendra Denpasar guru bidang studi IPA, mengalami posisi yang sedikit dilematis, sebab meskipun guru bidang studi IPA memberikan informasi yang netral terhadap keberadaan semua jurusan tetapi, karena banyaknya anak-anak yang memilih jurusan IPA, maka hal tersebut dapat pula berdimensi *sosial engenering* (dianggap mengandung rekayasa sosial). Sebab ketika lembaga pendidikan berfungsi sebagai alat hegemoni, yakni sebagai alat untuk menyebarkan dan memperkuat gagasan dan sistem ideologi tertentu yang bersifat dominan, seperti gagasan tentang modernisme, maka di dalamnya terbuka peluang besar terciptanya berbagai bentuk pemaksaan gagasan, pengetahuan, atau ideologi, lewat sebuah mekanisme yang disebut kekerasan simbol (*symbolic violence*). Menurut Pierre Bourdieu dalam *Language and Symbolic Power* kekerasan simbol adalah sebuah bentuk kekerasan yang halus dan tidak tampak, tetapi di baliknya menyembunyikan dominasi. Dalam arti sebuah proses pemaksaan ide, gagasan, dan kekuasaan yang dilakukan dengan cara yang sangat halus sehingga tidak tampak sebagai sebuah pemaksaan dominasi (Piliang, 2004:359).

Dalam hal pemilihan jurusan, baik di SMA Negeri 1 maupun di SMA Dwijendra Denpasar, memang guru bidang studi IPA, tidak tampak memaksakan dominasi agar siswa memilih jurusan IPA. Tetapi melalui jargon-jargon yang mengatakan bahwa bidang studi IPA adalah bidang studi yang mengandung rasionalitas yang tinggi, bidang studi IPA sebagai bidang ilmu yang bersifat positivistik, bidang studi IPA adalah bidang studi yang mengandung objektivitas yang tinggi, dan berbagai jargon lainnya, tentu dapat ditafsirkan sebagai upaya untuk melakukan dominasi terhadap bidang studi di luar bidang studi IPA dengan cara-cara yang bersifat hegemonik. Seperti yang disampaikan

Drs. I Ketut Sadia, M.Pd. (guru matematika di SMA Negeri 1 Denpasar) sebagai berikut,

... setiap memberikan arahan kepada para siswa dalam hal pemilihan jurusan saya selalu mengatakan bahwa semua jurusan pada prinsipnya adalah sama. Tetapi memang harus diakui bahwa setiap jurusan memiliki kelebihan dan kekuarangan masing-masing. Seperti misalnya, jika memilih jurusan IPA setelah tamat bisa memilih jurusan lebih banyak nanti di perguruan tinggi. Sedangkan jika memilih jurusan IPS atau Bahasa agak terbatas nantinya saat memilih jurusan di perguruan tinggi. Selain itu, kelompok bidang studi IPA cenderung memiliki objektivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok bidang studi IPS dan Bahasa. Selain kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh kelompok bidang studi IPA, tentu juga dengan segala kekuarungannya. (Wawancara, tanggal 19 Maret 2012).

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa guru kelompok bidang studi IPA tidak melakukan dominasi secara terang-terangan kepada para siswanya dalam konteks pemilihan jurusan, tetapi dari berbagai pernyataan di atas dengan menggunakan pemahaman hegemoninya Gramsci, dapat dikembangkan sebuah pemikiran bahwa dalam proses pemilihan jurusan di SMA telah terjadi dominasi dan hegemoni melalui penyusupan berbagai gagasan, ide, pengetahuan, atau ideologi melalui mekanisme yang sangat halus, sehingga tidak tampak sebagai suatu pemaksaan dominasi.

Selain itu, penggunaan Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar pada kelompok mata pelajaran IPA (baca: jurusan IPA) juga dapat ditafsirkan sebagai upaya untuk memosisikan jurusan IPA adalah jurusan yang lebih bergengsi dibandingkan jurusan lainnya. Sebab sampai saat ini pandangan masyarakat yang menganggap keberadaan budaya Barat lebih tinggi dari kebudayaan Timur masih sangat dominan. Padahal tanpa disadari penggunaan bahasa Inggris, komputer, dan berbagai teknologi canggih lainnya dapat melahirkan bentuk penyeragaman sekaligus sentralisme baru melalui proses kolonisasi bahasa asing utamanya bahasa Inggris dan teknologi komputer. Jadi, penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar pada siswa jurusan IPA merupakan salah satu bentuk hegemoni atau dominasi kebijakan sekolah terhadap peserta didik, sebab di balik kebijakan tersebut terselip maksud agar jurusan IPA

tampak lebih bergengsi, lebih modern, dan lebih unggul dari jurusan lainnya.

### **Peran Guru IPS dalam Pemilihan Jurusan**

Pasal 39 (2) Undang-Undang No.20/2003 tentang Sisdiknas menegaskan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Jika mengacu pada ketentuan pasal 39(2) undang-undang No.20/2003 tersebut, maka selain melakukan proses pembelajaran dan menilai hasil belajar sebagai tugas pokoknya, melakukan arahan dan bimbingan karier bagi siswa juga merupakan tugas guru di sekolah. Dalam hal memberikan bimbingan karier kepada siswa guru mempunyai peranan yang cukup penting, sebab jika salah dalam pemberian arahan bukan tidak mungkin siswa bisa gagal dalam proses perkembangannya.

Untuk di SMA Negeri 1 dan SMA Dwijendra Denpasar, tidak ada bimbingan karier secara khusus diberikan kepada anak-anak, baik dalam hal mengatasi kesulitan belajar maupun dalam hal pemilihan jurusan. Hal demikian dapat diketahui dari hasil penelitian lapangan yang menunjukkan bahwa tidak ada satupun surat keputusan kepala sekolah yang menugaskan guru secara khusus untuk memberi layanan bimbingan karier kepada para siswanya. Ketika hal ini dikonfirmasi dengan kepala sekolah SMA Negeri 1 Denpasar Drs. I Made Tumbuh, M.Pd. (sekarang sudah purna tugas) dikatakannya bahwa:

...kami di sini tidak menugaskan guru secara khusus untuk memberikan layanan bimbingan karier kepada para siswa, sebab proses bimbingan termasuk bimbingan karier sudah melekat pada tugas guru sebagai pembimbing anak-anak di sekolah. Jadi, dalam hal pemilihan jurusan saya asumsikan setiap guru mempunyai tugas yang sama untuk mengarahkan siswa, untuk memilih jurusan apa yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan yang dimiliki siswa masing-masing. Dalam hal ini guru bidang studi apapun mempunyai tugas yang sama dalam hal memberikan arahan, bimbingan, dan bantuan belajar kepada anak sehingga anak-anak tidak salah langkah dalam proses pemilihan jurusan.

Sejalan dengan I Made Tumbuh, Ida Ayu Tirta (55 tahun) guru Bimbingan dan Konseling di SMA Negeri 1 juga mengatakan bahwa

...secara khusus memang tidak ada guru yang ditugaskan untuk memberikan bimbingan karier kepada para siswa termasuk saya sebagai guru Bimbingan dan Konseling. Namun, secara tidak langsung sebagai guru, ketika mengajar di kelas saya sering juga mengarahkan anak-anak yang di dalamnya berisi juga arahan mengenai bimbingan karier. Misalnya, apa yang menjadi cita-cita mereka kita coba pancing lalu dari respon yang diberikan oleh siswa, kita coba arahkan sesuai minat dan bakatnya masing-masing. Selain itu, sebagai seorang guru BK, saya juga sering melayani siswa di ruangan saya dalam kaitannya dengan bimbingan karier. Kadang-kadang anak-anak datang ke ruangan saya dengan tujuan meminta bimbingan atau arahan mengenai berbagai hal. Mulai dari soal pelajaran, ekstra kurikuler, soal jurusan, masalah keluarga, sampai persoalan pribadinya. Terhadap hal ini sebagai guru, kita harus melayani mereka dengan sebaik-baiknya, agar mereka tidak sampai terjerumus.

Dari apa yang dikatakan baik oleh kepala sekolah maupun oleh Guru Bimbingan dan Konseling di SMA Negeri 1 Denpasar, dapat diketahui bahwa secara normatif, memang tidak ditemukan adanya upaya-upaya pihak manajemen sekolah untuk menggiring para siswanya agar memilih salah satu jurusan yang favorit dalam proses penjurusan di SMA tersebut. Sementara di sisi lain ketika para siswa sebagian besar memilih jurusan IPA, dan hanya sebagian kecil yang tertarik untuk memilih jurusan IPS, bahkan tidak ada sama sekali yang berminat memilih jurusan Bahasa, pihak manajemen sekolahpun tidak mengambil langkah apa-apa. Bahkan di SMA Negeri 1 Denpasar untuk jurusan Bahasa malah ditiadakan, karena kurangnya minat siswa untuk memilih jurusan tersebut.

Demikian pula yang terjadi di SMA Dwijendra Denpasar, sebagian besar anak-anak memilih jurusan IPA, hanya sebagian kecil memilih jurusan IPS, yakni hanya tiga kelas dari sepuluh kelas yang ada, baik di kelas XI maupun di kelas XII dan tidak ada sama sekali yang memilih jurusan Bahasa. Dari hasil wawancara dengan beberapa orang siswa di SMA Dwijendra Denpasar, sebenarnya ditemukan beberapa orang siswa yang berminat terhadap jurusan Bahasa. Tetapi karena jumlah mereka relatif



sedikit, maka pihak manajemen sekolah di SMA Dwijendrapun meniadakan jurusan Bahasa dengan alasan yang sama, yakni kurangnya minat anak-anak untuk memilih jurusan dimaksud. Terkait dengan kondisi ini seharusnya guru IPS, dan Guru Bahasa memainkan peranan yang sangat penting dalam hal memberikan bimbingan atau arahan kepada siswa mengenai posisi dan peranan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora dalam sistem pendidikan nasional.

Namun, guru-guru IPS yang mengajar di SMA Dwijendra Denpasar lebih memilih sikap permisif dibandingkan sikap proaktif dalam mengarahkan siswanya untuk memilih jurusan. Sikap permisif yang dilakukan oleh guru-guru bidang studi IPS dan Bahasa boleh jadi merupakan sebuah representasi dari dominasi bidang studi IPA atas bidang studi IPS dan Humaniora. Sebab apa yang terjadi secara realitas dalam konteks sistem penjurusan di SMA dewasa ini, sebangun dengan apa yang dikatakan Ash Hartwell (1995) sebagaimana dikutip oleh Danim, (2003:34—35) yang mengatakan bahwa:

...sekolah dan universitas begitu lamban merespon ide-ide radikal, dan karenanya lembaga ini dilabeli sebagai institusi sosial yang paling konservatif. Selain itu, diperlukan waktu sekitar 100 tahun bagi teori-teori dan ide-ide ilmiah untuk dapat mempengaruhi, isi, proses, dan struktur lembaga pendidikan persekolahan sebagai organisasi pembelajaran formal.

Sementara di sisi lain, perubahan wajah dunia terus berakselerasi, misalnya pada abad ke-20 ini telah diproduksi konsep-konsep dan teori-teori yang radikal tentang alam, realitas, dan tentang epistemologi. Munculnya teori relativitas mekanika kuantum, dan penemuan DNA adalah contoh nyata, betapa dunia di luar lembaga pendidikan formal berkembang sangat cepat dan pesat. Kenyataan ini pula menunjukkan betapa guru IPS dan Bahasa kurang mampu meyakinkan para stakeholdernya akan konstruksi dan posisi keilmuannya di tengah pertarungan antara filsafat ilmu sosial dan filsafat ilmu alamiah. Sehingga pada kenyataannya jurusan IPA selalu dapat mengungguli jurusan IPS dan Bahasa dalam konteks penjurusan di SMA.

## Peran Guru Bahasa dalam Pemilihan Jurusan

Otomatisasi pembelajaran di era teknoinformasi dewasa ini, seakan telah menjadi sebuah *hall* akademik yang tidak bisa dibendung oleh siapapun. Otomatisasi pembelajaran, termasuk otomatisasi perpustakaan merupakan distribusi bahan-bahan ajar melalui media *online* secara digital. Istilah *online* bermakna bahwa material bahan ajar dapat diakses di ruang-ruang kantor, ruang keluarga, ruang belajar pribadi, dan sebagainya melalui tombol-tombol kumputer yang menggunakan jaringan atau instrumen telekomunikasi. Skema proses pembelajaran semacam ini melahirkan minimalisasi interaksi guru dengan siswa, sehingga dapat mengurangi peran guru, baik sebagai sumber belajar, motivator, fasilitator, maupun sebagai pembimbing (Danim, 2003:39).

Berangkat dari apa yang dikatakan Danim di atas, temuan penelitian ini menunjukkan realitas kebenarannya. Terbukti anak-anak SMA sekarang ini telah biasa melakoni proses pembelajaran *online*, yakni dengan cara mengakses berbagai materi ajar dengan memanfaatkan jaringan atau instrumen telekomunikasi, misalnya melalui *online forum*, *online journal*, dan *social media*. Cara belajar seperti ini memang harus diakui, bahwa di satu sisi dapat memudahkan para pembelajar (baca:siswa) dalam hal mengakses berbagai sumber belajar, tetapi di sisi lain peranan guru dalam hal melakukan transmisi nilai (*tranmision of value*) menjadi semakin berkurang, bahkan hampir tidak ada sama sekali.

Kondisi ini tampak terjadi pula, baik di SMA Negeri 1 maupun di SMA Dwijendra Denpasar. Hal ini terlihat dari para siswa di kedua sekolah tersebut, hampir sebagian besar berangkat ke sekolah dengan seperangkat laptop sehingga setiap saat mereka bisa mengakses informasi dari internet. Selain itu, di kedua institusi pendidikan ini dilengkapi dengan Wifi, sehingga para siswa bisa leluasa mencari berbagai materi ajar tanpa harus merogoh uang jajan mereka. Seperti yang dikatakan oleh Inten Kusumayanti (siswa kelas X1) SMA Dwijendra Denpasar sebagai berikut.

...saya sering mencari informasi dari sumber-sumber diinternet, karena kebetulan saya udah dibelikan laptop oleh orang tua saya dan di sekolah juga ada wifinya sehingga kita bebas mengakses materi ajar dari internet. Banyak pengetahuan baru yang bisa saya dapati dari internet, baik pengetahuan umum maupun pengetahuan yang terkait dengan materi ajar yang diberikan guru di sekolah (wawancara, 31 Maret 2012).

Hal yang sebangun dikatakan juga oleh Ni Made Chyntia Trisna Eva Dewi, (siswa kelas XI IPS) SMA Negeri 1 Denpasar sebagai berikut.

...sekarang kan jamannya digital, kita udah biasa mencari berbagai materi ajar dari sumber-sumber diinternet. Guru-guru juga sering memberi tugas untuk mencari materi pelajaran dari internet. Jadi, saya pikir mencari sumber belajar dari internet bukan lagi sesuatu yang luar biasa, melainkan sesuatu yang sudah biasa kita lakukan, baik di rumah maupun di sekolah (Wawancara , 31 Maret 2012).

Apa yang dikatakan oleh dua orang siswa tadi menunjukkan betapa otomatisasi pembelajaran di sekolah dewasa ini telah menunjukkan faktanya. Dengan demikian apa yang dikatakan oleh Danim (2003:39) terjadi pula pada kedua institusi yang dijadikan lokasi penelitian ini. Skema proses pembelajaran semacam ini diasumsikan dapat memperbaiki kinerja pembelajaran dan pemekaran akses bagi manusia pebelajar secara lebih luas. Akan tetapi di sisi lain model pembelajaran semacam ini juga melahirkan minimalisasi interaksi antara guru dengan siswa, sehingga dapat pula mengurangi peranan guru dalam berbagai hal termasuk peranan guru sebagai pembimbing.

Selain itu, praktik otomatisasi pembelajaran dengan memanfaatkan instrumen telekomunikasi juga dapat berakibat lahirnya kecenderungan-kecenderungan sikap komersialisasi di kalangan tenaga pengajar dan pihak manajemen sekolah. Sebab ketika siswa dianjurkan untuk mengakses materi ajar di internet tentu di situ ada beban-beban biaya, seperti biaya pulsa, biaya *print out* dan sebagainya. Di sisi lain ketika sikap komersialisasi malang melintang di dunia sekolah, maka hal ini akan dapat berpengaruh terhadap hubungan antara guru siswa, yang semula hubungan personal yang terjadi lebih dilandasi oleh sikap sosial kekeluargaan, namun kini telah berubah menjadi hubungan individualisme-materialisme.

Berangkat dari kondisi skema proses pembelajaran yang terjadi di sekolah akhir-akhir ini dan dari hasil penelusuran di kedua sekolah yang dijadikan lokasi penelitian ini ditemukan betapa sebenarnya minimnya peranan guru bidang studi, termasuk guru bidang studi Bahasa dalam hal memberikan arahan kepada para siswa, termasuk pengarahan dalam hal pemilihan jurusan. Hal demikian disebabkan selain karena institusi sekolah tidak mampu menghindarkan diri dari pesatnya perkembangan teknologi informasi juga disebabkan skema proses pembelajaran memang sudah dirancang seperti itu, sehingga meminimalisir peranan guru di sekolah dalam berbagai hal. Seperti peranan guru sebagai sumber belajar, peranan guru sebagai fasilitator, sebagai motivator, dan juga peranan guru sebagai pembimbing.

Kondisi demikian juga dapat menyulitkan guru dalam menjalankan perannya sebagai seorang pembimbing, sebab bisa jadi siswa lebih dulu mengetahui berbagai informasi mengenai perkembangan dunia keilmuan melalui informasi di internet dibandingkan gurunya. Hal ini diakui oleh salah seorang guru Bimbingan dan Konseling di SMA Dwijendra Denpasar, yakni Bapak Drs. I Gusti Ngurah Suburyana (52 tahun) dengan mengatakan sebagai berikut,

... kadang-kadang kita kesulitan untuk mengarahkan siswa, termasuk mengarahkan siswa dalam hal pemilihan jurusan, sebab melalui internet mereka bisa lebih dulu mengetahui perkembangan dunia keilmuan yang ada saat ini. Misalnya, jika dia memilih jurusan IPA apa kelebihan dan kekurangannya, demikian pula jika mereka memilih jurusan IPS dan Bahasa apa kelebihan dan kekurangannya masing-masing, mereka sudah lebih dulu tahu melalui berbagai sumber di internet. Dunia sekarang sudah sangat canggih, sehingga sebagai guru kadang-kadang kita serba susah dalam mengarahkan siswa (wawancara, 1 April 2012).

Dari data ini dapat dipahami betapa minimnya peranan guru bidang studi dalam hal mengarahkan anak-anak terutama dalam konteks pemilihan jurusan di sekolah. Akibatnya, para siswa dalam hal memilih jurusan bisa jadi bukan lagi atas dasar minat, bakat, dan kemampuan, tetapi dalam hal memilih jurusan mereka lebih didasari oleh selera atau atas dasar simbol status sosial. Dalam arti, proses pemilihan jurusan di sekolah kini tidak lagi semata-mata dipanadang sebagai wadah

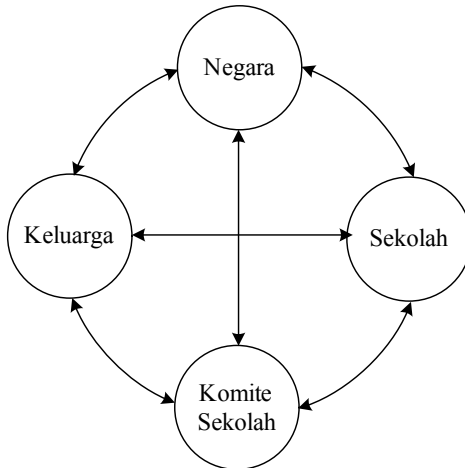
untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki, tetapi lebih dimaksudkan untuk memenuhi hasrat untuk memperoleh simbol status, sehingga tidak mengherankan jika jurusan yang dianggap favorit (misalnya Jurusan IPA) akan kelebihan peminat, sementara jurusan yang dianggap termarginal, seperti (jurusan IPS dan Bahasa) akan kekurangan peminat. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Piliang (2004:183) bahwa:

Pada masyarakat konsumen dewasa ini, konsumsi dipandang sebagai suatu sistem difrensiasi, yakni sistem pembentukan perbedaan, melalui status, simbol, dan prestise sosial. Adanya perbedaan ini merupakan sistem yang menandai kedatangan masyarakat konsumen. Dalam era konsumerisme, masyarakat hidup dalam satu bentuk relasi subjek dan objek yang baru, yakni relasi konsumerisme.

Percataan Piliang di atas, jika dikaitkan dengan kondisi yang terjadi di masyarakat dewasa ini, termasuk masyarakat sekolah nampak ada kesesuaian. Misalnya, para siswa di sekolah memandang sistem pemilihan jurusan sebagai objek untuk membuat difrensiasi diri melalui simbol, status, dan prestise. Dalam arti jurusan tertentu dipandang sebagai institusi yang memiliki simbol status yang tinggi, sementara jurusan lain dianggapnya sebagai simbol status yang rendah. Padahal menurut teori pedagogis sebagaimana dikemukakan oleh Williams Stern (dalam Ahmadi, 1991:21) bahwa perkembangan jiwa anak lebih banyak ditentukan oleh dua faktor yang saling menopang, yakni faktor bakat dan pengaruh lingkungan yang keduanya bersifat *interdependence* yang seolah-olah memadu dan bertemu dalam satu titik. Jika mengacu pada Williams Stern di atas, seharusnya dalam proses pemilihan jurusan para siswa tidak menjadikan selera atau keinginan sebagai asumsi dasar, tetapi yang seharusnya dijadikan landasan adalah minat, bakat, dan potensi (kemampuan) yang ada pada diri siswa itu sendiri. Sebab menurut teori konvergensi sebagaimana dikatakan Williams Stren, bahwa perkembangan anak akan mengalami laju yang sangat cepat jika bakat yang dimiliki oleh anak didukung oleh lingkungan yang sesuai. Oleh karenanya dalam sistem pemilihan jurusan, jurusan sebagai faktor lingkungan hendaknya sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan siswa sebagai faktor bawaan yang dimiliki siswa. Jika hal ini yang dilakukan

para siswa, maka para siswa akan dapat terhindar dari kesulitan belajar yang sering menghambat proses perkembangan siswa itu sendiri. Begitu sebaliknya jika, siswa memilih jurusan atas dasar selera, simbol status, atau prestise, maka kesulitan belajar pasti akan menghadang di depan mereka.

Apabila dirangkum maka proses terjadinya marjinalisasi jurusan IPS dan Bahasa di SMA Negeri 1 dan SMA Dwijendra Denpasar, nampak seperti bagan 6.1 sebagai berikut.



Dari bagan di atas dapat dijelaskan bahwa proses marjinalisasi jurusan IPS dan Bahasa diawali dari: pertama, negara (regulator pendidikan), mengadakan tata aturan penjurusan, seperti diamanatkan oleh Permendikna No.22 Tahun 2006. Bahwa sistem penjurusan di SMA dimaksudkan untuk penelusuran terhadap minat, bakat, dan kemampuan siswa dibidang akademik. Penjurusan di SMA di mulai dari kelas XI. Jurusan dibagi menjadi tiga yaitu jurusan IPA, IPS, dan Bahasa. Siswa yang dapat masuk pada katagori jurusan IPA, adalah siswa yang memiliki ketuntasan pada empat mata pelajaran, yaitu Matematika, Kimia, Fisika, dan Biologi. Sedangkan yang masuk pada katagori jurusan IPS adalah siswa yang memiliki ketuntasan pada empat mata pelajaran yaitu Sejarah, Geografi, Ekonomi, dan Sosiologi. Siswa yang dapat masuk pada katagori jurusan Bahasa, adalah siswa yang memiliki ketuntasan dalam mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa dan Sastra Inggris, dan

Bahasa Bali, serta Bahasa Asing lainnya. Nilai ditentukan pada semester II kelas X. Selain itu Negara mengadakan tata aturan lain yang memberikan peluang terhadap dominasi IPA, seperti pengadaan fasilitas, sarana dan prasarana yang lebih banyak ditujukan kepada pengembangan jurusan IPA. Seperti contoh jumlah jam IPA lebih banyak dari jumlah jam IPS. Informasi IPA pada buku-buku pelajaran di SMA lebih banyak berorientasi praksis, rasional, dan objektif. Informasi IPS dan Bahasa lebih menekankan normatif akademik.

Kedua, peran keluarga, yang mempunyai kuasa untuk mengarahkan putra-putrinya untuk memilih jurusan IPA dengan argumen-argumen, masuk/ memilih jurusan IPA termasuk katagori siswa yang pintar, baik, bergengsi, dan masa depan cerah. Sedangkan siswa yang memilih jurusan IPS dan Bahasa, dikategorikan anak-anak(siswa) yang bodoh, tidak baik, tidak bergengsi, dan masa depan suram. Selain relasi kekuasaan juga pemberian fasilitas berupa kelengkapan alat-alat belajar, pemberian fasilitas bimbingan belajar, dan *reinforcement*.

Ketiga, sekolah membuat penjurusan IPA, IPS dan Bahasa sesuai aturan dan regulasi negara. Hal ini sangat memungkinkan terjadinya dikotomis, karena didikotomikan melalui aturan, fasilitas, dan sistem penerimaan siswa baru. Penerimaan melalui Tes Potensi Akademik, yang soal-soalnya didominasi oleh pelajaran IPA, apalagi sistem penerimaan siswa baru melalui jalur nilai Ujian Nasional (UN), sangat jelas bahwa nilai IPA menjadi barometer. Hal lainnya adalah praktik-praktik sosial guru. Guru IPA lebih percaya diri dibandingkan guru IPS dan Bahasa.

Keempat, komite sekolah, biasanya diketuai oleh orang yang memiliki modal intelektual, modal sosial, dan modal kuasa. Dengan modal itu ketua komite ikut bermain menentukan arah kebijakan pendidikan termasuk penjurusan. Seperti terjadi di SMA Negeri 1 Denpasar, penutupan jurusan Bahasa diledakkan oleh Komite Sekolah.

# IMPLIKASI MARGINALISASI JURUSAN IPS DAN BAHASA

## Implikasi Terhadap Siswa

Sebagaimana telah diuraikan di depan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan di dua lokus penelitian ini, yakni di SMA Negeri 1 dan di SMA Dwijendra Denpasar, ternyata di kedua lokasi tersebut dalam konteks pemilihan jurusan telah terjadi marginalisasi jurusan, yakni jurusan IPS dan jurusan Bahasa. Hal ini terbukti dari 11 kelas siswa kelas XI di SMA Negeri 1 Denpasar, yang memilih jurusan IPS hanya 1 (satu) kelas, yang memilih jurusan Bahasa tidak ada, dan sebanyak 10 kelas lainnya . jurusan IPA. Demikian pula untuk siswa kelas XII dari sepuluh kelas siswa yang ada pada tahun ajaran 2011/2012 yang memilih jurusan IPS hanya 1 (satu) kelas, dan yang memilih jurusan Bahasa tidak ada, sementara 9 kelas lainnya memilih jurusan IPA. Kondisi yang tidak jauh berbeda terjadi pula di SMA Dwijendra Denpasar. Dari 10 (sepuluh) kelas, siswa kelas XI yang ada di SMA Dwijendra Denpasar ternyata yang memilih jurusan IPS hanya 3 (tiga) kelas, tidak ada yang memilih jurusan Bahasa, dan 7 (tujuh) kelas lainnya memilih jurusan IPA. Demikian pula yang terjadi di kelas XII, dari 10 (sepuluh) kelas, siswa kelas XII di SMA Dwijendra Denpasar, yang memilih jurusan IPS hanya 3 (tiga) kelas, yang memilih jurusan Bahasa tidak ada, sementara 7 (tujuh) kelas lainnya memilih jurusan IPA.

Dari data yang berhasil dikumpulkan di kedua lokasi penelitian ini, menunjukkan betapa jurusan IPS dan Bahasa di dua lokasi penelitian ini termarginalkan. Padahal semua jurusan yang ada seharusnya diberikan porsi yang sama sehingga terjadi keseimbangan jumlah siswa pada masing-masing jurusan yang ada. Jika tidak demikian bukan tidak mungkin akan dapat memunculkan stratifikasi sosial baru dalam konteks persekolahan. Maksudnya, ketika salah satu jurusan menjadi rebutan bahkan idola bagi para siswa, masyarakat, dan negara,



sementara jurusan lain tidak ada yang meminati, maka akan muncul jurusan favorit dan jurusan tidak favorit atau jurusan unggulan dan jurusan non-unggulan yang pada akhirnya akan bermuara pada anggapan bahwa jurusan yang banyak peminat mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan jurusan yang kurang peminat. Bagi siswa yang bisa masuk ke kelas unggulan, favorit, atau sebutan lain yang senada, maka mereka akan merasa lebih superior dari temannya yang tidak bisa masuk di kelas unggulan atau favorit. Siswa yang hanya bisa masuk di jurusan IPS atau jurusan non favorit akan merasa bahwa dirinya inferior, rendah diri, atau sebutan lain yang sejenis.

Padahal adanya sistem kelas (jurusan) favorit, unggulan, atau sebutan lain yang senada dapat berimplikasi pada lahirnya generasi-generasi yang eksklusif, egois, dan menganggap dirinya paling superior. Hal ini sejalan dengan apa yang ditulis oleh Pudjo Sugito (dalam Harian *Bali Post*, 16 Juli 2008:7) yang mengatakan bahwa jebolan pendidikan dari sekolah-sekolah favorit, unggulan, dan sejenisnya akan miskin terhadap pentingnya pemahaman nilai-nilai budaya luhur bangsa, seperti nilai pertalian sosial, toleransi, kerja sama, serta berbagai nilai sosial lainnya. Padahal jika dicermati secara lebih seksama kompetensi sosial tersebut jauh lebih superior dan berfungsi sebagai *life skill*, yang berperan dominan dalam mengantarkan seseorang pada berbagai keberhasilan hidupnya, dibandingkan ilmu eksakta lainnya.

Apa yang ditulis Pudjo Sugito, faktanya di lokasi penelitian ini menunjukkan kebenaran, seperti yang dikatakan salah seorang siswi kelas XII IPA-1 SMA Dwijendra Denpasar, yakni Yati Oktavianti berikut pernyataannya,

...saya ogah memilih jurusan IPS, entar saya dikira bodoh oleh orang-orang, dan jurusan IPS kan identik dengan anak bodoh, anak nakal, kurang disiplin, dan sebutan lain yang sejenis. Selain itu, jurusan IPS atau Bahasa kan kurang memiliki prospek, oleh karena itu lebih baik saya memilih jurusan IPA saja, dibandingkan dua jurusan lainnya (wawancara, 5 Maret 2012).

Implikasi lainnya, berhasilnya anak-anak masuk di jurusan yang dianggap favorit juga dapat berimplikasi pada sikap anak, yakni menjadi sangat egois, mementingkan diri sendiri, bersikap

permissif terhadap lingkungannya dan lain sebagainya. Seperti yang dialami oleh beberapa siswa baik di SMA Negeri 1 Denpasar maupun di SMA Dwijendra Denpasar, banyak anak-anak Jurusan IPA yang bersikap acuh tak acuh terhadap lingkungannya. Contoh, suatu ketika peneliti melihat beberapa orang siswa duduk di kantin, tiba-tiba seorang guru lewat di depannya, mereka cuek saja tanpa ada yang menyapa gurunya apalagi mengucapkan salam. Sikap demikian merupakan salah satu wujud dari sikap egois siswa yang sangat tinggi. Atau dengan istilah lain sikap pertalian sosial siswa sangat kurang.

Dari peristiwa tersebut di atas, menunjukkan betapa miskinnya anak-anak sekolah, khususnya anak-anak dari kelas-kelas eksklusif terhadap pemahaman nilai-nilai sosial yang sesungguhnya merupakan nilai-nilai budaya bangsa yang bersifat adiluhung. Sejalan dengan itu Suda (2009:288) mengatakan kondisi demikian menandakan bahwa sistem pembelajaran di sekolah dewasa ini lebih mengutamakan kemampuan intelektual dibandingkan kemampuan memahami nilai-nilai sosial bagi anak-anak itu sendiri. Belum lagi padatnya kegiatan ekstrakurikuler dan pelajaran tambahan yang diikuti siswa. Untuk mengejar pendalaman pemahaman bidang intelektual, membuat waktu anak-anak untuk melakukan sosialisasi dengan lingkungannya benar-benar sangat minim.

Hal demikian juga dapat berimplikasi bagi diri siswa, yakni siswa menjadi sangat terisolasi dari lingkungan masyarakat secara riil, padahal masyarakat merupakan laboratorium kehidupan, yakni sebagai tempat bagi anak-anak untuk belajar berbagai nilai kehidupan yang sesungguhnya.

### **Implikasi Terhadap Manajemen Sekolah**

Siagian (1973) sebagaimana dikutip oleh Nasution (2006:11) mengatakan bahwa manajemen merupakan proses menggerakkan orang lain untuk memperoleh hasil tertentu dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi, yang dimaksud proses dalam manajemen adalah bentuk kemampuan atau ketrampilan untuk memperoleh hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan organisasi

tersebut. Oleh karena itu, dalam manajemen tercakup beberapa hal seperti, konsep kepemimpinan, *human relation* (hubungan antar manusia), pengambilan keputusan, manusia, sarana, dan kerja sama.

Sementara kata sekolah berasal dari kata Latin *skhole, scola, scolae, schola* yang berarti "waktu luang" (Pora, 2007:21). Namun, dalam kenyataannya pemahaman akan makna dari kata "waktu luang" telah mengalami distorsi, yakni waktu luang diartikan sebagai waktu santai setelah beraktivitas seharian penuh. Jadi, dalam konteks yang distorsi waktu luang diartikan, bila seseorang tidak memiliki aktivitas apapun sehingga ia bisa baca koran, ngerumpi, nonton TV, jalan-jalan ke *mall*, ngobrol bersama keluarga, dan berbagai aktivitas lainnya di luar aktivitas rutin. Padahal yang dimaksud waktu luang dalam arti *skhole* menurut Krishnamurti (1981) dalam Pora (2007:21) adalah

bahwa batin mempunyai waktu tak terbatas untuk mengamati apa yang terjadi di sekelilingnya, dan apa yang berlangsung dalam dirinya sendiri; mempunyai waktu senggang untuk mendengarkan, dan untuk melihat dengan jelas. Senggang berarti ada kebebasan, yang umumnya ditafsirkan sebagai berbuat semaunya, sesuatu yang memang lazim dilakukan orang dan anggapan yang menimbulkan kekacauan besar, penderitaan dan kebingungan. Senggang berarti bahwa batin tenang, tak ada motif, dan karena itu tak ada arah. Inilah senggang, dan hanya dalam keadaan inilah batin mungkin belajar, tidak hanya sains, sejarah, matematik, tetapi juga tentang dirinya sendiri.

Inilah arti sekolah yang sesungguhnya, dan sekolah bukanlah hanya sebuah tempat untuk memperoleh pengetahuan atau informasi sebanyak-banyaknya. Tetapi yang jauh lebih penting dari itu adalah sekolah sebagai wadah bagi guru dan siswa untuk sama-sama belajar, sama-sama mengamati apa yang terjadi di sekelilingnya dan terlebih lagi pengamatan terhadap diri masing-masing. Kesemua itu harus terjadi pada saat batin tenang dan itulah makna senggang yang sesungguhnya.

Jadi, yang dimaksud dengan manajemen sekolah dalam konteks kajian ini adalah sekelompok orang atau manusia, sarana, dan prasarana serta kerja sama yang dilakukan oleh kelompok orang bersangkutan untuk mewadahi para siswa dan guru untuk sama-sama belajar dan sama-sama mengamati apa yang terjadi

di sekeliling dirinya dan terlebih lagi pengamatan terhadap diri mereka masing-masing. Berangkat dari pengertian manajemen sekolah dan jika dikaitkan dengan fungsi-fungsi manajemen, maka pihak manajemen sekolah seharusnya mampu memberikan pengaruh yang positif terhadap perkembangan anak, baik sebagai mahluk individu maupun sebagai mahluk sosial. Dalam arti, manajemen sekolah harus mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan anak melalui peraturan sekolah, otoritas guru, disiplin kerja, cara belajar, kebiasaan bergaul, serta bermacam-macam tuntutan serta kesenangan belajar anak, melalui fungsi-fungsi manajemen pendidikan. Fungsi-fungsi manajemen dimaksud adalah, perencanaan; pengorganisasian; pengarahan; pengkoordinasian; dan pengontrolan /evaluasi.

Akan tetapi ketika dalam proses pemilihan jurusan, jurusan IPS dan jurusan Bahasa kurang diminati oleh para siswa, atau dengan kata lain termarginalkan, maka hal ini akan berimplikasi, baik langsung maupun tidak terhadap pihak manajemen sekolah. Dalam konteks ini, pihak manajemen sekolah seakan tidak mempunyai otoritas dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Seperti ketika anak-anak sebagian besar menjatuhkan pilihannya pada jurusan IPA pihak manajemen sekolah tidak bisa berbuat banyak. Padahal pemberian informasi tentang jurusan di SMA sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan siswa mempunyai makna yang sangat penting bagi keberhasilan siswa dalam melakoni kehidupan di dunia ini.

Ketidakkuasaan pihak manajemen sekolah dalam mengarahkan anak-anaknya untuk memilih jurusan sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan yang dimiliki siswa terlihat dari apa yang dikatakan oleh Kepala SMA Dwijendra Denpasar (Ida Bagus Alit Bajra Manuaba, S.Pd.) sebagai berikut,

...dalam rangka pemilihan jurusan kami pihak manajemen sekolah tidak bisa berbuat banyak, apapun yang menjadi pilihan siswa itu adalah hak mereka. Kadang-kadang ada siswa yang secara akademik sebenarnya tidak memiliki kemampuan untuk masuk di jurusan IPA, tetapi karena desakan orang tuanya, agar anaknya bisa mendapat jurusan IPA, maka kami pihak manajemen sekolah tidak bisa berbuat banyak, kecuali mengijinkannya tetapi dengan syarat ada jaminan dari pihak orang tua untuk memberi pengawasan yang lebih ketat kepada anaknya dalam hal

belajar. Itu saja yang bisa kami lakukan selebihnya tidak bisa (wawancara, 16 April 2012).

Apa yang dikatakan pihak kepala sekolah di atas menunjukkan bahwa betapa lemahnya otoritas manajemen sekolah dalam menerapkan fungsi-fungsi manajemen pendidikan dalam hal sistem penjurusan. Selain itu, terjadinya marginalisasi jurusan IPS dan jurusan Bahasa, baik di SMA Negeri 1 maupun di SMA Dwijendra Denpasar dapat berimplikasi bagi upaya manajemen sekolah dalam hal pengadaan infrastruktur pembelajaran. Contoh, ketika jurusan Bahasa tidak ada yang meminati, maka pihak manajemen sekolah tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membangun infrastruktur pembelajaran berupa laboratorium bahasa, yang tentu untuk hal itu diperlukan biaya yang tidak sedikit.

Adanya efisiensi dalam bentuk pemangkasan biaya untuk pembuatan laboratorium bahasa secara faktual seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan penyediaan sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran yang lainnya, seperti pengadaan multi media sebagai sarana pembelajaran, pengadaan berbagai buku referensi sebagai sumber belajar bagi siswa dan guru, serta dapat pula dimanfaatkan untuk melengkapi berbagai sarana pembelajaran di laboratorium IPA, seperti pada Laboratorium Kimia, Fisika, dan Biologi.

### **Implikasi Terhadap Manajemen Kelas**

Menurut Djamarah (1994:15) bahwa proses pembelajaran di ruang kelas merupakan inti dari kegiatan pendidikan. Sebagai inti dari sebuah proses pendidikan maka manajemen kelas, mau tidak mau suka tidak suka harus mendapat perhatian khusus dari pihak manajemen sekolah. Hal ini penting sebab keberhasilan sebuah proses pendidikan di sekolah akan sangat ditentukan oleh baik atau buruknya manajemen kelas itu dilakukan oleh setiap guru saat melakukan proses pembelajaran di ruang kelas. Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa proses pembelajaran merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam arti, tujuan pendidikan tidak akan pernah tercapai apabila

proses pembelajaran tidak pernah berlangsung dengan baik.

Dalam setiap kegiatan pembelajaran, unsur-unsur seperti guru, siswa, sarana, prasarana penunjang proses pembelajaran dan materi ajar keberadaannya tidak boleh diabaikan. Sebab keberadaan tiap-tiap unsur tersebut akan saling melengkapi dan saling menunjang satu sama lainnya. Artinya bahwa salah satu unsur tidak terpenuhi, maka proses pembelajaran secara keseluruhan akan terganggu. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Djamarah di atas, Faturohman dan Sutikno (2007) menegaskan bahwa dalam kegiatan pembelajaran antara guru dan siswa akan saling mempengaruhi dan saling memberikan masukan. Terkait dengan itulah, maka proses pembelajaran merupakan suatu aktivitas yang hidup, sarat nilai, dan senantiasa memiliki tujuan.

Berangkat dari pernyataan Djamarah (1994), Faturohman, dan Sutikno (2007) di atas, maka di antara guru dan siswa seharusnya mampu menciptakan interaksi yang harmonis, dalam melakukan suatu proses pembelajaran di ruang kelas. Hal ini akan bisa terwujud bila guru dalam melakukan proses pembelajaran mampu menciptakan suasana yang kondusif bagi siswa untuk mengikuti pelajaran yang diberikannya. Sebaliknya, siswa harus bisa mengikuti pendidikan dengan penuh kesungguhan, dan harus didorong oleh minat dan motivasi yang tinggi yang muncul dari dalam diri siswa itu sendiri.

Hal ini akan bisa terwujud apabila antara yang diberikan oleh guru dan yang dipelajari oleh siswa benar-benar sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan yang dimiliki oleh siswa itu sendiri. Namun, yang terjadi di dua lokasi penelitian ini, baik di SMA Negeri 1 maupun di SMA Dwijendra Denpasar, banyak anak-anak yang memilih jurusan tidak dilandasi oleh minat, bakat, dan kemampuan yang mereka miliki, tetapi lebih didasari oleh motif-motif tertentu, seperti agar tidak dianggap bodoh, tidak dianggap brandal, dan tidak dianggap kurang disiplin oleh masyarakat lingkungannya. Sebab sampai saat ini masih berkembang anggapan stereotip dalam masyarakat yang menganggap, jurusan IPS dan Bahasa identik dengan keberadaan anak-anak nakal, bodoh, brandal, kurang disiplin dan sebutan

lain yang sejenis. Seperti yang dikatakan salah seorang siswa kelas X-1 SMA Dwijendra Indra Widiasta Putra, sebagai berikut,

...meskipun sebenarnya saya tertarik dengan ilmu bahasa, yakni Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, tetapi jika saatnya sistem penjurusan tiba saya akan tetap memilih jurusan IPA. Sebab jurusan IPA, selain lebih bergengsi, anak-anak IPA terkenal rajin, pintar, cerdas, disiplin dan sebutan lain yang sejenis. Oleh karena saya tidak ingin dicap sebagai anak berandal, nakal, bodoh, dan kurang disiplin, maka saya ingin juga memilih jurusan IPA (Wawancara, 16 April 2012).

Dalam konteks ini mungkin Indra tidak sendirian, dalam arti banyak siswa lain yang hanya karena takut dicap berandal, bodoh, dan tidak disiplin, mereka terpaksa memilih jurusan yang sesungguhnya tidak mereka minati. Kondisi demikian tentu akan berimplikasi pada proses pembelajaran di ruang kelas. Artinya, ketika siswa tidak berminat terhadap materi pelajaran yang disampaikan oleh guru, maka bisa saja siswa bersangkutan tidak akan mau mengikuti proses pembelajaran dengan baik, tertib, dan dengan kesungguhan hati, sehingga hal demikian dapat mengganggu ketertiban siswa dalam proses pembelajaran di ruang kelas. Sebab sesuai dengan teori pedagogis, yakni teori nativisme oleh Schopenhauer mengatakan bahwa anak telah mempunyai kemampuan-kemampuan yang dibawa sejak lahir dan tinggal dikembangkan saja (Tilaar, 1999:19). Maksudnya, jika apa yang anak-anak terima dari gurunya itu, merupakan sesuatu yang sama sekali baru, dalam arti tidak ada hubungannya dengan struktur kognitif yang ada pada diri anak, maka hal tersebut akan dapat mempengaruhi minat belajar siswa yang pada ujungnya bermuara pula pada antusiasme siswa dalam mengikuti pelajaran.

Jadi, berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dari lapangan dapat dipahami bahwa sebenarnya terpinggirkannya jurusan IPS dan Bahasa di dua lokasi penelitian ini bukanlah semata-mata disebabkan kurang berminatnya para siswa terhadap jurusan IPS dan Bahasa, akan tetapi ini terjadi lebih disebabkan oleh pengaruh modernisme, yang menganggap jurusan IPA itu, identik dengan hal-hal yang berbau modern, sementara jurusan IPS dan Bahasa dipadankan dengan nilai-nilai

yang bersifat tradisional, , kurang modern, dan dalam bahasa sekarang disebut kurang *up to date*. Padahal dalam kenyataannya tidaklah selalu demikian.

Bangkitnya negara-negara yang baru merdeka di Asia dan Afrika yang tadinya merupakan jajahan negara-negara Eropa dan Amerika sebagai simbol negara modern, dan dalam perjuangannya mereka tertarik dengan sosialisme sebagai cara untuk melakukan perubahan sosial, merupakan bukti nyata kalau ilmu eksakta tidak selalu dominan dalam proses aplikasinya. Hal ini pulalah yang membuat Amerika Serikat sebagai negara modern mendorong para ilmuwan sosialnya untuk mengembangkan teori-teori sosial untuk memahami perkembangan dunia ketiga yang baru lahir tersebut (Fakih, 2003:53).





## TEMUAN BARU

**A**da beberapa temuan baru dalam penelitian ini serta prospek temuan tersebut bagi pengembangan sistem penjurusan pada sekolah menengah atas (SMA). *Pertama*, di dua lokasi penelitian ini, yakni di SMA Negeri 1 dan di SMA Dwijendra Denpasar, ditemukan terjadinya marjinalisasi jurusan, yakni jurusan IPS dan jurusan Bahasa. Hal ini terbukti dari 10 kelas siswa kelas XI di SMA Negeri 1 Denpasar pada tahun ajaran 2011/2012 dengan jumlah siswa 452 orang, hanya satu kelas (24 orang) siswa yang memilih jurusan IPS, dan 9 kelas lainnya atau sebanyak 438 orang siswa memilih jurusan IPA, sementara tidak ada siswa yang memilih jurusan Bahasa. Selanjutnya, dari 10 kelas siswa kelas XII untuk tahun ajaran yang sama di SMA Negeri 1 Denpasar, yang memilih jurusan IPS hanya 1 kelas dengan jumlah siswa hanya 13 orang, sementara sisanya lagi 9 kelas yang terdiri atas 415 orang lainnya memilih jurusan IPA, sementara jurusan Bahasa juga tidak ada peminatnya. Demikian pula yang terjadi di SMA Dwijendra Denpasar, pada tahun ajaran 2011/2012 dari 10 kelas siswa kelas XI atau 429 orang siswa yang memilih jurusan IPS hanya 3 kelas atau 116 orang. Sebanyak 7 kelas atau 313 orang lainnya memilih jurusan IPA, sementara tidak ada siswa yang berminat untuk memilih jurusan Bahasa. Untuk kelas XII dari 10 kelas atau 431 orang siswa yang memilih jurusan IPS hanya 3 kelas dengan jumlah siswa sebanyak 120 orang, yang memilih jurusan IPA sebanyak 7 kelas dengan jumlah siswa 311 orang, dan tidak ada siswa yang berminat untuk memilih jurusan Bahasa.

Faktor penyebab kurangnya minat anak-anak untuk memilih jurusan IPS dan Bahasa adalah karena mereka takut dicap bodoh, brandal, nakal, dan kurang disiplin. Padahal dalam pemilihan jurusan yang seharusnya dijadikan dasar adalah minat, bakat, dan kemampuan yang dimiliki siswa masing-masing.

*Kedua*, kurangnya minat siswa untuk memilih jurusan IPS dan Bahasa juga disebabkan oleh ambisi orang tua mereka yang menginginkan anak-anaknya bisa kuliah di fakultas-fakultas yang bergengsi, seperti fakultas kedokteran, fakultas, teknik, dan lain-lain. Padahal anak-anak mereka belum tentu memiliki minat, bakat, dan kemampuan untuk itu.

*Ketiga*, terjadinya marjinalisasi jurusan pada jenjang pendidikan SMA, khususnya di SMA Negeri 1 dan SMA Dwijendra Denpasar melalui mekanisme yang sangat halus dan sistemik. Prosesnya melalui imperialisme pengetahuan sains terhadap ilmu pengetahuan IPS dan Bahasa. Maksudnya, bahwa marginalisasi jurusan IPS dan Bahasa yang terjadi di level Sekolah Menengah Atas, terlaksana melalui imperialisme pengetahuan atau dominasi pengetahuan sains atas ilmu pengetahuan sosial dan Bahasa. Artinya, selama ini telah berkembang anggapan dalam masyarakat bahwa puncak pengetahuan manusia adalah ilmu-ilmu positif atau sains (ilmu-ilmu yang berangkat dari fakta-fakta yang terverifikasi dan terukur secara ketat). Dominasi demikian membuat kepercayaan masyarakat terhadap keunggulan Ilmu Pengetahuan Alam menjadi sangat kuat, sehingga masyarakat akan sangat percaya akan keunggulan tersebut. Dengan demikian ketika ada pilihan antara Ilmu Pengetahuan Alam dengan Ilmu Pengetahuan Sosial tentu yang lebih dipilih oleh masyarakat adalah Ilmu Pengetahuan Alam dengan berbagai kelebihan dan keunggulannya tersebut. Akibatnya, dalam proses penjurusan di SMA terjadilah dominasi jurusan IPA atas dua jurusan lainnya, yakni IPS dan Bahasa.

*Keempat*, terjadinya marjinalisasi jurusan IPS dan Bahasa di dua lokasi penelitian ini juga berproses melalui permainan kekuasaan atau dalam istilah kajian budaya disebut relasi kekuasaan. Hal ini berproses melalui mekanisme sebagai berikut: modernisasi ala Barat yang bercirikan mengejar pertumbuhan yang diilhami oleh pandangan dunia ala Descartes yang mekanistik, rasional, telah berpengaruh kuat pada semua "ilmu" dan pada "cara berpikir" masyarakat. Pandangan-pandangan yang tidak sesuai dengan kerangka berpikir dengan metode ilmiah tidak akan dibicarakan secara serius dan biasanya dikesampingkan,

jika tidak dijadikan cemoohan. Cara berpikir tidak ilmiah dianggap *out of date*, tidak modern dan dianggap, dan tidak maju. Cara berpikir seperti di atas telah menyumsum dan mendarah daging sampai saat ini pada masyarakat, tidak terkecuali pada sistem pendidikan di Indonesia, yang menomorsatukan jurusan IPA dan memomorduakan jurusan IPS dan Bahasa.

*Kelima*, marjinalisasi jurusan IPS dan Bahasa, baik yang terjadi di SMA Negeri 1 maupun yang terjadi di SMA Dwijendra Denpasar ternyata berimplikasi pada diri siswa, manajemen sekolah dan juga pada manajemen kelas. Implikasinya pada diri siswa, sampai saat ini dalam masyarakat berkembang suatu anggapan bahwa jurusan IPA jauh lebih unggul dibandingkan jurusan IPS dan Bahasa. Anggapan demikian akan berimplikasi pada diri siswa yang berhasil masuk di jurusan IPA, misalnya mereka menganggap dirinya superior dibandingkan temannya yang masuk di jurusan IPS dan Bahasa. Implikasi lainnya siswa demikian juga akan bersikap eksklusif, egois dan mementingkan diri sendiri. Sementara itu, marjinalisasi jurusan IPS dan Bahasa akan berimplikasi pula pada manajemen sekolah, yakni ketika para siswa sebagian besar menjatuhkan pilihan pada jurusan IPA pihak manajemen sekolah seakan tidak mempunyai otoritas dalam menjalankan peraturan sekolah, dan menegakkan disiplin kerja, akibatnya anak-anak dibiarkan saja memilih jurusan sesuai keinginannya, meskipun tidak sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan yang mereka miliki. Padahal mengarahkan anak-anak untuk memilih jurusan sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan siswa mempunyai makna yang sangat penting bagi keberhasilan siswa dalam melakoni kehidupan di dunia ini. Demikian pula terjadinya marjinalisasi jurusan IPS dan Bahasa pada level Sekolah Menengah Atas, dapat berimplikasi pada manajemen kelas, artinya ketika anak-anak memilih jurusan hanya karena alasan gengsi, takut dikatakan bodoh, atau brandal, padahal sebenarnya minat dan bakat mereka bukan kejurusan yang mereka pilih hal demikian akan dapat mengganggu kelancaran proses pembelajaran di ruang kelas.

Temuan dalam penelitian ini diharapkan mempunyai kontribusi bagi pengayaan referensi ilmu pengetahuan dalam

bidang pendidikan, selain juga diharapkan mempunyai kontribusi sebagai bahan acuan bagi para pengambil kebijakan, khususnya kebijakan publik dalam bidang pendidikan.

Penelitian ini sebenarnya fokus pada permasalahan “marginalisasi jurusan IPS dan jurusan Bahasa di SMA Negeri 1 dan SMA Dwijendra Denpasar. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penelitian ini lebih mengarah pada penelitian non-PTK, yakni menyangkut penelitian kebijakan dalam bidang pendidikan, sehingga cakupannya jauh lebih luas dari sekadar proses pembelajaran di ruang kelas, yang jika dicermati secara seksama akan berpengaruh pula terhadap proses pembelajaran di ruang kelas.

Jika dicermati beberapa temuan dalam penelitian ini, sebenarnya ada tiga implikasi teoritik yang merupakan kontribusi temuan penelitian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan terutama berkaitan dengan permasalahan marginalisasi jurusan IPS dan Bahasa dalam sistem penjurusan di level Sekolah Menengah Atas.

*Pertama*, marginalisasi jurusan IPS dan Bahasa yang terjadi baik di SMA Negeri 1 maupun di SMA Dwijendra Denpasar, secara faktual disebabkan oleh pengaruh paham modernisme telah jauh merasuk dalam tataran pemikiran masyarakat Indonesia secara umum, dan masyarakat Bali pada khususnya, dan lebih khusus lagi masyarakat Denpasar. Hal ini terlihat dari cara berpikir masyarakat Denpasar dewasa ini banyak dipengaruhi oleh pola hidup modern seperti, pola berpikir yang cenderung meniru cara hidup masyarakat “Barat” (di masyarakat Eropa dan Amerika), ada juga yang berpendapat bahwa masyarakat modern adalah masyarakat yang hidup dalam alam teknologi maju seperti sekarang ini. Ciri-ciri masyarakat modern meliputi lebih sekuler, rasional, logis, kritis, dan berorientasi kepada masalah praktis; Menyukai hal-hal efisien, dan cepat saji (instan); Konsumtif, karena pengaruh media, individualistis, dan kurang bermasyarakat; Sangat tergantung pada teknologi; Memiliki kebebasan yang lebih besar dalam menentukan arah perkembangannya; Pengaruh nilai-nilai agama, budaya, dan keluarga cenderung berkurang; Nilai-nilai agama, budaya, dan

keluarga ditafsirkan berdasarkan pandangan yang realistis, ekonomis, dan praktis; Lebih terbuka dan toleran; Hubungan orang tua-anak lebih bebas; Lebih mobilitas, batas antara kelompok etnik dan bangsa menjadi kabur; Pendidikan lebih berorientasi pada masa depan dan pada kebutuhan aktual pada masyarakat; Arus informasi antar bangsa lebih cepat dan mudah.

Dalam proses pemilihan jurusan bagi para siswa di SMA pun telah terpengaruh oleh pola hidup modern tersebut, yakni para siswa sebagian besar dalam memilih jurusan dilatari oleh pemikiran bahwa jurusan IPA lebih prospektif dibandingkan jurusan IPS dan Bahasa, lebih menjajikan, lebih bergengsi, dan sebutan lain yang sejenis.

*Kedua*, bagi penganut aliran konstruktivisme pengetahuan bagi mereka tidak merefleksikan suatu realitas ontologisme objektif, namun sebagai sebuah realitas yang dibentuk pengalaman seseorang. Pengetahuan selalu merupakan konstruksi dari individu yang mengetahui dan tidak dapat ditransfer kepada individu lain yang pasif. Konstruksi harus dilakukan sendiri olehnya terhadap pengetahuan itu. Sedangkan lingkungan adalah sarana terjadinya konstruksi.

Namun, apa yang terjadi di dua lokasi penelitian ini justru anak-anak dalam hal memilih jurusan banyak dipengaruhi oleh lingkungannya, dalam hal ini adalah oleh teman-temannya, masyarakatan, orang tua, dan media (informasi). Bukan sebagaimana yang diyakini penganut konstruktivisme, yakni pengetahuan bagi mereka tidak merefleksikan suatu realitas ontologisme objektif, namun sebagai sebuah realitas yang dibentuk pengalaman seseorang. Akan tetapi dalam hal memilih jurusan siswa tidak didasarkan pengetahuan yang dikonstruksi siswa sendiri tentang berbagai hal menyangkut masalah penjurusan. Akan tetapi lebih didasari oleh faktor lingkungannya. Artinya, siswa dalam memilih jurusan banyak dipengaruhi oleh asumsi-asumsi yang berkembang dalam masyarakat, mengenai berbagai keunggulan dari jurusan IPA, tanpa menyesuaikan dengan minat, bakat dan kemampuan yang mereka miliki.

*Ketiga*, penganut aliran pendidikan kritis menekankan

bahwa pendidikan seharusnya dapat membebaskan manusia dari segala ketertindasan, menjadikan manusia lebih dewasa dan bertanggung jawab, baik terhadap hidupnya maupun terhadap lingkungannya. Namun, yang terjadi di lokasi penelitian ini, pendidikan cenderung diorientasikan pada upaya untuk mendapatkan pekerjaan (berparadigma instrumentalisme). Hal ini terbukti, dalam hal pemilihan jurusan siswa tidak mendasarkan diri pada minat, bakat, dan kemampuan yang mereka miliki, tetapi lebih didasarkan pada, peluang kerja, orientasi masa depan, dan hal-hal pragmatis lainnya. Jadi, salah satu temuan dalam penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan prinsip dalam sistem pemilihan jurusan dengan aliran konstruktivisme dan juga pendidikan kritis.

## PENUTUP

### Simpulan

**T**elah terjadi marjinalisasi jurusan IPS dan jurusan Bahasa di SMAN 1 Denpasar dan SMA Dwijendra Denpasar. Marjinalisasi itu disebabkan oleh beberapa hal: *pertama*, budaya citra begitu kuatnya melanda kehidupan masyarakat, termasuk masyarakat sekolah, sehingga anak-anak dalam hal memilih jurusan lebih mendasarkan diri pada masalah pencitraan (gengsi) dibandingkan bakat, minat, dan kemampuan yang mereka miliki. *Kedua*, adanya imperialisme pengetahuan sains terhadap Ilmu Pengetahuan Sosial dan bahasa, dalam arti cara-cara berpikir sains yang menekankan pada masalah-masalah yang bersifat empirik, terukur, dan ilmiah telah berpengaruh kuat pada semua bidang “ilmu” dan pada “cara berpikir” manusia secara umum. Pandangan-pandangan yang tidak sesuai dengan kerangka berpikir dengan metode ilmiah tidak akan dibicarakan secara serius dan biasanya dikesampingkan, jika tidak dijadikan cemoohan. Cara berpikir tidak ilmiah dianggap *out of date*, tidak modern dan dianggap , dan tidak maju. Cara berpikir seperti di atas telah menyumsum dan mendarah daging sampai saat ini pada masyarakat. Tidak terkecuali pada sistem pendidikan di Indonesia, yang menomorsatukan jurusan IPA dan menomorduakan jurusan IPS dan Bahasa. *Ketiga*, kebijakan pemerintah yang cenderung memberikan ruang yang lebih luas kepada anak-anak jurusan IPA dalam hal pemilihan jurusan di tingkat perguruan tinggi. Hal demikian berakibat dalam hal pemilihan jurusan anak-anak lebih suka memilih jurusan IPA dibandingkan jurusan IPS dengan alasan agar ia lebih leluasa memilih jurusan saat memasuki lembaga pendidikan tinggi.

Marjinalisasi jurusan IPS dan Bahasa terjadi melalui mekanisme yang sangat halus dan sistemik. Sangat halus, karena proses terjadinya tanpa disadari, baik oleh siswa maupun oleh orang tuanya. Bersifat sistemik, karena proses penjurusan yang



terjadi di SMA diselenggarakan atas dasar sistem tertentu, yakni Permendiknas No. 22 tahun 2006 yang mempersyaratkan nilai akademik siswa saat mereka naik ke kelas XI; dan ketentuan mata pelajaran ciri khas jurusan. Maksudnya, siswa yang bisa masuk ke jurusan IPA adalah siswa yang nilai mata pelajaran Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi pada raport semester 2 (kelas X) mengalami ketuntasan. Demikian pula siswa yang bisa memilih jurusan IPS nilai mata pelajaran Sejarah, Geografi, Ekonomi, dan Sosiologi pada raport semester 2 (kelas X) harus mengalami ketuntasan, tidak terkecuali siswa yang ingin memilih jurusan Bahasa. Bagi siswa yang ingin memilih jurusan Bahasa, mereka harus mengalami ketuntasan belajar dalam mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Bali, dan Bahasa Asing lainnya pada raport semester 2 (Kelas X). Sementara kecakapan lain di luar bidang akademik, seperti kemampuan siswa dalam hal seni, teknik, dan dalam hal membuat suatu karya tulis tidak pernah diperhitungkan dalam konteks pemilihan jurusan padahal faktor-faktor ini cukup menentukan.

Marjinalisasi jurusan IPS dan Bahasa telah berimplikasi pada diri siswa itu sendiri, pada manajemen sekolah, dan pada manajemen kelas. Implikasi terhadap diri siswa, di mana siswa yang berhasil meraih jurusan IPA yang dianggap sebagai jurusan favorit, cenderung akan merasa superior, sementara bagi siswa yang masuk pada jurusan IPS karena jurusan Bahasa tidak dibuka, akan merasa dirinya imperior terhadap siswa lainnya. Kemudian implikasinya bagi manajemen sekolah, pihak manajemen sekolah seakan tidak mempunyai otoritas dalam menjalankan peraturan sekolah, dan menegakkan disiplin kerja, sehingga ketika anak-anak sebagian besar menjatuhkan pilihannya pada jurusan IPA pihak manajemen sekolah tidak bisa berbuat banyak. Padahal mengarahkan anak-anak untuk memilih jurusan sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan siswa mempunyai makna yang sangat penting bagi keberhasilan siswa dalam melakoni kehidupan di dunia ini. Selanjutnya implikasi bagi manajemen, manajemen kelas akan dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila proses pembelajaran didasari oleh minat, bakat, dan

kemampuan yang dimiliki oleh para siswa yang ada dalam kelas bersangkutan. Sebaliknya proses manajemen kelas akan dapat terganggu bila anak-anak yang mengikuti proses pembelajaran di ruang kelas bersangkutan tidak dilandasi oleh minat, bakat, dan kemampuan yang sesuai dengan jurusan yang mereka pilih. Oleh sebab itu pemilihan jurusan yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan siswa menjadi sesuatu yang penting, baik terhadap diri siswa itu sendiri, bagi manajemen sekolah, maupun bagi manajemen kelas.

### **Saran**

Dalam membuat kebijakan tentang sistem penjurusan di Sekolah Menengah Atas (SMA), pihakatau instansi terkait disarankan mampu membuat sistem penjurusan yang dapat diminati oleh para siswa secara proporsional. Artinya, tidak ada jurusan yang favorit dan jurusan yang tidak favorit.

Para pelaku pendidikan, khususnya guru hendaknya mampu memberikan informasi yang berimbang kepada para siswa mengenai jurusan yang ada. Dengan demikian, ketika memilih jurusan anak-anak tidak dilandasi oleh anggapan stereotif yang berkembang dalam masyarakat tentang jurusan yang ada di SMA, tetapi lebih didasari oleh alasan pedagogis, sehingga anak-anak dalam hal memilih jurusan benar-benar didasari oleh minat, bakat, dan kemampuan yang mereka miliki.

Dalam memilih jurusan, para siswa disarankan agar menyesuaikan dengan minat, bakat dan kemampuan yang dimiliki. Jangan malah terjebak pada budaya citra yang memberikan citra pada salah satu jurusan tertentu sebagai jurusan yang favorit, bergengsi, dan simbol status sosial lainnya, jika misalnya kemampuan justru tidak di situ.

Para orangtua siswa disarankan agar dalam hal mengarahkan anak-anak untuk memilih jurusan hendaknya sesuaikan dengan minat, bakat, dan kemampuan anak itu sendiri. Jangan didasarkan atas ambisi dan motivasi diri sendiri yang notabene belum tentu sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak itu sendiri.



## Daftar Pustaka

- Acarya, Avadhutika Anandamitra. 2001. *Pendidikan Neo-Humanis*. Jakarta: PAMI Jakarta
- Adian, Dony Gahril. 2006. *Percik Pemikiran Kontemporer sebuah Pengantar Komprehensif*. Yogyakarta: Jalsutra.
- Ahmadi Abu, H. 1991. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- A'la Miftahul, 2010. *Quantum Teaching*. Yogyakarta DIVA Press.
- Aldin, 2004. "Desain, Teknologi, Gaya Hidup: Perangkat Elektronik sebagai Simbol Status Sosial". Idi Subandi Ibrahim (ed.), *Life Style Ectasy Kebudayaan Pop dalam Masyarakat Komoditas Indonesia*. Yogyakarta: Jalsutra
- Anonim, 2000. "Propil SMA Dwijendra". Denpasar.
- Anonim. 2008. "Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Tesis, dan Disertasi". Denpasar: Program Pascasarjana Universitas Udayana
- Anonim, 2008. "Monografi Desa Dangin Puri Kangin". Denpasar: Kantor Desa Dangin Puri Kangin
- Anonim, 2011. *Profil Sekolah SMA Negeri 1 Denpasar*. Denpasar: SMA Negeri 1 Denpasar
- Anonim. 2011. *Selayang Pandang SMA Negeri 1 Denpasar*. Denpasar: SMA Negeri 1 Denpasar
- Arsyad, Liknocolin. 2007. *Pembangunan dan Pendidikan*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN
- Atmadja, Nengah Bawa. 2005. *Bali pada Era Globalisasi Pulau Seribu Pura Tidak Seindah Penampilannya* (draf Buku).
- Atmadja, Nengah Bawa; Ketut Margi; Tuty Maryati; dan Anantawikrama Tungga Atmadja. 2005a. "Joged Bumbung Porno: Industri Seks Berbentuk Hiburan Seka Melalui Rangsangan Mata: Studi Kasus di Buleleng, Bali" Hasil Penelitian Disampaikan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Jakarta.
- Atmadja, Nengah Bawa; dan Anantawikrama Tungga Atmadja. 2008. "Sekolah + (bertaraf Internasional, Unggulan,, Favorit) = Biaya Mahal=Komersialisasi Pendidikan" Makalah disampaikan pada Diskusi terbatas Bidang Pendidikan di Bali TV, Jln Kebo Iwa 63 A Denpasar.

- Balai Pustaka. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Barker, Chris, 2005. *Cultural Studies Teori dan Praktek*. Yogyakarta: PT. Bentang Pustaka.
- Barker, Chris. 2008. *Cultural Studies Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Baudrilard, Jean. 2004. *Masyarakat Konsumsi*. (Wahyutomo Penerjemah). Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Bennet, T. 1988. *Cultural: A Reformer's Science*, St Leonard, NSW: Allen & Unwin.
- Berg, Bruce, L. 1989. *Qualitative Research Method for the Social Science*. Boston: IndianaUniversity of Pennsylvania.
- Berger, Peter L. 1982. *Piramida Kurban Manusia*. Jakarta: LP3ES
- Bourdieu, Pierre. 1984. *(Habitus X Modal) + Ranah=Praktik*. (Richard Harker, Cheen Mahar, Chris Wilkes, ed.,) (Pipit Maizier, Penerjemah) Yogyakarta : Jalasutra.
- Budiman, Arief. 1996. *Toeri Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Bungin. 2001. *Imaji Media Massa; Konstruksi dan Makna Sosial Iklan Televisi dalam Masyarakat Kapitalistik*. Yogyakarta: Jendela
- Capra, Fritjof. 1999. *Titik Balik Peradaban. Sain, Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya
- Darmaningtyas. 2005. *Pendidikan Rusak-Rusakan*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.
- Danim, Sudarwan. 2003. *Menjadi Komunitas Pembelajaran. Kepemimpinan Transformasional dalam Komunitas Organisasi Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara
- Dawam, Annoropi. 2003. *Emoh Sekolah, Menolak "Komersialisasi Pendidikan" dan "Kanibalisme Intelektual" Menuju Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: INSPIEL AHIMSAKARYA PRESS.
- Danim Sudarwan, 2003. *Menjadi Komunitas Pembelajara Kepemimpinan Tranformasional dalam Komunitas Organisasi Pembelajaran*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat Jenderal. 1992. *"Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Bidang Pendidikan dan Kebudayaan"*. Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional. 2006. *"Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22. Tentang Standar Isi Kurikulum"*. Jakarta

- Dewey, Jhon. 2001. *Agama Pragmatis Telaah atas Konsepsi Agama John Dewey*. Magelang: Indonesiatara.
- Djamarah, Syamsul Bakri, 1994. *Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Dwipayana, Ari, A.A.G.N. 2001. *Kelas dan Kasta Pergulatan Kelas Menengah Bali*. Yogyakarta: Lepra Pustaka Utama
- Eryanto. 2007. *Analisis Framminy: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*. Edisi IV. Hal 47-63 (on-line)
- Fakih Mansour, 2003. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. INSIST-Press: Yogyakarta.
- Fauzi, Ibrahim Ali. 2002. "Modernisme Versus Postmodernisme" dalam Suyot, dkk (ed). Yogyakarta: Aditya Media
- Felix Guattari, 1981. *Melocular Revolution: Psychiatry and Politics*, Penguin Books: London.
- Foucault, Michel. 2002. *Pengetahuan dan Metode: Karya-Karya Penting Foucault*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Freire, Paulo. 2003. *Pendidikan Masyarakat Kota*. (Agung Prihantoro, Penerjemah). Yogyakarta, LKiS.
- Freire, Paulo, 2002. *Politik Pendidikan, Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan*, terjemahan Agung Prihantoro dan Agung Arif Fudiyartanto. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Gramsci, Antonio. 1976. *Selections from the Prison Notebooks, Quintin Hoare and Nowell Smith (ed)*. New York: International Publisher
- Hardiman, F. Budi. 2008. *Kritik Ideologi Menyikap Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan Bersama Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius
- Harian Bali Post*, 16 juli 2008
- Harian Kompas*, 22 Januari 2010.
- Hasbullah. 2005. *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasbullah, Jousairi. 2006. *Social Capital: Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia*. Jakarta: MR-United Press.
- Hassan. 2004. "Memasarkan Sekolah dan Menyekolahkan Pasar" dalam Widiastono (ed). *Pendidikan Manusia Indonesia*. Jakarta: Buku Kompas
- Hernacki, Mike; Bobbi De Porter. 2003. *Quantum Learning*. Bandung: Mizan Pustaka

- Hidayat, Dedy. N. 2008. *Mengenal Filsafat Konstruktivisme dan Poitioisme (serial on-line)*. <http://kangsari.wordpress.com/materi-diklat-lanjut-investasi-ukpm>
- Ihsan, H.Fuad. 1996. *Dasar-Dasar Kependidikan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Irawan, Ad; dkk. 2004. *Mendagangkan Sekolah. Studi Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah di DKI Jakarta*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- Isjoni. 2008. *Memajukan Bangsa dengan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Katu, Nggandi. 2002. "Pendidikan Dalam Masyarakat Modern" dalam Johannes Mardimin (ed). 2002. *Jangan Tangisi Tradisi. Transformasi Budaya Menuju masyarakat Indonesia Modern*. Yogyakarta: Kanisius
- Kerlinger, Fred N. 1990. *Asas-Asas Penelitian Behavioral*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Khosim, Amir; Kun Marlina Lubis. 2007. *Materi Geografi SMA Kls.X*. Yogyakarta: Grasindo
- Kurniatin, Sri.R. 2007. *Buku Materi Fisika Kls.X*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional
- Kutha, Ratna I Nyoman. 2004. *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastradari Strukturalisme hingga Postrukturalisme: Perspektif Wacana Naratif*. Yogyakarta: pustaka Pelajar.
- Kutha, Ratna I Nyoman. 2005. *Sastra dan Culture Studies Representasi Fiksi dan Fakta*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Lincoln, Y.S; dan EG Guba. 1985. *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills: Sage Publication.
- Lull, J. 1998. *Media Komunikasi Kebudayaan Suatu Pendekatan Global (A. Setiawan, Penerjemah)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Lyotard, Jean, Francois. 1984. *The Post Modern Condition: A report on Knowledge*. G. Benington dan B. Masumi, Penerjemah). (Mineapolis, Minesota: University of Minesota Press). Edisi pertama diterbitkan di Prancis tahun 1979.
- Ma'arif, Syamsul. 2008. *Pesantren Vs Kapitalisme Sekolah*. Semarang: NEED'S PRESS
- Mantra, I.B. Prof. DR. 1993. *Bali Masalah Sosial Budaya dan Modernisasi*. Denpasar: Upada Sastra
- Marzoeki, Djohansjah. 2000. *Budaya Ilmiah dan Filsafat Ilmu*. Jakarta: Gransindo

- Mas'oe'd, Mohtar. 1999. *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Miles , M.B. dan A.M. Haberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: Indonesia Baru.
- Moleong; J. Lexy. 1991. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mudyahardjo, Redja. 2001. *Dasar-Dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Raja grafindo Persada
- Munir, Misnal. 2008. *Aliran-Aliran Utama Filsafat Barat Kontemporer*. Yogyakarta:Lima
- Murchland, Bernard. 2002. *Humanisme dan Kapitalisme Kajian Pemikiran tentang Moralitas*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya
- Muslih, Muhammad. Tt. *Filsafat Ilmu Kajian atas Asumsi Dasar Paradigma dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan Revised Editions*
- Nawawi, Hadari dan Martini Hadari. 1992. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta:Gajah MadaUniversity Press.
- Nazir, M. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Noris. Christoper. 2003. *Membongkar Teori Dekonstruksi Jaques Derrida* (Inyiaq Ridwan Muzir, Penerjemah). Yogyakarta: AR-RUZZ.
- Nugroho, Heru. 2001. *Negara, Pasar dan Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka
- Nugroho Riant, 2008. *Kebijakan Pendidikan yang Unggul, Kasus Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Jembrana 2000—2006*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurohman, L. 2003. Poligami: "Saatnya Melihat Realitas". *Jurnal Perempuan*, Nomor 31/2003. Hal. 31- 46.
- O'neal, William F. 2008. *Ideologi Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Palguna, IBM Dharma. 2007. *Budaya Kepintaran Sampai Budaya Kekerasan*. Mataram: Sadampatyaksara
- Permendiknas No.22 Tahun 2006.
- Piliang, Yasraf Amir. 1998. *Dunia yang Dilipat Realitas Menjelang Milenium Ketiga dan Matinya Posmodernisme*. Bandung Misana.
- Piliang, Yasraf Amir. 2003. *Hipersemiotika, Tafsir Cultural Studies Atas Matinya Makna*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Piliang, Yasraf Amir. 2004. *"Post-Modernisme dan Kita Refleksi tentang Budaya Kontemporer. Prasi Jurnal Bahasa, Seni dan*



- Pengajarannya*". Nomor 4. Volume 2. Halaman 1- 19.
- Piliang, Yasraf Amir. 2004. *Dunia Yang Dilipat, Tamasya Melampaui Batas-Batas Kebudayaan*. Yogyakarta: Jalasutra
- Piliang, Yasraf A. 2005. *Transpolitika Dinamika Politik di dalam Era Virtualitas*. Yogyakarta: Jalasutra
- Plano, Jack, C; dkk., 1989. *Kamus Analisa Politik*. Jakarta: CV Rajawali.
- Poerwanto, Ngalm, Dkk. 1979. *Administrasi Pendidikan*. Jakarta: Mutiara.
- Prasetyo, Eko. 2008. *Orang Miskin Dilarang Sekolah*. Yogyakarta: Resist Book
- Priere, Paulo. 2003. *Menggugat Pendidikan*. Diterjemahkan oleh Omi Intan Naomi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Purwanto, Ngalm. 2010. *Psikologi Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Regita, Yarra. 2009. Oposisi Biner. <http://yarraregita.blogspot.com/2009/04/oposisi-biner.html>
- Reimer, Everret. 1971. *School is dead: Alternative in Education*.
- Riandari, Henry. 2009. *Materi Biologi Bilingual Kls.X*. Jakarta: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri
- Ritzer, George. 2008. *Teori Sosial Postmodern*. Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Ritzer, George; Douglas J. Goodman. 2008. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Rosyada, Dede. 2004. *Paradigma Pendidikan Demokratis. Sebuah Model pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media.
- Sanjaya, Wina. 2008. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Saripudin, Didin; Marwan Supriyadi. 2006. *Materi Sejarah Untuk SMA Kls. X*. Jakarta: Regina
- Sastrini, Ni Kadek. 2010. *"Persepsi Siswa SMA Dwijendra Denpasar Terhadap Penerapan Konsep Ajeg Bali Berbasis Agama Hindu"*. Tesis. Denpasar: Program Pascasarjana Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar
- Schrijvers, Joke. 2000. *Kekerasan Pembangunan Pilihan untuk Kaum Intelektual*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Shiva, Vandana. 1997. *Bebas Dari Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Obor

Indonesia bekerjasama dengan Konphalindo

- Singleton, J.R. Royce. at.al. 1988. *Approach to Social Reseach*. New York: Oxford University.
- Singarimbun, Masri. dan Sofian Efendi. 1985. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta:LP3ES.
- SMA Negeri 1 Denpasar, 2011/2012. Dokumen 1 Kurikulum SMA Negeri 1 Denpasar.
- Stewart A. Thomas, 1997. *Intelectual Capital*. London: Nicholas & Brealy.
- Suacana, I Wayan. 2008. "*Transformasi Demokrasi dan Otonomi dalam Taqta Pemerintahan Desa Mengwi Era Transisi: Perspektif Kajian Budaya*". Desertasi. Denpasar: Program Doktor Program Studi Kajian Budaya Universitas Udayana
- Suardana, I Gede. 2006. "*Perlawanan Guru terhadap Kekuasaan Negara di Kota Denpasar*". Tesis diajukan untuk memperoleh gelar Magister Sain pada Program Studi Magister kajian Budaya, Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar.
- Suda, I Ketut. 2009. *Merkantilisme Pengetahuan dalam Bidang Pendidikan*. Surabaya: Paramita.
- Suda, I Ketut. 2009a. "*Merkantilisme Pengetahuan dalam Bidang Pendidikan: Studi Kasus di SD Melati Sukma Denpasar*". Disertasi Diajukan dalam Rangka Meraih Gelar Doktor pada Program Doktor Program Studi Kajian Budaya, Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar.
- Sugiharto, Bambang (ed). 2008. *Humanisme dan Humaniora Relevansinya Bagi Pendidikan*. Yogyakarta: Jalasutra
- Suhardi, Sri Sunarti. 2009. *Materi Sosiologi untuk SMA Kls. X*. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas
- Sunardi, 2008. *Buku Pelajaran Kimia Bilingual SMA Kls X*. Jakarta: Yrama Widya
- Suparno, Paul. 2009. *Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Kanisius
- Supratiknya, Augustinus. 2009. "*Pendidikan Humaniora*". Educare Wahana Komunikasi Pendidikan. No.9/VI/ Desember 2009. Jakarta: Komisi Pendidikan KWI
- Surakhmad, Winarno. 2009. *Pendidikan Nasional Strategi dan Tragedi*. Jakarta: Kompas Penerbit Buku
- Suriasumantri, Jujun S. 1978. *Ilmu dalam Perspektif Sebuah Kumpulan Tentang hakekat Ilmu*. Jakarta: Gramedia

- Surya, H.Mohamad.2003. *Percikan Perjuangan Guru*. Semarang: Aneka Ilmu
- Susetyo, Benny. 2005. *Politik Pendidikan Penguasa*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara
- Susilo, M. Joko. 2007. *Pembodohan Siswa Tersistematis*. Yogyakarta: Pinus
- Sutarno; Sudarnu; Dkk. 2009. *Materi Economics, Bilingual untuk SMA Kls. X*. Jakarta; Tiga serangkai Pustaka Mandiri
- Suwati. 2008. *Sekolah Bukan Untuk Mencari Pekerjaan*. Jakarta: Pustaka Grafia
- Syafie, Inu Kencana, 2005. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Thompson, John, B. 2003. *Analisis Ideologi Kritik Wacana Ideologi-Ideologi Dunia*. Penerjemah Haqqul Yaqin, Yogyakarta: IRCiSoD.
- Tilaar, H.A.R. 1999. *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia. Strategi Reformasi Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Tilaar. H.A.R. 2003. *Kekuasaan dan Pendidikan, Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural*. Magelang: Inonesitra.
- Tilaar, H.A.R. 2009. *Kekuasaan dan Pendidikan, Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Veerger, K.J. 2003. *Realitas Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Wahab, Abd; Umiarso, 2011. *Kepemimpinan Pendidikan dan Kecerdasan Spiritual*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Widja, I Gde. 2009. *Pendidikan Sebagai Ideologi Budaya*. Denpasar: Program Magister dan Doktor Kajian Budaya Universitas Udayana.
- Wora, Emanuel. 2006. *.Perenialisme Kritik atas Modernisme dan Postmodernisme*. Yogyakarta: Kanisius.
- Yin, Robert, K. 2002. *Studi Kasus Desain & Metode*. M. Djauzi Mudzakir, Penerjemah). Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Yamin, Moh. 2009. *Menggugat Pendidikan Indonesia Belajar dari Paulo Freire dan Ki Hajar Dewantara*.Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Yusuf, Syamsu. 2010. *Psikologi Perkembangan Anak & Remaja*. Bandung: Remaja Rosdakarya

# Indeks

## A

achievement status 7, 90  
Agung Ridwan 98  
aktor politik 44  
Alex Inkeles 79  
Aljazair 34  
Alvin C. Eurich 161  
Amerika Serikat 33, 79, 181  
Amretham tu Widya 72  
animisme 122  
anomali 25  
arbitrer 22, 23  
Arestoteles 30  
Arianai 88, 89  
Arsana 118  
Aryaningsih 12  
Ash Hartwell 166  
Asia Tenggara 22, 48, 67  
Aufklarung 102

## B

Bahasa Asing 5, 81, 133, 172, 190  
Bahasa Bali 5  
Bahasa Inggris 5, 77, 81, 133,  
154, 163, 180, 190  
Barker, C. 40, 116, 119, 131, 194  
Bede Griffiths 102  
Bennett 144  
Bert F. Hoselitz 79  
Bertrand Rusell 146, 147  
bhakti 36  
Biologi 4, 51, 70, 71, 77, 78, 81,  
133, 171, 178, 190, 198  
Birma 79  
Bourdieu, P 29, 85, 110, 144,  
145, 162, 194  
budaya citra 10, 105, 107, 109,  
189, 191  
budaya meterialistik 10

## C

capacity building 61  
caracter building 146  
cash value 7, 89, 90  
Citra Dewi 108  
Clifford Geertz 79  
Comte, A. 3, 121, 122, 126, 127  
cultural loss 9

## D

Dangin Puri Kangin 44, 63, 193  
Danim 46, 61, 65, 166, 167, 168,  
194  
Daoad Yoesoef 41  
Darmaningtyas 14, 194  
David Mc Ceeland 79  
Dawam 11, 12, 194  
dekonstruktif 26  
demagogis 3  
Derrida, J. 26, 34, 197  
Desa Kala Patra 14, 35  
Descartes 81, 102, 184  
Dewey 7, 89, 90, 195  
Dharma Wacana 54, 68  
Djamarah 178, 179, 195  
dunia citra 44

## E

ekologis 3  
Ekonomi 4, 81, 123, 133, 138,  
171, 190  
ekonomi libido 36, 100  
elite modern 41  
emansipatoris vii, 7, 14  
Eropa 79, 181, 186  
esensialisme 148  
etimologis 67, 102  
Everett E. Hagen 79  
Evsey Domar 79

**F**

Fakih, M. 33, 34, 134, 181, 195  
 Fati Oktavianti 108, 109  
 Faturohman, O. 179  
 Felix Guattari 105, 106, 195  
 filsafat materialis 102  
 Fisika 4, 51, 70, 71, 77, 81, 126,  
 133, 171, 178, 190, 196

**G**

Galtung, J. 120  
 Geografi 4, 81, 133, 171, 190, 196  
 globalisasi 9, 63  
 Godelier 26  
 Goodman 26, 198  
 Gramsci, A. 28, 39, 134, 163, 195

**H**

habitus v, 29, 85, 145  
 Halsel Henderson 150  
 hegemoni 28, 29, 38, 39, 113,  
 114, 119, 134, 145, 151,  
 162, 163  
 hegemonik vii, 7, 14, 134, 162  
 hegemoni tandingan 151  
 hereditet 82  
 hidden curriculum iv, 39  
 Hindu ii, iii, 14, 53, 63, 68, 123,  
 145, 198, 204  
 hukum liberalisasi 11  
 hukum rimba 11  
 humaniora iv, vii, viii, 6, 20, 44,  
 129, 130, 131, 147, 148  
 hylemorfisme 102

**I**

Ian Hacking 126  
 Ida Ayu Tirta 84, 85, 117, 156,  
 165  
 Ida Bagus Alit Bajra Manuaba 82,  
 130, 145, 177  
 Ideologi Dominan 35  
 I Gusti Ngurah Suburyana 157,  
 169

I Gusti Nyoman Suardika 135  
 ilmu pengetahuan vii, viii, 9, 14,  
 21, 26, 28, 40, 56, 119, 122,  
 123, 126, 129, 130, 131,  
 132, 134, 143, 146, 154,  
 160, 184, 185, 186

I Made Oka Antara 124  
 Indonesia 1, 5, 14, 15, 16, 17, 19,  
 21, 22, 36, 43, 47, 48, 57,  
 63, 66, 67, 79, 81, 86, 91,  
 92, 124, 133, 148, 150, 171,  
 180, 185, 186, 189, 190,  
 193, 194, 195, 196, 197,  
 199, 200, 204

Indra Widiasa Putra 125, 147,  
 180

industrialisasi 9  
 ing arso asungtulodo 114  
 Inggris 5, 20, 77, 81, 121, 133,  
 154, 163, 171, 180, 190

ing madyo mangun karso 114  
 Intan Kusumayanti 149  
 Isjoni 14, 19, 92, 93, 100, 196

Italia 28

Ivan Illich 33

I Wayan Sadia 82

I Wayan Sueca 149

I Wayan Tumbuh 130

**J**

Jepang 48, 66, 78

J.H. Boeke 79

John Lock 30

Judith Williamsons 93

**K**

Kanibalisme Intelektual 11, 194  
 kapitalisme iii, 33, 43, 44, 63, 92,  
 150, 151

Kapitalisme 33, 196, 197

KARMANY EVA DHIKARASTE  
 MAPHALESU KADACANA  
 43

Karma Phala 14

Kartodihardjo, S. 41

Kartono, M. 112  
kearifan lokal 14  
Keraf, G. 22  
Ki Hajar Dewantoro 114  
Kimia 4, 50, 70, 77, 81, 125, 133,  
171, 178, 190, 199, 204  
Kolonialisme 91  
komite sekolah 29, 38, 61, 62,  
141, 143, 144, 145, 172  
komodifikasi pendidikan 31  
Konstruktivisme Interpretatif 27  
Konstruktivisme Sosial 27  
konsumerisme 43, 44, 86, 94,  
102, 151, 170  
Krishnamurti 176

## L

leading sector 9  
learning organization 60  
learning outcome 139  
linguistik 2, 21  
Logosentrisme 26

## M

Made Ayu Dwi Octavanny 87, 88  
Mahmud 12  
Malawi 120  
Malaysia 48, 66  
Mangunwijaya 2, 133, 134  
marjinalisasi 6, 10, 12, 13, 14, 17,  
19, 24, 28, 37, 92, 135, 137,  
140, 141, 171, 183, 184,  
185, 186, 189  
Mataram 12, 197  
Matematika 4, 77, 81, 84, 86, 102,  
133, 171, 190  
Max Weber 79  
Mc Clelland 89  
McDonaldisasi 152  
Michael Rutz 154  
Miftahul A'la 140  
modal budaya 30  
monoteisme 122  
Mudyahardjo 2, 3, 4, 197  
Multikultural 11, 194

Murchland 91, 197  
Myanmar 79. *Lihat juga* Birma

## N

Narsa 13  
Nasution 175  
neoliberal 11  
neutral conception 129  
Nietzsche 91  
Ni Luh Putu Trisna Rini 123, 124  
Ni Made Chyntia Trisna Eva Dewi  
114, 115, 136, 139, 168  
Non Governmnet Organisation 79  
Norbert Wiener 137  
Nurmini 16

## O

Oka Arsa 119  
ontologis 121  
oposisi biner 19, 34, 35, 36, 141  
Owen 23

## P

Palemahan 35, 36  
Pancasila 35, 204  
paradigma positivistik 129  
Parhyangan 35  
paternalisme 143, 144  
patologis 3  
Paulo Frierre 13, 33  
Pawongan 35, 36  
Pembangunan 9, 79, 193, 194,  
195, 197, 198  
Pendidikan Humaniora 37, 199  
pendidikan kritis v, 7, 90, 187, 188  
Pendidikan Nasional 1, 61, 146,  
193, 194, 196, 199, 200  
Perang Dunia 79  
Permendiknas 5, 26, 81, 82, 83,  
133, 145, 146, 148, 153,  
154, 190, 197  
perpustakaan 48, 54, 56, 69, 70,  
167  
Piliang, Y.A. 10, 44, 94, 96, 105,  
106, 116, 159, 162, 170,

197, 198  
 piodalan 53, 68  
 P.J. Hills 155  
 Plato 27, 30  
 Poerwanto 155, 198  
 politeisme 122  
 politik pendidikan 12, 38, 132  
 Pora 176  
 positivisme 27  
 post-modernitas 34  
 postpositivisme 27  
 post-strukturalisme 26, 34  
 practicality 7, 89, 90  
 pragmatis 7, 10, 86, 89, 90, 101,  
 108, 118, 123, 151, 188  
 Prancis 34, 122, 196  
 psikologi 21, 79, 81  
 Pudjo Sugito 174  
 Pura Maha Dwijasrama 67, 68  
 Purnama Kedasa 53

## R

reduksionisme 12, 134  
 regulator pendidikan vii, 171  
 rekayasa sosial 158, 162  
 relasi kekuasaan 86, 129, 130,  
 143, 144, 172, 184  
 Renaissans 102  
 Revolusi Industri 25, 121  
 revolusi klas 28  
 revolusioner 57, 105  
 Ritzer 26, 35, 152, 198  
 Rosyada 47, 48, 66, 198  
 Roy Harrod 79  
 Ruge 120  
 Rwa Bhineda 14

## S

Saint Simon 121  
 Sanjaya 160, 161, 198  
 Santoso 23  
 Saraswati 8, 53, 68  
 Sastra Indonesia 5, 81, 133, 171,  
 190  
 Sastrini 14, 198

Schopenhauer 37, 38, 111, 180  
 Schrijvers 91, 198  
 Sejarah vi, 4, 81, 91, 133, 171,  
 190, 198  
 Siagian 175  
 simbolic violence 110  
 Singapura 48, 66  
 sistem kekuasaan 28  
 skel 36  
 skill 11, 36, 87, 174  
 Skizofrenia 159  
 Smarapradhipa 22  
 social control 38  
 social cost 9  
 social equity 47, 66  
 Socrates 27  
 Soejono 24  
 Sosiologi vi, 4, 21, 79, 81, 133,  
 171, 190, 198, 199  
 spiritual question 68  
 srada 36  
 stake holder 43  
 Standar kompetensi 22  
 status sosial v, 15, 36, 37, 97, 112,  
 140, 169, 191  
 Stiawan 23  
 strukturalisme 26, 34  
 subversif 26  
 Suda 15, 97, 175, 199  
 Sujanto 61  
 sumber daya manusia 46, 47, 48,  
 63, 65, 66, 67, 86  
 Sumber daya material 46, 65  
 sumber daya sekolah 46, 65  
 Suparno 36, 101, 199  
 Supratiknya 3, 4, 37, 199  
 Surakhmad 15, 16, 199  
 Surya 60, 77, 200  
 Suryawan 144  
 Susetyo 12, 59, 76, 137, 200  
 Sutikno 179  
 swadharma 53, 68  
 swdharma 53, 68  
 Syamsuddin 23  
 symbolic violence 162

## **T**

Tarigan 23  
Tat Twam Asi 14  
teben 53, 68, 89  
Teori organik 30  
teori Strukturalis 25  
Thomas A. Stewart 143  
Tilaar, H.A.R. 28, 29, 37, 38, 39,  
82, 95, 111, 113, 114, 154,  
180, 200  
transformasi sosial 34  
Tri Hita Karana 14, 35, 67  
Tri Mandala 67  
Tripalupi 10  
Tut Wuri Handayani 59, 76

## **U**

Undang-Undang Dasar 1945 1  
Uniformitas 99

Universitas California 140  
Universitas Indonesia 92

## **V**

Vasu Deva Kutumbhakam 36  
Von Glaserfeld 27

## **W**

Walija 23  
Wangaya 42  
Wibowo 23  
William Stern 38  
wong seberang 44  
workability 7, 90  
W.W. Rostow 79

## **Y**

Yamin, M 2, 15, 200



## Tentang Penulis



**Dr. Drs. I Wayan Winaja, M.Si.** dilahirkan di Tabanan, 30 Mei 1962. Setelah menamatkan SDN 3 Kerambitan tahun 1974, melanjutkan pendidikan menengahnya di SMPN Kerambitan tahun 1978, dan SMA/SMPP Negeri Denpasar jurusan IPA 1981.

Pendidikan S1-nya ditempuh di Jurusan Pendidikan Kimia Universitas Udayana tahun 1986. Pendidikan magisternya di S2 Kajian Budaya Universitas Udayana tahun 2000, dan S3 Kajian Budaya Universitas Udayana tahun

2012.

Saat ini Winaja tercatat sebagai dosen Prodi Ilmu Agama dan Kebudayaan, Program Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar.

Ia juga aktif menulis di sejumlah jurnal, majalah, buku serta menjadi pemakalah. Dua buah buku yang pernah ditulis berjudul "Strategi Pembelajaran" dan "Filsafat Pendidikan".

Di UNHI, tempatnya mengabdikan ilmu, Winaja sempat menjadi Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Wakil Rektor I Bidang Akademik.

Winaja juga aktif di bidang organisasi profesi. Pada organisasi ini ia pernah tercatat menjadi Sekretaris Badan Pembina Seni Mahasiswa Indonesia (BPMSI) Pengda Bali, Pengurus BAPOMI Bali, Sebagai Wakil dalam Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) Wilayah Bali, dan anggota Bidang Pendidikan Karakter; Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah VIII A Bali.

Winaja juga aktif dalam organisasi sosial kemasyarakatan. Pernah menduduki posisi Sekretaris Umum Pemuda Panca Marga (PPM) Pengurus Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB), anggota Bidang Organisasi Prajaniti Pengurus Daerah NTB, Sekretaris Umum Pemuda Panca Marga (PPM) Pengurus Cabang Kota Denpasar (hingga sekarang), dan Sekretaris Umum Gerakan Nasional Pembudayaan Pancasila (GNPP) Provinsi Bali.

Menikahi Dra. Ni Ketut Aryani, M.Si (alm) dikaruniai dua orang putra/putri yaitu I Wayan Sukma Winarya Prabawa, SST.Par; M.Par; M.Pro. dan Ni Made Dyah Nanda Widyaswari, S.H.

\*\*\*

**B**uku ini amat penting dan menarik untuk disimak secara cermat. Mengapa menarik? Jawabannya, karena dalam buku ini, Wayan Winaja berhasil memaparkan bahwa apa yang dianggap oleh kebanyakan orang – orang awam bahkan sering pula berlaku di kalangan kaum akademikus sebagai sesuatu yang biasa, namun setelah dikaji secara mendalam dengan menggunakan pendekatan teori kritis, ternyata banyak dijumpai hal yang luar biasa. Kondisi inilah yang menyebabkan buku ini tidak saja penting, tetapi amat menarik untuk dibaca oleh siapa pun, terutama di kalangan mereka yang berminat pada masalah pendidikan secara umum atau pendidikan kritis secara khusus.

**Prof. Dr. Nengah Bawa Atmadja**  
Guru Besar Universitas Pendidikan Ganesha

